



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA BEIJING

LAPORAN KINERJA



2025



KATA PENGANTAR

“ Tahun 2025 merupakan tahun perayaan 75 tahun hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok, periode yang menuntut KBRI Beijing untuk bekerja dengan tingkat adaptabilitas dan ketepatan strategi yang tinggi.

A portrait of Djauhari Oratmangun, a man with a grey beard and glasses, wearing a blue double-breasted suit jacket, a red patterned tie, and a red pocket square. He is standing with his hands clasped in front of him. The background is a light-colored wall with a map of Indonesia and the text 'Republik Indonesia' and '印度尼西亚共和国'.

Djauhari Oratmangun
Duta Besar LBBP
Untuk RRT dan Mongolia



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, KBRI Beijing dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia.

Laporan ini disusun dengan berlandaskan visi pada Renstra KBRI Beijing tahun 2025-2029, yaitu *memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia di Tiongkok dan Mongolia untuk berkontribusi kepada percepatan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045*. Visi tersebut menjadi penuntun dalam merancang perencanaan, melaksanakan program, serta mengevaluasi kinerja diplomasi Indonesia di tengah dinamika hubungan bilateral yang semakin strategis, intensif, dan multidimensi.

Tahun 2025 merupakan tahun perayaan 75 tahun hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok, periode yang menuntut KBRI Beijing untuk bekerja dengan tingkat adaptabilitas dan ketepatan strategi yang tinggi. Hubungan Indonesia–Tiongkok terus berkembang tidak hanya dalam skala ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam kerja sama politik, sosial budaya, perlindungan WNI, serta diplomasi digital dan tata kelola internal. Intensitas interaksi yang meningkat, termasuk kunjungan pejabat tinggi dan implementasi berbagai kesepakatan strategis, menempatkan KBRI Beijing pada posisi yang semakin sentral sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Beijing tahun 2025 tercatat sebesar 105,18 (Istimewa), yang merupakan akumulasi capaian seluruh perspektif kinerja. Capaian ini terdiri atas *Stakeholders Perspective* sebesar 107,26%, *Customer Perspective* sebesar 111,75%, *Internal Business Process Perspective* sebesar 105,08%, serta *Learning and Growth Perspective* sebesar 100,25%. Komposisi capaian ini mencerminkan bahwa kinerja KBRI Beijing tidak hanya kuat pada aspek hasil dan kepuasan pemangku kepentingan eksternal, tetapi juga ditopang oleh proses internal yang relatif efektif serta kapasitas organisasi dan sumber daya manusia yang terjaga.

Namun demikian, capaian tersebut diraih di tengah berbagai tantangan strategis. Kompleksitas lingkungan strategis di Tiongkok dan Mongolia menuntut pendekatan diplomasi yang semakin presisi dan berlapis, asimetri informasi dan peran perantara dalam beberapa inisiatif ekonomi dan investasi, keterbatasan sumber daya baik dari sisi SDM, anggaran, maupun infrastruktur pendukung, dan juga meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan dan beban kerja yang semakin kompleks.

Dinamika geo-politik, regulasi, dan kebijakan domestik Tiongkok dan Mongolia yang bergerak cepat, serta kerap bersifat eksperimental sebagai *testing ground*, menuntut kemampuan adaptasi, pembaruan informasi, dan koordinasi lintas fungsi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, KBRI Beijing secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, penajaman prioritas program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Langkah-langkah perbaikan juga diarahkan pada peningkatan kualitas koordinasi lintas fungsi, pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses kerja dan pengambilan keputusan, serta



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi agar setiap program dan kegiatan memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur. KBRI Beijing juga terus mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan kompetensi dan pembagian peran yang lebih adaptif, sehingga organisasi tetap responsif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Capaian kinerja KBRI Beijing merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur perwakilan yang telah menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas negara. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri RI, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra strategis di Tiongkok dan Mongolia, komunitas WNI dan diaspora, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan serta menjadi tolok ukur dalam meningkatkan performa manajemen kinerja dan pengelolaan anggaran KBRI Beijing ke depannya.

Beijing, 20 Januari 2026
Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk
Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia

DJAUHARI ORATMANGUN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 3
Ringkasan Eksekutif..... 7
Bab 1 Pendahuluan..... 11
 Latar Belakang..... 11
 Aspek Strategis..... 12
Bab 2 Perencanaan Kinerja..... 19
 Rencana Strategis..... 19
 Perjanjian Kinerja..... 20
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja..... 26
 Capaian Kinerja..... 26
 Stakeholders Perspective..... 33
 S.1.1 efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan 34
 S.1.2 efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi 44
 S.1.3 efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata 54
 S.2. Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing..... 64
 Customer Perspective..... 73
 C.1.1. Persentase kasus WNI yang diselesaikan 74
 C.1.2. Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran 81
 C.1.3. Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI..... 86
 C.2 Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral..... 92
 C.2.1. Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral 92
 Internal Business Process Perspective..... 104
 B.1. Diplomasi bilateral di negara akreditasi 104
 B.1.1 Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi 105
 B.1.2. Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan..... 113
 B.1.5. Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi 120
 B.2. Basis data KBRI Beijing yang akurat..... 131
 B.2.1. Persentase WNI di negara akreditasi terverifikasi di Portal Peduli WNI.. 131
 B.2.2. Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi 138
 B.3. Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Beijing yang Kuat..... 144
 B.3.1. Persentase Impresi *Engagement* Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat 144
 Learning and Growth Perspective..... 152
 L.1. Tata kelola organisasi KBRI Beijing yang baik..... 152
 L.1.1. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)..... 152
 L.2. Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal..... 159
 L.2.1. Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing..... 159
 L.3. Pengelolaan anggaran KBRI Beijing yang optimal dan akuntabel..... 164
 L.3.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Beijing..... 164
 Realisasi Anggaran..... 170
 Analisis Efisiensi Sumber Daya..... 171
 Efisiensi Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja..... 171
 Efisiensi SDM..... 176
 Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Kinerja..... 180
Bab 4 Penutup..... 183
 Simpulan Umum Capaian Kinerja..... 183
 Kendala-Kendala Utama yang Dihadapi..... 183
 Langkah di Masa Mendatang untuk Peningkatan Kinerja..... 184
Lampiran 185

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja KBRI Beijing pada periode 2021–2025 menunjukkan konsistensi peningkatan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO). Pada periode 2021–2023, NCKO memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan sebagai hasil penguatan tata kelola organisasi, penajaman prioritas diplomasi, serta konsolidasi sistem perencanaan dan pengendalian kinerja.

Selanjutnya, pada periode 2023–2025, KBRI Beijing berhasil mempertahankan capaian NCKO secara konsisten di atas 100%, yang mencerminkan terjaganya kinerja organisasi secara berkelanjutan.

	2021	2022	2023	2024	2025
NCKO	88.3%	92.82%	107.89%	106.41%	105.18%

Pada tahun 2025, Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Beijing tercatat sebesar 105,18 (Istimewa), sebagai akumulasi capaian seluruh perspektif kinerja, dengan komposisi sebagai berikut:

Perspective	Capaian	Bobot
Stakeholders Perspective	107,26%	25%
Customer Perspective	111,75%	15%
Internal Business Process Perspective	105,08%	30%
Learning and Growth Perspective	100,25%	30%

Struktur capaian ini menunjukkan keseimbangan kinerja antara dimensi eksternal (pemangku kepentingan dan layanan publik), efektivitas proses internal, serta kapasitas SDM dan pembelajaran organisasi, yang secara kolektif membentuk fondasi ketangguhan institusional KBRI Beijing.

Dari sisi pengelolaan anggaran, kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas yang sangat baik, dengan realisasi serapan anggaran mencapai 98.64% dari PAGU akhir Rp. 101.100.935.00. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang presisi, disiplin pelaksanaan, serta pengendalian keuangan yang kuat, sejalan dengan capaian Nilai IKPA yang melampaui target.

Pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada pencapaian output dan outcome program secara nyata.

Ringkasan Pelaksanaan Program

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional

Fokus utama diarahkan pada penguatan kemitraan strategis Indonesia–Tiongkok, peningkatan perdagangan dan investasi, implementasi kesepakatan bilateral, penguatan kerja sama sektor industri hijau dan hilirisasi, serta penyelarasan visi pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045 dengan modernisasi Tiongkok.

2. Program Pelayanan dan Pelindungan WNI



Penguatan basis data WNI, optimalisasi Portal Peduli WNI, peningkatan literasi kekonsuleran, serta penguatan koordinasi lintas fungsi menjadi fondasi utama pelayanan. Capaian kinerja menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan WNI yang tinggi terhadap layanan KBRI Beijing.

3. Program Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Dukungan Manajemen

Program ini menopang keberlanjutan organisasi melalui tata kelola anggaran, pengelolaan aset negara (BMN), penguatan akuntabilitas kinerja, serta pengembangan kapasitas organisasi. Capaian Indeks Pengelolaan Aset, IKPA, dan AKIP menunjukkan kinerja tata kelola yang stabil, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Kinerja tersebut juga tercermin melalui sejumlah kegiatan ikonik (*iconic activities*) yang menegaskan posisi strategis KBRI Beijing dalam mendukung visi pemerintahan dan prioritas nasional, antara lain:

- Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada peringatan Victory Day di Beijing pada 3 September 2025. Kunjungan ini memperkuat kepercayaan politik tingkat tinggi (*strategic trust*), mengukuhkan kembali status *Comprehensive Strategic Partnership*, serta membuka ruang konkret bagi penguatan kerja sama di bidang pertahanan, investasi, industri strategis, dan ketahanan nasional.
- Fasilitasi pertemuan 2+2 pertama Tiongkok dengan Indonesia, yang menjadi katalis penguatan kerja sama pertahanan dan keamanan strategis, termasuk penajakan kerja sama industri pertahanan.
- Penguatan diplomasi ekonomi konkret, termasuk fasilitasi komitmen investasi strategis Tiongkok di sektor kendaraan listrik, industri hijau, dan hilirisasi, serta dukungan terhadap kerja sama sistem pembayaran lintas negara melalui dialog Bank Indonesia–PBOC terkait QRIS.
- Penyelenggaraan dan partisipasi aktif dalam forum-forum bisnis dan investasi unggulan, seperti China International Import Expo (CIIE), *business forum* rantai pasok energi baru, serta pertemuan tingkat tinggi dengan korporasi strategis Tiongkok.
- Program promosi Pariwisata Bali di platform Kuaishou yang ditonton lebih dari 800 juta kali.

Penguatan perlindungan dan pelayanan WNI, melalui optimalisasi Portal Peduli WNI, *hotline* perlindungan 24 jam, serta penanganan kasus WNI secara cepat dan akuntabel di wilayah kerja yang luas dan kompleks.

NCKO

KBRI BEIJING DARI TAHUN KE TAHUN

2021

88.3%

2022

92.82%

2023

107.89%

2024

106.41%

2025

105.18%

Predikat
Istimewa



Capaian Setiap Perspektif

Stakeholders
Perspective 107.26

Customer
Perspective 111.75

Internal Business
Process Perspective 105.08

Learning and
Growth Perspective 100.25

98.64%

Total Serapan
Anggaran

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Aspek Strategis

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor Sk.06/A/OI/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, menetapkan KBRI Beijing berkedudukan di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok dengan wilayah rangkapan Mongolia. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2006, KBRI Beijing mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, KBRI Beijing memiliki struktur fungsi yang mencerminkan kebutuhan pelaksanaan diplomasi Indonesia, yaitu Fungsi Politik; Fungsi Ekonomi; Fungsi Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Diplomasi Publik; dan Fungsi Protokol dan Konsuler (Protkons), serta didukung oleh Atase Pertahanan, Atase Perdagangan, Atase Pendidikan, Atase Imigrasi, *Indonesian Investment Promotion Center* (IIPC) dan unsur penunjang lainnya.

KBRI Beijing menempati posisi yang sangat strategis. Beroperasi di wilayah akreditasi yang mencakup Tiongkok dan Mongolia, dua negara dengan karakter dan nilai strategis, KBRI Beijing berada langsung di pusat dinamika ekonomi, teknologi, dan geopolitik yang paling berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Posisi ini menjadikan KBRI Beijing sebagai *first line diplomacy* Indonesia, di mana keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan akan memiliki *multiplier effect* yang signifikan terhadap pencapaian visi nasional.

KBRI Beijing berada langsung di pusat dinamika ekonomi, teknologi, dan geopolitik yang paling berpengaruh terhadap masa depan Indonesia.

1.1.1. Profile KBRI Beijing

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan negara di wilayah akreditasi Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, KBRI Beijing didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Duta Besar LBBP RI;



2. Wakil Duta Besar RI;
3. Wakil Kepala Perwakilan RI;
4. Fungsi Politik;
5. Fungsi Ekonomi;
6. Fungsi Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Diplomasi Publik;
7. Fungsi Protokol dan Konsuler;
8. Atase Pertahanan;
9. Sekkabsus;
10. Atase Perdagangan;
11. Atase Imigrasi;
12. Atase Pendidikan,
13. Direktur Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)
14. Penata Kekanseleraian; dan
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.



Gambar 1: Struktur KBRI Beijing

Terdapat 56 personel di KBRI Beijing, yang terdiri atas 22 pemegang ID dan izin tinggal Diplomatik (termasuk Duta Besar RI) dan 34 pemegang ID dan izin tinggal Dinas. Dari jumlah tersebut, terdapat 28 Home Staff (HS), dengan komposisi 22 HS pemegang ID Diplomatik dan 6 HS pemegang ID Dinas, yang terdiri dari dua Penata Kanselera, satu Direktur Promosi Investasi/BKPM, satu Perwira Penghubung (PBU) Atase Pertahanan, satu PBU Atase Imigrasi, serta satu pejabat SK-111.

1.2. Aspek Strategis

1.2.1. Tiongkok

Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi kepentingan nasional Indonesia. Tiongkok telah menjadi salah satu kekuatan utama



dunia yang memegang peran sentral dalam dinamika ekonomi, teknologi, dan geopolitik global.

Berdasarkan data resmi Pemerintah Tiongkok, pada tahun 2024 Tiongkok menempati peringkat kedua terbesar dunia dari sisi Produk Domestik Bruto (GDP) dengan nilai sekitar US\$18,8–19,2 triliun dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Dari sisi demografi, jumlah penduduk Tiongkok pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,408 miliar jiwa, menjadikannya salah satu basis pasar, tenaga kerja, dan konsumsi terbesar di dunia, meskipun terdapat tren penurunan demografis secara gradual.

Nilai strategis Tiongkok tercermin, antara lain, dalam beberapa aspek utama berikut:

- Di sektor industri strategis, Tiongkok merupakan negara dengan kapasitas produksi manufaktur terbesar di dunia. Keunggulan ini mencakup berbagai sektor kunci, antara lain industri baja, petrokimia, elektronik, kendaraan bermotor, hingga kendaraan listrik dan industri baterai. Dominasi Tiongkok dalam manufaktur global menempatkannya sebagai aktor utama dalam rantai pasok dunia, sehingga setiap perubahan kebijakan industri Tiongkok memiliki dampak langsung terhadap stabilitas dan arah perdagangan global sebagaimana tergambar ketika COVID-19.
- Dalam konteks sumber daya strategis, Tiongkok merupakan aktor utama dunia dalam penguasaan dan pengolahan *rare earth elements*. Lebih dari 90% *processing of rare earth elements* untuk kebutuhan Industri berada di Tiongkok. Komoditas ini merupakan komponen vital bagi industri teknologi tinggi, energi terbarukan, pertahanan, serta elektronik modern.
- Di bidang teknologi dan inovasi, Tiongkok menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) seperti terobosan *deepseek*, *cloud computing*, *big data*, teknologi 5G, serta energi bersih. Ekosistem inovasi Tiongkok berkembang secara terintegrasi dengan kebijakan industri nasional, menjadikannya salah satu pusat inovasi teknologi terbesar di dunia.
- Tiongkok saat ini juga dipandang sebagai negara terdepan dalam transformasi industri berbasis AI dan energi bersih, termasuk dalam penerapan teknologi tersebut pada sektor pertahanan dan keamanan. Integrasi teknologi sipil dan militer memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan strategis yang memadukan keunggulan ekonomi, teknologi, dan keamanan secara simultan.

Bagi Indonesia, nilai strategis Tiongkok tercermin secara nyata dalam hubungan ekonomi bilateral. Selama lebih dari satu dekade, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia serta masuk dalam tiga besar sumber utama investasi asing. Pada tahun 2024, total nilai perdagangan Indonesia–Tiongkok mencapai USD 147,78 miliar, sementara realisasi investasi Tiongkok di Indonesia mencapai sekitar USD 8,1 miliar. Sebagai perbandingan, nilai perdagangan Indonesia–Tiongkok tersebut sekitar 5x lebih besar dibandingkan total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang menggambarkan tingkat keterkaitan ekonomi yang sangat signifikan.

Sejak tahun 2013, hubungan Indonesia–Tiongkok telah ditingkatkan ke tingkat Comprehensive Strategic Partnership. Kunjungan pertama Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok setelah memenangkan pemilihan umum, serta kunjungan kenegaraan pertamanya sebagai Presiden, semakin menegaskan prioritas hubungan strategis Indonesia–Tiongkok dalam kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Lima tahun ke depan, Tiongkok memasuki fase struktural baru. Populasi mulai menyusut, tingkat kelahiran berada di 1,15 per perempuan, dan kelompok usia 65+ mencapai 15,6%. Pertumbuhan ekonomi bergeser ke kisaran 4%, dan proyeksi menjadi ekonomi terbesar dunia secara nominal semakin mundur. Untuk menjawab tantangan ini, Tiongkok menempatkan *new quality productive forces*, AI, robotik, semikonduktor, bioteknologi, material maju, serta manufaktur hijau, sebagai inti perencanaan *15th Five-Year Plan* (2026–2030).

Arah pembangunan dan kebijakan Tiongkok ke depan juga akan dipengaruhi dinamika suksesi Xi Jinping, yang memimpin dengan tingkat konsolidasi politik tertinggi sejak era Mao.

Dalam konteks tersebut, KBRI Beijing berdiri tepat di jantung realitas strategis ini. Setiap dinamika hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok, akan berdampak langsung terhadap kepentingan nasional dan pencapaian agenda pembangunan Indonesia.

Selama lebih dari satu dekade, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia serta tiga besar sumber utama investasi asing

1.2.2. Mongolia

Mongolia memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam konteks geopolitik kawasan, ketahanan sumber daya, serta penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama multilateral dan Selatan–Selatan.

Secara geografis dan geopolitik, Mongolia menempati posisi yang strategis karena berada di antara dua kekuatan besar dunia, yaitu Tiongkok dan Rusia. Posisi ini menjadikan Mongolia sebagai *buffer state* yang berperan dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Timur dan Asia Tengah. Dalam dinamika geopolitik global yang ditandai oleh rivalitas kekuatan besar dan fragmentasi kawasan, keberadaan Mongolia yang relatif stabil dan terbuka terhadap kerja sama internasional memiliki arti penting bagi upaya menjaga keseimbangan kawasan.

Dari sisi ekonomi dan sumber daya alam, Mongolia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya mineral yang signifikan. Mongolia memiliki cadangan besar batubara, tembaga, dan emas, serta potensi mineral strategis lainnya yang bernilai tinggi bagi industri global. Beberapa proyek pertambangan Mongolia, khususnya di sektor tembaga dan batubara, termasuk yang terbesar di kawasan dan memiliki peran penting dalam pasokan bahan baku industri global.

Pada tahun 2024, Produk Domestik Bruto (GDP) Mongolia berada pada kisaran USD 16–17 miliar, dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa, mencerminkan ekonomi yang relatif kecil namun sangat terbuka dan berbasis sumber daya alam.

“Kekayaan sumber daya alam Mongolia memberikan peluang strategis bagi Indonesia, terutama dalam konteks ketahanan dan diversifikasi rantai pasok

Kekayaan sumber daya alam Mongolia memberikan peluang strategis bagi Indonesia, terutama dalam konteks ketahanan dan diversifikasi rantai pasok, pertukaran pengalaman pengelolaan sektor pertambangan dan hilirisasi, serta potensi kerja sama di bidang teknologi pertambangan, lingkungan, dan peningkatan nilai tambah. Dalam jangka panjang, kerja sama ini juga relevan bagi agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi energi.

Selain itu, Mongolia menjalankan kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai *third neighbor policy*, yaitu upaya memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara di luar Tiongkok dan Rusia. Kebijakan ini

sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk memperluas jejaring diplomasi, memperkuat kerja sama Selatan–Selatan, serta meningkatkan dukungan timbal balik dalam berbagai forum multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional lainnya.

Lima tahun ke depan, Mongolia memasuki fase perubahan struktural penting. Ekonominya masih sangat bergantung pada komoditas, batu bara, tembaga, dan emas, dengan sensitivitas tinggi terhadap permintaan Tiongkok yang menyerap lebih dari 90 persen ekspor Mongolia. Urbanisasi cepat di Ulaanbaatar memicu tantangan polusi udara, keterbatasan infrastruktur kota, dan kebutuhan pembangunan rendah emisi. Di tengah posisi geografis yang diapit dua kekuatan besar (Tiongkok dan Rusia), Mongolia memperkuat *Third Neighbor Policy* untuk menyeimbangkan hubungan eksternal melalui kemitraan yang lebih erat dengan negara-negara demokrasi dan Indo-Pasifik.



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

Dengan demikian, keberadaan Mongolia dalam wilayah akreditasi KBRI Beijing memperluas cakupan strategis diplomasi Indonesia, tidak hanya berfokus pada hubungan dengan kekuatan besar, tetapi juga pada penguatan jaringan diplomasi yang berimbang, inklusif, dan berbasis kepentingan jangka panjang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

II.2. Perjanjian Kinerja



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



VISI KBRI Beijing

Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia di Tiongkok dan Mongolia untuk berkontribusi kepada percepatan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045



01

Memajukan diplomasi yang mendukung percepatan pembangunan nasional, yang diwujudkan melalui penguatan diplomasi ekonomi, perdagangan, investasi, industri, teknologi, serta kerja sama strategis lainnya dengan Tiongkok dan Mongolia.

02

Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI di Tiongkok dan Mongolia

03

Memperkuat postur diplomasi Indonesia di kawasan, yang diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar, wibawa, dan pengaruh Indonesia di Asia Timur dan Asia Tengah

MISI KBRI Beijing



II.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja KBRI Beijing disusun dengan memperhatikan kerangka pembangunan nasional jangka panjang dan menengah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berkontribusi secara terukur terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam hal ini, perencanaan kinerja KBRI Beijing disusun memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan utama negara.

RPJMN 2025–2029 merupakan penjabaran tahap awal dari RPJPN 2025–2045 dan disusun sebagai implementasi dari Visi dan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi ini menempatkan pembangunan nasional dalam jalur menuju negara maju yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing tinggi, dengan menekankan pentingnya ketahanan nasional, transformasi ekonomi, dan penguatan posisi Indonesia di tingkat regional dan global.

Dalam kerangka tersebut, politik luar negeri dan diplomasi Indonesia diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Visi Kementerian Luar Negeri, yaitu *“Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045”*. Visi ini menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak berdiri terpisah dari agenda pembangunan, melainkan menjadi bagian integral dalam menciptakan lingkungan eksternal yang aman, stabil, dan menguntungkan bagi pencapaian sasaran RPJMN.

Misi-misi Kementerian Luar Negeri, mulai dari penguatan hubungan internasional yang kondusif, diplomasi ekonomi, kepemimpinan kawasan dan global, perlindungan WNI, penguatan peran diaspora, hingga peningkatan wibawa politik luar negeri, merupakan kerangka operasional diplomasi yang secara langsung mendukung prioritas RPJMN 2025–2029, khususnya dalam aspek ketahanan nasional, transformasi ekonomi, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

Sebagai perwakilan Indonesia di wilayah akreditasi Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, KBRI Beijing menurunkan visi dan misi Kementerian Luar Negeri tersebut ke dalam konteks kawasan dan negara mitra yang memiliki nilai strategis tinggi bagi pembangunan nasional Indonesia. Visi KBRI Beijing periode 2025–2029, yaitu *“Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia di Tiongkok dan Mongolia untuk berkontribusi kepada percepatan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045”*, secara eksplisit menegaskan orientasi pembangunan sebagai tujuan akhir pelaksanaan diplomasi di wilayah kerja KBRI Beijing.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam tiga misi KBRI Beijing yang saling terkait dan bersifat operasional. Pertama, memajukan diplomasi yang mendukung percepatan pembangunan nasional, yang diwujudkan melalui penguatan diplomasi ekonomi, perdagangan, investasi, industri, teknologi, serta kerja sama strategis lainnya dengan Tiongkok dan Mongolia. Misi ini berkontribusi langsung terhadap sasaran RPJMN dalam



mendorong hilirisasi, industrialisasi, peningkatan nilai tambah, dan transformasi ekonomi Indonesia.

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI di Tiongkok dan Mongolia, yang sejalan dengan misi Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat kehadiran dan perlindungan negara bagi warganya di luar negeri. Perlindungan WNI dipandang tidak hanya sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan modal sosial dan legitimasi negara, yang pada akhirnya mendukung stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan sebagaimana diarahkan dalam RPJMN.

Ketiga, memperkuat postur diplomasi Indonesia di kawasan, yang diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar, wibawa, dan pengaruh Indonesia di Asia Timur dan Asia Tengah. Penguatan postur diplomasi ini mendukung peran Indonesia sebagai *middle power* yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan, sekaligus memperkuat kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global sebagaimana menjadi salah satu sasaran strategis RPJMN 2025–2029.

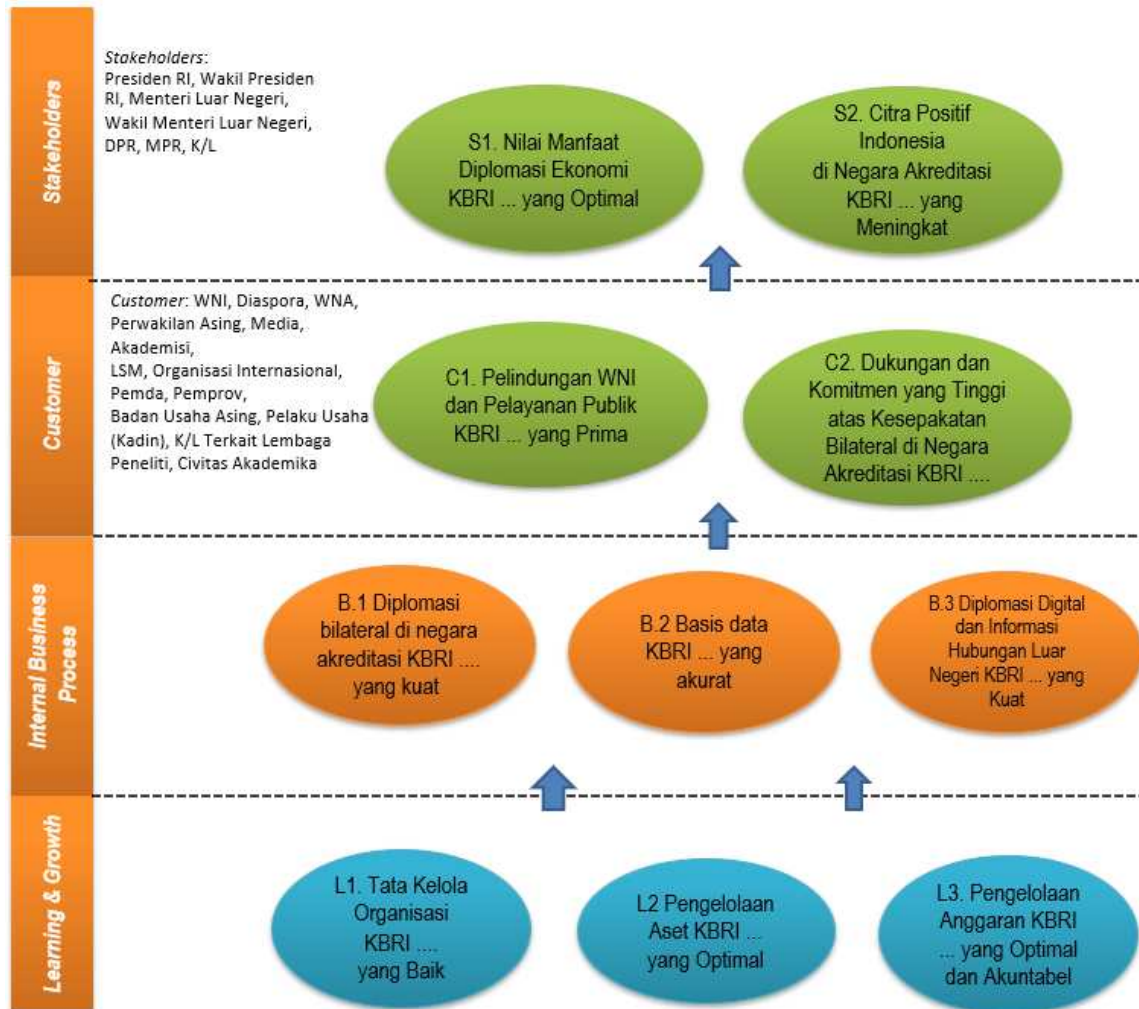
Dengan demikian, perencanaan kinerja KBRI Beijing disusun secara deduktif dan selaras dengan kerangka perencanaan nasional, mulai dari RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, visi Presiden dan Wakil Presiden, hingga visi dan misi Kementerian Luar Negeri. Keseluruhan kerangka tersebut kemudian dioperasionalkan melalui visi, misi, dan program kerja KBRI Beijing, sehingga peran perwakilan tidak hanya bersifat administratif dan representatif, tetapi berkontribusi secara nyata dan terukur terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

II.2. Perjanjian Kinerja



Gambar 3: Perjanjian Kinerja KBRI Beijing 2025 Selaras Renstra Kemenlu

Sebagai tindak lanjut dari kesinambungan visi, misi, dan strategi dengan Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Beijing menyusun Peta Strategi sebagai kerangka operasional pelaksanaan kinerja. Peta Strategi ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi KBRI Beijing berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Kementerian Luar Negeri dan prioritas nasional. Gambar berikut menyajikan Peta Strategi KBRI Beijing:



Gambar 4: Peta Strategi KBRI Beijing

Selanjutnya, untuk memastikan komitmen pelaksanaan dan pengukuran kinerja secara terukur, Peta Strategi tersebut diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja KBRI Beijing Tahun 2025. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target tahunan yang disepakati sebagai bentuk akuntabilitas kinerja perwakilan. Tabel berikut menyajikan Perjanjian Kinerja KBRI Beijing Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA BEIJING**

Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Beijing yang Optimal	IK S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	100%
		IK S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Beijing <i>(Komitmen Inbound)</i>	100%
		IK S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Beijing	100%
S.2	Citra positif Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing yang meningkat	IK S.2.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing	4,20 (skala 5)
Customer Perspective				
C.1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Beijing yang prima	IK C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang diselesaikan	90%



Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IK C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Beijing	4 (Skala 4)
		IK C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KBRI Beijing	4 (Skala 4)
C.2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI Beijing	IK C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Beijing <i>*)Diadopsi jika terdapat tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing dengan penyesuaian target sesuai kondisi/karakteristik Perwakilan RI</i>	95%
Internal Business Process Perspective				
B.1	Diplomasi bilateral di negara akreditasi KBRI Beijing yang kuat	IK B.1.1	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	15
		IK B.1.2	Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	5
		IK B.1.5	Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi	12
B.2	Basis data KBRI Beijing yang akurat	IK B.2.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100%
		IK B.2.2	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Beijing	98



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B.3	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Beijing yang Kuat	IK B.3.1	Persentase Impresi <i>Engagement</i> Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing <i>*) Terdapat perbedaan perlakuan meliputi jumlah komponen dan bobot komponen untuk perwakilan PRPB dan non PRPB</i>	70%
Learning and Growth Perspective				
L.1	Tata kelola organisasi KBRI Beijing yang baik	IK L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing	80.65 (A)
L.2	Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal	IK L.2.1	Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing	3,7 (Skala 4)
L.3	Pengelolaan anggaran KBRI Beijing yang optimal dan akuntabel	IK L.3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Beijing	95

Adapun alokasi anggaran awal KBRI Beijing pada tahun 2024 sebesar Rp. 64.830.225.000,- (Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang didistribusikan ke dalam 3 (program).

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI	Rp.6.383.212.000,-
2	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Perwakilan RI	Rp.1.054.587.000,-
3	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp.57.392.426.000,-
Pagu Anggaran KBRI Beijing 2025		Rp.64.830.225.000,-

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja

III.2. Realisasi Anggaran

III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

III.4. Capaian Kinerja Lainnya

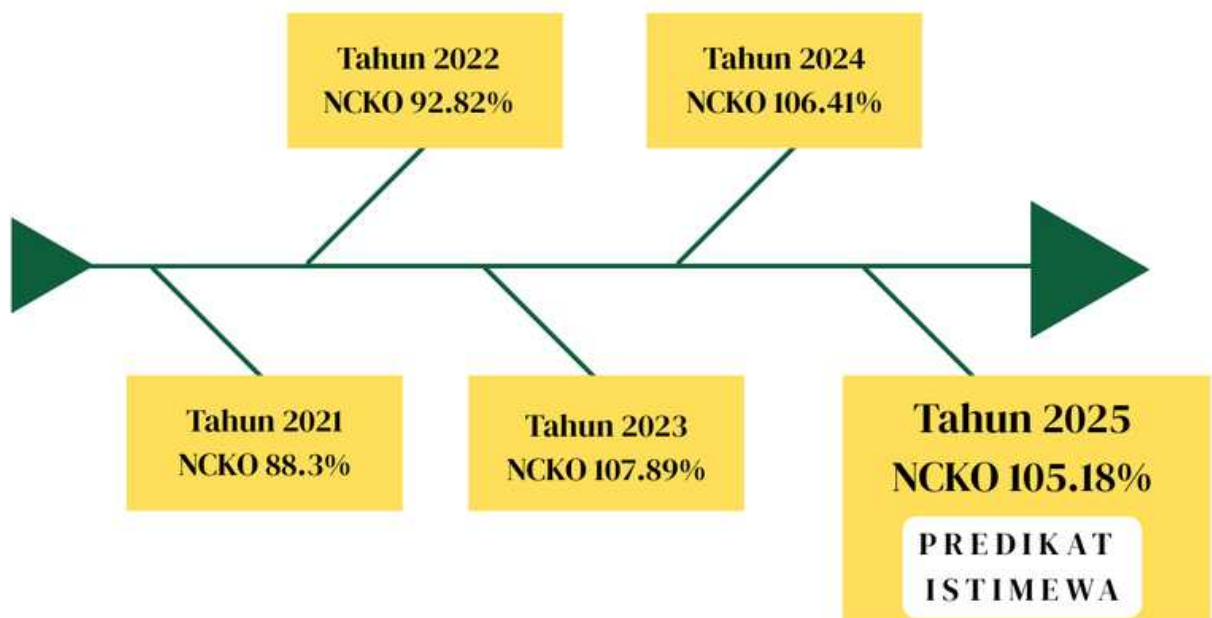


BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja

Pada periode 2021–2023, Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Beijing menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, pada periode 2023–2025, KBRI Beijing berhasil mempertahankan capaian NCKO secara konsisten di atas 100 persen, yang mencerminkan terjaganya kinerja organisasi secara berkelanjutan serta keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Beijing



Gambar 4: Diagram Fishbone Capaian NCKO KBRI Beijing 2021-2025

Capaian NCKO KBRI Beijing diukur melalui empat (4) perspektif utama, yang merupakan konsolidasi dari sepuluh (10) Sasaran Strategis (SS) dan dijabarkan ke dalam tujuh belas (17) Indikator Kinerja (IK) sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025.

Penilaian capaian pada setiap perspektif dilakukan berdasarkan bobot yang telah ditetapkan, sesuai dengan tingkat prioritas dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. Adapun rincian capaian Tahun 2025 pada masing-masing perspektif, sasaran strategis, dan indikator kinerja disajikan dalam bagan berikut.



Pada periode 2021–2023, NCKO KBRI Beijing menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Pada periode 2023–2025, KBRI Beijing berhasil mempertahankan capaian NCKO secara konsisten di atas 100 persen, yang mencerminkan terjaganya kinerja organisasi secara berkelanjutan

**Stakeholders
Perspective**

Bobot 25%
107.26

S1
113.33

Nilai Manfaat Diplomasi
Ekonomi KBRI Beijing
yang Optimal

S2
101.19

Citra Positif Indonesia di
Negara Akreditasi KBRI
Beijing yang Meningkatkan

**Customer
Perspective**

Bobot 15%
111.75

C1
103.50

Pelindungan WNI dan
Pelayanan Publik KBRI
Beijing yang Prima

C2
120

Dukungan dan Komitmen
yang Tinggi atas
Kesepakatan Bilateral di
Negara Akreditasi KBRI
Beijing

NCKO 2025

105.18

ISTIMEWA

**Internal Business
Process Perspective**

Bobot 30%
105.08

B1
112.38

Diplomasi Bilateral di
Negara Akreditasi KBRI
Beijing yang Kuat

B2
100

Basis Data KBRI Beijing
yang Akurat

B3
102.86

Diplomasi Digital dan
Informasi Hubungan Luar
Negeri KBRI Beijing yang
Kuat

**Learning and
Growth Perspective**

Bobot 30%
100.25

L1
98.39

Tata Kelola Organisasi KBRI
Beijing yang Baik

L2
101.89

Pengelolaan Aset KBRI
Beijing yang Optimal

L3
100.46

Pengelolaan Anggaran KBRI
Beijing yang Optimal dan
Akuntabel



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

Capaian Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Beijing yang ditampilkan berdasarkan empat perspektif utama memberikan gambaran kinerja secara agregat dan komprehensif. Setiap perspektif tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), Bobot, Target, Realisasi, Capaian, dan Toleransi Capaian yang dirancang untuk mengukur kontribusi perwakilan secara lebih spesifik dan terukur.

Adapun rincian realisasi dan capaian per Indikator Kinerja, sebagaimana tabel di bawah ini:

NCKO 2025						
105.18 (ISTIMEWA)						
Perspektif : Stakeholders Perspective (25 %)						Capaian : 107,26
S.1 : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Beijing yang Optimal						Capaian : 113,33
Nama IK		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
IK S1. 1	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing	33.33	100,00	134,51	134,51	120
IK S1.2	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing	33.33	100,00	124,88	124,88	120
IK S1.3	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing	33.33	100,00	100,00	100,00	N/A
S2 : Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Meningkat						Capaian : 101,19



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

Nama IK		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
IK S2.1	Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Beijing	100	4,20	4,24	100,95	N/A
Perspektif : Customer Perspective (15 %)						Capaian : 111,75
C1 : Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI Beijing yang Prima						Capaian : 103,50
Nama IK		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
IK C1.1	Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Diselesaikan	33.33	90,00	99,46	110,51	N/A
IK C1.2	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Beijing	33.33	4,00	4,00	100,00	N/A
IK C1.3	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Beijing	33.33	4,00	4,00	100,00	N/A
C2 : Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Beijing						Capaian : 120,00
Nama IK		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

IK C2.1	Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing	100	95,00	116,67	122,81	120
Perspektif : Internal Business Process Perspective (30 %)						Capaian : 105,08
B1 : Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Kuat						Capaian : 112,38
Nama IK		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
IK B1.1	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	28.57	15,00	14,00	93,33	N/A
IK B1.2	Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	28.57	5,00	6,00	120,00	120
IK B1.3	Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi	42.86	12,00	15,00	125,00	120
B2 : Basis Data KBRI Beijing yang Akurat						Capaian : 100,00
Nama IK		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
IK B2.1	Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI	65.63	100,00	100,00	100,00	N/A



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

IK B2.2	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Beijing	34.38	98,00	98,00	100,00	N/A
B3 : Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Beijing yang Kuat						Capaian : 102,86
Nama IK		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
IK B3.1	Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing	100	70,00	72,00	102,86	N/A
Perspektif : Learning & Growth Perspective (30 %)						Capaian : 100,25
L1 : Tata Kelola Organisasi KBRI Beijing yang Baik						Capaian : 98,39
Nama IK		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
IK L1.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing	100	80,65	79,35	98,39	N/A
L2 : Pengelolaan Aset KBRI Beijing yang Optimal						Capaian : 101,89
Nama IK		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

IK L2.1	Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing	100	3,70	3,77	101,89	N/A
L3 : Pengelolaan Anggaran KBRI Beijing yang Optimal dan Akuntabel						Capaian : 100,46
Nama IK		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
IK L3.1	Nilai IKPA KBRI Beijing	100	95,00	95,44	100,46	N/A

Sejalan dengan capaian kinerja tersebut, KBRI Beijing juga memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 2, yaitu *Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.*

Dalam konteks ini, KBRI Beijing berperan aktif memfasilitasi dan mengawal kerja sama strategis Indonesia–Tiongkok di bidang pertahanan dan keamanan, antara lain melalui terselenggaranya pertemuan 2+2 pertama antara Indonesia dan Tiongkok, yang menjadi tonggak penting dalam pendalaman dialog strategis kedua negara. Pertemuan tersebut turut menjadi katalis bagi penguatan kerja sama pertahanan, termasuk pembahasan rencana pengadaan alutsista, seperti pesawat tempur jenis J, serta peningkatan kepercayaan dan interoperabilitas di bidang pertahanan.

Pada sektor ekonomi, keuangan yang mencakup keamanan transaksi, KBRI Beijing turut mendukung penguatan kemandirian ekonomi nasional melalui fasilitasi kerja sama Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBOC) terkait penggunaan QRIS di Tiongkok, yang memperluas akses sistem pembayaran digital Indonesia di luar negeri. MoU kerja sama ini ditandatangani ketika kunjungan PM Li Qiang ke Indonesia pada Mei 2025. Capaian ini tidak hanya mendukung kelancaran transaksi lintas negara, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional serta daya saing sistem pembayaran Indonesia di tingkat global.

Selain itu, KBRI Beijing juga mencatat capaian dalam mendukung pencapaian RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, hilirisasi, ketahanan pangan nasional, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, serta peningkatan akses, mutu, dan kualitas layanan pendidikan. Pada aspek realisasi investasi, investasi Tiongkok ke Indonesia pada tahun 2025 mencapai USD 18,1 miliar, menempatkan Tiongkok sebagai salah satu kontributor utama penanaman modal asing. KBRI Beijing berperan dalam memfasilitasi dan mengawal investasi strategis tersebut agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional, misalnya di sektor renewable energy, termasuk investasi industri EV Tiongkok di Indonesia



yang disertai dengan alih produksi secara bertahap untuk memperkuat basis industri dalam negeri.

Dalam mendukung agenda hilirisasi dan penguatan rantai pasok, KBRI Beijing turut mengawal penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Tiongkok mengenai penguatan kerja sama rantai pasok. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, meningkatkan nilai tambah domestik, serta mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Di samping itu, KBRI Beijing juga mencatat kemajuan dalam Reformasi Birokrasi, yang tercermin dalam perspektif Learning and Growth. Upaya peningkatan kualitas *Minimum Essential Diplomatic Infrastructure* terus dilakukan untuk mendukung efektivitas kerja perwakilan. Salah satu terobosan yang dicapai adalah peningkatan kualitas dan keamanan akses teknologi informasi, termasuk tersedianya akses internet tanpa kebutuhan penggunaan VPN melalui penguatan kerja sama dan pengelolaan server antarperwakilan. Inisiatif ini meningkatkan efisiensi kerja, keamanan informasi, serta produktivitas sumber daya manusia, sekaligus mendukung lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adaptif.

Secara keseluruhan, capaian-capaian tersebut mencerminkan bahwa kinerja KBRI Beijing tidak hanya memenuhi target organisasi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian Prioritas Nasional, dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana diarahkan dalam Renstra KBRI Beijing.

3.1.1. STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

S1 Nilai manfaat diplomasi ekonomi KBRI Beijing yang optimal

Sesuai dengan mandat Kementerian Luar Negeri dan arahan Presiden Republik Indonesia, kinerja diplomasi ekonomi diukur berdasarkan kontribusinya terhadap capaian di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata, sehingga manfaat diplomasi dapat dirasakan secara langsung dan terukur oleh masyarakat.

Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal dimaknai sebagai besaran manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan paling menguntungkan yang dihasilkan dari kerja sama dan hubungan internasional di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Diplomasi ekonomi dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional melalui hubungan bilateral, regional, dan multilateral, mencakup sektor perdagangan, investasi, pariwisata, keuangan, ketenagakerjaan, dan kerja sama pembangunan internasional.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) S1 diukur melalui 3 Indikator Kinerja (IK), dengan perhitungan capaian yang merujuk pada realisasi komponen masing-masing indikator sebagai berikut:

1. IK S1.1: Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing, yang diukur dari agregasi:



- a. jumlah komitmen perdagangan; dan
 - b. jumlah potensi transaksi perdagangan.
2. IK S1.2: Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Beijing, yang diukur dari agregasi:
- a. jumlah komitmen investasi *inbound*; dan
 - b. jumlah potensi transaksi investasi *inbound*.
3. IK S1.3: Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Beijing, yang diukur dari:
- a. potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Beijing ke Indonesia.

Analisis IK S1.1: Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Deskripsi IK

IK S1.1 disusun sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian Luar Negeri dan Satker/Perwakilan RI, serta untuk melaksanakan amanat Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, bahwa kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya terhadap capaian di bidang perdagangan agar manfaat diplomasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Indikator Kinerja ini secara spesifik mengukur nilai (*value*) yang diperoleh Indonesia dari pelaksanaan diplomasi ekonomi di sektor perdagangan.

Perdagangan dimaknai sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri maupun lintas batas negara, dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

IK S1.1 terdiri atas 2 komponen dengan bobot yang seimbang, yaitu masing-masing sebesar 50 persen, sebagai berikut:

- Komponen 1: Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing (50%), yang mengukur nilai komitmen perdagangan yang dihasilkan dari kegiatan diplomasi ekonomi di bidang perdagangan, antara lain *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang, serta forum kerja sama. Komitmen perdagangan dimaknai sebagai kesepakatan tertulis antara Indonesia dan entitas di negara akreditasi yang memuat nilai perdagangan yang disepakati, dan dihitung per negara akreditasi.
- Komponen 2: Jumlah potensi transaksi perdagangan (50%), yang mengukur nilai potensi transaksi perdagangan yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi di bidang perdagangan, termasuk *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang, serta forum kerja sama. Potensi transaksi perdagangan dihitung sebagai peluang transaksi yang teridentifikasi dengan negara akreditasi KBRI Beijing.



Informasi Kinerja

Capaian IK S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK	Nilai Bobot
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing	Capaian Komponen 1 : Jumlah komitmen perdagangan (50%)	16	50 %
	Capaian Komponen 2 : Jumlah potensi transaksi perdagangan (50%)	USD 2,356,372,363.73	50 %
Realisasi			134.51
Target			100
Capaian			134.51%
Batas Toleransi			120%

Pada tahun 2025, realisasi IK S1.1 “Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing” tercatat sebesar 134,51 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100 persen, dengan batas toleransi capaian 120 persen. Capaian IK S1.1 diperoleh dari agregasi bobot capaian Komponen 1 dan Komponen 2.

Realisasi Komponen 1 “Jumlah komitmen perdagangan” pada tahun 2025 mencapai 16 komitmen dari target 15 komitmen. Komitmen perdagangan tersebut didominasi oleh sektor makanan dan farmasi, dengan 7 komitmen dari total komitmen yang berhasil disepakati dengan negara akreditasi KBRI Beijing.

Sementara itu, realisasi Komponen 2 “Jumlah potensi transaksi perdagangan” pada tahun 2025 tercatat sebesar USD 2.356.372.363,73, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar USD 100.000.000. Capaian ini mencerminkan tingginya potensi transaksi perdagangan yang berhasil difasilitasi melalui pelaksanaan diplomasi ekonomi KBRI Beijing sepanjang tahun 2025.



Perbandingan Kinerja

Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
S1.1	Target	95%	100%	100%
	Realisasi	98.01%	111.34%	134.51%
	Capaian	103.17%	100%	134.51%
Komponen 1	Target	7	7	15
	Realisasi	7	8	16
	Capaian	100%	114.29%	106.67%
Komponen 2	Target	USD 57 Miliar	USD 54 Miliar	USD 2.4 Miliar
	Realisasi	USD 53.21 Miliar	USD 56.4 Miliar	USD 100 Juta
	Capaian	93.36%	104.46%	162.35%

IK S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing mulai diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur, dengan tujuan mengukur capaian diplomasi ekonomi secara lebih optimal dan relevan. Capaian IK tahun 2025 dianalisis secara komparatif dengan capaian IK tahun 2024 dan 2023 untuk melihat tren kinerja dan efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Target IK S1.1 pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 persen, sama dengan target tahun 2024. Penetapan target tersebut didasarkan pada hasil pemantauan realisasi dan capaian IK tahun 2024 yang melampaui target, serta dimaksudkan untuk memacu peningkatan kinerja diplomasi ekonomi melalui penetapan target yang menantang namun tetap *achievable*.

Target Komponen 1 (Jumlah Komitmen Perdagangan) mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 16 komitmen, dibandingkan 8 komitmen pada tahun 2024. Peningkatan target ini didasarkan pada realisasi dan capaian tahun 2024 yang melampaui target, serta hasil pemetaan potensi komitmen perdagangan yang diproyeksikan meningkat pada tahun 2025. Seiring dengan peningkatan target tersebut, realisasi Komponen 1 pada tahun 2025 tercatat sebesar 106,67 persen, menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 114,29 persen. Penurunan persentase capaian ini terutama disebabkan oleh kenaikan target yang signifikan, bukan penurunan kinerja substantif.



Sementara itu, Komponen 2 (Jumlah Potensi Transaksi Perdagangan) pada tahun 2025 tercatat sebesar 162,35 persen, meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 104,46 persen dan tahun 2023 sebesar 93.36%.

Catatan:

Penurunan signifikan pada Komponen 2 dalam target dan realisasi tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkiraan data dukung kedepannya yang benar-benar tersedia, serta hasil pembahasan dengan fungsi terkait untuk menetapkan target yang lebih realistis. Penyesuaian ini didasarkan pada pemahaman bahwa melalui IK diupayakan mengukur kinerja KBRI Beijing secara langsung, sehingga indikator difokuskan pada aspek-aspek di mana Perwakilan memainkan peran yang nyata. Sementara itu, nilai perdagangan total pada hakikatnya merupakan hasil kontribusi berbagai aktor dan faktor eksternal, tidak semata-mata dipengaruhi oleh KBRI Beijing. Oleh karena itu, penurunan target dan realisasi pada komponen tersebut dipandang lebih selaras dengan prinsip evaluasi kinerja yang objektif, proporsional, dan benar-benar merefleksikan peran KBRI Beijing.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IK S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing pada tahun 2025 tidak terlepas dari kombinasi faktor eksternal global dan intervensi diplomasi ekonomi yang adaptif oleh KBRI Beijing. Capaian yang melampaui target mencerminkan kemampuan perwakilan dalam membaca dinamika global dan memanfaatkannya untuk kepentingan nasional.

Salah satu faktor eksternal utama adalah terjadinya trade diversion sebagai dampak dari kenaikan tarif dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok yang mulai diterapkan sejak awal 2025. Kebijakan tersebut mendorong pelaku usaha Tiongkok untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan sumber pasokan, dengan mengintensifkan perdagangan ke negara-negara mitra potensial di kawasan, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki pasar besar, stabilitas politik yang relatif terjaga.

Selain itu, meningkatnya investasi Tiongkok di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur, industri pengolahan, dan kendaraan listrik, turut berkontribusi terhadap kenaikan potensi transaksi perdagangan. Banyak proyek investasi tersebut masih bergantung pada impor bahan baku, komponen antara, dan mesin dari Tiongkok, terutama pada tahap awal dan menengah pengembangan industri. Ketergantungan ini secara langsung mendorong peningkatan nilai perdagangan bilateral, baik dalam bentuk komitmen maupun potensi transaksi yang teridentifikasi dan difasilitasi melalui diplomasi ekonomi KBRI Beijing.

Faktor lain yang turut mendukung capaian adalah perubahan pola perdagangan melalui pemanfaatan platform digital dan perdagangan daring (*online platforms*). Pelaku usaha Tiongkok semakin memanfaatkan cross-border e-commerce dan platform digital untuk menjangkau mitra dagang di Indonesia secara lebih cepat dan efisien. Perkembangan ini memperluas basis potensi transaksi perdagangan, terutama bagi produk makanan, farmasi, dan barang konsumsi, yang tercermin dalam dominasi sektor-sektor tersebut pada komitmen perdagangan yang berhasil difasilitasi.



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

Dari sisi internal, keberhasilan capaian juga dipengaruhi oleh penajaman strategi diplomasi ekonomi KBRI Beijing, termasuk peningkatan intensitas business matching, promosi dagang yang lebih terarah, serta pemetaan sektor unggulan dan pasar potensial yang lebih presisi. Pendekatan ini memungkinkan KBRI Beijing untuk tidak hanya menghimpun komitmen perdagangan yang bersifat kuantitatif, tetapi juga mengidentifikasi potensi transaksi bernilai besar yang berkontribusi signifikan terhadap capaian IK.

Selain itu, sinergi lintas pemangku kepentingan, baik dengan kementerian/lembaga teknis, BUMN, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha nasional, turut memperkuat efektivitas diplomasi ekonomi. Koordinasi yang lebih terintegrasi memungkinkan tindak lanjut yang lebih cepat terhadap peluang perdagangan yang muncul, sehingga potensi transaksi dapat segera dikonversi menjadi komitmen dan realisasi.

Sejumlah komitmen dicapai yang berkontribusi signifikan diantaranya:

No.	Nama/Deskripsi Kesepakatan	Tanggal/Waktu Kesepakatan	Nilai	Data Dukung (MoU, Lol, Kontrak, Brafaks, Nodin, Memo, dll)
1	PT Etana dengan Grand Pharmaceuticals Wuhan dan Redstone Capital	25 Mei 2025	Potensi transaksi sebesar USD 650.000.000	Brafaks B-00159/BEIJING/250411
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan RRT mengenai Penguatan Kerja Sama Ekonomi di Bidang Industri dan Rantai Pasok	25 Mei 2025	Potensi transaksi sebesar 6.000.000.000	Brafaks R-02848/KEMLU/250604
3	MoU Trilateral antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan RRT, dan Pemerintah Provinsi Fujian Tiongkok mengenai proyek Two Countries Twin Parks	25 Mei 2025	Potensi transaksi sebesar 30.000.000.000	Brafaks R-02848/KEMLU/250604
4	Bank Indonesia dan People's Bank of China menyepakati pembentukan Kerangka Kerja Sama Transaksi Bilateral dalam Mata Uang Lokal (local currency transaction framework)	25 Mei 2025	Potensi transaksi sebesar USD 20.000.000.000	Brafaks R-02848/KEMLU/250604
5	Kerja Sama Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs RRT tentang inspeksi, karantina, dan persyaratan sanitasi untuk ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok	25 Mei 2025	Potensi transaksi sebesar USD 10.000.000.000	Brafaks R-02848/KEMLU/250604
6	Kesepakatan Penguatan Hubungan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia	25 Mei 2025	Potensi transaksi sebesar USD 20.000.000.000	Brafaks R-02848/KEMLU/250604
7	The 31 st Lanzhou Investment and Trade Fair 2025	06 – 10 Juli 2025	Nilai potensi transaksi on the spot mencapai RMB 86.630 setara USD 12.363,73 dan potensi transaksi (business to business) mencapai USD 360.000	Brafaks B-00302/Beijing/250717
8	Pameran the 28 th annual China Fisheries & Seafood Expo '2025 di Qingdao, Provinsi Shandong	29 - 31 Oktober 2025	nilai potensi transaksi on the spot sebesar USD 20.000.000 dan Potensi transaksi (Business to Business) mencapai USD 50.000.000	SKL-25-0405 20251118 Laporan perjalanan dinas partisipasi pada Pameran the 28 th annual China Fisheries & Seafood Expo '2025 tanggal 29 -



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

				31 Oktober 2025 di Qingdao, Shandong, Tiongkok
9	MOU CAMEX - GAPKI	20 September 2025	Nilai potensi transaksi MOU U SD 5.000.000	008 - MoU GAPKI dan CAMEX China
10	MOU kontrak Eksklusif KOMODO Maju Pangan - Shanghai HuangGuangE-Commerce Co.,Ltd	20 September 2025	Nilai potensi transaksi MOU U SD 24.370	250920 MOU kontrak eksklusif komodo maju pangan
11	MOU PT Walet Teluk Naga dengan Fujian Trading Technology Group Co. Ltd	17 Oktober 2025	Nilai potensi transaksi MOU U SD 1.000.000.000	251017 Draft MoU WTN
12	MOU Repeat Order TGP - Xiamen Maodi Jiuzhou International Trading Co.,Ltd	20 Oktober 2025	Nilai potensi transaksi MOU U SD 21.000.000	250920 PO Pineapple China
13	Trade Expo Indonesia : MOU Repeat Order Shanghai Superfresh Trading Co.ltd dan Guangzhou Kunhai Supply Chain Co.Ltd bersama PT. Bintang Kiat kemuliaan	15 -19 Oktober 2025	Nilai potensi transaksi MOU U SD 25.000.000	Brafaks B-00506/Beijing/251107
14	Trade Expo Indonesia : MOU Repeat Order PT Maritim Timur Jaya	15 -19 Oktober 2025	Nilai potensi transaksi MOU U SD 1.200.000.000	Brafaks B-00506/Beijing/251107
15	Trade Expo Indonesia : MOU Repeat Order CV. Mandiri Kopi & China Light Merchandise IMP & EXP Corp	15 -19 Oktober 2025	Nilai potensi transaksi MOU U SD 10.000.000	Brafaks B-00506/Beijing/251107
16	Trade Expo Indonesia : MOU Repeat Order PT. Natura Karunia Agung bersama Zh ezhenbu(Guangdong)Healthy Technology Co.,Ltd dan Zhezhenbu (Guangdong)Healthy Technology Co.,Ltd	15 -19 Oktober 2025	Nilai potensi transaksi MOU U SD 25.000.000	Brafaks B-00506/Beijing/251107

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing melaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis sepanjang tahun 2025 yang berkontribusi langsung terhadap realisasi target Indikator Kinerja. Kegiatan tersebut menjadi instrumen diplomasi operasional untuk menghasilkan output yang terukur, karena dirancang berdasarkan analisis yang matang, pendekatan yang *targeted*, serta masukan dari pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya. Rincian program pendukung diantaranya:

No.	Kegiatan	Keterangan
1	31st China Lanzhou Investment and Trade Fair, Lanzhou (6 Juli 2025)	Duta Besar RI Beijing bersama pimpinan Pemerintah Provinsi Gansu meresmikan Paviliun Indonesia pada <i>31st China Lanzhou Investment and Trade Fair</i> yang diselenggarakan oleh Atase Perdagangan KBRI Beijing dengan dukungan Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri RI. Indonesia bertindak sebagai <i>Guest Country of Honor</i> dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik RI–RRT. Paviliun menghadirkan partisipasi 16 perusahaan Indonesia yang menampilkan produk unggulan sektor pertanian, makanan halal, dan kerajinan, antara lain kopi luwak, sarang burung walet, batik, camilan khas, serta produk perawatan kulit alami.



No.	Kegiatan	Keterangan
2	China Fuzhou International Seafood & Fisheries Expo (FIFE), Fuzhou (30 Mei – 3 Juni 2025)	KBRI Beijing berpartisipasi dalam pameran FIFE melalui Paviliun Indonesia seluas 126 m ² dengan menghadirkan enam perusahaan yang memamerkan produk perikanan serta produk turunan unggulan Indonesia. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari promosi akses pasar dan penguatan kerja sama perdagangan sektor kelautan dan perikanan dengan mitra di Tiongkok.
3	Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 Tahun 2025, BSD City, Tangerang	KBRI Beijing menghadiri TEI ke-40 sebagai salah satu platform utama promosi ekspor Indonesia. Dalam rangkaian kegiatan, bekerja sama dengan KJRI Guangzhou, diselenggarakan Forum Bisnis dan <i>Business Matching</i> yang dihadiri sekitar 130 peserta. Kegiatan tersebut menghasilkan sembilan kesepakatan kerja sama investasi dan perdagangan dengan nilai lebih dari USD 643 juta.
4	China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF), Guangzhou (27–30 Juni 2025)	KBRI Beijing berpartisipasi dalam CISMEF bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian UMKM RI. Delegasi RI yang terdiri dari 25 pelaku usaha UMKM menempati 24 booth dengan total luasan area 216 m ² . Partisipasi ini bertujuan memperluas jejaring bisnis, meningkatkan eksposur produk UMKM Indonesia, serta membuka peluang kemitraan dengan pelaku usaha Tiongkok.
5	The 8th China International Import Expo (CIIE), Shanghai (5–10 November 2025)	KBRI Beijing bersama KJRI Shanghai dan ITPC Shanghai berpartisipasi pada CIIE ke-8 sebagai salah satu pameran impor terbesar di dunia. Dalam rangkaian kegiatan juga diselenggarakan <i>business matching</i> untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan mitra dagang Tiongkok, guna mendorong peningkatan ekspor serta penguatan kerja sama perdagangan bilateral.

Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, KBRI Beijing menghadapi sejumlah tantangan teknis dan struktural yang memerlukan penanganan cermat dan adaptif. Tantangan tersebut antara lain:

- Terkait dengan akses informasi pasar dan kebijakan ekonomi di Tiongkok yang relatif ketat dan terfragmentasi, sehingga menuntut pendalaman berlapis untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai peluang, risiko, serta hambatan perdagangan dan investasi.
- Terdapat keberadaan berbagai entitas perantara yang berperan sebagai makelar atau *palugada* dalam penajakan kerja sama ekonomi. Kondisi ini menuntut proses verifikasi yang lebih ketat agar pendekatan diplomasi ekonomi dapat diarahkan secara tepat kepada pelaku usaha yang kredibel dan pengambil keputusan yang sesungguhnya, sehingga meminimalkan risiko komitmen yang tidak berlanjut.



- Karakteristik proses pengambilan keputusan ekonomi di Tiongkok yang tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan komersial, tetapi juga dipengaruhi oleh prioritas kebijakan nasional, pertimbangan strategis jangka panjang, serta faktor politik tertentu. Hal ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap arah kebijakan pemerintah Tiongkok agar upaya diplomasi ekonomi dapat diselaraskan secara efektif.
- Terdapat perbedaan prioritas, standar, dan tahapan implementasi kebijakan antara Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi, yang pada praktiknya berdampak pada tempo dan mekanisme tindak lanjut atas kesepakatan yang telah dicapai. Perbedaan ini memerlukan koordinasi intensif dan pengelolaan ekspektasi yang realistis di antara para pemangku kepentingan.
- Dinamika kebijakan perdagangan global dan regional juga turut memengaruhi minat, pola, serta waktu realisasi kerja sama ekonomi. Perubahan kebijakan negara-negara besar, perkembangan geopolitik, serta penyesuaian rantai pasok global menjadi faktor eksternal yang harus terus dicermati dalam perumusan dan pelaksanaan diplomasi ekonomi KBRI Beijing.

Upaya Perbaikan

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Fungsi Ekonomi KBRI Beijing telah dan terus menempuh sejumlah langkah strategis dan operasional, diantaranya:

- Pendalaman substansi serta pemetaan mitra usaha secara selektif, guna memastikan bahwa potensi kerja sama perdagangan dan investasi yang dijajaki memiliki prospek keberlanjutan dan nilai tambah bagi kepentingan nasional Indonesia.
- Mengkombinasikan pendekatan formal dan informal dalam kegiatan promosi dan fasilitasi ekonomi. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesiapan pelaku usaha, arah kebijakan, serta dinamika pengambilan keputusan di Tiongkok, sehingga intervensi diplomasi ekonomi dapat disesuaikan secara lebih tepat.
- Penguatan koordinasi lintas fungsi di KBRI Beijing terus dilakukan guna memastikan keselarasan langkah, konsistensi pesan, serta efektivitas tindak lanjut atas peluang kerja sama yang muncul. Sinergi antar fungsi ini menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas isu perdagangan dan investasi, sekaligus meningkatkan daya ungkit diplomasi ekonomi perwakilan.
- Mengatasi hambatan perdagangan, Fungsi Ekonomi juga meningkatkan upaya penyelesaian melalui jalur formal (bilateral), baik dengan otoritas terkait di Tiongkok maupun melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga di Indonesia. Upaya tersebut dilengkapi dengan pendekatan informal dan komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan di Tiongkok, termasuk pemerintah setempat, asosiasi industri, dan pelaku usaha yang memiliki kepentingan langsung, guna mempercepat klarifikasi, membangun kesepahaman, dan mendorong penyelesaian hambatan perdagangan secara konstruktif.
- Mendorong pengusaha dalam negeri untuk melakukan peningkatan ekspor produk bernilai tambah serta memanfaatkan potensi dari ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) yang memberikan tarif bea masuk lebih rendah dibandingkan menggunakan tarif MFN dan *Regional Comprehensive Partnership* (RCEP) yang mulai diimplementasikan 1 Januari 2022.

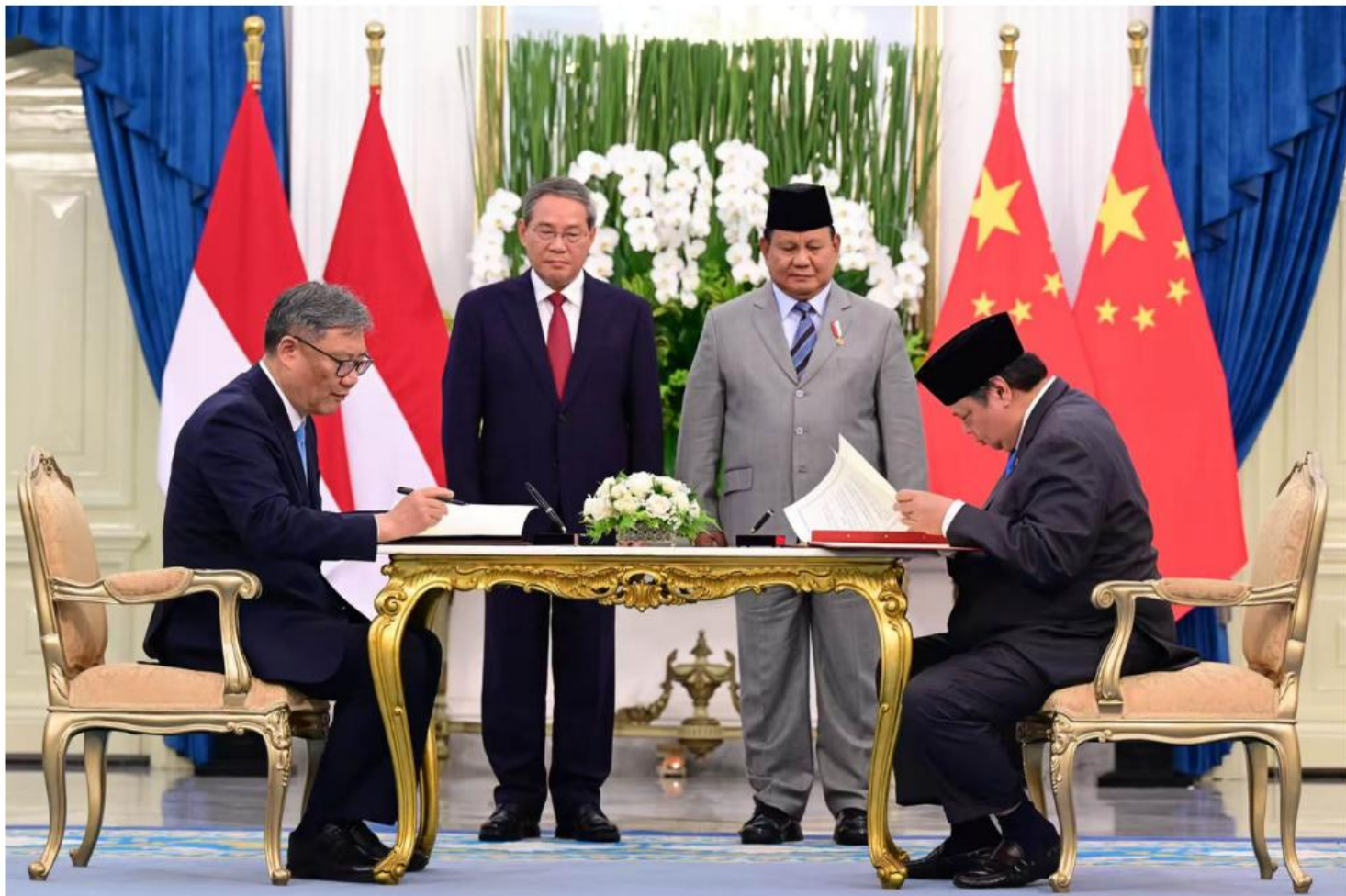


Proyeksi Kedepan

Ke depan, peningkatan kinerja diplomasi ekonomi KBRI Beijing akan terus dihadapkan pada dinamika global dan kawasan yang kompleks, termasuk fragmentasi perdagangan internasional, penyesuaian kebijakan industri Tiongkok, serta meningkatnya penggunaan instrumen non-tarif. Dari sisi domestik, Pemerintah Tiongkok diperkirakan akan terus mendorong konsumsi dalam negeri sekaligus mengintensifkan ekspansi ekspor ke pasar global, sehingga perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada peningkatan defisit perdagangan Indonesia.

Kondisi tersebut menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi yang lebih terarah, dengan fokus pada peningkatan kualitas pemetaan mitra strategis, pendalaman sektor prioritas, penguatan mekanisme tindak lanjut, serta optimalisasi penyelesaian hambatan perdagangan melalui jalur formal dan informal. Dalam kerangka ini, perencanaan kinerja dan program prioritas tahun mendatang akan difokuskan pada sektor-sektor berdampak tinggi terhadap pembangunan nasional, antara lain industri hilir, kendaraan listrik, pangan dan farmasi, serta ekonomi hijau dan digital, yang selanjutnya menjadi dasar penetapan target Indikator Kinerja yang menantang namun tetap realistis dan terukur.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK S.1.1



Penandatanganan MoUPenguatan Kerja Sama Ekonomi di Bidang Industri dan Rantai Pasok



Partisipasi Indonesia pada 31st China Lanzhou Investment and Trade Fair, Lanzhou, 6 Juli 2025



Analisis IK S1.2: Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Indikator Kinerja ini disusun sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, serta untuk melaksanakan amanat Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024, bahwa kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya terhadap capaian di bidang investasi, sehingga manfaat diplomasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Sub-IK ini secara spesifik mengukur nilai (value) yang diperoleh Indonesia dari pelaksanaan diplomasi ekonomi di sektor investasi.

Investasi dimaknai sebagai seluruh kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dari negara akreditasi untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, IK ini terdiri atas dua komponen dengan bobot masing-masing sebesar 50 persen, yaitu:

- Komponen 1: Jumlah komitmen investasi *inbound* (50%), yang mengukur nilai komitmen investasi yang diperoleh melalui kegiatan diplomasi ekonomi di bidang investasi, antara lain *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi, serta forum kerja sama. Komitmen investasi dimaknai sebagai kesepakatan tertulis antara Indonesia dan entitas di negara akreditasi yang memuat nilai investasi yang disepakati, dan dihitung per negara akreditasi.
- Komponen 2: Jumlah potensi transaksi investasi *inbound* (50%), yang mengukur nilai potensi transaksi investasi yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi di bidang investasi, termasuk *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi, serta forum kerja sama. Potensi transaksi investasi dihitung untuk suatu negara akreditasi.

Informasi Kinerja

Capaian IK S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK	Nilai Bobot
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing	Capaian Komponen 1 : Jumlah komitmen investasi (50%)	8	50 %
	Capaian Komponen 2 : Jumlah potensi transaksi investasi (50%)	USD USD 1,497,610,910.16	50 %



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

Realisasi	124.88%
Target	100
Capaian	124.88%
Batas Toleransi	120%

Pada tahun 2025, realisasi IK S1.2 “Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing” tercatat sebesar 124,88 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100 persen, dengan batas toleransi capaian 120 persen. Capaian IK S1.2 diperoleh dari agregasi bobot capaian Komponen 1 dan Komponen 2.

Realisasi Komponen 1 “Jumlah komitmen investasi” pada tahun 2025 mencapai 8 komitmen dari target 8 komitmen. Komitmen investasi tersebut didominasi oleh infrastruktur, dengan 5 komitmen dari total komitmen yang berhasil disepakati dengan negara akreditasi KBRI Beijing.

Sementara itu, realisasi Komponen 2 “Jumlah potensi transaksi investasi” pada tahun 2025 tercatat sebesar USD 1,497,610,910.16, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar USD 1,000,000,000. Capaian ini mencerminkan tingginya potensi transaksi investasi yang berhasil difasilitasi melalui pelaksanaan diplomasi ekonomi KBRI Beijing sepanjang tahun 2025.

Perbandingan Kinerja

Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
S1.2	Target	95%	100%	100%
	Realisasi	114.48%	114.96%	124.88%
	Capaian	120%	100%	124.88%
Komponen 1	Target	8	10	8
	Realisasi	13	12	8



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

	Capaian	120%	120%	100%
Komponen 2	Target	USD 5.5 Miliar	USD 5.6 Miliar	USD 1 Miliar
	Realisasi	USD 5.58 Miliar	USD 5.78 Miliar	USD 1.5 Miliar
	Capaian	101.16%	103.21%	162.35%

IK S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing mulai diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur, dengan tujuan mengukur capaian diplomasi ekonomi secara lebih optimal dan relevan. Capaian IK tahun 2025 dianalisis secara komparatif dengan capaian IK tahun 2024 dan 2023 untuk melihat tren kinerja dan efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Target IK S1.2 pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 persen, sama dengan target tahun 2024. Penetapan target tersebut didasarkan pada hasil pemantauan realisasi dan capaian IK tahun 2024 yang melampaui target, serta dimaksudkan untuk memacu peningkatan kinerja diplomasi ekonomi melalui penetapan target yang menantang namun tetap *achievable*.

Target Komponen 1 (Jumlah Komitmen investasi) pada tahun 2025 sebanyak 8 komitmen, dibandingkan 10 komitmen pada tahun 2024. Target ini didasarkan pada pertimbangan realisasi dan capaian tahun 2024, kondisi geopolitik, serta kebijakan domestik Tiongkok yang mengejar target pertumbuhan ekonomi melalui prioritas investasi domestik. Realisasi Komponen 1 pada tahun 2025 tercatat sebesar 100 persen, menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 120 persen.

Sementara itu, capaian Komponen 2 (Jumlah Potensi Transaksi investasi) pada tahun 2025 tercatat sebesar 162,35 persen, meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 104,46 persen.

Catatan:

Penurunan signifikan pada Komponen 2 dalam target dan realisasi tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkiraan data dukung kedepannya yang benar-benar tersedia, serta hasil pembahasan dengan fungsi terkait dan IIPC untuk menetapkan target yang lebih realistis. Penyesuaian ini didasarkan pada pemahaman bahwa melalui IK diupayakan mengukur kinerja KBRI Beijing secara langsung, sehingga indikator difokuskan pada aspek-aspek di mana Perwakilan memainkan peran yang nyata.

Sementara itu, investasi masuk ke Indonesia dari Tiongkok pada hakikatnya merupakan hasil kontribusi berbagai aktor dan faktor eksternal, tidak semata-mata dipengaruhi oleh KBRI Beijing. IIPC Beijing sendiri mengakui bahwa salah satu tantangan adalah timbulnya tren investasi yang tidak difasilitasi melalui IIPC atau BKPM. Oleh karena itu, penurunan target dan realisasi pada komponen tersebut dipandang lebih selaras dengan prinsip evaluasi kinerja yang objektif, proporsional, dan benar-benar merefleksikan peran KBRI Beijing.



Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IK S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing pada tahun 2025 merupakan hasil dari konvergensi dinamika eksternal global dan kawasan, serta penguatan peran diplomasi ekonomi KBRI Beijing yang semakin proaktif dan terarah. Capaian yang melampaui target mencerminkan kemampuan perwakilan dalam membaca perubahan lanskap investasi global dan memosisikan Indonesia sebagai tujuan investasi strategis bagi pelaku usaha Tiongkok.

Dari sisi eksternal, pergeseran rantai pasok global dan strategi *de-risking* yang ditempuh oleh banyak perusahaan Tiongkok pasca meningkatnya ketegangan perdagangan dan kebijakan proteksionisme di negara-negara maju menjadi faktor pendorong utama. Perusahaan Tiongkok semakin terdorong untuk melakukan diversifikasi basis produksi dan investasi ke luar negeri, khususnya ke negara-negara dengan pasar besar, stabilitas politik yang relatif terjaga, dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Dalam konteks ini, Indonesia dipandang sebagai destinasi investasi yang strategis di kawasan Asia Tenggara, baik sebagai pasar domestik maupun sebagai basis produksi regional.

Selain itu, kebijakan hilirisasi dan industrialisasi Indonesia, khususnya di sektor mineral, energi baru dan terbarukan, serta kendaraan listrik, memberikan daya tarik yang kuat bagi investor Tiongkok. Investasi Tiongkok yang terus meningkat di sektor manufaktur, industri pengolahan, dan ekosistem kendaraan listrik menciptakan momentum positif yang secara langsung meningkatkan nilai komitmen investasi inbound maupun potensi transaksi investasi yang difasilitasi melalui diplomasi ekonomi KBRI Beijing.

Faktor eksternal lainnya adalah keselarasan kebijakan industri dan pembangunan antara Indonesia dan Tiongkok. Inisiatif pembangunan industri Tiongkok yang mendorong ekspansi ke luar negeri, termasuk melalui skema *outbound investment* dan kerja sama rantai pasok global, menemukan titik temu dengan agenda pembangunan Indonesia dalam RPJMN, terutama terkait peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Keselarasan ini mempermudah proses peninjauan investasi dan meningkatkan tingkat keberlanjutan komitmen yang dicapai.

Dari sisi internal, keberhasilan capaian IK S1.2 juga dipengaruhi oleh penajaman strategi fasilitasi investasi KBRI Beijing, antara lain melalui pemetaan investor potensial yang lebih selektif, pendalaman sektor prioritas, serta penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, dan instansi promosi investasi nasional. Pendekatan ini memungkinkan KBRI Beijing untuk mengarahkan diplomasi ekonomi kepada investor yang memiliki kapasitas finansial, kesiapan teknologi, dan keseriusan jangka panjang.

Selain itu, peningkatan kualitas *follow-up* atas peninjauan investasi menjadi faktor penting dalam mengonversi minat awal menjadi komitmen investasi yang lebih konkret. KBRI Beijing tidak hanya berperan sebagai fasilitator awal, tetapi juga sebagai penghubung berkelanjutan antara investor Tiongkok dan pemangku kepentingan di Indonesia, sehingga berbagai isu teknis dan non-teknis dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini.

Sejumlah komitmen dicapai yang berkontribusi signifikan diantaranya:



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

No.	Nama Perusahaan	Tanggal / Waktu Kesepakatan	Bidang	Data Dukung
1	JASON FURNITURE	One-on-One Meeting, 10 November 2025	Furniture	NKU Tahun 2025
2	SINO TRUCK	Business Forum New Energy Chain, Jiading, 7–8 November 2025	Transportasi	NKU Tahun 2025
3	Isoftstone	KBRI Beijing, 30 Desember 2025	Digital / IT	NKU Tahun 2025
4	CECC Group	KBRI Beijing, 16 Desember 2025	Infrastruktur	NKU Tahun 2025
5	CECC Group	KBRI Beijing, 16 Desember 2025		NKU Tahun 2025
6	CECC Group	KBRI Beijing, 16 Desember 2025		NKU Tahun 2025
7	CECC Group	KBRI Beijing, 16 Desember 2025		NKU Tahun 2025
8	CECC Group	KBRI Beijing, 16 Desember 2025		NKU Tahun 2025
9	CECC Group	KBRI Beijing, 16 Desember 2025		NKU Tahun 2025
10	CECC Group	KBRI Beijing, 16 Desember 2025		NKU Tahun 2025
11	CECC Group	KBRI Beijing, 16 Desember 2025		NKU Tahun 2025
12	Freenow	CIIE, 4–6 November 2025	Makanan	NIB Tahun 2025
13	Freenow	CIIE, 4–6 November 2025	Makanan	NIB Tahun 2025
14	Delong Steel	Kunjungan Kerja Menteri Investasi dan Hilirisasi, 28 Agustus 2025	Besi dan Baja	NKU Tahun 2025
15	GEM	Kunjungan Kerja Menteri Investasi dan Hilirisasi, 25 Agustus 2025	Green Economy	NIB Tahun 2025
16	Wechai Power	Business Forum New Energy Chain, Jiading, 7–8 November 2025	Energi	NKU Tahun 2025

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KBRI Beijing sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi, khususnya dalam menjaring dan memfasilitasi komitmen investasi *inbound* dari negara akreditasi.

Pertama, penyelenggaraan pertemuan bisnis terfokus (*targeted business engagement*) menjadi instrumen utama dalam menjaring komitmen investasi. Kegiatan *one-on-one meeting* dan *business forum*, seperti pertemuan dengan Jason Furniture (10 November 2025), Sino Truck dan Weichai Power dalam *Business Forum New Energy Chain* di Jiading (7–8 November 2025), memungkinkan pendekatan yang lebih spesifik kepada investor potensial sesuai sektor prioritas. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menghasilkan komitmen investasi di sektor manufaktur, transportasi, energi, dan ekonomi hijau, yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap agenda hilirisasi dan transformasi industri nasional.

Kedua, pemanfaatan forum internasional dan platform promosi strategis turut berkontribusi signifikan terhadap capaian IK S1.2. Keikutsertaan dan fasilitasi pertemuan dalam ajang



China International Import Expo (CIIE) 2025 dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkit minat investasi di sektor makanan dan industri pengolahan, sebagaimana tercermin dalam capaian kerja sama dengan Freenow. Forum berskala internasional ini berperan sebagai *entry point* bagi penjangkitan investasi yang kemudian ditindaklanjuti secara lebih intensif oleh KBRI Beijing.

Ketiga, pendekatan langsung kepada korporasi besar dan BUMN Tiongkok melalui fasilitasi pertemuan di KBRI Beijing juga menjadi faktor kunci keberhasilan. Serangkaian pertemuan dengan CECC Group pada 16 Desember 2025, yang mencakup berbagai lini usaha di bidang infrastruktur dan teknologi, menunjukkan peran KBRI Beijing sebagai *trusted interlocutor* dan simpul koordinasi investasi. Konsistensi pendekatan ini memungkinkan terbangunnya kepercayaan serta penjangkitan investasi yang bersifat multi-proyek dan berjangka menengah–panjang.

Keempat, sinergi diplomasi ekonomi dengan kunjungan kerja pejabat tinggi Pemerintah Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kredibilitas dan daya tarik investasi. Kunjungan kerja Menteri Investasi dan Hilirisasi pada Agustus 2025, yang menghasilkan penjangkitan dan komitmen dengan Delong Steel (sektor besi dan baja) dan GEM (sektor ekonomi hijau), memperkuat pesan kebijakan Indonesia terkait hilirisasi, transisi energi, dan kepastian berusaha. KBRI Beijing berperan penting dalam memfasilitasi substansi pertemuan dan memastikan kesinambungan tindak lanjut pascakunjungan.

Kelima, keberhasilan program-program tersebut juga ditopang oleh pendekatan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, termasuk koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis, BKPM/Kementerian Investasi, serta pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan komitmen investasi yang diperoleh tidak berhenti pada tahap deklaratif, tetapi diarahkan menuju realisasi melalui pemetaan lokasi, sektor, dan kebutuhan kebijakan pendukung.

Sejumlah kegiatan strategis lainnya seperti:

No.	Kegiatan	Tanggal	Lokasi
1.	Business Forum dan Coaching Clinic: Diplomatic Reception	24 Oktober 2025	Beijing
2.	Booth Promosi: Chlor Alkali	11- 14 November 2025	Xi'an
3.	Coaching Clinic: Local Currency Transaction	10 November 2025	Shanghai
4.	Business Matching: Dengan Kawasan Industri Terpadu Batang	24 - 26 November 2025	Shanghai
5.	Business Forum dan Coaching Clinic: Dengan KJRI Hong Kong	21 November 2025	Hong Kong
6.	Business Forum: Ekonomi Kreatif	17 Desember 2025	Beijing
7.	Business Meeting: Zhenxing China Tour	19 Desember	Beijing



8.	Business Forum: Indonesia Update	19 Desember	Beijing
----	----------------------------------	-------------	---------

Kendala dan Tantangan

Dalam upaya memenuhi target Indikator Kinerja (IK) diplomasi ekonomi di sektor investasi, KBRI Beijing menghadapi sejumlah kendala struktural, regulatif, dan teknis yang memengaruhi proses peninjauan, fasilitasi, serta realisasi investasi *inbound* dari negara akreditasi. Kendala-kendala ini bersifat lintas yurisdiksi dan melibatkan dinamika kebijakan di negara asal investor maupun di dalam negeri.

- Pertama, peran asosiasi industri di Tiongkok menjadi faktor penting dalam proses peninjauan investasi. Banyak perusahaan Tiongkok beroperasi dalam kerangka koordinasi asosiasi industri yang memiliki mekanisme internal, arahan kebijakan, dan pertimbangan kolektif tertentu. Dalam praktiknya, perusahaan sering kali tidak sepenuhnya otonom dalam mengambil keputusan investasi, sehingga pendekatan langsung kepada perusahaan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan atau melalui struktur asosiasi terkait. Kondisi ini menambah lapisan proses koordinasi dan berimplikasi pada waktu serta kompleksitas fasilitasi investasi.
- Kedua, keterbatasan akses terhadap informasi perusahaan yang bersifat terbuka dan komprehensif di Tiongkok menimbulkan tantangan dalam proses verifikasi kelayakan dan reputasi calon investor. Lingkungan informasi yang relatif tertutup menuntut kehati-hatian ekstra untuk memastikan bahwa perusahaan yang menyampaikan minat investasi memiliki legalitas yang jelas, rekam jejak yang baik, serta kapasitas finansial dan operasional yang memadai. Tantangan ini diperkuat oleh keberadaan pihak-pihak yang mengatasnamakan asosiasi atau jaringan tertentu namun tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko komitmen investasi yang tidak berlanjut.
- Ketiga, pengaturan dan pengawasan Pemerintah Tiongkok terhadap investasi ke luar negeri (*outbound investment*) juga menjadi faktor pembatas. Mekanisme perizinan, penyelarasan dengan kebijakan nasional, serta pertimbangan sektor dan negara tujuan investasi dapat memengaruhi proses persetujuan, waktu pelaksanaan, dan realisasi rencana investasi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, minat investasi yang telah dijejaki secara komersial masih memerlukan persetujuan tambahan di tingkat otoritas Tiongkok, sehingga memperpanjang siklus realisasi.
- Keempat, meningkatnya inisiatif langsung pelaku usaha Tiongkok untuk melakukan pendekatan investasi ke Indonesia tanpa pendampingan institusional yang memadai turut menimbulkan tantangan tersendiri. Ketika menghadapi kendala teknis di lapangan, seperti perizinan, regulasi sektoral, atau tata kelola investasi, kerap muncul kesenjangan pemahaman dan potensi misinformasi mengenai kebijakan dan kondisi investasi di Indonesia. Situasi ini dapat memengaruhi persepsi investor serta menurunkan tingkat keberlanjutan minat investasi apabila tidak segera ditangani melalui klarifikasi dan pendampingan yang tepat.
- Kelima, dari sisi domestik, kendala internal di Indonesia, seperti kesulitan pembebasan lahan, proses administrasi perizinan pembangunan pabrik manufaktur, serta prosedur birokrasi yang relatif panjang dan kompleks di tingkat pusat dan daerah, juga memengaruhi kecepatan dan kepastian realisasi investasi. Kendala ini berada di luar kendali langsung KBRI Beijing, namun berdampak pada persepsi dan keputusan akhir investor Tiongkok terhadap kelayakan dan daya tarik investasi di Indonesia.



Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian IK diplomasi ekonomi di sektor investasi, langkah perbaikan perlu diarahkan pada dua sasaran utama: (i) peningkatan kualitas pipeline investasi sejak tahap awal penjangkauan, dan (ii) penguatan kepastian serta kecepatan tindak lanjut melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan. Dengan demikian, diplomasi investasi tidak hanya menghasilkan daftar minat, tetapi mendorong komitmen yang kredibel dan berpotensi direalisasikan.

- Pertama, pendalaman substansi dan uji kelayakan mitra secara berlapis merupakan prasyarat untuk menekan risiko keterlibatan pihak perantara dan meningkatkan kredibilitas calon investor. Pendekatan ini mencakup verifikasi legalitas, kapasitas finansial, rekam jejak, struktur kepemilikan, serta, yang paling penting, memastikan keterlibatan langsung investor dan pemangku keputusan utama. Dengan memperkuat *screening* sejak awal, KBRI Beijing dapat memfokuskan sumber daya pada investor yang memiliki komitmen dan kemampuan realisasi, sekaligus mengurangi biaya diplomasi terhadap penjangkauan yang bersifat spekulatif.
- Kedua, kombinasi pendekatan formal dan informal perlu dijadikan standar kerja untuk membaca konteks kebijakan dan kesiapan investasi di Tiongkok. Jalur formal diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, dokumentasi, dan legitimasi proses, sementara jalur informal berfungsi sebagai *early signal* untuk memahami dinamika internal perusahaan, posisi asosiasi industri, serta konteks kebijakan *outbound investment* yang memengaruhi keputusan investasi. Kombinasi ini meningkatkan ketepatan strategi pendekatan, mempercepat klarifikasi, dan membantu memetakan risiko waktu realisasi.
- Ketiga, untuk mengatasi kesenjangan pemahaman dan potensi misinformasi, IIPC Beijing bersama KBRI Beijing perlu memperkuat peran proaktif dalam penyampaian informasi resmi, akurat, dan terkini mengenai kebijakan serta prosedur investasi di Indonesia. Penguatan ini idealnya dilakukan melalui kanal terkoordinasi (misalnya paket informasi tematik, *one stop information*, dan materi standar) sehingga calon investor memperoleh rujukan yang konsisten sejak tahap awal. Langkah ini akan meningkatkan kualitas kesiapan investor, mengurangi friksi dalam proses tindak lanjut, serta memperkecil risiko ekspektasi yang tidak selaras dengan kerangka regulasi Indonesia.
- Keempat, penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di Indonesia serta fungsi-fungsi teknis di KBRI Beijing menjadi kunci untuk memastikan bahwa fasilitas investasi berjalan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas. Koordinasi ini diperlukan untuk mempercepat penyelesaian isu lintas sektor, seperti perizinan, kesiapan lahan, insentif, dan persyaratan teknis, serta menyelaraskan agenda investasi dengan prioritas nasional (hilirisasi, ekonomi hijau, industri strategis). Dengan koordinasi yang lebih kuat, tindak lanjut pascapenjangkauan dapat dilakukan lebih cepat, pesan kebijakan lebih konsisten, dan peluang investasi lebih mudah dikonversi dari minat menjadi komitmen yang dapat ditindaklanjuti.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, kinerja diplomasi ekonomi KBRI Beijing di sektor inbound investasi ke Indonesia akan dipengaruhi oleh arah kebijakan pembangunan Tiongkok yang menekankan pertumbuhan berkualitas (*new qualitative growth*), melalui penguatan konsumsi domestik dan



peningkatan investasi domestik pada sektor-sektor unggulan. Fokus kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi alokasi investasi ke luar negeri, sehingga Indonesia perlu secara aktif menyelaraskan prioritas dan penawaran investasinya agar tetap relevan dalam strategi global investor Tiongkok.

Dalam konteks tersebut, perencanaan kinerja dan program prioritas KBRI Beijing akan diarahkan pada penyelarasan agenda inbound investment Indonesia dengan sektor-sektor prioritas Tiongkok, antara lain industri manufaktur bernilai tambah, kendaraan listrik dan energi bersih, ekonomi digital, infrastruktur strategis, serta sektor berbasis teknologi.



The Next Chapter Business Forum, October 2025

Direct Investment Realization in Manufacturing, 2020 - 2024 in USD billion



No.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Chlor Alkali Forum, November 2025



IKU. S.1.3. Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Beijing

Kinerja diplomasi di sektor pariwisata diukur berdasarkan relevansinya terhadap peningkatan minat kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga manfaat diplomasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas di tanah air. Potensi kunjungan wisatawan mancanegara digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat minat wisatawan potensial, yaitu WNA yang memiliki ekspektasi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia setelah melihat, menghadiri, atau berpartisipasi dalam kegiatan promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI atau kegiatan promosi pihak lain dengan keterlibatan Perwakilan RI.

Ruang lingkup indikator ini mencakup pengukuran minat wisatawan potensial dari negara akreditasi yang menunjukkan ekspektasi tinggi untuk berkunjung ke Indonesia. Tingkat ekspektasi diukur melalui survei yang mencerminkan tingkat persetujuan responden, mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju, terhadap pernyataan bahwa promosi Indonesia telah meningkatkan minat berkunjung. Tingkat potensi kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa promosi Indonesia berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia.

Penghitungan IK 3 dilakukan dengan membandingkan jumlah responden yang menyatakan berminat untuk berkunjung ke Indonesia terhadap jumlah total responden yang mengisi survei, kemudian dikalikan 100 persen. Perhitungan ini mencerminkan persentase tingkat minat wisatawan mancanegara potensial terhadap kunjungan ke Indonesia sebagai hasil dari kegiatan promosi pariwisata dan budaya yang difasilitasi oleh Perwakilan RI.

Target dan realisasi capaian Perwakilan RI selanjutnya menjadi kontribusi langsung terhadap target dan realisasi kinerja Pusat, sehingga pelaksanaan diplomasi pariwisata di Perwakilan RI terintegrasi dalam pencapaian kinerja nasional di sektor pariwisata.

Informasi Kinerja

Capaian IK S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing	Jumlah responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia	280
	Jumlah responden yang mengisi survei	290



Realisasi	100%
Target	100%
Capaian	100%
Batas Toleransi	120%

Pada tahun 2025, realisasi IK S1.3 “Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing” tercatat sebesar 95 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen, dengan batas toleransi capaian 120 persen.

Terdapat 280 jumlah responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia dari 290 jumlah responden yang mengisi survei.

Perbandingan Kinerja

Terdapat perubahan perhitungan realisasi IK S.1.3 dari periode 2023-2024. Pada tahun 2025 realisasi diukur secara spesifik dengan membandingkan jumlah responden yang menyatakan berminat untuk berkunjung ke Indonesia terhadap jumlah total responden yang mengisi survei, kemudian dikalikan 100 persen.

Catatan:

Sebagai catatan, pada periode sebelumnya pengukuran IK S1.3 terdiri atas dua Sub-IKU. Sub-IKU 1, yaitu *Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia*, mengukur ekspektasi wisatawan melalui skala penilaian 1–5, di mana level 4–5 merepresentasikan ekspektasi tinggi bahwa promosi Indonesia telah meningkatkan minat berkunjung. Sub-IKU ini memiliki bobot 70 persen, mengingat pelaksanaan promosi pariwisata dan budaya merupakan bagian langsung dari tugas diplomasi yang dilaksanakan oleh KBRI Beijing.

Sementara itu, Sub-IKU 2, yaitu *Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia*, mengukur jumlah aktual wisatawan asing yang melakukan perjalanan wisata ke Indonesia. Sub-IKU ini memiliki bobot 30 persen, karena capaian indikator tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, melainkan merupakan hasil kontribusi kolektif berbagai pemangku kepentingan serta dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penyederhanaan pengukuran pada tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan keterukuran dan relevansi indikator terhadap peran langsung Perwakilan RI dalam diplomasi pariwisata,



sekaligus memastikan keselarasan antara kegiatan promosi yang dilaksanakan dan capaian kinerja yang diukur.

Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
S1.3	Target	9%	100%	100%
	Realisasi	108.835%	103.49%	100%
	Capaian	120%	103.49%	100%
Komponen 1	Target	95%	100%	280 (Jumlah responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia)
	Realisasi	100%	100%	
	Capaian	109.68%	100%	
Komponen 2	Target	253.000	1.000.000	290 (Jumlah responden yang mengisi survei)
	Realisasi	707.347	1.116.197	
	Capaian	120%	111.62%	

Tabel:

Capaian IK S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing pada tahun 2025 dianalisis secara komparatif dengan capaian tahun 2024 dan 2023 untuk melihat tren kinerja serta efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Target IK S1.3 pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 persen, sama dengan target tahun 2024. Penetapan target ini didasarkan pada hasil pemantauan capaian tahun sebelumnya yang melampaui target, sekaligus dimaksudkan untuk memacu peningkatan kinerja diplomasi pariwisata melalui penetapan target yang menantang namun tetap *achievable*.

Pada tahun 2025, jumlah responden yang menyatakan berminat untuk berkunjung ke Indonesia tercatat sebanyak 68 orang dari 68 orang yang disurvei. Penetapan target dan realisasi tersebut mempertimbangkan intensitas kegiatan promosi pariwisata yang diselenggarakan oleh KBRI Beijing serta aspek teknis pelaksanaan dan pengisian survei. Secara keseluruhan, tren capaian periode 2023–2025 menunjukkan bahwa upaya KBRI Beijing dalam mendorong inbound tourism ke Indonesia berjalan efektif dan memberikan dampak yang nyata.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi pada tahun 2025 tidak terlepas dari kombinasi faktor eksternal yang kondusif serta penguatan peran diplomasi pariwisata yang dijalankan oleh KBRI Beijing



secara adaptif dan terarah. Capaian yang memenuhi target mencerminkan meningkatnya minat wisatawan mancanegara, khususnya dari Tiongkok, terhadap Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan.

Salah satu faktor pendukung utama adalah meningkatnya konektivitas penerbangan langsung (*direct flights*) antara Tiongkok dan Indonesia. Hingga tahun 2025, terdapat sekitar 15 rute penerbangan langsung yang menghubungkan berbagai kota besar di Tiongkok dengan destinasi utama di Indonesia, terutama Bali dan Jakarta, disertai penambahan frekuensi penerbangan. Peningkatan konektivitas ini secara signifikan menurunkan hambatan perjalanan (*travel friction*) dan mendorong peningkatan minat wisatawan untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata. Dampak positifnya tercermin dari data kunjungan, di mana sepanjang Januari–September 2025 jumlah wisatawan asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia mencapai sekitar 1,012 juta orang, meningkat hampir 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, eksposur destinasi wisata Indonesia di media sosial dan platform digital Tiongkok turut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan minat berkunjung. Destinasi seperti Gunung Bromo, Borobudur, dan Bali semakin sering menjadi konten viral di berbagai platform digital Tiongkok, sehingga memperluas jangkauan promosi Indonesia secara organik dan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang unik dan beragam. Viralisasi konten tersebut berfungsi sebagai *soft promotion* yang melengkapi upaya promosi formal melalui diplomasi pariwisata.

Faktor lain yang memperkuat capaian adalah posisi Bali sebagai magnet utama wisatawan Tiongkok, yang terus mempertahankan daya tariknya melalui kombinasi keindahan alam, kesiapan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, serta kemudahan akses. Bali juga berperan sebagai *gateway* bagi wisatawan untuk menjelajahi destinasi lain di Indonesia, sehingga mendorong potensi kunjungan lanjutan ke wilayah Jawa dan kawasan Indonesia timur.

Keunikan dan keragaman budaya Indonesia turut menjadi nilai tambah dalam promosi pariwisata. Tradisi, seni, dan kekayaan budaya yang ditampilkan dalam berbagai kegiatan promosi dan event budaya yang difasilitasi oleh KBRI Beijing memperkuat diferensiasi Indonesia dibandingkan destinasi lain. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan *destination awareness*, tetapi juga membangun *emotional attachment* wisatawan potensial terhadap Indonesia.

Dari sisi internal, keberhasilan capaian juga didukung oleh intensifikasi kegiatan promosi pariwisata dan budaya yang lebih terfokus dan terintegrasi, baik melalui partisipasi dalam pameran pariwisata, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, maupun pemanfaatan momentum event budaya. Pendekatan ini memungkinkan KBRI Beijing menjangkau segmen wisatawan potensial yang lebih spesifik serta meningkatkan kualitas respon survei yang menjadi dasar pengukuran IK.

Sejumlah capaian strategis tahun 2025:

KBRI Beijing telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mempromosikan pariwisata dan budaya Indonesia sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah pelaksanaan *Sales Mission* Pemerintah Provinsi Bali yang memperoleh respons dan animo tinggi dari



masyarakat serta pelaku industri pariwisata dan bisnis di Tiongkok. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat kehadiran peserta, antusiasme dalam sesi presentasi dan diskusi, serta munculnya berbagai pertanyaan dan penajakan kerja sama selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, *Indonesia Gourmet Festival* diselenggarakan di Hotel Hyatt sebagai bagian dari promosi budaya dan kuliner Indonesia, sekaligus dalam rangka memperingati 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia–Tiongkok. Festival ini menghadirkan beragam hidangan khas Nusantara, seperti rendang, gado-gado, soto, sop buntut, serta jajanan pasar tradisional, yang disiapkan langsung oleh koki profesional dari Indonesia untuk memperkenalkan cita rasa autentik Indonesia kepada para pengunjung.

Sebagai salah satu *highlight* utama, Kementerian Pariwisata RI dengan dukungan KBRI Beijing dan INACHAM menyelenggarakan *Wonderful Indonesia Business Matching* pada 10 September 2025. Kegiatan ini mencakup *Indonesia Tourism Investment Meeting and Business Matching* yang menawarkan peluang kerja sama investasi, serta *Wonderful Indonesia Business Matching Go Beyond Ordinary* yang mempertemukan perusahaan wisata Indonesia dan Tiongkok sekaligus mempromosikan destinasi unggulan Indonesia. Business matching tersebut menghasilkan potensi 12.984 *potential pax*, setara dengan potensi devisa sekitar Rp254,5 miliar (\pm US\$15,4 juta), dengan mengacu pada *Average Spending per Arrival* (ASPA) wisatawan asal Tiongkok tahun 2024 sebesar US\$1.188,11.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing melaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis sepanjang tahun 2025 yang berkontribusi langsung terhadap realisasi target Indikator Kinerja. Kegiatan tersebut menjadi instrumen diplomasi operasional untuk menghasilkan output yang terukur, karena dirancang berdasarkan analisis yang matang, pendekatan yang *targeted*, serta masukan dari pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya. Rincian program pendukung diantaranya:

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Sales Mission Pemprov Bali	KBRI Beijing mendukung kegiatan promosi dan penajakan kerja sama oleh Pemerintah Provinsi Bali pada 27 Mei 2025 di Beijing, untuk memperkenalkan potensi pariwisata, investasi, dan produk unggulan daerah kepada mitra di Tiongkok. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, menarik minat investasi, serta memperluas kerja sama ekonomi antara Bali dan Tiongkok.
2	Little Diplomats bersama Yitian Han School	Dalam rangka promosi pariwisata, seni, dan budaya Indonesia, KBRI Beijing menyelenggarakan kegiatan <i>Little Diplomats</i> bersama murid-murid Yitian Han Education Group's Yitian Han School di KBRI Beijing pada 18 Mei 2025. Program ini memperkenalkan budaya, bahasa, dan potensi alam Indonesia



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

No.	Kegiatan	Keterangan
		kepada generasi muda, sekaligus memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
3	Ambassador's Treasure Dinner	Pada 4–5 Juni 2025, KBRI Beijing bekerja sama dengan Beijing Radio and Television (BRTV) menyelenggarakan program <i>Ambassador's Treasure Dinner</i> untuk memperkuat hubungan dengan media, meningkatkan pertukaran budaya, serta mendorong kolaborasi dalam produksi konten dan penyiaran.
4	Indonesia Gourmet Festival	Pada 9–23 Juli 2025, KBRI Beijing bekerja sama dengan Hotel Grand Hyatt Beijing menyelenggarakan <i>Indonesia Gourmet Festival</i> dalam rangka peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia–Tiongkok. Festival ini menjadi bagian dari promosi budaya dan kuliner Indonesia kepada masyarakat Tiongkok.
5	Take Me Out to Bali (Kuaishou)	Video promosi pariwisata <i>Take Me Out to Bali</i> diproduksi bekerja sama dengan platform media sosial Tiongkok Kuaishou. Video menampilkan 6 influencers Tiongkok dalam format kreatif yang memperkenalkan pesona Bali kepada audiens Tiongkok, khususnya generasi muda, sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi unggulan di pasar Tiongkok.
6	Business Roundtable: Unlocking Indonesia's Tourism Opportunities	KBRI Beijing bersama Kementerian Pariwisata menyelenggarakan <i>Business Roundtable</i> pada 8 Agustus 2025 untuk memperkenalkan destinasi wisata baru di Indonesia serta peluang investasi sektor <i>hospitality</i> kepada pelaku usaha Tiongkok.
7	Indonesia Fair – Gempita Merdeka 2025	KBRI Beijing menyelenggarakan <i>Indonesia Fair – Gempita Merdeka 2025</i> pada 17 Agustus 2025 sebagai program promosi terintegrasi produk, ekonomi kreatif, pariwisata, dan budaya, sekaligus peringatan HUT RI ke-80 dan 75 Tahun Indonesia–Tiongkok. Kegiatan dikunjungi sekitar 6.000 orang dengan transaksi B-to-C mencapai ±Rp460 juta. Terdapat lebih dari 350 video berbagi di media sosial Tiongkok dengan total tayangan sekitar 89 juta kali (per 20 Agustus 2025).
8	ASEAN Ladies Circle: "A Taste of Tradition, Dance and Culture"	KBRI Beijing bersama DWP menjadi tuan rumah ASEAN Ladies Circle di Wisma Duta Besar RI pada 31 Oktober 2025. Program bertema budaya ini mempromosikan tari Indonesia serta produk jamu sebagai warisan budaya tak benda. Acara dihadiri <i>spouse</i> Duta Besar ASEAN dan negara sahabat, diplomat perempuan, serta perwakilan ASEAN-China Centre.



No.	Kegiatan	Keterangan
9	Wonderful Indonesia Business Matching	Kementerian Pariwisata RI, KBRI Beijing, dan INACHAM menyelenggarakan <i>Wonderful Indonesia Business Matching</i> pada 10 September 2025. Kegiatan terdiri dari dua sesi: (1) <i>Indonesia Tourism Investment Meeting and Business Matching</i> untuk peluang investasi, dan (2) <i>Go Beyond Ordinary</i> yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Indonesia–Tiongkok serta mempromosikan destinasi unggulan Indonesia.

Kendala dan Tantangan

Dalam upaya mencapai Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi, KBRI Beijing menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional yang memengaruhi intensitas serta efektivitas promosi pariwisata Indonesia di Tiongkok.

- Pertama, kondisi domestik Indonesia merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi persepsi dan keputusan wisatawan Tiongkok untuk berkunjung. Stabilitas keamanan, kenyamanan, serta konsistensi kebijakan pariwisata menjadi prasyarat utama dalam menarik minat wisatawan. Dalam konteks persaingan regional, country brand Indonesia di pasar Tiongkok masih relatif lebih lemah dibandingkan destinasi seperti Thailand, Singapura, Viet Nam, Jepang, dan Korea, yang telah memiliki citra pariwisata yang kuat dan konsisten. Kondisi ini menuntut upaya berkelanjutan untuk menjaga situasi domestik yang kondusif sekaligus memperkuat narasi positif Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan menarik.
- Kedua, keterbatasan konektivitas udara menjadi tantangan tersendiri. Dibandingkan dengan negara pesaing di kawasan, jarak geografis Indonesia yang relatif lebih jauh dari Tiongkok, khususnya dari kota-kota di Tiongkok bagian utara, berdampak pada biaya dan waktu perjalanan. Kondisi ini diperkuat oleh terbatasnya frekuensi penerbangan langsung, serta minimnya variasi maskapai dan promosi tarif penerbangan. Sebagai ilustrasi, saat ini hanya terdapat satu maskapai yang melayani penerbangan langsung dari Beijing ke Indonesia dengan frekuensi sekitar tiga kali per minggu, sehingga pilihan perjalanan wisatawan menjadi lebih terbatas.
- Ketiga, keterbatasan bahan promosi pariwisata turut memengaruhi efektivitas diplomasi pariwisata. Ketersediaan materi promosi, baik dalam bentuk barang promosi khas Indonesia maupun materi informasi seperti *flyer*, video, dan konten digital berbahasa Mandarin, masih belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Keterbatasan ini berdampak pada optimalisasi penyampaian pesan promosi, terutama dalam kegiatan *outreach* di luar kota-kota utama.
- Keempat, luasnya wilayah kerja KBRI Beijing menjadi tantangan operasional yang signifikan. Wilayah akreditasi mencakup 20 provinsi dan 3 kotamadya yang memiliki karakteristik demografis, ekonomi, dan minat wisata yang beragam. Luasnya cakupan wilayah tersebut membatasi intensitas kehadiran fisik dan promosi langsung, sehingga diperlukan strategi promosi yang lebih selektif dan berbasis prioritas wilayah untuk memastikan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.



Upaya Perbaikan

Untuk menjawab tantangan dalam pencapaian Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata, KBRI Beijing akan memperkuat pendekatan diplomasi pariwisata yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis pasar. Upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan daya jangkau promosi, penguatan pesan kebijakan, serta peningkatan kualitas wisatawan yang ditargetkan.

Pertama, penguatan koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan di Indonesia dan Tiongkok menjadi fondasi utama. KBRI Beijing akan mengintensifkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, maskapai penerbangan, serta asosiasi pariwisata di Tiongkok. Sinergi lintas pemangku kepentingan ini ditujukan untuk memastikan keselarasan pesan promosi, peningkatan konektivitas, serta penyusunan paket wisata yang kompetitif dan sesuai dengan preferensi pasar Tiongkok.

Kedua, optimalisasi pemanfaatan media sosial dan platform digital buatan Tiongkok akan terus diintensifkan untuk memperluas jangkauan promosi. KBRI Beijing akan memanfaatkan platform seperti *Kuaishou*, *Weibo*, dan *Douyin* sebagai sarana promosi utama, dengan pendekatan konten yang disesuaikan dengan karakter dan preferensi audiens Tiongkok. Sebagai contoh, program “Kuaishou Take Me Out to Bali” yang telah ditonton lebih dari 800 juta kali menunjukkan efektivitas promosi digital berbasis platform lokal dalam membangun *awareness* dan minat kunjungan wisata.

Ketiga, untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kunjungan wisata, KBRI Beijing akan mengintensifkan pelaksanaan familiarization trip (fam trip) bagi *tour operator* dan *influencer* terpilih dari Tiongkok. Program ini diarahkan untuk menjangkau wisatawan berkualitas dan berkelanjutan (*sustainable and high-quality tourists*), yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada peningkatan lama tinggal, belanja wisata, serta distribusi kunjungan ke destinasi di luar Bali.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, kinerja diplomasi ekonomi KBRI Beijing di sektor pariwisata akan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik kawasan, kondisi ekonomi domestik Tiongkok, serta perubahan preferensi wisatawan. Ketegangan hubungan Tiongkok–Jepang berpotensi mendorong sebagian wisatawan Tiongkok mengalihkan tujuan perjalanan ke destinasi alternatif yang dinilai lebih netral dan ramah, termasuk Indonesia. Pergeseran ini membuka peluang terjadinya *tourism diversion* yang dapat dimanfaatkan Indonesia, khususnya pada segmen wisata alam, budaya, dan rekreasi.

Dari sisi ekonomi, penguatan nilai tukar Renminbi (RMB) terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan daya beli wisatawan Tiongkok untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, sehingga mendorong kenaikan *outbound tourism*. Selain itu, tren meningkatnya *sport tourism* di Tiongkok, seiring dengan tumbuhnya kelas menengah, gaya hidup sehat, dan minat terhadap kegiatan olahraga berbasis alam, menciptakan peluang baru bagi Indonesia untuk



mempromosikan destinasi seperti lari maraton, selancar, *trail running*, bersepeda, serta *adventure sports* yang terintegrasi dengan keindahan alam dan budaya lokal.

Dalam konteks tersebut, perencanaan kinerja dan program prioritas KBRI Beijing akan diarahkan pada penguatan promosi pariwisata yang selaras dengan tren pasar Tiongkok, termasuk pengembangan narasi *sport tourism*, *eco-tourism*, dan pariwisata berkelanjutan, di samping destinasi unggulan konvensional.

Strategi ini akan didukung oleh optimalisasi promosi digital melalui platform media sosial Tiongkok, penguatan kerja sama dengan maskapai dan pelaku industri pariwisata, serta peningkatan kualitas *familiarization trip* bagi *tour operator* dan *influencer*. Pendekatan tersebut menjadi dasar penetapan target IK yang menantang namun tetap realistis, guna memastikan kontribusi diplomasi pariwisata KBRI Beijing terhadap pertumbuhan pariwisata nasional yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK S.1.3



Wonderful Indonesia Investment Meeting, September 2025



Indonesia Fair, Agustus 2025



S2 Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Meningkat

Citra positif Indonesia merupakan persepsi dan keyakinan aktor internasional terhadap Indonesia yang terbentuk dari pola perilaku Indonesia dalam pergaulan internasional. Pola perilaku tersebut dibangun melalui pemanfaatan kekuatan nasional, baik yang bersifat *hard power* maupun *soft power*, serta tercermin dalam kebijakan luar negeri dan praktik diplomasi yang dijalankan. Citra merupakan salah satu dampak akhir (*ultimate outcome*) dari pelaksanaan diplomasi dan kebijakan luar negeri, sehingga pembentukan citra positif menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan internasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berpengaruh.

Indeks Citra Indonesia merupakan instrumen pengukuran yang menggambarkan kesan dan pandangan masyarakat internasional terhadap Indonesia, yang dilaksanakan secara periodik setiap triwulan. Indeks ini disusun berdasarkan hasil survei yang mengukur tiga dimensi utama, yaitu *Tourism & Socio-Culture*, *Economy*, serta *Governance and Rule of Law*. Data Indeks Citra Indonesia diperoleh melalui kuesioner yang disebar oleh seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri, kecuali Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), kepada responden Warga Negara Asing di negara akreditasi atau wilayah kerja masing-masing perwakilan. Hasil survei tersebut diolah melalui aplikasi pengelolaan data Citra Indonesia di dunia internasional

Responden survei merupakan WNA di negara akreditasi atau wilayah kerja perwakilan yang mengetahui Indonesia, dengan jumlah minimal responden yang ditetapkan berdasarkan status perwakilan. Untuk setiap perwakilan, jumlah minimal responden ditetapkan sebesar 25 responden pada masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV, serta 100 responden untuk pengukuran tahunan, kecuali bagi perwakilan yang berada pada kategori rawan dan berbahaya. Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan metodologi survei yang ditetapkan. Adapun nilai Indeks Citra Indonesia per triwulan bersifat kumulatif, dihitung berdasarkan akumulasi jumlah responden dan jawaban survei sejak awal pelaksanaan survei pada tahun berjalan hingga akhir triwulan yang bersangkutan.

Pengkategorian Indeks Citra Indonesia

Interval	Kategori Indeks
4.21 – 5.00	Sangat Baik
3.41 – 4.20	Baik
2.61 – 3.40	Cukup
1.81 – 2.60	Kurang
1.00 – 1.80	Tidak Baik

Formula penghitungan IKU S.2 adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks citra positif Indonesia} = \frac{\text{Total Indeks Rata} - \text{Rata Seluruh Responden}}{\text{Jumlah Total Responden}}$$



Informasi Kinerja

Capaian IK S2 Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK
Indeks Citra Indonesia	Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden	4.24
	Jumlah Total Responden	568
Realisasi		4.24
Target		4.20
Capaian		4.24

Tabel:

Pada tahun 2025, realisasi IK S.2 Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Beijing tercatat sebesar 4.24, melebihi target 4.07. Terdapat 568 responden terverifikasi yang mengisi survei citra KBRI Beijing, melebihi ketentuan minimal sebanyak 100 orang di dalam manual IKU.

Perbandingan Kinerja

Target, Realisasi, dan Capaian IK Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
S.2	Target	3.95	4.07	4.2
	Realisasi	4.11	4.48	4.24
	Responden	238	834	568

Target IK S.2 Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Meningkat, pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,07, sama dengan target tahun 2024. Penetapan target ini



didasarkan pada hasil pemantauan realisasi dan capaian IK tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data, antara lain kebutuhan penggunaan VPN, keterbatasan teknis pada perangkat *handphone* di Tiongkok dalam mengakses tautan survei, kendala bahasa, serta kondisi pengetatan anggaran pada awal tahun 2025.

Pada tahun 2025, jumlah responden survei Indeks Citra Indonesia tercatat sebanyak 568 responden, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 238 responden. Namun demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 834 responden. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh menurunnya intensitas kegiatan promosi dan *outreach* seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran, yang berdampak pada terbatasnya kesempatan pengumpulan responden survei di lapangan.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IK S.2 Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Beijing pada tahun 2025 dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, kultural, dan diplomasi publik yang saling menguatkan. Capaian indikator ini mencerminkan terjaganya persepsi positif masyarakat internasional, khususnya di Tiongkok, terhadap Indonesia sebagai negara yang ramah, berbudaya, dan memiliki peran konstruktif di tingkat regional maupun global.

Salah satu faktor pendukung utama adalah karakteristik responden survei yang sebagian besar merupakan individu yang memiliki ketertarikan, pengalaman, atau keterikatan dengan Indonesia, baik melalui interaksi budaya, pendidikan, pariwisata, maupun kerja sama ekonomi. Basis responden yang telah memiliki *baseline awareness* terhadap Indonesia tersebut memungkinkan pesan diplomasi publik dan promosi yang disampaikan KBRI Beijing diterima secara lebih efektif dan menghasilkan persepsi yang relatif positif.

Selain itu, kegiatan promosi dan diplomasi budaya yang diselenggarakan oleh KBRI Beijing menampilkan kekhasan dan keragaman budaya Indonesia secara konsisten dan kontekstual. Penyajian seni, tradisi, kuliner, dan nilai-nilai budaya Indonesia dalam berbagai kegiatan promosi tidak hanya meningkatkan *awareness*, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan identitas budaya yang kaya dan terbuka. Pendekatan berbasis budaya ini terbukti efektif dalam membangun kedekatan emosional (*emotional affinity*) dengan audiens lokal.

Peran komunitas diaspora Indonesia di Tiongkok juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Diaspora berperan sebagai *natural ambassador* yang secara aktif turut mempromosikan Indonesia melalui jejaring sosial, komunitas, dan kegiatan masyarakat. Keterlibatan diaspora memperluas jangkauan diplomasi publik di luar kegiatan formal perwakilan dan memperkuat persepsi positif Indonesia secara organik.

Faktor lain yang turut memperkuat capaian adalah ikatan historis dan hubungan persahabatan yang panjang antara Indonesia dan Tiongkok. Narasi sejarah, pertukaran budaya, dan hubungan antar masyarakat yang telah terbangun sejak lama memberikan konteks positif dalam penerimaan pesan-pesan diplomasi Indonesia di Tiongkok.



Selain itu, pemberitaan mengenai Indonesia di media Tiongkok yang relatif positif, baik terkait stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, maupun peran Indonesia di kawasan turut membentuk persepsi yang konstruktif di kalangan masyarakat. Lingkungan informasi yang kondusif ini mendukung upaya KBRI Beijing dalam menjaga dan meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing melaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis sepanjang tahun 2025 yang berkontribusi langsung terhadap realisasi target Indikator Kinerja. Kegiatan tersebut menjadi instrumen diplomasi operasional untuk menghasilkan output yang terukur, karena dirancang berdasarkan analisis yang matang, pendekatan yang *targeted*, serta masukan dari pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya. Rincian program pendukung diantaranya:

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Indonesia Updates	Pada 27 Februari 2025, KBRI Beijing menyelenggarakan <i>Media Gathering</i> bertajuk “Kabar Terkini dari Indonesia” yang dihadiri lebih dari 60 jurnalis dari media terkemuka di Tiongkok. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan perkembangan terbaru di Indonesia sekaligus mempererat hubungan komunikasi publik dan media antara Indonesia dan Tiongkok. Selanjutnya, pada 19 Desember 2025, KBRI Beijing kembali melaksanakan INDONESIA UPDATES: “Strengthening Connections, Welcoming New Chapters” di Hotel Millennium Beijing sebagai bentuk akuntabilitas semesteran kepada media dan pemangku kepentingan, sekaligus memperbarui informasi kerja sama RI–RRT selama satu tahun terakhir.
2	Indonesia Fair – Gempita Merdeka 2025	KBRI Beijing menyelenggarakan Indonesia Fair–Gempita Merdeka 2025 pada 17 Agustus 2025 sebagai program promosi terintegrasi produk, ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia dalam rangka HUT ke-80 RI serta 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Tiongkok. Kegiatan ini dikunjungi sekitar 6.000 orang, mencatat transaksi B2C sekitar Rp460 juta, serta menghasilkan lebih dari 350 konten video di media sosial Tiongkok dengan total tayangan sekitar 89 juta kali per 20 Agustus 2025. Indonesia Fair memperkuat branding Indonesia sekaligus mendorong <i>people-to-people connection</i> sebagai fondasi kemitraan strategis komprehensif.
3	Ambassador’s Treasure Dinner	Pada 4–5 Juni 2025, KBRI Beijing bekerja sama dengan Beijing Radio and Television (BRTV) menyelenggarakan Ambassador’s Treasure Dinner sebagai program diplomasi budaya dan media. Kegiatan ini bertujuan memperkuat hubungan dengan kalangan media setempat, mendorong



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

No.	Kegiatan	Keterangan
		pertukaran budaya, serta membuka peluang kolaborasi dalam produksi konten dan penyiaran.
4	Indonesia Gourmet Festival	Pada 9–23 Juli 2025, KBRI Beijing bekerja sama dengan Hotel Grand Hyatt Beijing menyelenggarakan Indonesia Food Festival sebagai bagian dari promosi budaya dan kuliner Indonesia sekaligus rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Tiongkok. Festival ini menjadi instrumen diplomasi kuliner untuk memperkuat citra Indonesia di kalangan masyarakat dan komunitas internasional di Beijing.
5	Forum Bisnis Ekraf: Film dan Animasi	Pada 17 Desember 2025, KBRI Beijing melaksanakan Forum Bisnis Ekonomi Kreatif bertajuk “Exploring Indonesia–China’s Potential Cooperation in the Creative Industries: A Business Dialogue on Film and Animation” di Warisan Restaurant, Beijing. Forum ini mempertemukan pelaku industri film dan animasi Tiongkok dengan pemangku kepentingan Indonesia, termasuk Kemene kraf, AINAKI, IIPC Beijing, serta produser Indonesia. Dari pihak Tiongkok turut hadir produser film dan pelaku teknologi AI, sehingga membuka peluang kerja sama konkret di sektor kreatif bernilai tambah tinggi.
6	Resepsi Diplomatik di Beijing dan Mongolia	Dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, KBRI Beijing menyelenggarakan resepsi diplomatik di Beijing pada 24 Oktober 2025 yang dihadiri Wakil Menlu RRT H.E. Sun Weidong serta pejabat tinggi Partai. Kegiatan dihadiri sekitar 1.000 tamu undangan, termasuk 30 duta besar negara sahabat, pejabat RI–RRT, pimpinan korporasi, akademisi, tokoh masyarakat, media, serta diaspora Indonesia. Selain itu, resepsi diplomatik juga dilaksanakan di Ulaanbaatar, Mongolia pada 19 November 2025 sebagai bagian penguatan jejaring diplomasi di wilayah rangkapan.
7	Soft Launching Film “Assalamualaikum Beijing 2”	KBRI Beijing bekerja sama dengan Imperial Pictures menyelenggarakan pemutaran eksklusif “Assalamualaikum Beijing 2: Lost in Ningxia” di Wisma Duta sebagai bentuk diplomasi budaya melalui industri kreatif. Acara dihadiri sekitar 200 peserta dari jajaran pemain, rumah produksi, pelaku industri perfilman Tiongkok, media, staf KBRI Beijing, perwakilan Bank Indonesia, mahasiswa, serta masyarakat Indonesia di Beijing.
8	Partisipasi Pameran Seni Lukis Internasional di Beijing	Pada 17–20 Mei 2025, KBRI Beijing berpartisipasi dalam The Charms of Beijing International Art Exchange Exhibition serta pameran ke-2 jejaring <i>Western Returned Scholars Association</i> Asia Tenggara dan Selatan. Karya pelukis Indonesia dipamerkan bersama karya seniman dari Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Partisipasi ini



No.	Kegiatan	Keterangan
		mencerminkan pengakuan terhadap seni Indonesia sekaligus bentuk konkret diplomasi budaya di ruang publik internasional.

Kendala dan Tantangan

Dalam upaya meningkatkan Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi, KBRI Beijing menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang bersifat teknis, operasional, serta struktural, yang memengaruhi proses pengumpulan data survei maupun efektivitas diplomasi publik secara keseluruhan.

Pertama, kendala teknis dalam pelaksanaan survei Indeks Citra menjadi tantangan yang cukup signifikan. Kebutuhan penggunaan VPN untuk mengakses tautan survei, keterbatasan kompatibilitas pada perangkat *handphone* buatan Tiongkok, serta kendala teknis dalam membuka atau mengisi kuesioner secara daring berdampak pada partisipasi responden. Kondisi ini memerlukan pendampingan tambahan dan berpotensi membatasi jumlah responden yang dapat dijangkau secara optimal.

Kedua, kendala bahasa juga memengaruhi efektivitas pengisian survei dan penyampaian pesan diplomasi publik. Meskipun kuesioner telah disiapkan secara sistematis, perbedaan tingkat pemahaman Bahasa, khususnya bahasa Inggris atau Indonesia, di kalangan responden WNA di Tiongkok dapat memengaruhi kualitas jawaban dan tingkat partisipasi. Hal ini menuntut upaya ekstra dalam penyederhanaan pesan serta penyesuaian materi komunikasi ke dalam bahasa Mandarin yang kontekstual.

Ketiga, pengetatan anggaran yang terjadi pada awal tahun 2025 turut menjadi tantangan operasional. Keterbatasan anggaran berdampak pada berkurangnya intensitas kegiatan promosi, *outreach*, dan diplomasi publik secara langsung, yang selama ini menjadi salah satu sarana utama dalam menjaring responden dan membangun persepsi positif secara berkelanjutan. Kondisi ini menuntut KBRI Beijing untuk lebih selektif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Keempat, tingkat persaingan yang semakin ketat dengan negara lain dalam membangun citra positif di mata publik Tiongkok juga menjadi tantangan tersendiri. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan negara-negara Eropa secara aktif melakukan diplomasi publik dengan dukungan sumber daya yang besar, narasi yang terstruktur, serta pemanfaatan media digital yang masif. Persaingan ini menuntut Indonesia untuk terus memperkuat diferensiasi pesan dan konsistensi narasi agar tetap relevan dan menonjol.

Kelima, dinamika persepsi global dan arus informasi digital yang cepat turut memengaruhi pembentukan citra Indonesia. Pemberitaan internasional, isu global, maupun persepsi yang terbentuk dari kejadian di luar konteks diplomasi dapat dengan cepat memengaruhi opini public, misal seperti bencana alam, dan kriminalitas. Dalam lingkungan informasi yang sangat dinamis ini, upaya menjaga citra positif memerlukan respons yang cepat, narasi yang adaptif, serta konsistensi pesan lintas platform.



Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam peningkatan Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi, KBRI Beijing akan mengarahkan upaya perbaikan pada penguatan efektivitas komunikasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta inovasi diplomasi publik berbasis digital dan kemitraan.

Pertama, guna mengatasi kendala teknis pengisian survei, KBRI Beijing akan meningkatkan pendekatan assisted survey melalui pendampingan langsung pada kegiatan promosi dan outreach.

Kedua, untuk menjawab kendala bahasa, KBRI Beijing akan memperkuat penyediaan materi komunikasi dan kuesioner berbahasa Mandarin yang disesuaikan secara kontekstual, baik dalam kegiatan promosi maupun dalam pelaksanaan survei Indeks Citra.

Ketiga, dalam menghadapi pengetatan anggaran, KBRI Beijing akan mengoptimalkan pendekatan low-cost–high-impact diplomacy melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital Tiongkok, kolaborasi dengan komunitas diaspora, serta sinergi dengan mitra strategis dan sponsor non-anggaran. Pendekatan ini memungkinkan diplomasi publik tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Keempat, untuk merespons persaingan citra dengan negara lain, KBRI Beijing akan memperkuat diferensiasi narasi Indonesia, dengan menonjolkan keunikan budaya, nilai kebhinekaan, peran Indonesia sebagai middle power yang konstruktif, serta kontribusi Indonesia dalam isu-isu global. Konsistensi pesan lintas platform dan kegiatan akan dijaga melalui pendekatan integrated communication.

Kelima, dalam menghadapi dinamika informasi global yang cepat, KBRI Beijing akan meningkatkan kapasitas monitoring dan respons komunikasi strategis, termasuk pemanfaatan jejaring media dan opinion leaders lokal. Langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa narasi positif Indonesia tetap terjaga dan dapat direspons secara adaptif terhadap isu yang berkembang.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, pembentukan dan penguatan Citra Positif Indonesia di negara akreditasi akan semakin dipengaruhi oleh dinamika lingkungan informasi digital, persaingan diplomasi publik antarnegara yang menuntut pendekatan yang lebih inovatif dan terukur. Arus informasi yang cepat, algoritma platform digital, serta meningkatnya ekspektasi audiens terhadap konten yang autentik dan relevan mengharuskan diplomasi publik Indonesia beradaptasi secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, perencanaan program kerja KBRI Beijing pada periode mendatang dapat diarahkan pada penguatan diplomasi publik berbasis digital dan komunitas, termasuk optimalisasi platform media sosial Tiongkok, kolaborasi dengan diaspora dan *opinion leaders* lokal, serta pengembangan konten tematik yang menonjolkan keunggulan Indonesia pada



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

dimensi budaya, dan ekonomi. Selain itu, pendekatan metode pengumpulan data yang lebih adaptif akan menjadi fokus untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pengukuran Indeks Citra.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK S.2



Exploring Indonesia-China's Potential Cooperation in the Creative Industries, Desember 2025



Indonesia Updates, Desember 2025



3.1.2. CUSTOMER PERSPECTIVE

IK C.1. Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI Beijing yang Prima

Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI di luar negeri, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia di luar negeri akan pelayanan dan pelindungan yang responsif, cepat, tanggap, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang prima mencakup pemenuhan kebutuhan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif bagi setiap WNI maupun Warga Negara Asing yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka Sasaran Strategis, pelindungan WNI di luar negeri dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima bertujuan memastikan capaian kinerja Kementerian Luar Negeri RI dalam melindungi WNI sesuai hukum internasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI. Pelindungan WNI mencakup pemberian bantuan informasi, hukum, dan/atau sosial, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018, yaitu:

1. mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; serta
3. dilaksanakan sesuai ketentuan hukum nasional, hukum negara setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Bagi WNI yang berada di luar negeri, pelindungan dan pelayanan merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan RI di luar negeri dan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menegaskan bahwa pemberian pelindungan WNI dan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam konteks ini, aparat pemerintah memiliki peran strategis sebagai pelayan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan publik menjadi cerminan kehadiran negara dan efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) C1 “Pelindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik KBRI Beijing yang Prima” diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. IKU C1.1: Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang diselesaikan.
2. IKU C1.2: Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Beijing.
3. IKU C1.3: Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Beijing.

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut, KBRI Beijing telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dan aspirasi publik secara optimal di wilayah akreditasi. Kegiatan dimaksud meliputi pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian, sosialisasi kekonsuleran kepada WNI, serta kegiatan pelindungan dan pendampingan hukum bagi WNI yang menghadapi permasalahan di wilayah akreditasi. Selain



itu, KBRI Beijing menyediakan layanan hotline perlindungan WNI dan alamat surat elektronik resmi yang berfungsi sebagai sarana respons cepat terhadap permohonan bantuan dan pertanyaan dari WNI.

Analisis IC C1.1: Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang diselesaikan

Penyelesaian kasus WNI di luar negeri mencakup penanganan kasus khusus dan kasus umum yang ditangani oleh Perwakilan RI di luar negeri melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain aparat kepolisian, otoritas keimigrasian, Kementerian Luar Negeri RI, serta instansi berwenang di negara setempat. Penanganan kasus WNI dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar operasional (SOP) yang berlaku, serta berlandaskan peraturan perundang-undangan nasional, hukum negara setempat, dan hukum serta kebiasaan internasional. Mengingat karakteristik setiap kasus berbeda, target waktu penyelesaian ditetapkan secara variatif sesuai tingkat kompleksitas dan urgensinya.

Kasus yang selesai (KS) adalah kasus yang telah ditangani hingga tuntas sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum negara setempat, dan/atau hukum serta kebiasaan internasional yang berlaku, dengan terpenuhinya hak-hak WNI yang bersangkutan. Sementara itu, kasus yang ditangani (KT) adalah seluruh kasus yang dihadapi WNI di luar negeri berdasarkan pengaduan, laporan, pemberitaan, atau informasi yang diterima dari berbagai pihak, sepanjang termasuk dalam lingkup pelayanan dan perlindungan WNI.

Penghitungan Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan dilakukan dengan pembobotan antara Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan sebesar 55 persen dan Persentase Kasus Umum yang diselesaikan sebesar 45 persen. Penetapan bobot tersebut didasarkan pada pertimbangan tingkat urgensi, kompleksitas permasalahan, serta kebutuhan sumber daya dalam penanganan dan penyelesaian masing-masing jenis kasus.

Informasi Kinerja

Capaian IK C.1.1: Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing

Jumlah Kasus Umum WNI yang Ditangani	208
Kasus Umum WNI yang Diselesaikan	202
Jumlah Kasus Khusus WNI yang Ditangani	23
Kasus Khusus WNI yang Diselesaikan	23
Target	90%
Realisasi	99.46%
Capaian	110.51%

Capaian IK C.1.1 Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari total 208 kasus umum WNI yang ditangani, sebanyak 202 kasus berhasil diselesaikan. Sementara itu, untuk kasus khusus, seluruh 23 kasus yang ditangani dapat diselesaikan secara tuntas.



Dengan target penyelesaian sebesar 90 persen, realisasi capaian IK C.1.1 tercatat sebesar 99,46 persen, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 110,51 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas dan responsivitas KBRI Beijing dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan WNI di wilayah akreditasi, baik untuk kasus umum maupun kasus khusus, sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum negara setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Perbandingan Kinerja

Target, Realisasi, dan Capaian IK C.1.1: Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing

	2023	2024	2025
Jumlah Kasus Umum WNI yang Ditangani	N/A	N/A	208
Kasus Umum WNI yang Diselesaikan			202
Jumlah Kasus Khusus WNI yang Ditangani			23
Kasus Khusus WNI yang Diselesaikan			23
Target	80%	83%	90%
Realisasi	93,33%	90,36%	99,46%
Capaian	116,67%	108,87%	110,51%

Target, Realisasi, dan Capaian IK C.1.1 Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing pada periode 2023–2025 menunjukkan tren kinerja yang konsisten meningkat dan melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pada tahun 2023, dengan target sebesar 80 persen, realisasi penyelesaian kasus mencapai 93,33 persen, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 116,67 persen. Pada tahun 2024, target IK C.1.1 dinaikkan menjadi 83 persen dengan realisasi capaian pada tingkat 90,36 persen, sehingga menghasilkan capaian sebesar 108,87 persen.

Penghitungan capaian tahun 2025 dilakukan dengan metode penghitungan yang telah disempurnakan, termasuk pembobotan antara kasus umum dan kasus khusus sesuai tingkat urgensi dan kompleksitas penanganan.

Pada tahun 2025, target kembali dinaikkan secara signifikan menjadi 90 persen, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas dan volume penanganan kasus WNI di wilayah akreditasi. Dari total 208 kasus umum WNI yang ditangani, sebanyak 202 kasus berhasil diselesaikan, sementara seluruh 23 kasus khusus yang ditangani juga dapat diselesaikan secara tuntas. Realisasi penyelesaian kasus mencapai 99,46 persen, menghasilkan capaian kinerja sebesar 110,51 persen. Capaian ini menegaskan kemampuan KBRI Beijing dalam tidak hanya meningkatkan target kinerja, tetapi juga menjaga tingkat penyelesaian kasus yang sangat tinggi secara berkelanjutan.



Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IK C.1.1 Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing pada tahun 2025 dipengaruhi pendekatan operasional perlindungan WNI yang dijalankan secara responsif dan adaptif oleh KBRI Beijing. Capaian yang melampaui target mencerminkan meningkatnya efektivitas sistem penanganan kasus WNI di wilayah akreditasi.

Salah satu faktor pendukung utama adalah karakteristik mayoritas WNI di wilayah akreditasi yang bekerja atau bermukim dengan status dan dasar hukum yang relatif jelas, termasuk keberadaan kontrak kerja yang tertulis dan terverifikasi. Kejelasan hubungan kerja dan status hukum tersebut memudahkan proses klarifikasi, mediasi, serta koordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi permasalahan, sehingga mempercepat penyelesaian kasus dan meminimalkan eskalasi.

Selain itu, meskipun otoritas Tiongkok menerapkan sistem regulasi yang relatif ketat dan rigid, dalam praktiknya aparat setempat menunjukkan tingkat kerja sama yang baik dalam penanganan kasus WNI, khususnya apabila proses dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai prosedur hukum setempat. Hubungan kerja yang terbangun secara berkelanjutan antara KBRI Beijing dan instansi terkait, seperti kepolisian, imigrasi, dan otoritas ketenagakerjaan, berkontribusi pada kelancaran komunikasi dan penyelesaian kasus secara profesional.

Keberhasilan capaian juga didukung oleh penerapan pendekatan perlindungan siaga 24 jam, melalui layanan hotline dan kanal komunikasi resmi yang memungkinkan respons awal secara cepat terhadap pengaduan WNI. Respons dini ini berperan penting dalam mencegah memburuknya situasi, mengamankan posisi WNI sejak awal, serta memastikan bahwa langkah penanganan dilakukan secara proporsional dan sesuai ketentuan.

Dari sisi internal, peningkatan kapasitas dan koordinasi lintas fungsi di KBRI Beijing turut memperkuat efektivitas penanganan kasus. Sinergi antara fungsi konsuler, protokol, politik, dan atase teknis memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga sosial dan administratif. Pendekatan terpadu ini meningkatkan kualitas pendampingan dan mempercepat penyelesaian kasus.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing senantiasa mempertahankan jalur komunikasi yang aktif dengan *Public Security Bureau* (PSB) di 20 provinsi dan kotamadya khusus yang menjadi wilayah kerja, khususnya di kota-kota kantong domisili WNI seperti Qingdao, Chengdu, dan Dalian. Kanal koordinasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan respons perlindungan yang cepat, akurat, dan terkoordinasi apabila terjadi permasalahan yang melibatkan WNI.

Selain itu, KBRI Beijing juga secara proaktif membuka jalur komunikasi baru dengan otoritas keamanan lokal di RRT maupun Mongolia melalui pemanfaatan kegiatan-kegiatan diplomasi yang dilaksanakan di wilayah-wilayah baru. Pendekatan ini antara lain dilakukan dalam Resepsi Diplomatik KBRI Beijing di Ulaanbaatar pada 19 November 2025, yang turut mengundang pemangku kepentingan bidang keamanan, kekonsuleran, dan ketenagakerjaan setempat, bersama perwakilan WNI, sebagai langkah antisipatif untuk memperkuat jejaring koordinasi dalam menghadapi potensi kasus-kasus WNI di masa mendatang.



Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan perlindungan WNI di wilayah akreditasi, KBRI Beijing menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang memengaruhi kecepatan serta kompleksitas penanganan kasus WNI:

- Pertama, luasnya wilayah akreditasi KBRI Beijing, yang mencakup berbagai provinsi dan kotamadya dengan karakteristik kebijakan lokal yang beragam, menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus WNI. Regulasi ketenagakerjaan dan keimigrasian di Tiongkok bersifat teknis dan dalam praktiknya terdesentralisasi pada otoritas daerah, sehingga penanganan satu kasus sering kali memerlukan koordinasi bertahap dengan berbagai instansi setempat. Kondisi ini berdampak pada variasi waktu dan prosedur penyelesaian kasus, terutama untuk kasus yang terjadi di wilayah yang jauh dari Beijing.
- Kedua, perbedaan sistem hukum, bahasa, dan budaya administrasi antara Indonesia dan Tiongkok menuntut pendampingan yang lebih intensif dalam proses komunikasi dan advokasi kepentingan WNI. Proses klarifikasi, mediasi, maupun pendampingan hukum memerlukan penyesuaian pendekatan agar sejalan dengan prosedur dan norma setempat, sekaligus tetap memastikan perlindungan hak-hak WNI sesuai hukum yang berlaku.
- Ketiga, rendahnya literasi sebagian WNI terhadap kewajiban lapor diri, khususnya di luar kalangan pelajar dan mahasiswa, menjadi tantangan dalam optimalisasi pendataan WNI di wilayah kerja KBRI Beijing. Keterbatasan data yang akurat dan mutakhir berdampak pada kecepatan identifikasi dan penanganan kasus, serta membatasi akses WNI terhadap layanan kekonsuleran dan perlindungan yang seharusnya dapat diberikan secara lebih proaktif.
- Keempat, keterbatasan teknis operasional dalam ekosistem digital Tiongkok turut memengaruhi efektivitas pelayanan dan perlindungan WNI. Akses terhadap sistem dan aplikasi layanan Indonesia pada kondisi tertentu memerlukan penggunaan jaringan VPN, sementara terdapat keterbatasan kompatibilitas antara platform agregasi data yang umum digunakan di Pusat—seperti *Google Drive*, *Google Form*, dan *OneDrive*—dengan platform yang dapat diakses secara optimal di Tiongkok. Kondisi ini menuntut penyesuaian teknis dan prosedural agar layanan tetap dapat berjalan secara efektif.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka menjawab berbagai kendala dan tantangan perlindungan WNI di wilayah akreditasi, KBRI Beijing terus melakukan upaya perbaikan yang terstruktur dan adaptif guna menjaga efektivitas penanganan kasus serta kualitas pelayanan publik:

- KBRI Beijing memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan otoritas setempat di Tiongkok melalui pendekatan yang menghormati ketentuan hukum dan praktik administrasi lokal, sekaligus mengedepankan kerja sama yang konstruktif dan berbasis kepercayaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperlancar proses klarifikasi dan penyelesaian kasus WNI, khususnya yang memerlukan keterlibatan berbagai instansi di tingkat daerah.
- Dilakukan optimalisasi peran jejaring perwakilan kehormatan, komunitas WNI, serta simpul-simpul komunikasi lokal sebagai *early warning system* dalam penanganan kasus.



Jejaring ini berfungsi untuk mempercepat pengumpulan informasi awal, memfasilitasi komunikasi dengan WNI di wilayah yang jauh dari Beijing, serta membantu mitigasi dini sebelum permasalahan berkembang lebih kompleks.

- KBRI Beijing secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada WNI mengenai urgensi pelaksanaan lapor diri melalui laman Peduli WNI, sebagai langkah fundamental dalam memperkuat pendataan dan mempermudah akses terhadap pelayanan kekonsuleran dan perlindungan WNI. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk pertemuan komunitas, media sosial, dan layanan kekonsuleran, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
- Dari sisi operasional, KBRI Beijing mengelola kendala teknis dalam ekosistem digital Tiongkok secara adaptif, antara lain melalui pengaturan penggunaan VPN secara terkontrol, penjadwalan akses sistem layanan Indonesia, serta peningkatan koordinasi dengan unit teknis terkait di Pusat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaporan, pengelolaan data, dan penyampaian layanan publik meskipun terdapat keterbatasan teknis.
- Dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui pembagian tugas yang lebih jelas, penguatan kerja tim lintas fungsi, serta pemantauan kinerja secara berkala. Pendekatan ini memastikan bahwa beban kerja penanganan kasus dapat dikelola secara proporsional dan berkelanjutan.
- KBRI Beijing juga mendorong pendekatan preventif dalam perlindungan WNI, antara lain melalui peningkatan literasi hukum dasar bagi WNI, penyebaran informasi mengenai hak dan kewajiban di negara setempat, serta penguatan mekanisme konsultasi awal bagi WNI sebelum menghadapi potensi permasalahan. Pendekatan preventif ini diharapkan dapat menekan potensi munculnya kasus baru dan meningkatkan ketahanan WNI dalam menghadapi dinamika kehidupan di Tiongkok.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, pelaksanaan perlindungan WNI dan pelayanan kekonsuleran KBRI Beijing diperkirakan akan menghadapi dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya intensitas kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok. Peningkatan investasi, khususnya di sektor manufaktur, industri hilir, dan teknologi, berpotensi mendorong kebutuhan tenaga kerja lintas negara serta mobilitas WNI yang lebih tinggi, baik sebagai tenaga profesional, pekerja teknis, maupun pelaku usaha. Kondisi ini akan berdampak langsung pada peningkatan volume dan kompleksitas layanan perlindungan WNI yang harus diantisipasi secara sistematis.

Selain itu, meningkatnya jumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia di Tiongkok, seiring dengan penguatan kerja sama pendidikan dan riset, akan memperluas profil WNI di wilayah akreditasi. Karakteristik pelajar yang tersebar di berbagai kota dan provinsi menuntut pendekatan perlindungan yang lebih proaktif, berbasis komunitas, serta didukung oleh sistem pendataan yang akurat dan mutakhir.

Faktor lain yang perlu diantisipasi adalah dinamika kebijakan keimigrasian, termasuk penerapan rezim bebas visa transit dan peningkatan mobilitas masyarakat sebagai dampak dari membaiknya konektivitas dan minat wisata ke Tiongkok. Mobilitas yang semakin tinggi berpotensi meningkatkan kebutuhan layanan kekonsuleran sekaligus risiko permasalahan keimigrasian yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi.



Dalam merespons dinamika tersebut, perencanaan kinerja Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Beijing akan diarahkan pada penyesuaian kapasitas dan tata kelola layanan, termasuk penguatan sistem perlindungan siaga, peningkatan literasi WNI, serta optimalisasi mekanisme koordinasi lintas fungsi dan pemangku kepentingan.

Upaya ini akan didukung oleh pemenuhan aspek Minimum Essential Diplomatic Infrastructure, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan teknologi informasi, guna memastikan layanan dan perlindungan WNI tetap responsif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika hubungan Indonesia–Tiongkok yang terus berkembang.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK C.1.1



Memberikan pendampingan dan bantuan kepada WNI yang tertimpa Musibah, Juli 2025



Kunjungan Kepenjara dalam rangka Pelindungan WNI di Qingdao, September 2025



IK C.1.2. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Beijing

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri.

Pelayanan konsuler merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam penyediaan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan hukum nasional, dengan tetap memperhatikan hukum negara mitra, serta hukum dan kebiasaan internasional. Pelayanan konsuler mencakup, antara lain, layanan kependudukan, notariat, kehakiman, keimigrasian, ketenagakerjaan, serta layanan terkait pengurusan paspor dan visa, perizinan tinggal, keluar dan masuk kembali, perizinan penerbangan dan perkapalan, legalisasi dokumen, serta jasa konsuler bagi warga negara asing.

Ruang lingkup pengukuran Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran diperoleh melalui survei, baik secara manual maupun elektronik, kepada responden yang sedang atau telah menerima pelayanan konsuler. Penetapan nilai persepsi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengkategorian Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Informasi Kinerja

Capaian IK C.1.2. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Beijing

Target	4 (sangat baik)
Realisasi	4 (sangat baik)
Capaian	100%

Capaian IK C.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Beijing pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan target nilai persepsi sebesar 4 (sangat baik), realisasi capaian juga tercatat sebesar 4 (sangat baik).



Capaian ini mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan kekonsuleran yang diberikan oleh KBRI Beijing, termasuk aspek kecepatan, ketepatan, kejelasan prosedur, serta sikap dan profesionalisme petugas.

Perbandingan Kinerja

Target, Realisasi, dan Capaian IK C.1.2: Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Beijing

	2023	2024	2025
Target	4 (sangat baik)	4 (sangat baik)	4 (sangat baik)
Realisasi	4 (sangat baik)	4 (sangat baik)	4 (sangat baik)
Capaian	100%	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten pada tingkat sangat baik periode 2023-2025. Selama tiga tahun berturut-turut, target nilai persepsi kepuasan ditetapkan sebesar 4 (sangat baik) dan berhasil dicapai secara penuh pada setiap tahun pelaporan.

Realisasi nilai persepsi kepuasan yang konsisten pada angka 4 (sangat baik) menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Konsistensi ini mencerminkan terjaganya kualitas pelayanan kekonsuleran KBRI Beijing secara berkelanjutan, baik dari aspek prosedur pelayanan, profesionalisme petugas.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IK C.1.2 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- Tingginya literasi kekonsuleran masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi, khususnya terkait prosedur dan persyaratan layanan, berkontribusi signifikan terhadap kelancaran proses pelayanan dan terbentuknya persepsi positif terhadap kualitas layanan.
- Keberadaan komunitas WNI yang solid dan saling mendukung turut memperkuat penyebaran informasi layanan kekonsuleran secara informal, sehingga pemohon layanan datang dengan kesiapan administratif yang lebih baik.
- Pendekatan pelayanan jemput bola yang dilakukan KBRI Beijing, termasuk melalui kegiatan layanan keliling dan kehadiran dalam kegiatan komunitas, memperluas akses layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna.
- Faktor lain yang berperan penting adalah profesionalisme petugas layanan, yang tercermin dari sikap ramah, komunikatif, dan solutif dalam melayani pemohon. Profesionalisme tersebut ditopang oleh penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten, sehingga pelayanan dapat diberikan secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Analisis Program yang Mendukung Capaian



KBRI Beijing melaksanakan program *jemput bola* dalam penyediaan layanan kekonsuleran dengan memanfaatkan konsentrasi WNI pada berbagai kegiatan besar yang diselenggarakan Perwakilan. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan diberikan secara lebih efektif, inklusif, dan responsif, sekaligus memperkuat literasi kekonsuleran di kalangan WNI. Program tersebut antara lain dilakukan pada momentum silaturahmi Idul Fitri (31 Maret 2025), Indonesia Fair (17 Agustus 2025), serta peringatan Hari Nasional RRT (30 September–1 Oktober 2025).

Selain itu, KBRI Beijing secara rutin menyelenggarakan *Warung Konsuler* di wilayah-wilayah yang memerlukan pelayanan langsung maupun yang secara tradisional menjadi kantong domisili WNI. Kegiatan ini menjadi instrumen strategis untuk mendekatkan layanan, mempercepat pemenuhan kebutuhan administratif, serta memperkuat fungsi perlindungan di lapangan. Sepanjang 2025, kegiatan serupa antara lain diselenggarakan di Ulaanbaatar pada 19 November 2025 dan di Beijing pada 19 Desember 2025.

Kendala dan Tantangan

Dalam menjaga kualitas pelayanan kekonsuleran pada tingkat sangat baik, KBRI Beijing menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang terutama berkaitan dengan aspek sumber daya dan dinamika operasional perwakilan:

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya pada Fungsi Protokol dan Konsuler yang menjalankan tugas rangkap. Pada periode tertentu, terutama saat terdapat peningkatan intensitas kegiatan keprotokolan kunjungan pejabat negara atau kegiatan resmi berskala besar, alokasi SDM yang menangani layanan kekonsuleran menjadi lebih terbatas. Kondisi ini menuntut pengaturan prioritas dan manajemen waktu yang cermat agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
- Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di Tiongkok dalam pelaksanaan pelayanan kekonsuleran kerap menghadapi tantangan prosedural. Sistem administrasi dan koordinasi yang relatif rigid di Tiongkok tidak selalu sejalan dengan karakter permintaan layanan kekonsuleran yang dalam beberapa kasus bersifat mendesak dan membutuhkan respons cepat, sehingga berpotensi memengaruhi kecepatan penyelesaian layanan tertentu.
- Kebutuhan dukungan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan program pelayanan jemput bola serta upaya mempertahankan tingkat literasi kekonsuleran masyarakat. Program-program tersebut membutuhkan dukungan anggaran, logistik, dan SDM yang berkelanjutan, sementara dinamika pengetatan anggaran dan luasnya wilayah akreditasi menjadi faktor pembatas dalam pelaksanaannya secara optimal.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka menjawab kendala dan tantangan pelayanan kekonsuleran, KBRI Beijing terus melakukan upaya perbaikan yang diarahkan pada penguatan tata kelola pelayanan, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan fleksibilitas operasional:



- Optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia melalui pengaturan penugasan yang lebih adaptif dan berbasis prioritas, khususnya pada Fungsi Protokol dan Konsuler. Penguatan kerja tim lintas fungsi dan penyesuaian pembagian tugas pada periode dengan intensitas kegiatan keprotokolan yang tinggi menjadi langkah untuk memastikan layanan kekonsuleran tetap berjalan secara optimal.
- KBRI Beijing memperkuat mekanisme koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di Tiongkok melalui pemanfaatan jalur komunikasi yang telah terbangun serta pendekatan yang lebih proaktif dan antisipatif. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan responsivitas terhadap permintaan layanan kekonsuleran yang bersifat mendesak, dengan tetap menghormati ketentuan dan prosedur setempat.
- KBRI Beijing terus mengembangkan dan memperluas program pelayanan jemput bola secara lebih terarah, dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan WNI dan prioritas wilayah. Pelaksanaan program ini diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan kolaborasi dengan komunitas WNI guna mengoptimalkan jangkauan layanan di tengah keterbatasan sumber daya.
- KBRI Beijing memperkuat upaya peningkatan dan pemeliharaan literasi kekonsuleran masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan, baik secara daring maupun luring. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur layanan diharapkan dapat mengurangi beban layanan tatap muka serta meningkatkan efektivitas proses pelayanan.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, dinamika pelayanan kekonsuleran KBRI Beijing diperkirakan akan semakin kompleks seiring dengan meningkatnya intensitas saling kunjung pejabat tinggi Indonesia–Tiongkok serta penguatan kerja sama strategis di berbagai sektor. Peningkatan kunjungan tingkat tinggi dan kegiatan resmi berdampak langsung pada penambahan beban kerja personel, khususnya pada Fungsi Konsuler yang menangani aspek flight clearance, serta berbagai perizinan pendukung. Selain itu, fungsi konsuler juga akan menangani izin pembangunan gedung KBRI dan fasilitasi administratif lainnya,

Dalam merespons proyeksi tersebut, rencana kerja KBRI Beijing ke depan akan diarahkan pada penyesuaian kapasitas dan tata kelola pelayanan, termasuk penguatan manajemen beban kerja personel, pengaturan prioritas layanan, serta peningkatan koordinasi lintas fungsi.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK C.1.2



Jemput Bola Lapor Diri WNI, Juli 2025



Warung Konsuler Goes to Tianjin, Juli 2025



IK C.1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Beijing

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi masyarakat atau pemangku kepentingan terhadap tingkat kepuasan atas kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri.

Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI di luar negeri. Pelayanan pelindungan WNI mencakup penanganan kasus, pemberian bantuan pelindungan lainnya, serta penyampaian informasi melalui kegiatan kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis, dan forum diskusi kelompok terfokus (FGD).

Ruang lingkup pengukuran Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI diperoleh melalui survei, baik secara manual maupun elektronik, kepada responden yang sedang atau telah menerima pelayanan pelindungan WNI. Penetapan nilai persepsi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jumlah responden survei ditetapkan minimal 367 orang, sesuai dengan ketentuan metodologi survei yang berlaku.

Batasan waktu pengukuran dilakukan selama satu tahun anggaran dan dilaksanakan secara periodik setiap triwulan untuk memantau konsistensi kualitas pelayanan.

Kategori nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Informasi Kinerja

Capaian IK C.1.3. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Beijing

Target	4 (sangat baik)
Realisasi	4 (sangat baik)
Capaian	100%

Tabel di atas menunjukkan kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan target nilai persepsi sebesar 4 (sangat baik), realisasi capaian juga tercatat sebesar 4 (sangat baik), sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen. Capaian ini mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dari WNI terhadap kualitas pelayanan



pelindungan yang diberikan oleh KBRI Beijing, baik dalam penanganan kasus maupun dalam pemberian informasi dan pendampingan.

Perbandingan Kinerja

Target, Realisasi, dan Capaian IK C.1.3: Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Beijing

	2023	2024	2025
Target	4 (sangat baik)	4 (sangat baik)	4 (sangat baik)
Realisasi	4 (sangat baik)	4 (sangat baik)	4 (sangat baik)
Capaian	100%	100%	100%

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Beijing pada periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten pada tingkat sangat baik. Selama tiga tahun berturut-turut, target nilai persepsi kepuasan ditetapkan sebesar 4 (sangat baik) dan berhasil dicapai secara penuh pada setiap tahun pelaporan.

Realisasi nilai persepsi kepuasan yang konsisten pada angka 4 (sangat baik) menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Konsistensi capaian ini mencerminkan terjaganya kualitas pelayanan pelindungan WNI KBRI Beijing secara berkelanjutan, baik dalam aspek penanganan kasus, pemberian pendampingan, maupun penyampaian informasi kepada WNI.

Berbeda dari kepuasan pelayanan kekonsuleran, angka kepuasan pelayanan PWNI memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Hal ini antara lain karena sifat dari kasus PWNI yang tidak selalu selesai dengan *outcome* maupun jangka waktu yang sesuai ekspektasi WNI. Sebagai gambaran, pelindungan WNI pada kasus penyalahgunaan izin tinggal dapat memakan waktu lebih dari sebulan tergantung dari keparahan pelanggaran yang dilakukan oleh WNI yang bersangkutan, sehubungan dengan prosedur hukum di negara akreditasi, terdapat variabel tidak pasti dalam pelayanan PWNI. Meskipun demikian, angka capaian tersebut merepresentasikan hampir seluruh WNI responden mengapresiasi respon KBRI Beijing dalam menjawab permohonan bantuan baik dari WNI korban secara langsung maupun pihak keluarga.

Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IK C.1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Beijing dipengaruhi antarnya oleh:

- Kejelasan status hukum dan hubungan kerja sebagian besar WNI di wilayah akreditasi, yang ditopang oleh kontrak kerja yang tertulis dan legalitas izin tinggal yang relatif tertib. Kejelasan ini mempermudah proses klarifikasi, pendampingan, dan advokasi kepentingan WNI ketika terjadi permasalahan, serta memperkecil potensi sengketa yang bersifat abu-abu secara hukum.
- Penegakan hukum oleh aparat setempat di Tiongkok yang berjalan relatif konsisten dan berbasis prosedur turut membantu proses penanganan kasus WNI. Meskipun sistem



hukum Tiongkok bersifat ketat, kepastian prosedural dan kejelasan kewenangan aparat memungkinkan KBRI Beijing untuk melakukan pendampingan secara lebih terarah dan terukur melalui jalur resmi, sehingga proses penyelesaian kasus dapat berlangsung lebih efektif.

- Pendekatan responsif dan empatik yang diterapkan KBRI Beijing, termasuk respons awal yang cepat dan komunikasi yang berkelanjutan, menjadi faktor penting dalam membangun kepuasan WNI. Kejelasan informasi mengenai tahapan penanganan kasus, batasan kewenangan perwakilan, serta proses hukum yang berlaku membantu mengelola ekspektasi WNI dan keluarga secara realistis.
- Kesiapsiagaan layanan perlindungan WNI, termasuk keberadaan kanal pengaduan dan hotline yang dapat diakses selama 24 jam. Sistem ini memperkuat persepsi kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, terutama pada situasi darurat yang memerlukan penanganan segera.
- Penguatan koordinasi lintas fungsi dan pengalaman petugas perlindungan WNI memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari sisi sosial dan kemanusiaan. Pendekatan ini memastikan bahwa pelayanan perlindungan WNI diberikan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum nasional maupun hukum negara akreditasi.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing melaksanakan program penyuluhan dan bincang ketenagakerjaan bagi WNI, termasuk mahasiswa tingkat akhir yang akan menjalani program magang maupun bekerja di berbagai perusahaan Tiongkok. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman WNI terhadap aspek ketenagakerjaan, administrasi, dan ketentuan hukum setempat, sekaligus memperkuat kesiapan sebelum memasuki dunia kerja. Program serupa antara lain diselenggarakan pada 15 Juli 2025 di Tianjin serta pada 24 September 2025 di Shenyang.

Dalam aspek perlindungan, KBRI Beijing menerapkan respons yang terukur dan konsisten melalui prosedur operasi standar (SOP) PWNI dalam setiap penanganan kasus WNI bermasalah, yang pada tahun 2025 didominasi oleh kasus overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Pendekatan ini mencakup penerapan standar pelayanan yang seragam sebagaimana ditetapkan oleh Pusat, pengutamaan kasus-kasus darurat yang mengancam keselamatan, serta perlindungan yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup kerahasiaan data dan identitas WNI. Seluruh langkah tersebut dijalankan dengan tetap menghormati ketentuan hukum setempat, sehingga tercipta keseimbangan antara pelayanan yang responsif dan kepatuhan terhadap norma serta regulasi yang berlaku di negara akreditasi.

Kendala dan Tantangan

Meskipun capaian IK C.1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI berada pada tingkat sangat baik, pelaksanaan perlindungan WNI di wilayah akreditasi KBRI Beijing tetap menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang bersifat struktural, prosedural, dan operasional:



- Tingginya kompleksitas karakter kasus perlindungan WNI menjadi tantangan utama. Berbeda dengan pelayanan administratif, penanganan kasus perlindungan WNI sangat bergantung pada proses hukum negara setempat yang memiliki tahapan baku dan jangka waktu yang tidak selalu dapat dipercepat. Dalam kasus tertentu, seperti pelanggaran izin tinggal, ketenagakerjaan, atau permasalahan hukum pidana—penyelesaian dapat memakan waktu relatif lama, sehingga terdapat kesenjangan antara ekspektasi WNI dan realitas prosedural yang harus dijalani.
- Perbedaan sistem hukum, bahasa, dan budaya administrasi antara Indonesia dan Tiongkok menuntut pendekatan pendampingan yang lebih intensif. Proses komunikasi dengan otoritas setempat memerlukan ketelitian tinggi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, sementara pendampingan kepada WNI juga harus dilakukan secara persuasif untuk memastikan pemahaman terhadap batasan kewenangan perwakilan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Luasnya wilayah akreditasi KBRI Beijing dan sebaran WNI di berbagai provinsi menjadi tantangan dalam hal jangkauan layanan. Tidak seluruh kasus dapat ditangani secara langsung dan cepat di lapangan, terutama yang terjadi di wilayah yang jauh dari Beijing, sehingga membutuhkan koordinasi bertahap dengan berbagai otoritas lokal.
- Keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tinggi, khususnya pada Fungsi Protokol dan Konsuler yang menjalankan tugas rangkap, turut memengaruhi intensitas pendampingan yang dapat diberikan. Pada periode tertentu, meningkatnya kegiatan keprotokolan dan kunjungan pejabat tinggi juga berpotensi mengurangi fleksibilitas alokasi waktu dan personel untuk penanganan kasus perlindungan WNI.
- Kendala teknis operasional, termasuk keterbatasan akses sistem digital di lingkungan Tiongkok dan ketergantungan pada platform tertentu yang memerlukan penyesuaian teknis, dapat memengaruhi kelancaran komunikasi, pelaporan, dan pengelolaan data kasus.

Upaya Perbaikan

Guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan perlindungan WNI di wilayah akreditasi, KBRI Beijing akan melakukan diantaranya:

- Memperkuat pendekatan preventif dalam perlindungan WNI, melalui peningkatan literasi hukum dan administratif WNI sejak tahap awal keberangkatan dan selama bermukim di Tiongkok. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan mengenai ketentuan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kewajiban hukum setempat, guna menekan potensi pelanggaran dan meminimalkan munculnya kasus baru.
- Penguatan mekanisme pendataan dan pemantauan WNI, khususnya melalui optimalisasi pelaksanaan lapor diri dan pemanfaatan sistem Peduli WNI. Data yang akurat dan mutakhir akan menjadi dasar penting dalam penanganan kasus yang lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran.
- Meningkatkan kesiapsiagaan layanan perlindungan WNI, termasuk optimalisasi fungsi hotline 24 jam dan penguatan prosedur respons awal. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan setiap permohonan bantuan dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi, terutama pada situasi darurat.
- Penguatan koordinasi lintas fungsi dan lintas pemangku kepentingan, baik di internal KBRI Beijing maupun dengan otoritas setempat di Tiongkok. Pendekatan ini diarahkan untuk



- memperlancar komunikasi, mempercepat proses klarifikasi, serta memastikan pendampingan WNI dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Mengelola aspek beban kerja dan keterbatasan sumber daya manusia melalui pengaturan prioritas penanganan kasus, penguatan kerja tim, serta pemanfaatan jejaring komunitas WNI sebagai simpul pendukung awal. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan perlindungan WNI tetap optimal meskipun dihadapkan pada peningkatan volume kasus dan kegiatan keprotokolan.
 - Mendorong peningkatan kapasitas petugas perlindungan WNI, baik melalui pembelajaran internal, berbagi praktik baik, maupun koordinasi teknis dengan unit terkait di Pusat.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, dinamika perlindungan WNI di wilayah akreditasi KBRI Beijing diperkirakan akan semakin kompleks seiring dengan perubahan kebijakan keimigrasian Tiongkok seperti rezim bebas visa transit. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan mobilitas WNI yang melakukan perjalanan lintas negara melalui Tiongkok, baik untuk kepentingan wisata, bisnis, maupun transit jangka pendek. Peningkatan mobilitas tersebut dapat berdampak pada bertambahnya kebutuhan layanan kekonsuleran dan perlindungan, khususnya terkait permasalahan overstay, ketidaksesuaian izin tinggal, serta miskomunikasi mengenai batasan hak dan kewajiban selama masa transit.

Selain itu, terdapat indikasi meningkatnya fenomena pernikahan lintas negara, termasuk pola yang menyerupai *mail-order bride*, yang melibatkan WNI, terutama perempuan, dengan warga negara setempat. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kerentanan baru, baik dari aspek hukum, sosial, maupun perlindungan hak-hak WNI, khususnya apabila pernikahan dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai status hukum, izin tinggal, dan perlindungan hukum di negara akreditasi. Kasus-kasus dalam kategori ini cenderung memiliki kompleksitas tinggi dan memerlukan pendampingan jangka panjang.

Di saat yang sama, peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi Indonesia–Tiongkok serta mobilitas tenaga kerja dan pelajar diperkirakan akan terus berlanjut, sehingga menambah variasi profil WNI di wilayah akreditasi. Kombinasi faktor tersebut menuntut pendekatan perlindungan yang lebih preventif, berbasis pemetaan risiko, dan adaptif terhadap tren baru yang berkembang.

Dalam merespons proyeksi tersebut, perencanaan kerja KBRI Beijing ke depan akan diarahkan pada peningkatan sosialisasi, serta penguatan mekanisme deteksi dini melalui jejaring komunitas dan kanal pelaporan.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK C.1.3



Sepanjang 2025 KBRI Beijing Aktif Lakukan Penyuluhan ke-PWNI-an kepada Masyarakat



IK C.2 Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI Beijing

Dukungan dimaknai sebagai bentuk sokongan atau bantuan yang diberikan untuk memperkuat pencapaian suatu tujuan. Komitmen adalah keterikatan atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu tindakan atau upaya tertentu, sedangkan tinggi menunjukkan tingkat dukungan yang diberikan secara penuh dan berkelanjutan.

Kebijakan luar negeri merupakan sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lainnya, guna menghadapi dinamika internasional dan mencapai tujuan nasional.

Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik bagi Pemerintah Republik Indonesia. Pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia bersama negara-negara lain telah menyepakati berbagai kesepakatan internasional yang perlu diimplementasikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Luar Negeri tidak berperan sebagai implementing agency, melainkan menjalankan fungsi koordinatif dan fasilitatif. Kemenlu memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi *focal point* nasional untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan bilateral, regional, dan multilateral. Peran Kemenlu adalah memastikan bahwa kesepakatan yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara efektif dan selaras dengan kepentingan nasional.

Kesepakatan bilateral merupakan perjanjian tertulis yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik. Kesepakatan kerja sama bilateral tersebut merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang implementasinya memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat.

Analisis IK C.2.1 Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Beijing

Indonesia senantiasa terlibat secara aktif dalam berbagai kesepakatan kerja sama bilateral serta regional dan multilateral. Kesepakatan-kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara nyata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh publik. Tindak lanjut atau implementasi dimaknai sebagai langkah-langkah lanjutan yang diambil oleh para pemangku kepentingan terkait, baik di Indonesia maupun di negara akreditasi, dalam rangka pelaksanaan dan penerapan substansi kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Kesepakatan kerja sama bilateral merupakan perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis antara Pemerintah Republik



Indonesia dengan pemerintah negara lain, yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik bagi Pemerintah Republik Indonesia. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan luar negeri, Perwakilan RI memiliki peran penting untuk memastikan kesepakatan tersebut ditindaklanjuti secara efektif di negara akreditasi/wilayah kerjanya.

Negara akreditasi atau wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI, termasuk negara atau wilayah rangkaian serta organisasi internasional yang secara resmi dimandatkan untuk diwakili dalam rangka memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam menjalankan mandat tersebut, Perwakilan RI berperan sebagai penghubung utama antara pemangku kepentingan di Indonesia dan mitra di negara akreditasi.

Ruang lingkup tindak lanjut kesepakatan kerja sama bilateral mengacu pada Dokumen Pemetaan, yaitu rekapitulasi rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dan disusun pada awal tahun anggaran. Apabila dalam tahun berjalan terdapat kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti di luar Dokumen Pemetaan, kesepakatan tersebut dapat ditambahkan dan diperhitungkan sebagai rencana serta realisasi tindak lanjut kesepakatan kerja sama.

Penghitungan indikator jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti/diimplementasikan dilakukan dengan membandingkan jumlah kesepakatan bilateral yang telah ditindaklanjuti atau diimplementasikan dengan jumlah rencana kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi/wilayah kerja beserta negara rangkaian yang direncanakan untuk ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemetaan, kemudian dikalikan 100 persen.

$$\frac{\text{Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti/diimplementasikan}}{\text{Jumlah rencana kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi/wilayah kerja beserta negara rangkaian yang akan ditindaklanjuti sesuai dokumen pemetaan}} \times 100\%$$

Informasi Kinerja

Capaian IKU C2.1: Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia Dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia Dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing	Jumlah kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti (realisasi riil dari baseline target)	18
	Jumlah kesepakatan yang akan ditindaklanjuti	17
Realisasi		116.67%
Target		95%



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

Capaian	122.81%
Batas Toleransi	120%

Tabel:

Capaian IKU C2 KBRI Beijing pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 17 kesepakatan bilateral yang direncanakan untuk ditindaklanjuti sesuai Dokumen Pemetaan, sebanyak 18 kesepakatan berhasil ditindaklanjuti atau diimplementasikan sepanjang tahun anggaran, sehingga realisasi capaian mencapai 116,67 persen.

Dengan target kinerja sebesar 95 persen, capaian IKU C2.1 tercatat sebesar 122,81 persen, melampaui batas toleransi capaian sebesar 120 persen. Capaian ini mencerminkan peran aktif dan efektivitas KBRI Beijing dalam mendorong tindak lanjut kesepakatan bilateral, termasuk melalui koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga teknis di Indonesia serta mitra di negara akreditasi, sehingga kesepakatan yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara konkret dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

Perbandingan Kinerja

Target, Realisasi, dan Capaian IKU C2.1: Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia Dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Informasi Kinerja	2023	2024	2025
Jumlah kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti (realisasi riil dari baseline target)	8	16	18
Jumlah kesepakatan yang akan ditindaklanjuti	8	10	17
Realisasi	111.11%	160%	116.67%
Target	90%	95%	95%
Capaian	100%	120%	122.81%
Batas Toleransi	120%	120%	120%

Tabel:

IKU C2.1 KBRI Beijing pada periode 2023–2025 menunjukkan tren kinerja yang positif dan menguat secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kesepakatan yang berhasil ditindaklanjuti, meskipun target yang ditetapkan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023, dari 8 kesepakatan yang direncanakan untuk ditindaklanjuti, seluruhnya berhasil ditindaklanjuti, bahkan realisasi mencapai 111,11 persen terhadap target 90 persen,

Pada tahun 2024, jumlah rencana kesepakatan yang ditindaklanjuti meningkat menjadi 10 kesepakatan, dengan realisasi mencapai 16 kesepakatan. Realisasi tersebut menghasilkan tingkat realisasi sebesar 160 persen, melampaui target 95 persen. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya intensitas koordinasi dan efektivitas fasilitasi tindak lanjut kesepakatan bilateral oleh KBRI Beijing.



Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2025, ketika jumlah rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti meningkat signifikan menjadi 17 kesepakatan. Dari jumlah tersebut, 18 kesepakatan berhasil ditindaklanjuti, dengan realisasi sebesar 116,67 persen dan capaian kinerja mencapai 122,81 persen, kembali melampaui target 95 persen dan batas toleransi capaian.

Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pemenuhan IKU C2.1 Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing yang secara konsisten diantaranya dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Salah satu faktor kunci adalah komitmen kuat pimpinan tertinggi negara, khususnya arahan Presiden Republik Indonesia yang menempatkan implementasi hasil diplomasi sebagai prioritas utama. Penekanan pada diplomasi yang berdampak nyata (mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi memastikan adanya tindak lanjut konkret di tingkat teknis.

Keberhasilan tersebut juga diperkuat oleh momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Tiongkok, yang menjadi katalis bagi intensifikasi interaksi bilateral di berbagai sektor. Momentum ini mendorong percepatan penyusunan, penandatanganan, serta tindak lanjut berbagai kesepakatan kerja sama, baik yang bersifat strategis maupun teknis, sehingga meningkatkan jumlah kesepakatan yang berhasil diimplementasikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Selain itu, peningkatan frekuensi kunjungan tingkat tinggi dan pertemuan bilateral berperan penting dalam menjaga momentum terhadap kesepakatan yang telah disepakati. Kunjungan dan pertemuan tersebut memberikan sinyal politik yang kuat kepada kementerian/lembaga teknis di kedua negara untuk segera menindaklanjuti kesepakatan sesuai mandat masing-masing.

Dari sisi kelembagaan, keberhasilan capaian juga didukung oleh penguatan peran KBRI Beijing sebagai koordinator dan fasilitator tindak lanjut kesepakatan bilateral. Melalui penyusunan Dokumen Pemetaan di awal tahun, pemantauan berkala, serta koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga teknis di Indonesia dan mitra di negara akreditasi, KBRI Beijing mampu menjaga kesinambungan proses tindak lanjut dan mendorong penyelesaian hambatan yang muncul di tingkat implementasi.

Selain itu, meningkatnya kepentingan ekonomi dan strategis kedua negara turut menciptakan *alignment of interest* yang kuat dalam menindaklanjuti kesepakatan bilateral, khususnya di sektor perdagangan, investasi, infrastruktur, energi, dan teknologi. Kondisi ini memperbesar insentif bagi para pemangku kepentingan untuk segera merealisasikan kesepakatan yang telah disepakati.

Sejumlah tindak lanjut kesepakatan di tahun 2025 meliputi:



No	Tindak Lanjut / Implementasi	Kesepakatan yang Ditindaklanjuti
1.	The First China Coast Guard and Bakamla RI High Level Meeting in Beijing, 11 Januari 2025	Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future (November 2024)
2.	Kunjungan dan Pertemuan Menteri Pertahanan RI dengan Menteri Pertahanan RRT, 22 Januari 2025	Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future (November 2024)
3.	Pertemuan 2+2 Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI-RRT, 21 April 2025	Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future (November 2024)
4.	Kunjungan Kerja Delegasi Dewan Ekonomi Nasional ke Beijing, 21 - 22 Mei 2025	Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future (November 2024)
5.	Intergovernmental Joint Steering Committee RI-RRT, 25 Juni 2025	Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future (November 2024)



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

6.	Kunjungan Direktur Utama TVRI sebagai panelis pada the 1st Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) AI Forum dan Pertemuan dengan China Media Group, 22-25 Juli 2025	MoU Kerja Sama Penyiaran antara TVRI dan CMG
7.	Kunjungan dan Pertemuan Tim Direktorat Afrika dengan Kedutaan Besar Non-Residen Negara Afrika di Beijing, 3-9 Agustus 2025	Tindak Lanjut Hasil Indonesia-Africa Forum ke-2, 2 September 2024
8.	Pertemuan Menteri Investasi dan Vice Chairman NDRC, 28 Agustus 2025	Agreement on Further Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation (16 November 2022)
9.	Pertemuan Wamenperind dan Xin Guobin, Vice Minister of Industry and Information Technology di Xiamen, 15 September 2025	Agreement on Further Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation (16 November 2022)
10.	Joint Working Group RI-RRT, 22 Oktober 2025	Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future (November 2024)
11.	Kunjungan Wamen Desa PDT bersama 22 kepala desa, 30 Oktober 2025 – 5 November 2025	MOU on Cooperation in Rural Development and Poverty Alleviation (17 Oktober 2023)
12.	Pertemuan Kepala BPOM dan Commissioner Li Li, National Medical Product Administration ke Beijing, 11 November 2025	MoU on Regulatory Cooperation of Pharmaceutical Products and Cosmetics (2021)
13.	Pertemuan Menteri Perhubungan dengan Minister of Transport, Li Xiaopeng di Beijing, November 2025, 11-13 November 2025	Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future (November 2024)
14.	Pertemuan antara Gubernur NTT dan CLEC untuk membahas tindak lanjut, 14 November 2025	MoU Kemendikbudristek dan Kementerian Pendidikan RRT tentang Kerja Sama Bidang



		Pendidikan Bahasa Mandarin
15.	Kunjungan Kepala Badan Karantina ke RRT dan Pertemuan dengan GACC, 22 November 2025	Kerja Sama Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs RRT tentang inspeksi, karantina, dan persyaratan sanitasi untuk ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok, 25 Mei 2025
16.	Ekspor Perdana Durian Beku ke RRT, 15 Desember 2025	Kerja Sama Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs RRT tentang inspeksi, karantina, dan persyaratan sanitasi untuk ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing melaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis sepanjang tahun 2025 yang berkontribusi langsung terhadap realisasi target Indikator Kinerja. Kegiatan tersebut menjadi instrumen diplomasi operasional untuk menghasilkan output yang terukur, karena dirancang berdasarkan analisis yang matang, pendekatan yang *targeted*, serta masukan dari pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya. Rincian program pendukung diantaranya:

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	The First China Coast Guard–Bakamla RI High Level Meeting, Beijing, 11 Januari 2025	Wakil Kepala Perwakilan RI Beijing dan Fungsi Politik KBRI Beijing berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi pertama antara Bakamla RI dan China Coast Guard. Pertemuan dipimpin Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah dan Director General China Coast Guard Mayor General Yu Zhong, membahas evaluasi kerja sama, autentikasi draf MoU, serta rencana program kerja sama maritim tahun 2025.
2.	Kunjungan Menteri Pertahanan RI dan Pertemuan dengan Menteri Pertahanan RRT, Beijing, 22 Januari 2025	KBRI Beijing memfasilitasi kunjungan Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk bertemu Menhan RRT Dong Jun guna menindaklanjuti Joint Statement RI–RRT November 2024 di bidang diplomasi pertahanan serta persiapan mekanisme Dialog 2+2.



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

No.	Kegiatan	Keterangan
3.	Pertemuan 2+2 Menlu–Menhan RI–RRT, 21 April 2025	KBRI Beijing memfasilitasi pelaksanaan Dialog 2+2 sebagai tindak lanjut Joint Statement November 2024. Pertemuan membahas penguatan kerja sama penegakan hukum, maritim, pertahanan-keamanan, koordinasi forum multilateral (ASEAN, BRICS, G20, PBB), serta konsolidasi posisi bersama terkait isu Palestina.
4.	Kunjungan Kerja Delegasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ke Beijing, 21–22 Mei 2025	KBRI Beijing memfasilitasi kunjungan Ketua DEN untuk menindaklanjuti Joint Statement RI–RRT November 2024 dalam konteks diplomasi ekonomi serta penguatan koordinasi agenda pembangunan dan investasi strategis.
5.	Kunjungan Dirut TVRI pada ABU AI Forum dan Pertemuan dengan China Media Group, 22–25 Juli 2025	KBRI Beijing mendukung kunjungan Dirut TVRI sebagai panelis pada forum AI penyiaran Asia Pasifik serta fasilitasi pertemuan dengan China Media Group yang menghasilkan MoU kerja sama penyiaran dan penguatan diplomasi publik berbasis teknologi.
6.	Kunjungan Tim Direktorat Afrika Kemlu RI ke Beijing, 3–9 Agustus 2025	KBRI Beijing memfasilitasi pertemuan dengan Kedutaan Besar non-residen negara Afrika serta think tank di Beijing untuk menindaklanjuti hasil Indonesia–Africa Forum ke-2 (September 2024), serta memperkuat positioning Indonesia dalam kerja sama Selatan–Selatan.
7.	Pertemuan Menteri Investasi RI dengan Vice Chairman NDRC, Beijing, 28 Agustus 2025	KBRI Beijing memfasilitasi pertemuan tingkat tinggi sebagai tindak lanjut Agreement on Further Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation (2022), guna memperkuat investasi inbound dan hilirisasi sektor strategis.
8.	Pertemuan Wamenperin RI dengan Vice Minister MIIT RRT Xin Guobin, Xiamen, 15 September 2025	Pertemuan difasilitasi KBRI Beijing untuk memperkuat implementasi kerja sama industri dan teknologi, sejalan dengan Agreement on Further Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation (2022).
9.	Joint Working Group RI–RRT, 22 Oktober 2025	KBRI Beijing memfasilitasi Joint Working Group sebagai mekanisme tindak lanjut Joint Statement 2024 mengenai Comprehensive Strategic Partnership dan pembangunan China–Indonesia Community with a Shared Future.
10.	Kunjungan Wamen Desa PDT bersama 22 Kepala Desa ke RRT, 30 Oktober–5 November 2025	KBRI Beijing memfasilitasi kunjungan dalam kerangka implementasi MoU on Cooperation in Rural Development and Poverty Alleviation (2023), dengan fokus pada pertukaran praktik pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan.



No.	Kegiatan	Keterangan
11.	Pertemuan Kepala BPOM RI dengan Commissioner NMPA RRT, Beijing, 11 November 2025	KBRI Beijing mendukung pertemuan untuk memperkuat implementasi MoU kerja sama regulasi produk farmasi dan kosmetik (2021), termasuk peningkatan harmonisasi standar dan akses pasar.
12.	Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Minister of Transport RRT Li Xiaopeng, Beijing, 11–13 November 2025	KBRI Beijing memfasilitasi pertemuan strategis sektor transportasi sebagai tindak lanjut Joint Statement 2024, termasuk penguatan konektivitas logistik, pelayaran, dan transportasi lintas negara.
13.	Pertemuan Gubernur NTT dengan CLEC, 14 November 2025	KBRI Beijing mendukung peninjauan tindak lanjut kerja sama pendidikan dan budaya, termasuk implementasi MoU Kemendikbudristek RI dan Kementerian Pendidikan RRT dalam penguatan pendidikan Bahasa Mandarin dan pertukaran daerah.
14.	Kunjungan Kepala Badan Karantina RI dan Pertemuan dengan GACC, 22 November 2025	KBRI Beijing memfasilitasi koordinasi teknis implementasi kerja sama karantina dan persyaratan sanitasi ekspor durian beku Indonesia ke Tiongkok (Mei 2025).
15.	Ekspor Perdana Durian Beku Indonesia ke RRT, 15 Desember 2025	Ekspor perdana menjadi milestone konkret tindak lanjut kerja sama Badan Karantina RI–GACC RRT, sekaligus bukti konversi kesepakatan teknis menjadi hasil ekonomi riil bagi Indonesia.

Kendala dan Tantangan

Meskipun capaian IKU C2.1 Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing menunjukkan kinerja yang tinggi, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

- Kompleksitas koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam proses tindak lanjut kesepakatan. Mengingat Kementerian Luar Negeri tidak berperan sebagai *implementing agency*, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan, prioritas, dan kapasitas K/L teknis. Perbedaan agenda sektoral, siklus perencanaan, serta keterbatasan sumber daya pada masing-masing K/L dapat memengaruhi kecepatan dan konsistensi tindak lanjut kesepakatan.
- Mekanisme pengambilan keputusan di Tiongkok yang berjenjang dan terdesentralisasi secara sektoral sering kali berdampak pada lamanya proses implementasi. Meskipun terdapat komitmen politik di tingkat pusat, realisasi di tingkat kementerian teknis, pemerintah daerah, atau BUMN Tiongkok memerlukan waktu dan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan kebijakan dan prioritas domestik setempat.



- Pemerintah Tiongkok ada kalanya tidak menginformasikan ke KBRI terkait kunjungan pejabat RRT atau pun kebijakan namun menyampaikan hal tersebut langsung ke Kemlu RI atau bahkan langsung ke institusi tanpa
- Pola komunikasi resmi yang cenderung normatif dan repetitif (*parrot diplomacy*), yang pada kondisi tertentu menyulitkan perolehan *real picture* mengenai kesiapan, kendala, maupun timeline aktual implementasi di tingkat teknis.
- Perbedaan prioritas dan tahapan implementasi antara Indonesia dan Tiongkok, baik dari sisi kebijakan sektoral, kerangka waktu, maupun penekanan substansi, yang memerlukan penyesuaian secara bertahap.
- Perbedaan sistem regulasi, standar teknis, dan prosedur administratif antara Indonesia dan Tiongkok kerap menjadi hambatan dalam tahap implementasi. Kesepakatan yang telah ditandatangani sering memerlukan penyesuaian lanjutan dalam bentuk regulasi turunan, pedoman teknis, atau kesepakatan operasional, yang prosesnya tidak selalu berjalan serempak di kedua negara.
- Dinamika lingkungan global dan regional turut memengaruhi tindak lanjut kesepakatan bilateral. Perubahan kebijakan ekonomi global, penyesuaian strategi industri Tiongkok, serta ketidakpastian geopolitik dapat menggeser prioritas kerja sama dan berdampak pada penjadwalan ulang atau perlambatan implementasi kesepakatan tertentu.
- Dari sisi internal perwakilan, peningkatan volume kesepakatan yang harus dimonitor dan ditindaklanjuti berimplikasi pada beban kerja yang semakin kompleks. Kebutuhan untuk melakukan pemantauan intensif, pelaporan, serta fasilitasi koordinasi lintas pihak menuntut kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sistem yang memadai agar kualitas pengawalan kesepakatan tetap terjaga.

Upaya Perbaikan

KBRI Beijing secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya perbaikan yang bersifat struktural, operasional, dan strategis:

- Penguatan mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) terus dilakukan melalui komunikasi yang lebih intensif dan terstruktur dengan K/L focal point di Indonesia.
- Penajaman fungsi monitoring dan pengawalan kesepakatan.
- Optimalisasi pendekatan diplomasi formal dan informal diterapkan secara simultan dalam mendorong implementasi kesepakatan di pihak Tiongkok. Selain memanfaatkan kanal resmi, KBRI Beijing juga membangun komunikasi informal dengan kementerian teknis, pemerintah daerah, BUMN, dan asosiasi industri Tiongkok untuk memastikan kesepakatan bilateral selaras dengan kepentingan dan kebijakan domestik mitra.
- Penguatan koordinasi lintas fungsi di internal KBRI Beijing Misal, sinergi antara Fungsi Politik, Ekonomi, dan Protokol-Konsuler memungkinkan pemantauan kesepakatan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemanfaatan momentum kunjungan pejabat tinggi, forum bilateral, dan kegiatan promosi untuk mempercepat tindak lanjut kesepakatan yang masih memerlukan dorongan tambahan.
- Peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi dan data.
- Mendorong penyesuaian ekspektasi dan prioritas implementasi melalui dialog yang konstruktif dan berorientasi pada kepentingan bersama.



Proyeksi Kedepan

Memasuki tahun 2026, dinamika kerja sama Indonesia–Tiongkok akan berada pada fase strategis seiring dimulainya proses penyusunan kembali *Plan of Action* (PoA) Strategic Partnership. Fase ini akan ditandai dengan meningkatnya intensitas dialog kebijakan, perumusan inisiatif baru, serta penajaman prioritas kerja sama di berbagai sektor, yang secara langsung akan meningkatkan jumlah dan tindak lanjut kesepakatan bilateral.

Ke depan, tindak lanjut kesepakatan bilateral akan terus diintensifkan dengan fokus pada konversi kesepakatan menjadi program, proyek, dan kerja sama konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor ekonomi, investasi, teknologi, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan sumber daya manusia.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK C.2.1



Pertemuan 2+2 Antara Menlu dan Menhan Indonesia-Tiongkok, April 2025



Kepala DEN Diterima oleh Menlu Wang Yi, Mei 2025



3.1.3 INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE

B.1 Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Kuat

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan diplomasi bilateral yang dijalankan oleh Perwakilan RI. Hubungan bilateral didorong untuk bersifat mutualistik, yaitu mampu menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sekaligus menghasilkan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak. Dalam konteks tersebut, diplomasi bilateral menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa relasi antarnegara tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga produktif dan berdampak nyata.

Hubungan bilateral mencakup berbagai 5 pilar bidang kerja sama *political and security cooperation, economic and development cooperation, people-to-people and socio-cultural cooperation, maritime cooperation, serta international and regional cooperation*. Kepentingan Indonesia pada bidang-bidang tersebut diperjuangkan melalui proses diplomasi bilateral yang terstruktur, termasuk pengajuan inisiatif, perundingan, dan negosiasi dengan negara mitra. Kinerja pada sasaran strategis ini tercermin dari keberhasilan mencapai kesepakatan bilateral yang memberikan *assurance* terhadap terjaganya kepentingan nasional Indonesia dalam dinamika hubungan antarnegara.

Sasaran strategis ini sekaligus merefleksikan prioritas utama yang harus dicapai oleh Perwakilan RI dalam mengelola dan memperkuat relasi bilateral dengan negara akreditasi. Dalam kerangka tersebut, salah satu fungsi utama Perwakilan RI adalah meningkatkan hubungan perekonomian dan perdagangan, serta melakukan pengamatan, penilaian, dan pelaporan secara komprehensif terhadap kondisi dan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di negara akreditasi.

KBRI Beijing, dalam konteks ini, berperan sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat perdagangan dengan negara akreditasi serta membuka dan memperluas akses pasar bagi produk Indonesia. Diplomasi ekonomi yang dilaksanakan KBRI Beijing mencakup berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional melalui kerja sama di bidang perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, serta kerja sama ekonomi teknik.

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional, KBRI Beijing juga menjalankan diplomasi sosial dan budaya untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan kebudayaan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk kerja sama di bidang kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan, serta promosi aset budaya nasional sebagai bagian dari pelestarian dan pengenalan budaya Indonesia di kancah internasional. Diplomasi sosial budaya tersebut tidak hanya memperkuat citra positif Indonesia, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan kebijakan luar negeri secara berkelanjutan.

Pencapaian Sasaran Strategis B1 “Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Kuat” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. IKU B.1.1: Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Beijing
2. IKU B.1.2: Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan, dan;



3. IKU B.1.5: Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi

Analisis IKU B.1.1: Jumlah Kesepakatan yang Dihasilkan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

Kesepakatan merupakan setiap bentuk perjanjian tertulis yang difasilitasi oleh Perwakilan Republik Indonesia (RI) dengan berbagai pihak di luar negeri, baik dengan pemerintah, institusi swasta, universitas, pelaku bisnis, maupun entitas lainnya. Kesepakatan ini mencerminkan hasil dari proses diplomasi dalam berbagai bentuk seperti negosiasi, perundingan, diskusi, atau pertemuan resmi.

Ruang lingkup kesepakatan mencakup berbagai sektor strategis, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, serta sektor lainnya. Yang membedakan kesepakatan ini adalah sifatnya yang non-komersial, tidak mengandung nilai moneter langsung, namun memiliki fungsi penting sebagai landasan hukum atau payung kerja sama antara Indonesia dan mitra luar negeri.

Tujuan utama dari pencatatan kesepakatan ini adalah untuk mengukur kapabilitas dan efektivitas diplomasi Indonesia melalui Perwakilan RI di luar negeri. Indikator yang digunakan adalah jumlah kesepakatan yang berhasil difasilitasi dan ditetapkan, sebagai representasi konkret dari output diplomatik.

Adapun sumber data yang digunakan dapat berasal dari berbagai format resmi, antara lain: *Records of Discussion (RoD)*, Naskah Kesepakatan, *Diplomatic Notes*, *Joint Statement*, *Declaration*, *Joint Communique*, *Letter of Intent*, *Chairman's Note*, *Memorandum of Understanding*, *Exchange of Notes*, *Summary Record*, *Agreed Minutes*, *Treaty*, *Minutes of Meeting*, serta Laporan Kinerja Perwakilan RI.

Informasi Kinerja

Capaian IKU B.1.1: Jumlah Kesepakatan yang Dihasilkan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

<i>Informasi Kinerja</i>	<i>Jumlah</i>
Realisasi Jumlah Kesepakatan yang dihasilkan	14
Target Jumlah Kesepakatan yang dihasilkan	15

Pada tahun 2025, realisasi IKU B.1.1 “Jumlah Kesepakatan yang Dihasilkan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing” tercatat sebanyak 14 kesepakatan dari target yang ditetapkan sebesar 15 kesepakatan. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rencana kesepakatan kerja sama bilateral yang diproyeksikan pada awal tahun berhasil direalisasikan melalui proses diplomasi, perundingan, dan fasilitasi yang dilakukan oleh KBRI Beijing.



Perbandingan Kinerja

Target, Realisasi, dan Capaian IKU B.1.1: Jumlah Kesepakatan yang Dihasilkan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing

	2023	2024	2025
Realisasi Jumlah Kesepakatan yang dihasilkan	10	18	14
Target Jumlah Kesepakatan yang dihasilkan	8	10	15

Selama periode 2023–2025 menunjukkan tren kinerja diplomasi bilateral KBRI Beijing yang secara umum konsisten dan produktif, meskipun dengan dinamika capaian tahunan yang berbeda. Pada tahun 2023, realisasi jumlah kesepakatan yang dihasilkan mencapai 10 kesepakatan, melampaui target yang ditetapkan sebesar 8 kesepakatan, yang mencerminkan efektivitas awal dalam mendorong pembentukan kerja sama bilateral.

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai 18 kesepakatan dari target 10 kesepakatan. Lonjakan capaian ini disebabkan oleh pertimbangan 2024 sebagai tahun penuh pertama operasional KBRI Beijing secara 100%, setelah restriksi *Zero-COVID Policy* dicabut.

Pada tahun 2025, realisasi tercatat sebanyak 14 kesepakatan dari target 15 kesepakatan. Meskipun secara numerik sedikit di bawah target dan lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024, kinerja ini tetap menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi dan relatif stabil diiringi peningkatan target yang signifikan.

Secara keseluruhan, tren capaian 2023–2025 menunjukkan bahwa KBRI Beijing mampu menjaga kesinambungan kinerja diplomasi bilateral, dengan fokus tidak hanya pada kuantitas kesepakatan, tetapi juga pada substansi dan nilai strategis kerja sama yang dihasilkan.

Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan capaian IKU B.1.1 tidak terlepas dari kombinasi faktor strategis pada tataran kebijakan, momentum hubungan bilateral, serta peran aktif KBRI Beijing sebagai *first line diplomacy* Indonesia di Tiongkok. Sejumlah faktor yang mendukung capaian keberhasilan pencapaian:

- Komitmen kuat pimpinan tertinggi kedua negara menjadi faktor penentu. Intensitas interaksi tingkat tinggi antara Indonesia dan Tiongkok, termasuk kunjungan kenegaraan, dialog strategis, serta mekanisme bilateral yang aktif, menciptakan *political enabling environment* yang kondusif bagi lahirnya berbagai kesepakatan. Momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Tiongkok semakin memperkuat dorongan politik untuk memperluas dan memperdalam kerja sama di berbagai sektor.



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

- Peran proaktif KBRI Beijing dalam mengawal proses perundingan menjadi faktor kunci. KBRI Beijing tidak hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga secara aktif melakukan pemetaan kepentingan, sinkronisasi agenda antar pemangku kepentingan, serta penjembatanan antara prioritas kebijakan Indonesia dan kerangka kebijakan Tiongkok.
- Keberhasilan capaian juga mencerminkan peningkatan kualitas koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kesepakatan yang dihasilkan pada periode pelaporan umumnya telah melalui proses konsultasi dan penyelarasan dengan K/L teknis terkait, sehingga memiliki kesiapan implementasi yang lebih baik. Hal ini memperkuat kepercayaan mitra Tiongkok dan memperlancar proses finalisasi kesepakatan.
- Meskipun capaian tahun 2025 secara kuantitatif sedikit di bawah target dan lebih rendah dibandingkan tahun 2024, hal tersebut justru mencerminkan pergeseran fokus dari kuantitas menuju kualitas kesepakatan. Proses perundingan yang lebih selektif dan mendalam dilakukan untuk memastikan kesepakatan yang dihasilkan memiliki nilai strategis jangka panjang dan dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Jumlah Kesepakatan yang Dihasilkan dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing:

No	Nama Kesepakatan	Tanggal
1.	MoU on Establishing Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) RI – RRT	21 April 2025
2.	Pembentukan Consultation on Disarmament, Non-Proliferation, and Arms Control Kemlu RI – Kemlu RRT	21 April 2025
3.	MoU Kerja Sama Keamanan Maritim antara Bakamla dan China Coast Guard (CCG)	21 April 2025
4.	Peresmian Pembukaan KJRI Chengdu	21 April 2025
5.	MoU on Political Consultation RI-Mongolia	21 Mei 2025
6.	MoU mengenai Penguatan Kerja Sama Ekonomi di Bidang Industri dan Rantai Pasok antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan RRT	25 Mei 2025
7.	MoU trilateral antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan RRT, dan Pemerintah Provinsi Fujian Tiongkok mengenai proyek Two Countries Twin Parks	25 Mei 2025
8.	Bank Indonesia dan People's Bank of China menyetujui pembentukan Kerangka Kerja Sama Transaksi Bilateral dalam Mata Uang Lokal (local currency transaction framework)	25 Mei 2025
9.	MoU Dewan Ekonomi Nasional RI dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi	25 Mei 2025
10.	MoU antara Kementerian Pariwisata RI dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RRT mengenai Kolaborasi di Sektor Pariwisata dan Mempromosikan Arus Pariwisata Kedua Negara	25 Mei 2025
11.	Kerja Sama Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs RRT tentang inspeksi, karantina, dan persyaratan sanitasi untuk ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok	25 Mei 2025
12.	Kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dan National Administration of Traditional Chinese Medicine RRT mengenai pengobatan tradisional Tiongkok	25 Mei 2025
13.	Kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dan National Administration of Disease Control and Prevention RRT terkait kerja sama pencegahan dan pengendalian TBC	25 Mei 2025
14.	Kerja sama investasi antara Danantara dan China Investment Corporation	25 Mei 2025



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

15.	Kesepakatan Penguatan Hubungan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia	25 Mei 2025
16.	Kerja Sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan Xinhua News Agency dalam bidang Pemberitaan dan Pertukaran Informasi	25 Mei 2025
17.	Kerja Sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan China Media Group mengenai Kolaborasi dan Kerja Sama di bidang Media	25 Mei 2025
18.	Minutes of Meeting Intergovernmental Joint Steering Committee RI-RRT di Xiamen	25 Juni 2025
19.	Memorandum of Understanding Between the Ministry of Communications and Digital Affairs of The Republic of Indonesia and the State Post Bureau of The People's Republic of China on Strengthening Cooperation in The Field of Postal Services	30 Juli 2025
20.	Arrangement Between the Directorate General of Digital Ecosystems of The Ministry of Communications and Digital Affairs of The Republic of Indonesia and China National Philatelic Co., Ltd. Of The People's Republic of China Concerning Joint Issue of Stamps	31 Juli 2025
21.	Nanning Initiative for the China-ASEAN Industry Ministerial Roundtable Meeting	17 September 2025
22.	Quarantine Protocol for Fish Meal, Fish Oil, and Other Aquatic Animal Protein	12 November 2025
23.	MoU antara Kementerian Kesehatan RI dan Beijing Chaoyang Hospital untuk Coronary Intervention Physician Training Program	13 November 2025
24.	Record of Discussion untuk membuka Pusat Pelatihan Bahasa Mandarin di NTT	14 November 2025
25.	Report The 50th Meeting of The Asean-China Joint Working Group on The Implementation of The Declaration on The Conduct of Parties in the South China Sea (JWG-DOC)	26 November 2025
26.	MoU antara Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia tentang Peningkatan Kerja Sama Kecerdasan Artifisial	29 Desember 2025

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing melaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis sepanjang tahun 2025 yang berkontribusi langsung terhadap realisasi target Indikator Kinerja. Kegiatan tersebut menjadi instrumen diplomasi operasional untuk menghasilkan output yang terukur, karena dirancang berdasarkan analisis yang matang, pendekatan yang *targeted*, serta masukan dari pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya. Rincian program pendukung diantaranya:

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Pertemuan 2+2 Menlu dan Menhan RI-RRT, 21 April 2025	KBRI Beijing memfasilitasi kunjungan dan pelaksanaan pertemuan strategis 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT. Forum ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain MoU on Establishing Comprehensive Strategic Dialogue (CSD), pembentukan konsultasi perlucutan senjata dan non-proliferasi, MoU Keamanan Maritim antara Bakamla dan



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

No.	Kegiatan	Keterangan
		China Coast Guard, serta peresmian pembukaan KJRI Chengdu sebagai penguatan infrastruktur diplomasi di wilayah akreditasi.
2.	Kunjungan Menteri Luar Negeri Mongolia ke Jakarta, 21 Mei 2025	KBRI Beijing turut mendukung pertemuan Menlu RI dengan Menlu Mongolia di Jakarta yang menghasilkan penandatanganan MoU on Political Consultation RI–Mongolia, sebagai landasan penguatan hubungan bilateral dan mekanisme dialog reguler ke depan.
3.	Kunjungan Resmi Premier Li Qiang ke Jakarta, 25 Mei 2025	Duta Besar RI Beijing mendampingi kunjungan Premier Li Qiang yang menjadi momentum besar diplomasi tingkat tinggi. Pertemuan Presiden RI dan Premier RRT menghasilkan paket kesepakatan strategis lintas sektor, mencakup penguatan kerja sama industri dan rantai pasok, proyek Two Countries Twin Parks, kerangka transaksi bilateral mata uang lokal (BI–PBoC), kerja sama DEN–NDRC, kolaborasi pariwisata, protokol karantina ekspor durian beku, kesehatan dan pengendalian TBC, investasi Danantara–CIC, penguatan hubungan KADIN–Kamar Dagang Tiongkok, serta kerja sama media ANTARA dengan Xinhua dan China Media Group.
4.	Minutes of Meeting Intergovernmental Joint Steering Committee RI–RRT, Xiamen	Dokumen MoM JSC menjadi instrumen teknis penting dalam memastikan tindak lanjut kesepakatan pemerintah-ke-pemerintah berjalan terstruktur, termasuk pemantauan proyek prioritas dan penyelarasan agenda kerja sama strategis.
5.	MoU Kemkomdigi RI–State Post Bureau RRT tentang Kerja Sama Layanan Pos	Kesepakatan ini memperluas kerja sama sektor konektivitas dan logistik, mendukung agenda ekonomi digital serta penguatan infrastruktur layanan lintas negara.
6.	Arrangement Joint Issue of Stamps Kemkomdigi RI–China National Philatelic Co., Ltd.	Kerja sama penerbitan prangko bersama menjadi bentuk diplomasi simbolik dan budaya yang memperkuat people-to-people connectivity sekaligus memperingati hubungan bilateral secara historis.
7.	Nanning Initiative – China–ASEAN Industry Ministerial Roundtable Meeting	Inisiatif ini mencerminkan keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama industri kawasan ASEAN–Tiongkok, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai dan integrasi ekonomi regional.
8.	Quarantine Protocol untuk Fish Meal, Fish Oil, dan Protein Hewani Akuatik	Protokol karantina ini menjadi landasan akses pasar baru bagi produk perikanan Indonesia, memperkuat diplomasi ekonomi sektor pangan dan ekspor strategis.
9.	MoU Kemenkes RI–Beijing Chaoyang Hospital tentang Pelatihan Coronary Intervention	Kesepakatan ini mendukung penguatan kapasitas SDM kesehatan Indonesia melalui program pelatihan medis spesialis, sejalan dengan agenda peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional.



No.	Kegiatan	Keterangan
10.	Record of Discussion Pembukaan Pusat Pelatihan Bahasa Mandarin di NTT	RoD ini memperkuat kerja sama pendidikan dan pengembangan SDM daerah, mendukung penguatan kapasitas bahasa dan people-to-people exchanges dalam kerangka kemitraan jangka panjang.
11.	Report 50th Meeting ASEAN–China JWG-DOC on South China Sea	KBRI Beijing memfasilitasi keterlibatan Indonesia dalam mekanisme ASEAN–China terkait implementasi DOC, sebagai kontribusi pada stabilitas kawasan dan diplomasi maritim.
12.	MoU NDRC RRT– Kemkomdigi RI tentang Peningkatan Kerja Sama Kecerdasan Artifisial	Kesepakatan AI ini mencerminkan penyelarasan kerja sama Indonesia–Tiongkok pada sektor pertumbuhan masa depan (new productive forces), membuka ruang kolaborasi teknologi strategis dan transfer inovasi.

Kendala dan Tantangan

Dalam pencapaian IKU tersebut, terdapat sejumlah tantangan teknis yang dihadapi, antara lain:

- Akses terhadap informasi kebijakan dan proses pengambilan keputusan di Tiongkok yang relatif ketat dan berlapis, sehingga memerlukan waktu dan pendekatan berkelanjutan untuk memperoleh gambaran substansial terkait perkembangan implementasi kesepakatan.
- Pemerintah Tiongkok ada kalinya tidak menginformasikan ke KBRI terkait kunjungan pejabat RRT atau pun kebijakan namun menyampaikan hal tersebut langsung ke Kemlu RI atau bahkan langsung ke institusi tanpa
- Pola komunikasi resmi yang cenderung normatif dan repetitif (*parrot diplomacy*), yang pada kondisi tertentu menyulitkan perolehan *real picture* mengenai kesiapan, kendala, maupun timeline aktual implementasi di tingkat teknis.
- Perbedaan prioritas dan tahapan implementasi antara Indonesia dan Tiongkok, baik dari sisi kebijakan sektoral, kerangka waktu, maupun penekanan substansi, yang memerlukan penyelarasan secara bertahap.

Upaya Perbaikan

KBRI Beijing secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya perbaikan yang bersifat struktural, operasional, dan strategis:

- Melakukan pendalaman substansi dan komunikasi berkelanjutan dengan mitra pemerintah Tiongkok melalui berbagai kanal dialog untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan implementasi kesepakatan.
- Mengkombinasikan pendekatan formal dan informal dalam diplomasi untuk melengkapi informasi resmi dengan pemahaman kontekstual di tingkat teknis.
- Mendorong penyelarasan ekspektasi dan prioritas implementasi melalui dialog yang konstruktif dan berorientasi pada kepentingan bersama.



Proyeksi Kedepan

Ke depan, kinerja IKU B.1.1 diperkirakan akan tetap ditopang oleh dinamika hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok yang semakin erat dan komprehensif. Kesepakatan baru pada berbagai bidang strategis akan tetap muncul seiring dengan intensitas dialog bilateral dan kebutuhan kedua negara untuk merespons dinamika ekonomi, geopolitik, dan kawasan.

Namun demikian, fokus diplomasi bilateral tidak semata diarahkan pada peningkatan jumlah kesepakatan baru, melainkan pada penguatan kualitas dan keberlanjutan hasil kerja sama. Dalam konteks tersebut, upaya KBRI Beijing ke depan akan semakin difokuskan pada tindak lanjut dan implementasi kesepakatan-kesepakatan yang telah ada, agar manfaat konkret dari kerja sama bilateral dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan dunia usaha di Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran orientasi dari *output-based diplomacy* menuju *outcome- and impact-based diplomacy*, dengan penekanan pada konversi kesepakatan menjadi proyek, program, dan kegiatan nyata.

Selain itu, tahun-tahun mendatang juga akan ditandai dengan penyusunan kembali *Plan of Action* Kemitraan Strategis Indonesia–Tiongkok, yang akan menjadi kerangka kerja baru bagi penguatan hubungan bilateral. Proses ini akan memberikan kesempatan strategis untuk melakukan penajaman prioritas, penyelarasan agenda pembangunan nasional kedua negara, serta evaluasi atas capaian dan tantangan kerja sama sebelumnya. KBRI Beijing akan berperan aktif dalam mengawal proses tersebut agar *Plan of Action* yang disusun lebih fokus, terukur, dan berorientasi pada hasil.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK B.1.1



Penandatanganan MoU mengenai Penguatan Kerja Sama Ekonomi di Bidang Industri dan Rantai Pasok, Mei 2025



Penandatanganan MoU Kemenkes RI–Beijing Chaoyang Hospital tentang Pelatihan Coronary Intervention



Analisis IKU B.1.2: Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan

Analisis potensi ekonomi tematik merupakan produk analisis yang disusun oleh Perwakilan RI di bidang ekonomi dengan fokus pada isu atau sektor tertentu, seperti perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, maupun jasa. Analisis ini disusun secara tematik dan kontekstual, menyesuaikan dengan dinamika ekonomi negara akreditasi serta kebutuhan strategis Indonesia, termasuk untuk menjawab permintaan atau kebutuhan spesifik dari pemangku kepentingan.

Analisis dimaksud dinilai dimanfaatkan apabila digunakan secara nyata oleh pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis atau kebijakan. Pemangku kepentingan tersebut meliputi antara lain pelaku usaha, investor, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pihak lain di Indonesia yang memiliki kepentingan dalam pengembangan kerja sama ekonomi dengan negara akreditasi.

Dalam ruang lingkup pelaksanaannya, Perwakilan RI menyampaikan analisis potensi ekonomi tematik kepada pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, pemangku kepentingan menindaklanjuti analisis tersebut melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti penjajakan kerja sama, pelaksanaan promosi, perluasan akses pasar, atau fasilitasi peluang investasi. Perwakilan RI kemudian melakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut untuk mengidentifikasi sejauh mana analisis yang disampaikan benar-benar dimanfaatkan dan memberikan dampak.

Penghitungan capaian kinerja IKU ini dilakukan berdasarkan jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan dalam satu tahun anggaran, yaitu pada periode Januari hingga Desember. Melalui pengukuran ini, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dapat menilai efektivitas serta nilai tambah dari analisis ekonomi yang dihasilkan dalam mendukung kepentingan nasional, khususnya dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemangku kepentingan.

Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa analisis potensi ekonomi tematik yang disusun tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif dan berdampak nyata dalam mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi Indonesia dengan negara akreditasi.

Informasi Kinerja

Capaian IKU B.1.2: Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	6
	Target Jumlah analisis potensi ekonomi tematik	5



	yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	
Capaian		120%

Pada tahun pelaporan, capaian IKU B.1.2 tercatat sebanyak 6 analisis, melampaui target yang ditetapkan sebesar 5 analisis, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 120 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa analisis potensi ekonomi tematik yang disusun oleh KBRI Beijing memiliki tingkat relevansi dan kegunaan yang tinggi bagi para pemangku kepentingan di Indonesia.

Perbandingan Kinerja

Target, Realisasi, dan Capaian IKU B.1.2: Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan

	2023	2024	2025
Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	5	4	6
Target Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	5	4	5
Capaian	100%	100%	120%

Tabel:

Kinerja IKU B.1.2 selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat. Pada tahun 2023, jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan tercatat sebanyak 5 analisis, sejalan dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.

Pada tahun 2024, jumlah analisis yang dimanfaatkan tercatat sebanyak 4 analisis, sesuai dengan target tahun tersebut, sehingga capaian tetap berada pada 100 persen. Penyesuaian target dan realisasi pada tahun 2024 menunjukkan adanya penyesuaian antara kapasitas penyusunan analisis, fokus pada isu-isu ekonomi yang lebih selektif dan spesifik, dan mempertimbangkan baru berangsurpulihan Tiongkok dari masa COVID.

Pada tahun 2025, kinerja IKU B.1.2 mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi sebanyak 6 analisis dari target 5 analisis, menghasilkan capaian sebesar 120 persen. Peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya peran KBRI Beijing sebagai penyedia analisis ekonomi tematik yang aplikatif dan dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.



Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IKU B.1.2 pada tahun 2025 tidak terlepas dari dinamika ekonomi Tiongkok yang berkembang pesat serta menerjemahkannya ke dalam analisis tematik yang relevan dan aplikatif bagi pemangku kepentingan di Indonesia.

Salah satu faktor utama pendukung keberhasilan adalah percepatan kemajuan teknologi dan transformasi industri di Tiongkok, khususnya di sektor-sektor strategis seperti kecerdasan buatan (AI), kesehatan dan bioteknologi, energi bersih, serta manufaktur berteknologi tinggi. Perkembangan tersebut membuka peluang kerja sama baru yang sebelumnya belum banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan institusi Indonesia, sehingga mendorong permintaan terhadap analisis tematik yang mampu memetakan peluang, risiko, serta model kerja sama yang potensial.

Selain itu, besarnya pasar domestik Tiongkok dan masih terbukanya ceruk pasar tertentu menjadi faktor pendorong meningkatnya pemanfaatan analisis. Analisis yang disusun KBRI Beijing membantu mengidentifikasi peluang pasar yang relatif belum optimal dimanfaatkan oleh Indonesia, baik untuk ekspor produk bernilai tambah, kerja sama industri, maupun investasi strategis. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi pemangku kepentingan dalam menyusun strategi masuk pasar atau ekspansi usaha.

Keberhasilan capaian juga dipengaruhi oleh pendekatan partisipatif dalam penyusunan analisis, di mana KBRI Beijing secara aktif menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, asosiasi industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian/lembaga teknis. Masukan tersebut memperkaya sudut pandang analisis, meningkatkan akurasi substansi, serta memastikan kesesuaian dengan kebutuhan riil pengguna.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing melaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis sepanjang tahun 2025 yang berkontribusi langsung terhadap realisasi target Indikator Kinerja. Kegiatan tersebut menjadi instrumen diplomasi operasional untuk menghasilkan output yang terukur, karena dirancang berdasarkan analisis yang matang, pendekatan yang *targeted*, serta masukan dari pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya. Rincian program pendukung diantaranya:

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	2025 Taiyuan Energy Low Carbon Development Forum (TELC), Taiyuan, Shanxi, 26–27 September 2025	KBRI Beijing berpartisipasi dalam forum TELC untuk mendalami perkembangan teknologi rendah karbon (low carbon) yang dikembangkan Tiongkok, sekaligus menjajaki peluang kerja sama konkret di sektor transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
2.	Kunjungan Kerja Wakil Kepala Perwakilan RI ke	Wakil Kepala Perwakilan RI melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah perusahaan Tiongkok di sektor



No.	Kegiatan	Keterangan
	Changsha, Hunan, 4–5 Juni 2025	engineering infrastruktur dan waste-to-energy sebagai bagian dari upaya memperoleh pemahaman teknis yang lebih mendalam serta membuka ruang penjangkauan kerja sama teknologi ramah lingkungan.
3.	Kunjungan Lapangan ke Tianjin Binhai High-tech Industrial Development Area, Tianjin, 6 Maret 2025	Perwakilan KBRI Beijing mengikuti kunjungan ke kawasan industri teknologi tinggi Tianjin Binhai untuk mempelajari perkembangan teknologi Tiongkok di sektor smart energy, kesehatan, dan baterai kendaraan listrik, guna memperkuat pemetaan peluang kolaborasi industri strategis.
4.	Kunjungan ke China National Nuclear Corporation (CNNC) dan Chinese Institute of Atomic Energy (CIAE), Beijing, 3 Maret 2025	Kegiatan dihadiri oleh sekitar 100 perwakilan negara asing dan organisasi internasional (UNWFP, UNIDO, UNEP, AIIB, ASEAN-China Center). Kunjungan bertujuan memperdalam pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi nuklir Tiongkok di sektor energi dan kesehatan, serta potensi penerapannya bagi kerja sama internasional.
5.	Belt and Road Green Brand Going Global Initiative & China Waste Incineration Program Exchange Conference, Hangzhou, 14–16 Mei 2025	KBRI Beijing hadir dalam forum untuk mendalami teknologi waste-to-energy serta membahas solusi pengelolaan sampah berkelanjutan. Partisipasi ini juga membuka ruang diskusi awal terkait potensi kerja sama proyek hijau di Indonesia.

Kendala dan Tantangan

Dalam IK ini, KBRI Beijing menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang bersifat struktural maupun operasional. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap informasi ekonomi yang komprehensif dan terbuka di Tiongkok. Informasi kebijakan, rencana industri, maupun data sektoral sering kali tersebar di berbagai sumber, bersifat parsial, dan tidak seluruhnya tersedia dalam format atau bahasa yang mudah diakses. Kondisi ini menuntut proses pendalaman berlapis dan verifikasi silang yang memerlukan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit.

Tantangan berikutnya adalah perbedaan bahasa, khususnya pada terminologi teknis dan kebijakan. Banyak dokumen resmi, kebijakan industri, serta publikasi sektoral di Tiongkok menggunakan istilah teknis yang sangat spesifik dan kontekstual, sehingga memerlukan pemahaman mendalam terhadap bahasa Mandarin teknis dan konteks kebijakan setempat. Risiko perbedaan penafsiran menjadi perhatian tersendiri dalam memastikan akurasi analisis yang disampaikan kepada pemangku kepentingan di Indonesia.

Dari sisi internal, keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan yang perlu dikelola secara cermat. Kebutuhan penyusunan analisis tematik yang semakin beragam dan mendalam sering kali harus diimbangi dengan pelaksanaan tugas diplomasi



ekonomi lainnya yang bersifat rutin maupun ad hoc. Kondisi ini menuntut pengelolaan prioritas kerja yang ketat agar kualitas analisis tetap terjaga.

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan dalam penyusunan serta pemanfaatan analisis potensi ekonomi tematik, KBRI Beijing telah dan akan terus melakukan sejumlah upaya perbaikan:

- KBRI Beijing memperkuat pendalaman dan diversifikasi sumber informasi melalui pemanfaatan berbagai kanal resmi dan non-resmi, termasuk publikasi pemerintah Tiongkok, laporan lembaga riset, asosiasi industri, serta jejaring pelaku usaha dan akademisi.
- Untuk mengatasi tantangan bahasa dan terminologi teknis, dilakukan penguatan kapasitas internal dalam pemahaman bahasa Mandarin teknis dan kebijakan, baik melalui pembelajaran mandiri, berbagi pengetahuan antar fungsi, maupun pemanfaatan narasumber lokal yang kompeten. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi penafsiran dan kedalaman analisis, khususnya pada sektor-sektor berteknologi tinggi dan industri strategis.
- KBRI Beijing mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan prioritas kerja, dengan menata pembagian tugas secara lebih terstruktur serta mendorong kerja lintas fungsi dalam penyusunan analisis tematik. Kolaborasi internal ini diharapkan dapat menjaga kualitas analisis meskipun dengan keterbatasan SDM, serta mempercepat proses penyusunan dan diseminasi.
- Kedepan, harapannya dapat dilakukan penguatan mekanisme umpan balik (feedback loop) dengan pemangku kepentingan untuk menilai relevansi dan kegunaan analisis yang telah disampaikan, secara lebih komprehensif. Masukan tersebut menjadi dasar penyempurnaan substansi dan metode penyusunan analisis di periode berikutnya, sehingga produk analisis semakin tepat guna dan berdampak.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, kebutuhan terhadap analisis potensi ekonomi tematik diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan arah kebijakan pembangunan Tiongkok yang menekankan penguatan *new qualitative productive forces*, termasuk pengembangan teknologi tinggi, digitalisasi industri, kecerdasan buatan, energi bersih, manufaktur cerdas, serta inovasi berbasis riset dan penguasaan teknologi. Fokus kebijakan tersebut akan mendorong konsentrasi sumber daya negara dan pelaku usaha Tiongkok pada sektor-sektor unggulan tertentu, sehingga memerlukan pemetaan peluang yang lebih tajam dan selektif bagi Indonesia.

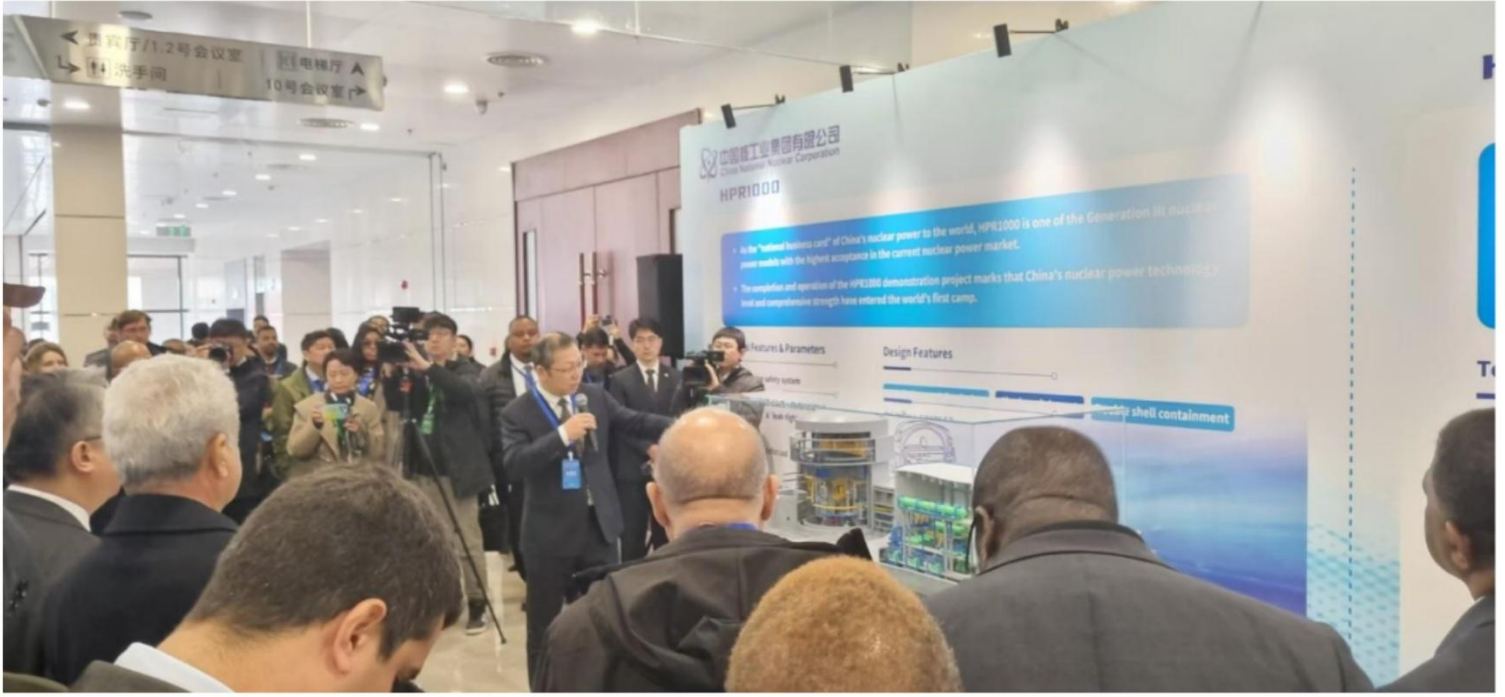
Dalam konteks tersebut, Indonesia perlu secara aktif menyelaraskan prioritas ekonomi dan penawaran kerja sama dengan arah transformasi ekonomi Tiongkok agar tetap relevan dan kompetitif. Analisis potensi ekonomi tematik akan menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi peluang investasi inbound, peningkatan perdagangan bernilai tambah, serta potensi alih teknologi dan penguatan kapasitas industri nasional. Tanpa analisis yang



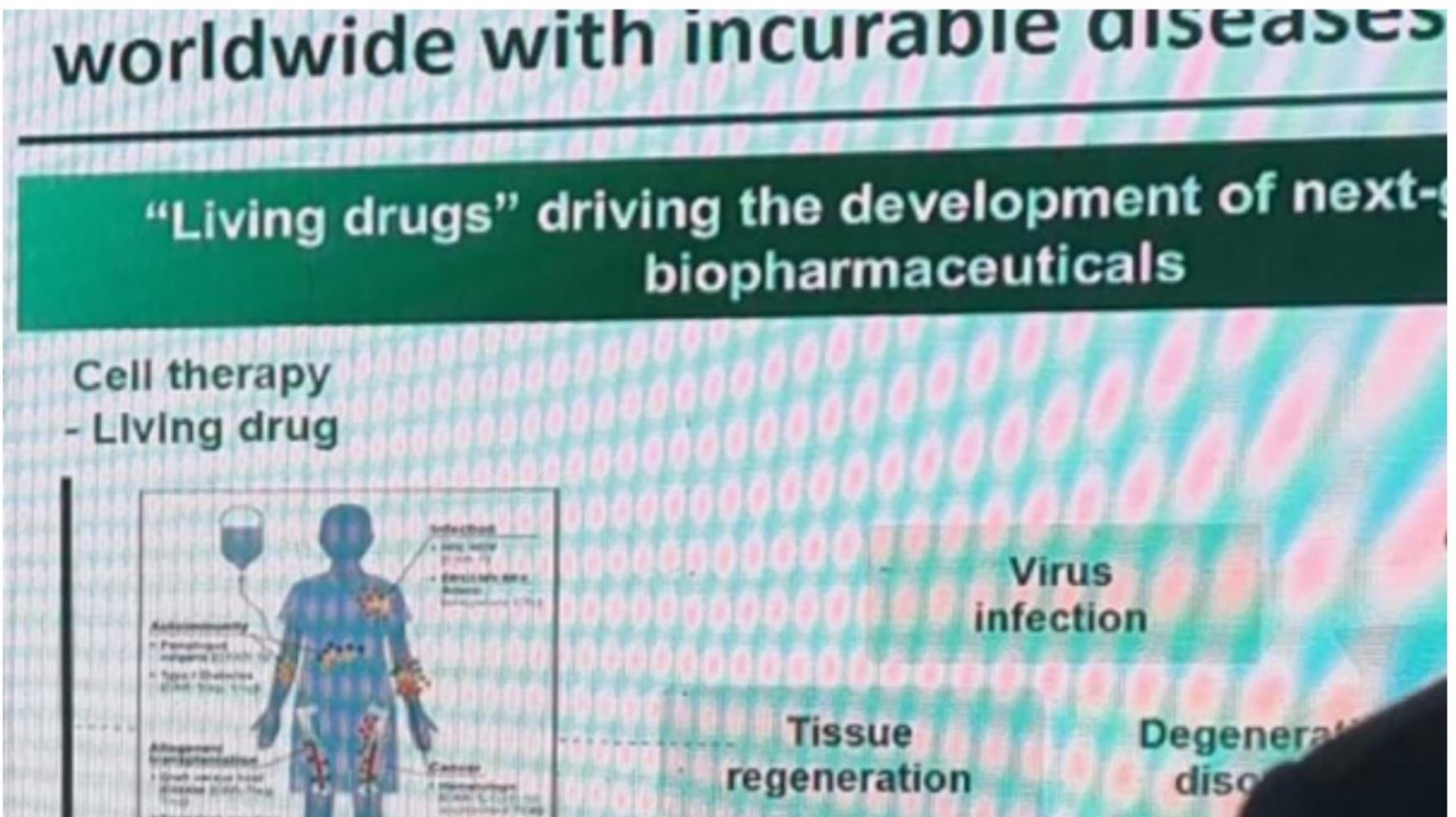
Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

memadai dan berbasis konteks kebijakan Tiongkok, peluang kerja sama berisiko tidak optimal atau tidak tepat sasaran.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK B.1.2



Kunjungan ke China National Nuclear Corporation (CNNC) dan Chinese Institute of Atomic Energy (CIAE), Beijing, 3 Maret 2025



Pengumpulan Informasi di Tianjin Binhai High-tech Industrial Development Area, Tianjin, 6 Maret 2025



Analisis IK B.1.5 Intensitas Saling Kunjung Pejabat Pemerintah Indonesia dengan Negara Akreditasi

Intensitas saling kunjung merupakan ukuran tingkat interaksi resmi antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara akreditasi yang tercermin melalui kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, dan kunjungan kerja. Kunjungan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah Indonesia ke negara akreditasi maupun sebaliknya, dan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kedekatan serta dinamika hubungan bilateral.

Pejabat pemerintah Indonesia yang termasuk dalam ruang lingkup pengukuran ini meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Kepala Badan/Lembaga/Komisi Negara, pimpinan lembaga legislatif pusat dan daerah, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua BPK, serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara itu, pejabat pemerintah negara akreditasi mencakup Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, Wakil Kepala Negara atau Wakil Kepala Pemerintahan, Kepala Negara Bagian atau Provinsi, serta Menteri.

Kegiatan saling kunjung memiliki peran strategis sebagai sarana untuk mengukuhkan hubungan baik dan memperkuat kerja sama yang dilandasi prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Selain itu, intensitas kunjungan juga merefleksikan kualitas layanan keprotokolan dan dukungan diplomatik yang diberikan oleh Perwakilan RI dalam memfasilitasi interaksi tingkat tinggi antar pemerintah.

Ruang lingkup penghitungan meliputi seluruh kunjungan pejabat pemerintah Indonesia ke negara akreditasi maupun kunjungan pejabat pemerintah negara akreditasi ke Indonesia yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu pada periode Januari hingga Desember. Penghitungan dilakukan berdasarkan jumlah kunjungan antar pejabat pemerintah kedua negara dalam periode tersebut.

Tujuan dari pengukuran intensitas saling kunjung ini adalah untuk mengetahui derajat dan kedalaman hubungan Indonesia dengan negara akreditasi, sekaligus menilai efektivitas diplomasi bilateral dalam membangun dan memelihara hubungan yang produktif dan berkelanjutan.

Informasi Kinerja

Capaian B.1.5 Intensitas Saling Kunjung Pejabat Pemerintah Indonesia dengan Negara Akreditasi

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Intensitas Saling Kunjung Pejabat Pemerintah Indonesia dengan Negara Akreditasi	Jumlah kunjungan selama 1 tahun	56
	Target Jumlah kunjungan selama 1 tahun	12
Capaian		466.67%



Batas Toleransi	120%
-----------------	------

Pada tahun 2025, realisasi Intensitas Saling Kunjung Pejabat Pemerintah Indonesia dengan Negara Akreditasi tercatat sebanyak 56 kunjungan dalam satu tahun anggaran. Angka tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 12 kunjungan, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 466,67 persen, dengan batas toleransi capaian sebesar 120 persen.

Capaian yang sangat tinggi ini mencerminkan meningkatnya intensitas interaksi dan komunikasi tingkat tinggi antara Indonesia dan negara akreditasi, yang sekaligus menunjukkan kedalaman dan dinamika hubungan bilateral yang semakin erat.

Perbandingan Kinerja

Target, Realisasi, dan Capaian IKU B.1.5 Intensitas Saling Kunjung Pejabat Pemerintah Indonesia dengan Negara Akreditasi

	2023	2024	2025
Jumlah kunjungan selama 1 tahun	N/A	22	56
Target Jumlah kunjungan selama 1 tahun	N/A	10	12
Capaian	N/A	220%	466.67%
Batas Toleransi	N/A	120%	120%

Kinerja IKU B.1.5 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan pada periode 2024–2025, yang mencerminkan penguatan intensitas hubungan bilateral antara Indonesia dan negara akreditasi. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan pejabat pemerintah tercatat sebanyak 22 kunjungan dari target 10 kunjungan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 220%, melampaui batas toleransi yang ditetapkan sebesar 120%.

Tren peningkatan tersebut semakin menguat pada tahun 2025. Jumlah kunjungan selama satu tahun anggaran meningkat tajam menjadi 56 kunjungan, jauh di atas target 12 kunjungan, dengan capaian mencapai 466,67%. Lonjakan ini menunjukkan eskalasi interaksi tingkat tinggi yang sangat intens, baik dalam bentuk kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, maupun kunjungan kerja, yang mencerminkan kedalaman dan dinamika hubungan bilateral yang semakin erat dan strategis.

Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IKU B.1.5 yang melampaui target secara signifikan pada tahun 2024 dan 2025 tidak terlepas dari dinamika hubungan bilateral, serta kesiapan operasional



KBRI Beijing dalam mendukung diplomasi tingkat tinggi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi:

- Komitmen politik pimpinan tertinggi kedua negara menjadi faktor utama pendorong meningkatnya frekuensi kunjungan. Hubungan Indonesia–Tiongkok yang berada dalam kerangka Kemitraan Strategis Komprehensif, serta momentum penguatan hubungan bilateral pasca peringatan 75 tahun hubungan diplomatik, menciptakan dorongan kuat bagi peningkatan interaksi langsung antar pejabat tinggi untuk mengawal berbagai agenda kerja sama strategis.
- Kompleksnya agenda kerja sama bilateral yang memerlukan koordinasi tingkat tinggi secara berkelanjutan. Kerja sama di bidang ekonomi dan pembangunan, investasi, industri hijau, energi, konektivitas, hingga teknologi dan pendidikan mendorong kebutuhan akan kunjungan kerja dan pertemuan tatap muka sebagai sarana percepatan pengambilan keputusan dan tindak lanjut kesepakatan.
- Peran aktif dan kesiapan KBRI Beijing dalam memberikan dukungan keprotokol dan diplomatik secara profesional dan responsif. Kemampuan KBRI Beijing dalam mengelola peningkatan volume kunjungan, termasuk pengaturan protokol, *substantive briefing*, perizinan, dan koordinasi lintas otoritas setempat, memungkinkan seluruh rangkaian kunjungan dapat terlaksana secara efektif dan tepat waktu.
- Meningkatnya intensitas saling kunjung juga mencerminkan tingginya kepercayaan (mutual trust) antara Indonesia dan negara akreditasi. Frekuensi kunjungan yang tinggi menunjukkan bahwa mekanisme dialog bilateral berjalan dengan baik dan dipandang sebagai kanal yang efektif untuk membahas isu-isu strategis dan sensitif, baik pada level bilateral maupun regional dan global.

Tabel berikut merupakan rekap dari sebagian kunjungan berbagai instansi ke wilayah kerja KBRI Beijing:

No	INSTANSI	KEGIATAN/ACARA	TINGKAT KUNJUNGAN	JUMLAH ORANG	TEMPAT	WAKTU
1	BAKAMLA	1ST High Level Meeting between BAKAMLA RI and CHINA COAST GUARD	Menteri (Kepala BAKAMLA)	6	Beijing, Guangzhou	7-10 Januari
2	Kemhan	Kunjungan Menteri Pertahanan ke Beijing	Menteri (Menhan)	10	Beijing	21-23 Januari
3	TNI	Kunjungan Panglima TNI mendampingi Menhan ke Beijing	Menteri (Panglima TNI)		Beijing	21-23 Januari
4	KBRI Beijing	Ketibaan LS Baru		1	Beijing	17 Januari
5	KBRI Beijing	Ketibaan LS Baru		1	Beijing	22 Januari
6	TNI	Kunjungan Siswa Sesko TNI		91	Beijing	24-28 Februari
7	Bapak Dr. Nur Hassan Wirajuda	Kunjungan Dr. Nur Hassan Wirajuda menghadiri acara ACC	Mantan Menteri	2	Beijing	17-22 Februari
8	DPR RI	Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI di Shanghai	Ketua Komisi I DPR	24	Shanghai	22-26 Februari



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

9	DPR RI	Kunjungan Privat (Transit) Anggota DPR RI (Bpk. Gde Demer Linggih)	Anggota DPR	2	Beijing	23 & 28 Februari
10	KBRI Beijing	Ketibaan HS Baru		12	Beijing	1 Februari
11	Delegasi Kemlu	Pertemuan the South China Sea Sub forum: Illuminating the Blue: Fostering Peace and Sustainability in the South China Sea - Boao Forum for Asia (BFA)	Dirjen ASEAN	3	Hainan	26-29 Maret
12	Kementerian Koordinator Infrastruktur	Kunjungan Menko Infrastruktur ke Boao Forum	Menteri	7	Hainan	26-29 Maret
13	Bapak Marty Natalegawa	Kunjungan ke Boao Forum	Mantan Menteri	2	Hainan	26-29 Maret
14	Bapak Dino Patti Djalal	Kunjungan ke Boao Forum	Mantan Menteri	1	Hainan	26-29 Maret
15	Kemenkeu	BoD Meeting AIB	Kasubdit	3	Beijing	23-27 Maret
16	Kemlu	Konferensi "Deliberative Democracy and Constitutional Amendment"	Sahli (Eselon 1)	2	Ulaanbaatar	2-5 Mei
17	Kemlu	Pertemuan 2+2	Menteri	15	Beijing	19-22 April
18	Kemhan	Pertemuan 2+2	Menteri + Panglima TNI	20	Beijing	19-22 April
19	MPR	Kunjungan Kerja Wakil Ketua MPR RI	Wakil Ketua MPR RI	7	Beijing, Shenzhen	13-17 April
20	Pemprov DKI Jakarta	Wuhan Food Trade Fair	Sekda	7	Wuhan	27-29 Maret
21	Kemdiktisaintek	Kunker Wamendiktisaintek	Wakil Menteri	5	Liuzhou	11-16 Mei
22	DPR RI	kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI	Ketua Komisi IV DPR	43	Beijing	21-27 Mei
23	DPR RI	Transit Ketua BKSAP DPR	Ketua BKSAP DPR	2	Beijing	8 & 11 Mei
24	Kemenkes	"Indonesia-China AI Delegation Visit"	Ketua Pokja	5	Beijing, Shenzhen	19-23 Mei
25	IPB	Kunjungan Rektor IPB	Rektor IPB	2	Beijing	24-26 Mei
26	MPR	Kunjungan Ketua MPR RI / Sekjen Gerindra	Ketua MPR RI	9	Beijing, Shanghai	25-27 Mei
27	Dewan Ekonomi Nasional	Kunjungan Kepala DEN, Wameninves, Wamenkeu	Kepala DEN, Wameninves, Wamenkeu	24	Beijing	19-23 Mei
28	Swasta	Launching Assalamualaikum Beijing 2	Swasta	9	Beijing	17-19 Mei
29	LBP	Kunjungan pribadi LBP	Kepala DEN / LBP	7	Beijing	21-23 Juni
30	DPR RI	Kunjungan BKSAP DPR RI	Ketua BKSAP DPR	10	Shanghai, Xi'an, Beijing	11-17 Juni



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

31	PPIT	Kunjungan Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok Dubes AI Busyra Basnur	Ketua PPIT/Mantan Dubes	5	Nanjing, Beijing	14-18 Juni
32	Lemhanas	Kunjungan Peserta Lemhanas	Lemhanan	30	Beijing	15-20 Juni
33	BPIP	Kunjungan Dubes Darmansjah Djumala (BPIP)	Mantan Dubes	5	Beijing	17 Juni
34	Bapak Dr. Nur Hassan Wirajuda	Kunjungan Dr. Nur Hassan Wirajuda	Mantan Menteri	2	Beijing	1-6 Juli
35	Bank Indonesia	Kunjungan Deputi Gubernur Bank Indonesia	Deputi Gubernur BI	3	Hangzhou, Beijing	16-21 Juni
36	Kementerian Keuangan	Kunjungan Menkeu AIB	Menteri	8	Beijing	23-27 Juni
37	Kementerian PPN/Bappenas	Kunjungan Deputi Bappenas AIB	Eselon I	3	Beijing	23-27 Juni
38	Kemlu	Kunjungan Tim Reaktivasi KBRI Pyong Yang	Staf	3	Beijing	19 Juni
38	KBRI Wina	32nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE)	Sek 1	1	Weihai	22-27 Juni
40	Kemlu	31st China Lanzhou Investment and Trade Fair	Eselon I	1	Beijing, Lanzhou	4-8 Juli
41	BAIS	Kunker KABAIS	Menteri	12	Beijing	15-18 Juli
42	Kemenko IPK	"12th Congress on High Speed Rail"	Eselon I	3	Beijing	7-10 Juli
43	BNPB	Kunjungan Kerja Kepala BNPB	Menteri	4	Beijing	11-15 Juli
44	Kementerian PU	Kunker Menteri PU	Menteri	4	Beijing	23-25 Juli
45	Komdigi	Kunker Kemenkomdigi Penandatanganan MoU kerja sama bidang Pos dan Arrangement tentan JIS, 30 Juli- 2 Agustus 2025	Eselon I	6	Beijing, Xiamen	30 Juli-2 Agustus
46	Kemlu	Kunker Dit. Afrika follow up IAF	Staf	2	Beijing	3-9 Agustus
47	Kemlu	Kunjungan Tim Persiapan the 10th FEALAC Foreign Ministers' Meeting 2025	Staf	2	Ulaanbaatar	6-8 Agustus
48	Kemenpar	Kunjungan Deputi Kemenpar Pre Event Wonderful Indonesia Business Matching	Eselon I	4	Beijing	8-10 Agustus
49	BIN	Pemeliharaan Pemeliharaan Perangkat Keamanan Siber di Perwakilan RI	Eselon I	3	Beijing	7-10 Agustus



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

50	Kemlu	Pemeliharaan Pemeliharaan Perangkat Keamanan Siber di Perwakilan RI	Eselon II	1	Beijing	7-10 Agustus
51	Komdigi	Sidang APPU Executive Council 2025	Staf	1	Ulaanbaatar	30 Jun-5 Juli
52	PDIP / BPIP	Kunjungan Ibu Megawati Soekarnoputri pada Global Civilization Dialogue Ministerial Meeting	Mantan Presiden	28	Beijing, Yunnan	8-14 Juli
53	Kemenbud	Kunker Menteri Kebudayaan pada Global Civilization Dialogue Ministerial Meeting	Menteri	10	Beijing	9-14 Juli
54	CPOPC	Kunker Sekjen CPOPC	Eselon I	3	Beijing	21-23 Juli
55	KBRI Pyongyang	Transit KBRI Pyongyang	Staf	2	Beijing	9, 15, 16 Agustus
56	Keminvess	Kunjungan Menteri Investasi	Menteri	4	Beijing	27-29 Agustus
56	DPR RI	Transit (GKSB) DPR RI-Parlemen Belarusia	Anggota DPR	3	Beijing	18 Agustus
58	Kemenko IPK	Kunjungan	Eselon II	2	Beijing	27-29 Agustus
59	Kemenko IPK	Kunjungan Menko IPK	Menteri	5	Tianjin	29-30 Agustus
60	Lintas K/L	Seminar on Digital Economy Development Capacity Building for Belt and Road Countries	Staf	4	Beijing	27 Agustus - 16 September
61	Lintas K/L	Tim Aju Kunpres	Staf	17	Tianjin & Beijing	25 Agustus - 5 September
62	Kemlu	Tim Inti Kemlu RI Kunpres	Menlu	23	Tianjin & Beijing	28-5 September
63	Kemlu	Penjemputan Keluarga Sdr. Winadi Sidik, Petugas Komunikasi KBRI Pyongyang	Keluarga HS	2	Beijing	22-23 September
64	Kemlu	Ketibaan Sdr. Muji Lastari/Staf Nondiplomatik (SK.111) pada Perwakilan RI Beijing	HS	1	Beijing	2 Oktober
65	Kemenko Perekonomian	East Asia Forum 2025 and Talk China Seminar	Eselon I	2	Beijing	22-25 September
66	KBRI Pyongyang	Transit KBRI Pyongyang	Staf	2	Beijing	2-4 Oktober
67	Kemlu	Tim VII Kunjungan Kerja Operasional (KKO) Perwakilan RI TA 2025	Staf	3	Beijing	15-18 Oktober
68	Presiden RI	Kunjungan Presiden RI ke Beijing	Presiden	64	Beijing	3-Sep-25



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

69	Kemenko IPK	Kunjungan Menko IPK dalam rangka Kunpres	Menteri	5	Tianjin	30-31 Aug 2025
70	Kemdiktisaintek	Kunjungan Wamendikti Sainstek dalam rangka Kunpres	Wakil Menteri	2	Tianjin, Beijing	29-3 September
71	Lemhannas	Kunjungan Gubernur Lemhannas	Gubernur Lemhannas	6	Beijing	12-15 Aug
72	Kemenhub	Kunjungan Menteri Perhubungan	Menteri	8	Beijing, Qingdao	10-13 Nov
73	BP Taskin	Kunjungan Kepala BP Taskin	Menteri	5	Beijing, Shanghai	2-5 Dec
74	Dubes Gary Yusuf	Kunjungan Dubes Gary Yusuf	Mantan Dubes	1	Beijing	16-21 Aug
75	Dubes Dino Patti Djalal	Kunjungan Dubes Dino Patti Djalal (FPCI)	Mantan Wamenlu	6	Beijing	19-22 Aug
76	Dubes Al Busyra Basnur	Kunjungan Dubes Al Busyra Basnur (PPIT)	Mantan Dubes	4	Beijing	16-21 Aug
77	BPK dan Polri	Kunjungan Pemeriksaan BPK dan Korlantas Polri	Eselon I	9	Beijing	24-Aug
78	Kemenpar	Kunjungan Deputi Kemenpar Wonderful Indonesia Business Matching	Eselon I	8	Beijing	September
79	Bank Indonesia	Kunjungan Gubernur Bank Indonesia	Gubernur Bank Indonesia	4	Beijing	September
80	Lintas K/L	Tim Jamkes Kepri (5 Pax - Kemkeu, Kemlu, Jasindo)	Eselon III	5	Beijing	Oktober
81	Lintas K/L	Tim JWG JD (Kemlu, ...)	Eselon II	9	Beijing	21-23 Oct
82	Dubes Rizal Sukma	Kunjungan Dubes Rizal Sukma	Mantan Dubes	1	Beijing	22-24 Oct
83	Kemenkum	Kunjungan Menteri Hukum	Menteri	10	Xian	24-28 Oct
84	Kemenperin	Kunjungan Wamenperin	Wakil Menteri	8	Beijing	November
85	BPOM	Kunjungan Kepala BPOM	Menteri	5	Beijing	November
86	BMKG	Kunjungan Kepala BMKG	Menteri	2	Beijing	November
87	Kemlu	Kunjungan BSKLN	Eselon II	4	Beijing	10-14 November
88	Kementerian PU	Kunjungan Menteri PU	Menteri	4	Beijing	12-14 November
89	Gubernur NTT	Kunjungan Gubernur NTT	Gubernur	8	Beijing	14-16 November
90	MPR	Kunjungan Wakil Ketua MPR RI Bpk. Eddy Soeparno	Waka MPR	6	Beijing	Desember
91	Menteri Desa dan PDT	Kunjungan Wamendes PDT dan Kepala Desa	Wakil Menteri	40	Beijing	30 Okt - 1 Nov
92	Kemdiktisaintek	Kunjungan Wamendikti Sainstek	Wakil Menteri	2	Beijing	September
93	Pemkab Tanimbar	Kunjungan Bupati Tanimbar	Bupati	2	Beijing	Oktober



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

94	Dubes Imron Cotan	Kunjungan Dubes Imron Cotan	Mantan Dubes	1	Beijing	Desember
95	Dubes Rizal Sukma	Kunjungan Dubes Rizal Sukma	Mantan Dubes	1	Beijing	Desember
96	BPK	Transit Anggota BPK RI	Anggota BPK	5	Beijing	Desember
97	KBRI	Kunjungan adhoc Wakil Dubes RI Beijing	Home Staff	1	Beijing	Desember
98	BPK	Kunjungan BPK RI pemeriksaan Bea Cukai	Anggota BPK	8	Beijing	November
99	LAN	Kunjungan Lembaga Administrasi Negara	Eselon II	17	Beijing	November
100	MPR	Kunjungan Privat Waka MPR Bpk. Ibas	Waka MPR	8	Xian	September
101	DEN	Kunjungan Privat Ketua DEN	Menteri	7	Beijing	Juni
102	Dubes Fadjroel	Kunjungan Privat Dubes RI Kazakhstan	Duta Besar	2	Beijing	Juni
103	KKP	Kunjungan Wamen KKP	Wakil Menteri		Qingdao	Oktober
104	Pindad	Kunjungan ke Wuhan			Wuhan	Oktober

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing secara berkala menyelenggarakan pelatihan, baik berupa pengenalan maupun *refreshment course*, di bidang keprotokolan guna membekali serta mempertahankan kapasitas pejabat dan staf dalam penanganan delegasi RI. Upaya ini menjadi semakin relevan mengingat intensitas kunjungan tingkat tinggi, termasuk menteri dan kepala negara yang kerap melibatkan rangkaian prosesi khusus serta standar protokoler yang harus diselaraskan antara pihak Indonesia dan Tiongkok.

Selain itu, KBRI Beijing menekankan pentingnya koordinasi erat dan pelibatan sejak tahap perencanaan kunjungan. Walaupun belum sepenuhnya dapat diterapkan secara merata pada seluruh kunjungan, Perwakilan senantiasa berupaya terlibat sedini mungkin dalam proses persiapan dan pelaksanaan. Pendekatan ini meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak terkait dalam mengantisipasi dinamika lapangan, seperti perubahan jadwal, lokasi, maupun substansi agenda, sehingga pelaksanaan kunjungan dapat berlangsung lebih tertib, efektif, dan adaptif.

Kendala dan Tantangan

Di balik capaian intensitas saling kunjung yang sangat tinggi, pelaksanaan IKU B.1.5 juga dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan operasional yang signifikan, khususnya terkait dengan kapasitas sumber daya dan kompleksitas tugas yang ditangani oleh KBRI Beijing, terutama pada Fungsi Protokol dan Konsuler (Protkons).



Seluruh layanan pada Fungsi Protkons saat ini ditangani oleh 2 (dua) Home Staff dan 2 (dua) Pegawai Setempat, dengan cakupan tugas yang sangat luas dan multidimensional. Tugas tersebut meliputi pelayanan kekonsuleran harian, termasuk pengurusan fasilitas diplomatik dan izin tinggal bagi seluruh Home Staff dan Pegawai Setempat, fasilitasi kunjungan serta pendampingan delegasi RI, perlindungan WNI termasuk penanganan kasus, pelayanan *inquiries* melalui hotline dan surel, pendampingan serta pelaporan substantif dan administratif, hingga koordinasi lintas fungsi dan pemangku kepentingan. Beban kerja yang tinggi dengan struktur SDM yang terbatas menuntut pengelolaan waktu dan prioritas yang sangat ketat.

Tantangan semakin meningkat pada periode kunjungan yang intensif, khususnya ketika terjadi lonjakan kunjungan pejabat tingkat tinggi dan bersamaan dengan meningkatnya permohonan layanan publik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap efektivitas layanan, ketepatan waktu penyelesaian tugas, serta kesinambungan fungsi pelayanan dan perlindungan WNI. Dalam situasi tersebut, kebutuhan untuk memenuhi standar layanan keprotokolan yang tinggi harus berjalan beriringan dengan pemenuhan pelayanan publik yang bersifat rutin dan mendesak.

Selain itu, dinamika diplomasi tingkat tinggi kerap bersifat mendadak dan cepat berubah, baik terkait perubahan jadwal, kebutuhan tambahan, maupun penyesuaian protokol sesuai ketentuan setempat. Hal ini menuntut fleksibilitas dan kesiapsiagaan tinggi dari Fungsi Protkons, yang pada saat bersamaan tetap harus menjaga kualitas pelayanan kekonsuleran dan perlindungan WNI.

Upaya Perbaikan

Untuk mengelola peningkatan intensitas saling kunjung sekaligus memitigasi kendala keterbatasan sumber daya dan kompleksitas tugas Fungsi Protokol dan Konsuler, KBRI Beijing telah dan akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan yang bersifat struktural, prosedural, dan adaptif.

Pertama, dilakukan optimalisasi pengaturan kerja dan prioritas tugas pada Fungsi Protkons, khususnya pada periode kunjungan intensif. Pengelompokan tugas antara pelayanan kekonsuleran rutin, fasilitasi kunjungan, dan perlindungan WNI dilakukan secara lebih terstruktur agar beban kerja dapat dikelola secara proporsional dan responsivitas layanan tetap terjaga.

Kedua, KBRI Beijing memperkuat koordinasi lintas fungsi secara internal, terutama antara Fungsi Protkons, Politik, Ekonomi, dan Atase Teknis, untuk mendukung pelaksanaan kunjungan pejabat secara lebih efisien. Pendekatan kerja tim ini memungkinkan distribusi beban kerja yang lebih merata serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas keprotokolan dan substantif secara simultan.

Ketiga, dilakukan penguatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi proses kerja, termasuk komunikasi internal yang lebih terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif manual dan mempercepat alur kerja, khususnya dalam kondisi jadwal yang padat dan dinamis.



Keempat, KBRI Beijing terus mengembangkan pendekatan preventif dan perencanaan dini (early planning) terhadap potensi kunjungan tingkat tinggi, melalui pemantauan agenda bilateral dan komunikasi awal dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan penanganan bersifat mendadak serta meningkatkan kesiapan operasional Fungsi Protkons.

Kelima, sebagai bagian dari upaya jangka menengah, KBRI Beijing mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya, baik melalui peningkatan kompetensi SDM yang ada, pengaturan dukungan lintas fungsi, maupun penyampaian kebutuhan penyesuaian sumber daya kepada Pusat sesuai dengan dinamika beban kerja.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi diperkirakan akan tetap berada pada tingkat yang tinggi, sejalan dengan karakter hubungan Indonesia–Tiongkok yang semakin kuat, erat, dan bersifat multidimensional. Kerja sama kedua negara tidak hanya berkembang dalam satu sektor, tetapi meluas dan saling terkait di bidang ekonomi dan pembangunan, investasi, industri hijau, energi, kemaritiman, teknologi, pendidikan, hingga kerja sama regional dan global. Kompleksitas dan luasnya agenda tersebut secara inheren menuntut interaksi langsung dan komunikasi intensif di tingkat pengambil kebijakan.

Selain itu, penyelarasan agenda pembangunan nasional Indonesia dengan arah kebijakan pembangunan Tiongkok, termasuk penguatan kerja sama dalam kerangka *Comprehensive Strategic Partnership*, akan terus mendorong kebutuhan kunjungan kerja, pertemuan bilateral, serta dialog tingkat tinggi sebagai sarana percepatan pengambilan keputusan dan tindak lanjut kesepakatan. Intensitas saling kunjung juga akan meningkat seiring dengan upaya penyusunan dan implementasi *Plan of Action* kerja sama Indonesia–Tiongkok yang baru, yang memerlukan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, KBRI Beijing perlu memproyeksikan intensitas kunjungan sebagai kondisi struktural jangka menengah hingga panjang, bukan sekadar fenomena tahunan. Hal ini menuntut penyesuaian perencanaan kerja, penguatan kapasitas layanan keprotokolan dan konsuler, serta pengembangan mekanisme kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan.



Kunjungan Presiden Prabowo ke Perayaan Victory Day, September 2025



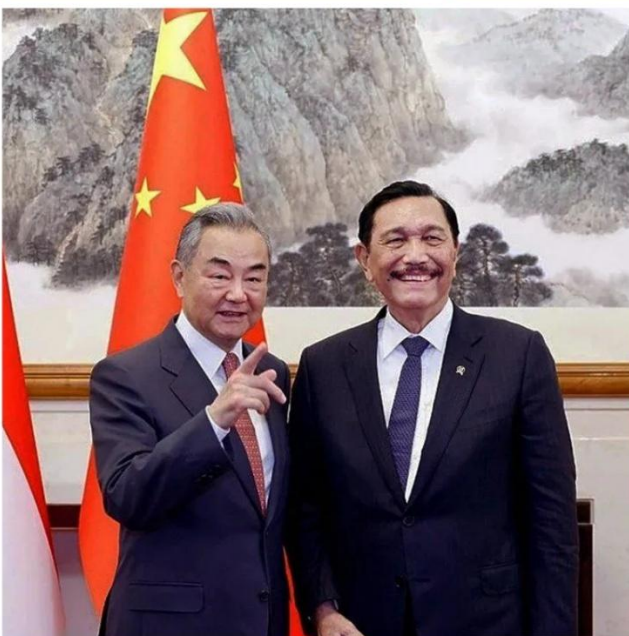
Kunjungan PM Li Qiang ke Jakarta, Mei 2025



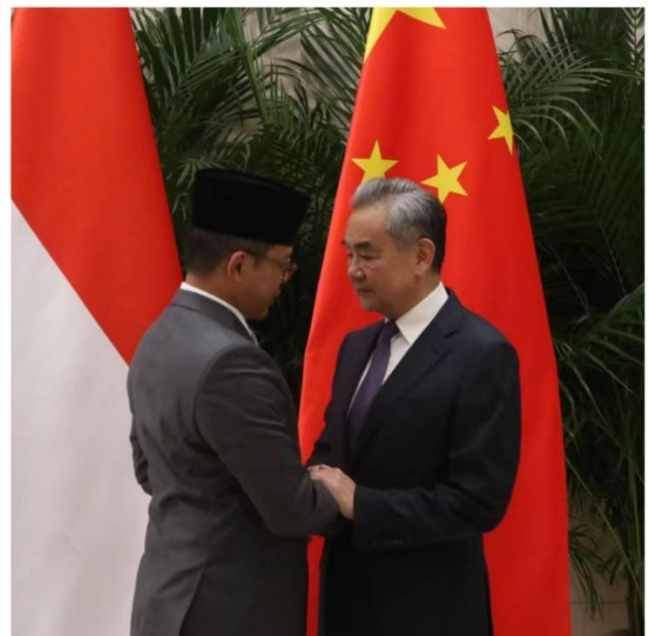
Kunjungan Presiden RI ke Beijing, September 2025



Kunjungan Chairman CCPPC ke Jakarta, Desember 2025



Kunjungan Ketua DEN ke Beijing, Mei 2025



Pertemuan Menlu RI dan Menlu RRT di Sela SCO Meeting, Mei 2025



B.2 Basis data KBRI Beijing yang Akurat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri yang efektif dan adaptif, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendorong perumusan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat (*evidence-based policy*). Pendekatan ini menjadi semakin penting di tengah dinamika global yang kompleks dan cepat berubah, sehingga keputusan kebijakan luar negeri dapat disusun secara tepat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri RI terus mendorong penguatan pendataan, pemanfaatan sistem informasi, serta penyusunan kajian dan analisis di berbagai bidang strategis. Perwakilan RI di luar negeri, sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia, memegang peran kunci dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengolahan data serta informasi yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan politik luar negeri. Peran ini mencakup tidak hanya fungsi pelaporan, tetapi juga penyediaan analisis kontekstual yang relevan dengan kondisi negara akreditasi.

Penguatan basis data dan informasi di Perwakilan RI saat ini difokuskan, antara lain, pada aspek perlindungan Warga Negara Indonesia dan diplomasi ekonomi, tanpa menutup kemungkinan pengembangan pada bidang-bidang strategis lainnya. Basis data dimaknai sebagai kumpulan informasi yang tersimpan secara sistematis dalam sistem komputer, yang dapat diakses, diperiksa, diolah, dan dimanfaatkan secara terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, “basis” merujuk pada media atau tempat penyimpanan, sementara “data” merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan dan dikelola secara berkelanjutan.

Kualitas data dan informasi yang digunakan menjadi prasyarat utama keberhasilan pendekatan berbasis bukti. Oleh karena itu, akurasi data, yang mencakup ketelitian, kecermatan, dan ketepatan, menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa informasi yang dihasilkan benar-benar dapat diandalkan sebagai dasar perumusan kebijakan. Dengan basis data yang kuat dan akurat, Perwakilan RI diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang responsif, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Pencapaian Sasaran Strategis B.2 ‘Basis data KBRI Beijing yang Akurat’ diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. B.2.1 Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang terverifikasi di Portal Peduli WNI; dan
2. B.2.2 Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Beijing.

Analisis IKU B.21: Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI

Portal Peduli WNI merupakan sistem informasi pelayanan dan perlindungan terpadu bagi WNI di luar negeri yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018 sebagai bagian dari penguatan tata kelola perlindungan WNI berbasis data.



Dalam rangka mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, Portal Peduli WNI telah terintegrasi dengan berbagai sistem nasional, antara lain Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (SIAM), Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM (SIMKIM), Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri BP2MI (SISKOTKLN), serta sistem pendataan dan pelayanan nasional lainnya. Integrasi ini memungkinkan konsolidasi data WNI secara lebih akurat dan berkelanjutan.

Selain mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, keberadaan data WNI yang terdaftar dan terverifikasi dalam Portal Peduli WNI memberikan manfaat strategis dalam mempermudah koordinasi pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Data tersebut juga menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan pelayanan dan perlindungan WNI yang lebih tepat sasaran, responsif, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Data pembandingan dalam penghitungan indikator ini adalah jumlah WNI yang telah melakukan lapor diri kepada Perwakilan RI. WNI dinyatakan terverifikasi apabila telah terdaftar pada Portal Peduli WNI dengan melampirkan dokumen pendukung yang diunggah oleh WNI yang bersangkutan dan/atau oleh staf Perwakilan RI yang berwenang, serta telah melalui proses verifikasi oleh Perwakilan RI. WNI yang dimaksud mencakup orang bangsa Indonesia asli maupun orang bangsa lain yang disahkan sebagai WNI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persentase jumlah WNI yang terdaftar dan terverifikasi pada Portal Peduli WNI dihitung dengan membandingkan jumlah WNI yang tercantum dan terverifikasi dalam sistem dengan jumlah WNI yang telah melakukan lapor diri. Perwakilan RI secara berkala melakukan pemutakhiran dan *back-up* data WNI, termasuk pembaruan *master data* yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengelolaan data pada Portal Peduli WNI.

Dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat, proses verifikasi data WNI oleh Perwakilan RI dapat dilakukan melalui mekanisme khusus sesuai dengan ketentuan Direktorat Perlindungan WNI. Pengertian keadaan darurat merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Penghitungan indikator ini dilakukan dengan formula:

(Jumlah WNI yang tercantum dan terverifikasi pada Portal Peduli WNI / Jumlah WNI yang lapor diri) x 100%.

Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian pendataan WNI yang akurat dan terverifikasi di Portal Peduli WNI sebagai dasar penguatan pelayanan dan perlindungan WNI yang berbasis data.

Informasi Kinerja

Capaian IKU B.21: Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI



Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI	Jumlah WNI yang tercantum dan terverifikasi pada Portal Peduli WNI	330
	Jumlah WNI yang lapor diri	330
Capaian		100%
Toleransi		120%

Tabel:

Pada tahun pelaporan, capaian IKU B.2.1 “Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI Beijing yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI” mencapai 100 persen. Dari total 330 WNI yang tercatat telah melakukan lapor diri kepada KBRI Beijing, seluruhnya telah tercantum dan terverifikasi dalam Portal Peduli WNI.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan verifikasi WNI di wilayah akreditasi KBRI Beijing telah dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Seluruh WNI yang telah melaporkan diri tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga telah melalui proses verifikasi dokumen sesuai ketentuan, sehingga data yang tersimpan dalam Portal Peduli WNI bersifat akurat dan dapat diandalkan.

Perbandingan Kinerja

	2023	2024	2025
Jumlah WNI yang tercantum dan terverifikasi pada Portal Peduli WNI	206	231	330
Jumlah WNI yang lapor diri	206	231	330
Capaian	100%	100%	100%
Toleransi	120%	120%	120%

Perbandingan kinerja IKU B.2.1 pada periode 2023–2025 menunjukkan capaian yang konsisten dan optimal. Pada tahun 2023, dari total 206 WNI yang melakukan lapor diri, seluruhnya telah tercantum dan terverifikasi dalam Portal Peduli WNI, sehingga capaian mencapai 100 persen. Kinerja serupa juga tercapai pada tahun 2024, dengan 231 WNI tercatat lapor diri dan seluruhnya berhasil diverifikasi, kembali menghasilkan capaian 100 persen.

Tren positif tersebut berlanjut dan semakin menguat pada tahun 2025. Jumlah WNI yang melakukan lapor diri dan terverifikasi meningkat signifikan menjadi 330 WNI, dengan tingkat verifikasi tetap terjaga pada 100 persen. Peningkatan jumlah WNI yang tercatat ini mencerminkan semakin baiknya kesadaran lapor diri di kalangan WNI serta efektivitas upaya pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh KBRI Beijing.



Konsistensi capaian 100 persen selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa KBRI Beijing telah berhasil menjaga kualitas tata kelola data WNI secara berkelanjutan, meskipun terjadi peningkatan volume data.

Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IKU B.2.1, tidak terlepas dari berbagai kombinasi faktor:

- Tingginya literasi kekonsuleran di kalangan WNI di Tiongkok menjadi faktor penentu utama. Mayoritas WNI yang berdomisili di wilayah akreditasi KBRI Beijing merupakan pelajar, mahasiswa, profesional, dan pekerja terampil yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi serta familiar dengan proses administrasi digital. Kondisi ini memudahkan proses lapor diri, pengunggahan dokumen, serta pemahaman terhadap pentingnya pendataan resmi sebagai bagian dari hak dan kewajiban WNI di luar negeri.
- Pendekatan proaktif dan konsisten KBRI Beijing dalam mendorong lapor diri dan verifikasi data turut berkontribusi signifikan. Sosialisasi berkelanjutan, integrasi pesan lapor diri dalam berbagai layanan konsuler, serta pendampingan langsung oleh petugas konsuler memastikan bahwa setiap WNI yang berinteraksi dengan KBRI Beijing diarahkan untuk menyelesaikan proses verifikasi secara tuntas.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Lapor diri WNI melalui situs peduliwni.kemlu.go.id senantiasa menjadi materi standar dalam setiap program jemput bola, penyuluhan, maupun diskusi bersama WNI, baik dalam konteks layanan kekonsuleran maupun perlindungan WNI. Hal ini karena keberadaan basis data yang terpercaya menjadi *head start* yang krusial untuk mempercepat respons Perwakilan, terutama dalam situasi darurat maupun kondisi layanan yang bersifat non-reguler.

Sejalan dengan penguatan integrasi layanan antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI melalui peduliwni.kemlu.go.id, lapor diri WNI juga berfungsi sebagai basis data pendukung bagi fasilitasi pembebasan pajak dan bea masuk atas barang pindahan WNI yang kembali menetap di Indonesia. Mekanisme ini dijalankan melalui penerbitan surat keterangan barang pindahan yang telah terkoneksi dengan sistem kepabeanan nasional, sehingga menambah insentif bagi WNI untuk semakin tertib melakukan lapor diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kendala dan Tantangan

Meskipun capaian IKU B.2.1 berhasil dipertahankan pada tingkat 100 persen, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala dan tantangan struktural yang perlu dicermati sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kinerja, diantaranya:

- Luasnya wilayah akreditasi KBRI Beijing yang mencakup puluhan provinsi dan kotamadya dengan sebaran WNI yang tidak merata menjadi tantangan utama dalam menjangkau seluruh WNI secara optimal. WNI yang berada di wilayah terpencil atau jauh dari pusat



kegiatan KBRI cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap layanan langsung, sehingga proses sosialisasi dan pendampingan verifikasi data memerlukan upaya ekstra dan pendekatan berbasis jaringan komunitas.

- Keterbatasan teknis di lingkungan digital Tiongkok, khususnya terkait penggunaan VPN, masih menjadi kendala operasional. Akses terhadap Portal Peduli WNI dan sistem pendukung lainnya pada kondisi tertentu memerlukan jaringan VPN yang stabil, baik bagi WNI maupun petugas, sehingga berpotensi memperlambat proses verifikasi, terutama pada periode dengan trafik layanan yang tinggi.
- Keterbatasan jumlah SDM konsuler dibandingkan dengan kompleksitas tugas yang diemban turut menjadi tantangan. Selain mengelola pendataan dan verifikasi WNI, petugas konsuler juga menangani pelayanan kekonsuleran harian, perlindungan WNI, pendampingan kasus, serta fasilitasi kegiatan diplomatik lainnya. Kondisi ini menuntut pengelolaan waktu dan prioritas yang sangat cermat agar proses verifikasi data tetap berjalan optimal tanpa mengganggu layanan inti lainnya.
- Dinamika mobilitas WNI yang relatif tinggi, khususnya di kalangan pelajar dan pekerja profesional, menuntut pemutakhiran data yang berkelanjutan. Perubahan status tinggal, alamat, maupun aktivitas WNI memerlukan mekanisme monitoring yang konsisten agar kualitas data tetap akurat dan relevan.

Upaya Perbaikan

Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pencapaian IKU B.2.1, KBRI Beijing akan terus melakukan sejumlah upaya perbaikan:

- Penguatan pendekatan berbasis jejaring komunitas WNI akan terus diintensifkan, khususnya di wilayah akreditasi yang jauh dari pusat kegiatan KBRI. Melalui peran simpul komunitas, ketua PPI, organisasi diaspora, dan perwakilan informal WNI, proses sosialisasi, pendampingan lapor diri, serta verifikasi data dapat dilakukan lebih efektif dan menjangkau WNI secara lebih merata.
- Optimalisasi pengelolaan teknis sistem dan akses digital akan dilakukan, termasuk pengaturan penggunaan VPN.
- Peningkatan efisiensi kerja melalui penguatan SOP dan pembagian tugas yang lebih terstruktur akan terus dilakukan untuk mengatasi keterbatasan SDM. Standardisasi alur kerja verifikasi data, pemanfaatan template administrasi, serta pemantauan berkala atas progres pendataan diharapkan dapat menjaga konsistensi kualitas layanan di tengah beban kerja yang tinggi.
- Menjajaki pengajuan tambahan jumlah SDM pendukung untung Fungsi Protkons.
- Menjadikan data Portal Peduli WNI sebagai basis pengambilan keputusan dalam perencanaan layanan, alokasi sumber daya, dan mitigasi risiko perlindungan WNI.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, tingkat pengisian dan verifikasi data WNI pada Portal Peduli WNI diperkirakan akan tetap tinggi, bahkan menunjukkan tren peningkatan seiring dengan semakin eratnya hubungan Indonesia–Tiongkok di berbagai bidang. Penguatan kerja sama ekonomi, meningkatnya arus investasi, mobilitas tenaga kerja terampil, serta pertumbuhan jumlah



pelajar dan diaspora Indonesia di Tiongkok akan berdampak langsung pada bertambahnya populasi WNI yang memerlukan layanan kekonsuleran dan perlindungan secara terstruktur.

Selain itu, intensitas kunjungan pejabat tinggi, penguatan people-to-people exchange, serta terbukanya peluang kerja sama di sektor pendidikan, riset, dan industri berbasis teknologi akan mendorong semakin dinamisnya pergerakan WNI antarwilayah di Tiongkok. Kondisi ini menuntut sistem pendataan yang semakin akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sehingga Portal Peduli WNI akan semakin diposisikan sebagai instrumen utama dalam pengelolaan layanan dan perlindungan WNI.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK B.2.1



Penyuluhan Materi Laporan Diri, Desember 2025



Game Materi Laporan Diri, Desember 2025



Analisis IK B.2.2 Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Beijing

Data *Economic Intelligence* (DEI) merupakan kumpulan informasi dan kajian analitis di bidang ekonomi, meliputi perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa, termasuk identifikasi peluang produk spesifik yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara akreditasi/wilayah kerja.

DEI disusun oleh Perwakilan RI dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun untuk memastikan relevansi dan akurasi analisis seiring dengan dinamika ekonomi negara mitra. Ruang lingkup DEI mencakup antara lain gambaran umum kondisi ekonomi negara akreditasi, potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi, strategi pengembangan kerja sama ekonomi, serta kalender kegiatan ekonomi strategis.

Penyusunan DEI oleh Perwakilan RI mengacu pada Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan DEI Kementerian Luar Negeri, sehingga format dan substansinya selaras dengan kebutuhan perumusan kebijakan di tingkat pusat.

Kualitas DEI dinilai berdasarkan skala nilai, yaitu 0–30 (tidak sesuai), 30,01–50 (belum sesuai), 50,01–70 (cukup sesuai), 70,01–90 (sesuai), dan di atas 90 (sangat sesuai). Penilaian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Amerop untuk Perwakilan RI di kawasan Amerop dan Direktorat Jenderal Aspasaf untuk Perwakilan RI di kawasan Aspasaf.

Penyusunan dan penilaian DEI bertujuan untuk memastikan tersedianya data dan analisis ekonomi yang andal, akurat, dan berkualitas, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi perumusan dan pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia yang lebih efektif dan berdampak.

Informasi Kinerja

Capaian IKU B.2.2 Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Beijing

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Beijing	Hasil Penilaian data <i>economic intelligence</i> KBRI Beijing oleh Kemlu RI	98
	Target Nilai data <i>economic intelligence</i> KBRI Beijing oleh Kemlu RI	98
Capaian		100%
Toleransi		120%

Tabel:

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) B.2.2 menunjukkan hasil yang sangat optimal. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI, Laporan DEI KBRI Beijing memperoleh nilai 98, yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 98.



Capaian tersebut merefleksikan kualitas penyusunan DEI yang baik, dari sisi kelengkapan data, analisis, relevansi substansi, maupun kesesuaian dengan pedoman teknis yang ditetapkan. Dengan capaian sebesar 100 persen, Laporan DEI KBRI Beijing dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara akreditasi.

Perbandingan Kinerja

	2023	2024	2025
Hasil Penilaian data <i>economic intelligence</i> KBRI Beijing oleh Kemlu RI	N/A	98	98
Target Nilai data <i>economic intelligence</i> KBRI Beijing oleh Kemlu RI	N/A	85	98
Capaian	120%	115.29%	100%
Toleransi	120%	120%	120%

Tabel:

Capaian Nilai Laporan *Data Economic Intelligence* (DEI) KBRI Beijing pada periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dan berada pada tingkat sangat baik. Pada tahun 2024, Laporan DEI KBRI Beijing memperoleh nilai 98, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85, dengan capaian mencapai 115,29 persen. Hasil tersebut mencerminkan keberhasilan awal dalam meningkatkan kualitas analisis ekonomi tematik dan pemenuhan standar teknis penyusunan DEI.

Pada tahun 2025, KBRI Beijing berhasil mempertahankan nilai DEI pada angka 98, meskipun target ditingkatkan secara signifikan menjadi 98. Dengan demikian, capaian tahun 2025 tercatat sebesar 100 persen, yang menunjukkan kemampuan perwakilan untuk menjaga konsistensi mutu laporan di tengah standar penilaian yang semakin ketat.

Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan KBRI Beijing mempertahankan capaian Nilai Laporan Data Economic Intelligence (DEI) pada kategori *sangat sesuai* mencerminkan penguatan kapasitas analisis ekonomi yang semakin terinstitusionalisasi dan berorientasi pada kebutuhan kebijakan. Nilai DEI yang konsisten tinggi menunjukkan bahwa proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan telah memenuhi standar substansi, metodologi, serta relevansi strategis sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri.

Salah satu faktor kunci keberhasilan adalah pendalaman analisis yang lebih tajam terhadap dinamika ekonomi Tiongkok, khususnya pada sektor-sektor prioritas seperti industri



berteknologi tinggi, energi bersih, ekonomi digital, dan rantai pasok global. Pendekatan tematik yang adaptif memungkinkan DEI tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan prospektif, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan diplomasi ekonomi dan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan di Indonesia.

Keberhasilan ini juga didukung oleh pemanfaatan sumber data yang beragam dan kredibel, termasuk publikasi resmi Pemerintah Tiongkok, lembaga riset, asosiasi industri, serta hasil pemantauan lapangan dan jejaring KBRI Beijing. Integrasi antara data kuantitatif dan analisis kualitatif memperkuat akurasi dan kedalaman laporan, sekaligus meningkatkan nilai tambah DEI sebagai produk *economic intelligence* yang aplikatif.

Dari sisi internal, koordinasi lintas fungsi di KBRI Beijing berperan penting dalam memperkaya perspektif dan substansi laporan DEI. Sinergi antara fungsi ekonomi, politik, dan perlindungan WNI memungkinkan analisis ekonomi disusun secara kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kebijakan, regulasi, serta implikasi sosial yang lebih luas. Selain itu, peningkatan disiplin kerja dalam pemutakhiran data dan pemenuhan tenggat waktu turut mendukung konsistensi kualitas laporan.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing melaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis sepanjang tahun 2025 yang berkontribusi langsung terhadap realisasi target Indikator Kinerja. Kegiatan tersebut menjadi instrumen diplomasi operasional untuk menghasilkan output yang terukur, karena dirancang berdasarkan analisis yang matang, pendekatan yang *targeted*, serta masukan dari pelaksanaan program pada tahun-tahun sebelumnya. Rincian program pendukung diantaranya:

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Forum Bisnis di Ulaanbaatar, Mongolia (17–21 November 2025)	KBRI Beijing bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Mongolia menyelenggarakan forum bisnis di Ulaanbaatar sebagai upaya mendorong penguatan kerja sama ekonomi Indonesia–Mongolia. Kegiatan ini bertujuan menggali potensi kolaborasi konkret di berbagai sektor strategis serta memperluas jejaring pemangku kepentingan kedua negara.
2.	Forum TTI “The Next Chapter: Synergy for High-Quality Cooperation on Tourism, Trade, and Investment between Indonesia and China”, Beijing (24 Oktober 2025)	KBRI Beijing menyelenggarakan Forum TTI sebagai platform pertukaran pandangan mengenai arah kebijakan pariwisata, perdagangan, investasi, dan peluang kerja sama masa depan. Forum ini diharapkan memperkuat jejaring bisnis pelaku usaha Indonesia dan Tiongkok serta mendorong terciptanya kolaborasi konkret, termasuk pada sektor teknologi tinggi dan kerja sama bernilai tambah.
3.	Pengadaan Buku Statistik Resmi Tiongkok	Mengingat sebagian data ekonomi dan sektoral di Tiongkok tidak tersedia melalui sumber terbuka, KBRI



No.	Kegiatan	Keterangan
		Beijing secara rutin melakukan pengadaan buku-buku statistik resmi yang diterbitkan Pemerintah RRT sebagai basis penguatan analisis dan pemetaan potensi kerja sama ekonomi.

Kendala dan Tantangan

Dalam penyusunan dan pemutakhiran Laporan Data Economic Intelligence (DEI), KBRI Beijing menghadapi sejumlah kendala dan tantangan diantaranya:

- Keterbatasan akses terhadap informasi ekonomi yang bersifat terbuka, komprehensif, dan terkini di Tiongkok. Data strategis terkait arah kebijakan industri, dukungan fiskal, maupun prioritas sektoral sering kali tersebar pada berbagai sumber, menggunakan terminologi teknis yang spesifik, serta tidak selalu tersedia dalam bahasa asing, sehingga memerlukan pendalaman berlapis dan interpretasi yang cermat.
- Perbedaan bahasa dan kompleksitas terminologi teknis, khususnya pada sektor-sektor unggulan seperti kecerdasan buatan, manufaktur berteknologi tinggi, energi baru dan terbarukan, serta keuangan digital, menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan ketepatan analisis. Proses penerjemahan konsep kebijakan dan istilah teknis dari bahasa Mandarin ke dalam kerangka analisis yang relevan bagi pemangku kepentingan di Indonesia memerlukan keahlian khusus serta waktu yang tidak sedikit.
- Tantangan lain berasal dari dinamika kebijakan ekonomi Tiongkok, termasuk penerapan kebijakan berbasis *pilot project* di tingkat daerah sebelum diberlakukan secara nasional.
- Di sisi pemanfaatan, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa analisis yang disusun dapat langsung selaras dengan kebutuhan spesifik pemangku kepentingan di Indonesia.

Upaya Perbaikan

Untuk menjaga kualitas Laporan Data Economic Intelligence (DEI, KBRI Beijing secara berkelanjutan menempuh sejumlah langkah perbaikan:

- Penguatan metodologi pengumpulan dan pengolahan data melalui diversifikasi sumber informasi, tidak hanya mengandalkan publikasi resmi pemerintah Tiongkok, tetapi juga laporan riset lembaga think tank, asosiasi industri, akademisi, serta pelaku usaha yang memiliki pengalaman langsung di sektor terkait.
- Dalam mengatasi tantangan bahasa dan terminologi teknis, KBRI Beijing meningkatkan pendalaman substansi melalui penguatan kapasitas analitis internal, termasuk pemanfaatan referensi bilingual, diskusi tematik lintas fungsi, serta konsultasi informal dengan narasumber lokal yang kompeten.
- KBRI Beijing juga mendorong peningkatan orientasi pemanfaatan DEI dengan menyelaraskan fokus analisis pada sektor-sektor prioritas pembangunan nasional dan minat pemangku kepentingan, seperti industri hilir, energi bersih, ekonomi digital, kesehatan, dan teknologi maju.



- Ke depan, upaya perbaikan ini akan terus diperkuat melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi dengan unit teknis di Pusat, serta pengayaan analisis berbasis tren dan proyeksi.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, kebutuhan terhadap Data Economic Intelligence (DEI) yang andal dan berkualitas diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan arah pembangunan ekonomi Tiongkok yang menekankan penguatan *new qualitative productive forces*, termasuk teknologi maju, ekonomi digital, kecerdasan buatan, energi bersih, kesehatan, dan industri bernilai tambah tinggi. Fokus kebijakan tersebut akan memengaruhi alokasi sumber daya, pola perdagangan, serta strategi investasi Tiongkok ke luar negeri, sehingga menuntut analisis yang lebih tajam, prediktif, dan berbasis tren jangka menengah–panjang.

Dalam konteks tersebut, DEI KBRI Beijing akan semakin diarahkan tidak hanya sebagai instrumen pemetaan peluang, tetapi juga sebagai *early warning system* bagi Indonesia dalam mengantisipasi perubahan kebijakan ekonomi, potensi trade diversion, serta dinamika persaingan global yang melibatkan Tiongkok. Analisis ke depan diharapkan mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi sinergi paling tinggi dengan agenda pembangunan nasional Indonesia, termasuk hilirisasi industri, transisi energi, ketahanan kesehatan, dan transformasi digital, sehingga dapat menjadi rujukan strategis bagi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK B.2.2



Pengumpulan Bahan Economic Intelligence di Indonesia-Mongolia Business Forum, November 2025





B.3 Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Beijing yang Kuat

Diplomasi digital merupakan bentuk diplomasi yang memanfaatkan internet dan teknologi digital sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Melalui diplomasi digital, komunikasi diplomatik tidak lagi terbatas pada kanal konvensional, melainkan diperluas ke ruang digital yang memungkinkan interaksi yang lebih cepat, luas, dan adaptif, baik dengan pemangku kepentingan, negara mitra, maupun publik secara umum. Pendekatan ini menjadi instrumen penting dalam mendukung aktivitas diplomasi modern yang semakin dinamis dan berbasis informasi.

Dalam praktiknya, diplomasi digital diarahkan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi strategis guna mendukung perumusan kebijakan luar negeri; mengomunikasikan posisi dan kepentingan Indonesia di tingkat regional dan global; serta melindungi kepentingan negara dan warga negara Indonesia di luar negeri. Informasi hubungan luar negeri yang dikelola melalui kanal digital mencakup berbagai pemberitahuan, kabar, dan berita terkait isu internasional, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik dan masyarakat, serta aktivitas warga negara Indonesia yang memiliki dimensi regional maupun global.

Kekuatan diplomasi digital terletak pada kemampuannya menyajikan informasi yang unggul, akurat, dan aktual. Informasi yang kuat tidak hanya cepat disampaikan, tetapi juga memiliki kredibilitas, ketepatan substansi, dan relevansi strategis, sehingga mampu membentuk persepsi, meningkatkan kepercayaan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.

Capaian Sasaran strategis ini diukur dari pemenuhan IK B.3.1 Persentase Impresi *Engagement* Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing.

Analisis IK B.3.1 Persentase Impresi *Engagement* Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing

Indikator Kinerja B.3.1 mengukur Persentase Impresi dan *Engagement* Media Sosial, Portal Berita, serta Media Setempat KBRI Beijing sebagai representasi efektivitas pelaksanaan diplomasi digital Perwakilan RI. Dalam konteks diplomasi modern, diplomasi digital menjadi instrumen strategis yang memanfaatkan internet dan platform digital untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan luar negeri Indonesia secara lebih luas, cepat, dan adaptif.

Diplomasi digital menawarkan pendekatan baru dalam komunikasi diplomatik, baik kepada pemangku kepentingan, negara mitra, maupun publik. Melalui kanal digital, Perwakilan RI dapat mengumpulkan dan menganalisis informasi strategis, mengomunikasikan posisi kebijakan luar negeri Indonesia, serta melindungi kepentingan negara dan warga negara Indonesia. Informasi hubungan luar negeri yang disampaikan mencakup pemberitahuan, kabar, dan berita terkait isu regional dan internasional, aktivitas lembaga negara, badan usaha, organisasi politik dan masyarakat, hingga dinamika yang melibatkan warga negara Indonesia.

Kekuatan diplomasi digital diukur dari kemampuannya menyajikan informasi yang unggul, akurat, dan aktual. Informasi yang kuat tidak hanya menjangkau audiens yang luas, tetapi



juga mampu membentuk persepsi positif, meningkatkan pemahaman publik, serta memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan narasi global.

Dalam pengukuran IK B.3.1, impresi dimaknai sebagai jumlah akun, baik pengikut maupun non-pengikut, yang melihat suatu konten yang dipublikasikan melalui media digital. Sementara itu, engagement mencerminkan tingkat interaksi audiens terhadap konten tersebut, yang diukur melalui respons, retweet, share, likes, serta berbagai bentuk interaksi media lainnya. Engagement juga mencakup akumulasi kegiatan hubungan media, seperti press briefing, wawancara, media gathering, kunjungan jurnalistik, pembuatan film, Journalist Visit Program, serta bentuk kerja sama lainnya dengan media.

Media sosial yang menjadi objek pengukuran meliputi Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube sebagai kanal utama komunikasi digital KBRI Beijing. Selain itu, pengukuran juga mencakup portal berita Perwakilan, yaitu publikasi yang diterbitkan melalui situs web resmi KBRI Beijing dalam bahasa setempat atau bahasa Inggris, yang bertujuan menyampaikan informasi penting mengenai aktivitas diplomatik, layanan, dan perkembangan terkait Indonesia kepada publik lokal dan internasional.

IK ini juga memperhitungkan pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat, baik media cetak, media daring, televisi, maupun radio di negara akreditasi. Pemberitaan tersebut mencakup isu-isu terkait Indonesia yang dipromosikan atau didukung oleh KBRI Beijing, serta engagement Perwakilan dengan media setempat melalui berbagai forum komunikasi dan kerja sama. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan kunjungan jurnalistik, pembuatan film oleh perusahaan asing yang mengambil lokasi di Indonesia, serta pelaksanaan Journalist Visit Program yang bertujuan memperkenalkan potensi Indonesia di bidang pariwisata, budaya, ekonomi, dan hubungan diplomatik.

Secara metodologis, IK B.3.1 diukur melalui empat komponen utama yang masing-masing memiliki bobot sebesar 25 persen, yaitu: (1) impresi dan engagement media sosial Perwakilan; (2) jumlah berita yang diunggah pada portal Perwakilan; (3) pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat; dan (4) engagement Perwakilan dengan media setempat. Pada awal tahun anggaran, Perwakilan RI menetapkan proyeksi realisasi dan target masing-masing komponen tersebut dalam dokumen pemetaan sebagai dasar pengukuran kinerja.

Penghitungan IK B.3.1 dilakukan berdasarkan hasil pengukuran selama satu tahun anggaran, sehingga capaian indikator ini mencerminkan konsistensi, kualitas, dan daya jangkau diplomasi digital KBRI Beijing dalam membangun komunikasi publik dan memperkuat citra Indonesia di negara akreditasi.

Informasi Kinerja

Capaian IK B.3.1 Persentase Impresi *Engagement* Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing tahun 2025



Persentase Impresi <i>Engagement</i> Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing	Komponen 1	Jumlah impressions 110,421, engagement: 1,869 = 112,290 /100,000
	Komponen 2	Jumlah berita yang diunggah di portal: 24 /24
	Komponen 3	Pemberitaan indonesia di negara setempat: 24/24
	Komponen 4	Engagement indonesia dengan media setempat: 20/20
Target		70
Realisasi		72
Capaian		102.86%

Capaian IK B.3.1 pada tahun 2025 menunjukkan kinerja diplomasi digital yang kuat dan melampaui target yang ditetapkan. Dari target indeks sebesar 70, realisasi kinerja tercatat mencapai 72, dengan tingkat capaian sebesar 102,86 persen, yang mencerminkan efektivitas strategi komunikasi publik dan hubungan media yang dijalankan KBRI Beijing secara konsisten dan terukur.

Pada Komponen 1, yaitu impresi dan engagement media sosial Perwakilan, KBRI Beijing mencatat total 110.421 impresi dan 1.869 nilai engagement. Capaian ini menunjukkan jangkauan audiens yang luas serta tingkat interaksi publik yang tinggi terhadap konten diplomasi digital yang disampaikan melalui kanal media sosial resmi KBRI Beijing.

Komponen 2, jumlah berita yang diunggah pada portal resmi Perwakilan, terealisasi secara penuh dengan 24 publikasi dari target 24, mencerminkan konsistensi KBRI Beijing dalam menyampaikan informasi diplomatik, pelayanan publik, dan agenda Indonesia secara rutin, akurat, dan relevan kepada publik setempat dan internasional.

Pada Komponen 3, pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat juga tercapai secara optimal, dengan 24 pemberitaan dari target 24. Hal ini menunjukkan tingginya eksposur Indonesia di media negara akreditasi serta keberhasilan KBRI Beijing dalam membangun narasi positif dan menjaga visibilitas Indonesia melalui media lokal.

Sementara itu, Komponen 4, engagement KBRI Beijing dengan media setempat, tercapai 20 dari target 20 kegiatan, yang meliputi berbagai bentuk interaksi seperti press briefing, wawancara, media gathering, kunjungan jurnalistik, serta kerja sama lainnya dengan insan media. Capaian ini mencerminkan hubungan kelembagaan yang aktif dan berkelanjutan antara KBRI Beijing dan media setempat.

Perbandingan Kinerja

IK diadopsi pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IK B.3.1 pada tahun 2025 terutama ditopang oleh terbangunnya hubungan yang kuat, berkelanjutan, dan saling percaya antara KBRI Beijing dengan kalangan media di negara akreditasi. Relasi yang baik ini memungkinkan KBRI Beijing tidak hanya menjadi sumber informasi resmi, tetapi juga mitra komunikasi yang kredibel bagi media setempat dalam memahami posisi, kebijakan, dan dinamika Indonesia.

Selain itu, keberhasilan capaian juga didukung oleh kemampuan KBRI Beijing dalam menyesuaikan pesan komunikasi dengan karakteristik ekosistem media dan audiens di Tiongkok. Pemanfaatan platform digital dan media sosial yang relevan dengan kebiasaan konsumsi informasi masyarakat setempat mendorong tingginya impresi dan engagement, serta memperkuat daya jangkau pesan diplomasi digital. Konten yang disajikan tidak hanya informatif, tetapi juga disusun secara visual dan naratif sehingga lebih mudah diterima dan dibagikan oleh publik.

Sinergi lintas fungsi di lingkungan KBRI Beijing turut berkontribusi pada keberhasilan ini. Koordinasi yang baik antara fungsi substantif dan unit komunikasi memungkinkan penyampaian informasi yang terintegrasi, konsisten, dan tepat waktu, baik melalui media sosial, portal resmi Perwakilan, maupun media setempat. Dengan demikian, setiap momentum diplomatik, kegiatan resmi, dan isu strategis Indonesia dapat direspons secara cepat dan efektif di ruang publik.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing melakukan promosi pariwisata, budaya, dan berbagai kegiatan Indonesia di tengah masyarakat Tiongkok tidak hanya melalui kanal media arus utama seperti Instagram dan YouTube, tetapi juga secara aktif memanfaatkan ekosistem media digital domestik Tiongkok, khususnya Weibo, Kuaishou, dan WeChat. Pendekatan ini penting mengingat karakteristik lanskap informasi di Tiongkok yang memiliki platform tersendiri dengan jangkauan dan audiens yang sangat luas. Weibo, sebagai salah satu media sosial utama, memiliki sekitar 587 juta pengguna aktif bulanan dan menawarkan antarmuka yang relatif serupa dengan platform media sosial Barat, sehingga efektif untuk komunikasi publik yang lebih luas. Sementara itu, pemilihan Kuaishou didasarkan pada basis pengguna aktif harian yang mencapai 407,5 juta, dengan penetrasi yang kuat hingga kota-kota tingkat dua dan tiga di RRT, sehingga menjadi kanal strategis untuk memperluas promosi Indonesia secara lebih merata.

Sejalan dengan intensifikasi diplomasi digital tersebut, kinerja media sosial KBRI Beijing menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pengikut akun Weibo dari 48.215 pada tahun 2024 menjadi 49.000 pada tahun 2025. Akun Kuaishou juga mengalami lonjakan signifikan, dari 3.240 pengikut pada tahun 2024 menjadi 9.673 pengikut pada tahun 2025, sementara akun WeChat telah menjangkau 14.125 pengikut. KBRI Beijing juga telah beberapa kali menjalin kerja sama langsung dengan platform Kuaishou melalui berbagai inisiatif kreatif, seperti partisipasi dalam challenge resmi, penyampaian ucapan Tahun Baru Imlek, pelaksanaan famtrip promosi pariwisata bertajuk *Take Me Out to Bali*, serta kampanye digital yang terintegrasi dalam rangka Indonesia Fair.



Selain penguatan kanal digital, KBRI Beijing juga aktif membangun keterlibatan dengan media setempat melalui pendekatan konvensional yang tetap relevan. Sepanjang tahun 2025, Duta Besar RI di Beijing telah melakukan lebih dari 15 wawancara dengan media-media utama Tiongkok, antara lain Phoenix TV, China Daily, Beijing Daily, Haiwainet, CCTV, BRTV, PR.com, China.com, serta berbagai platform media lainnya. Intensitas interaksi ini memperkuat eksposur Indonesia di ruang publik Tiongkok sekaligus mendukung pembentukan persepsi positif dan peningkatan engagement masyarakat terhadap Indonesia.

Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan diplomasi digital, KBRI Beijing menghadapi sejumlah kendala dan tantangan terkait dengan karakter ekosistem informasi dan media di Tiongkok:

- Nature pengelolaan informasi dan pemberitaan di Tiongkok yang sangat terstruktur dan diatur secara ketat, sehingga menuntut tingkat kehati-hatian tinggi dalam penyusunan pesan. Lingkungan ini mendorong praktik *self-censorship* tidak hanya di tingkat institusi media, tetapi juga pada level individu jurnalis. Setiap narasi, diksi, dan sudut pandang pemberitaan perlu disesuaikan agar tidak bersinggungan dengan isu sensitif politik, ideologis, maupun kebijakan domestik, yang berpotensi membatasi ruang ekspresi pesan diplomatik secara langsung.
- Tipikal jurnalis Tiongkok cenderung bersifat konservatif dan mengedepankan pendekatan “aman” (*playing safe*) dalam peliputan isu-isu internasional. Jurnalis umumnya lebih memilih angle pemberitaan yang netral, normatif, dan sejalan dengan garis besar kebijakan redaksional, dibandingkan eksplorasi narasi yang kritis atau interpretatif. Konsekuensinya, pesan-pesan diplomasi Indonesia perlu dikemas secara sangat hati-hati, dengan penekanan pada aspek kerja sama, saling menguntungkan, dan narasi positif yang tidak menimbulkan ambiguitas atau kontroversi.
- Di sisi teknis, pembatasan akses terhadap platform digital global juga memengaruhi strategi distribusi pesan. KBRI Beijing perlu mengoptimalkan penggunaan platform media sosial domestik Tiongkok dengan algoritma, format konten, dan pola konsumsi audiens yang berbeda, sehingga strategi diplomasi digital tidak dapat sepenuhnya diseragamkan dengan pendekatan di negara lain.

Upaya Perbaikan

KBRI Beijing akan terus melakukan upaya perbaikan guna memperkuat efektivitas diplomasi digital dan hubungan media di negara akreditasi:

- KBRI Beijing memperkuat pendekatan komunikasi yang kontekstual dan sensitif terhadap ekosistem media Tiongkok, termasuk melalui penyesuaian redaksional dan narasi yang menekankan aspek kerja sama, saling menguntungkan, dan keselarasan kepentingan. Pendekatan ini dilakukan tanpa mengurangi substansi kepentingan nasional Indonesia.
- KBRI Beijing mengintensifkan pengelolaan hubungan media secara berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk kegiatan seremonial, tetapi juga melalui komunikasi rutin dan informal dengan jurnalis kunci dan redaksi media setempat.



- Dari sisi konten, KBRI Beijing melakukan peningkatan kualitas materi komunikasi digital, baik di media sosial maupun portal resmi Perwakilan, dengan mengedepankan akurasi data, kejelasan pesan, dan daya tarik visual. Konten disusun secara lebih strategis agar relevan dengan kepentingan audiens lokal, sekaligus selaras dengan pola konsumsi informasi di platform digital domestik Tiongkok.
- KBRI Beijing mengoptimalkan pemanfaatan platform digital lokal dan menyesuaikan strategi distribusi pesan dengan karakteristik algoritma serta format yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap platform global dan memastikan jangkauan pesan diplomasi tetap luas dan efektif.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, pelaksanaan diplomasi digital KBRI Beijing diproyeksikan akan menghadapi dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya peran ruang digital sebagai arena utama pembentukan opini publik dan narasi internasional. Ekosistem media dan informasi di Tiongkok diperkirakan tetap bersifat terkelola dan konservatif, sehingga kebutuhan akan pendekatan komunikasi yang kontekstual, hati-hati, dan berbasis kepercayaan akan semakin mengemuka.

Lebih lanjut, sejalan dengan semakin eratnya hubungan strategis Indonesia–Tiongkok di bidang politik, ekonomi, investasi, pariwisata, dan people-to-people exchanges, kebutuhan akan komunikasi publik yang akurat, konsisten, dan proaktif akan meningkat. Intensitas pemberitaan dan eksposur Indonesia di media Tiongkok diperkirakan akan terus bertambah, khususnya pada isu-isu kerja sama konkret, proyek strategis, dan agenda kunjungan tingkat tinggi. Kondisi ini menuntut KBRI Beijing untuk terus memperkuat kapasitas pengelolaan konten digital, memperluas jejaring media, serta menjaga kecepatan respons tanpa mengabaikan sensitivitas lokal

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK B.3.1



Shooting Beijing and Radio TV Promosi Budaya Indonesia, Juni 2025



Wawancara Dengan Media di Wunhan Promosi Peluang Kerja Sama dengan Indonesia, Mei 2025

Learning and Growth Perspective



Pelaksanaan Anggaran TA 2025

Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) 4

Meningkatkan akurasi percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pemerintah (Ba

Meningkatkan kualitas melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*) 6



3.1.4 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

L.1. Tata Kelola Organisasi KBRI Beijing yang Baik

Sasaran strategis Tata Kelola Organisasi KBRI Beijing yang Baik adalah fondasi utama dalam menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan RI. Dalam konteks organisasi, KBRI Beijing merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai bagian dan fungsi yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama, yakni memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di negara akreditasi.

Tata kelola organisasi dimaknai sebagai rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang membentuk cara organisasi diarahkan, dikelola, dan dikendalikan. Tata kelola yang baik memastikan bahwa setiap fungsi dan sumber daya organisasi berjalan secara selaras, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian hasil. Di dalamnya tercakup pula mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan kinerja, pengelolaan risiko, serta penegakan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain aspek internal, tata kelola organisasi juga mencerminkan kualitas hubungan antara KBRI Beijing dengan para pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal Perwakilan maupun dengan mitra eksternal, termasuk Kementerian/Lembaga terkait, otoritas negara akreditasi, komunitas WNI, dan mitra strategis lainnya. Hubungan yang dikelola secara transparan dan profesional akan memperkuat kepercayaan serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, tata kelola organisasi yang baik menjadi prasyarat penting bagi KBRI Beijing untuk menjalankan diplomasi secara efektif, responsif, dan kredibel. Penguatan tata kelola tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja internal, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas diplomasi dan pelayanan publik dilaksanakan secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional Indonesia.

Pemenuhan sasaran strategis Tata Kelola Organisasi KBRI Beijing yang Baik diukur melalui pencapaian IK L.1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing.

Analisis IK L.1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing

Nilai evaluasi AKIP merepresentasikan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur, melalui sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, serta dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Evaluasi AKIP dilaksanakan sebagai bagian integral dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor



29 Tahun 2014. SAKIP merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mendukung penetapan kinerja, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, hingga pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut, penilaian evaluasi AKIP mencakup empat komponen utama dengan bobot tertentu, yang secara keseluruhan menilai sejauh mana perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja telah dilaksanakan secara konsisten dan berkualitas.

Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Perwakilan RI bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan SAKIP, menilai tingkat implementasi dan akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan guna meningkatkan kualitas tata kelola kinerja, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi pada periode sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi AKIP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian, tetapi juga sebagai alat pembelajaran organisasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

Hasil evaluasi AKIP diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori nilai, mulai dari AA (sangat memuaskan) hingga D (sangat kurang), yang mencerminkan tingkat kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Klasifikasi ini menjadi tolok ukur objektif bagi instansi dalam menilai posisi kinerjanya sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan.

Secara umum, pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem akuntabilitas kinerja telah berperan dalam mendorong pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus, evaluasi ini diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi, memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi sebelumnya dapat dilaksanakan secara konsisten. Proses evaluasi dan pemberian nilai dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kemlu.

Informasi Kinerja

Capaian IK L.1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing	Nilai evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal Kemenlu	79.35 (BB)
Realisasi		79.35 (BB)
Target		80.65
Capaian		98.39



Capaian IK L.1.1 tahun 2025 menunjukkan bahwa KBRI Beijing telah melaksanakan prinsip akuntabilitas kinerja secara konsisten dan terukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, KBRI Beijing memperoleh nilai AKIP sebesar 79,35, dengan predikat BB (Sangat Baik). Nilai tersebut sekaligus merupakan nilai realisasi capaian kinerja AKIP KBRI Beijing pada tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80,65, capaian tersebut setara dengan 98,39 persen, yang menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang sangat mendekati target.

Perbandingan Kinerja

Perbandingan Capaian IK L.1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing Tahun 2023-2025

	2023	2024	2025
Nilai evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal Kemenlu	79,6 (BB)	79,65 (BB)	79.35 (BB)
Realisasi	79,6 (BB)	79,65 (BB)	79.35 (BB)
Target	79,06 (BB)	80,60 (A)	80.65 (A)
Capaian	100,13%	98,82%	98.39%

Pada tahun 2023, KBRI Beijing memperoleh nilai evaluasi AKIP sebesar 79,6 dengan predikat BB (Sangat Baik), melampaui target yang ditetapkan sebesar 79,06, sehingga capaian kinerja mencapai 100,13 persen.

Pada tahun 2024, nilai evaluasi AKIP tercatat sebesar 79,65 (BB). Meskipun mengalami peningkatan nilai secara absolut dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut berada sedikit di bawah target yang dinaikkan menjadi 80,60 dengan predikat A, sehingga tingkat capaian tercatat sebesar 98,82 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2025, KBRI Beijing memperoleh nilai evaluasi AKIP sebesar 79,35 (BB), dengan tingkat capaian 98,39 persen terhadap target 80,65 (A). Meskipun nilai realisasi sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, predikat kinerja tetap berada pada kategori Sangat Baik, yang menandakan keberlanjutan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja di lingkungan KBRI Beijing.

Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IK L.1.1 KBRI Beijing ditopang oleh pemanfaatan informasi kinerja secara sistematis sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan



kegiatan. KBRI Beijing secara konsisten menggunakan berbagai dokumen kinerja, antara lain Rencana Aksi (Renaksi), hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta Laporan Kinerja (LKj), sebagai dasar untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja.

Lebih lanjut, KBRI Beijing juga menjaga kesinambungan perencanaan kinerja yang selaras antara dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, hingga pelaporan kinerja tahunan.

Selain itu, KBRI Beijing telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Kinerja. Analisis ini memungkinkan organisasi untuk menilai keterkaitan antara input, output, dan capaian kinerja, serta menjadi dasar dalam mengidentifikasi ruang perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program di tengah keterbatasan sumber daya dan tingginya kompleksitas tugas diplomatik.

KBRI Beijing juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dengan memberikan perhatian khusus terhadap realisasi kinerja yang tidak mencapai target. Capaian yang belum optimal tidak semata dicatat secara administratif, tetapi dianalisis penyebabnya dan dijadikan bahan pembelajaran organisasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya. Pendekatan ini mencerminkan orientasi perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP.

Dari aspek kepatuhan, KBRI Beijing senantiasa memastikan penyampaian dokumen AKIP dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, serta mempublikasikan dokumen AKIP melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri. Praktik ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi ketentuan batas toleransi pencapaian sasaran IKU sebesar 120 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018, sehingga transparansi dan akuntabilitas kinerja tetap terjaga.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

1. Untuk mendukung capaian kinerja L1.1, KBRI Beijing menyelenggarakan forum monitoring capaian kinerja organisasi secara rutin setiap triwulan sebelum pelaksanaan monitoring capaian kinerja organisasi dilakukan oleh Pusat/BPO. Hal ini dilakukan sebagai sarana evaluasi dan penyajian bukti dukung serta perencanaan kegiatan mendatang. Pelaksanaan forum monitoring dilakukan dengan melibatkan seluruh fungsi pada KBRI Beijing.
2. Dokumentasi dan/publikasi kegiatan dilakukan sesaat setelah penyelenggaraan kegiatan dengan melakukan upload berita pada website <https://kemlu.go.id/beijing>. Informasi-informasi terkait pelayanan publik, publikasi kegiatan, pelaporan kinerja dan semua informasi yang sifatnya terbuka dapat diakses melalui website tersebut sebagai upaya KBRI Beijing dalam memberikan akses informasi kepada para stakeholder.
3. Pelaksanaan townhall meeting dengan seluruh home staff dan local staff dilakukan secara rutin oleh Duta Besar RI Beijing. Townhall meeting yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2025 dan 25 Oktober 2025 merupakan salah satu mekanisme dialog



kinerja antara Pimpinan KBRI Beijing dan seluruh elemen yang bertugas dalam mencapai visi dan misi Perwakilan RI Beijing.

Kendala dan Tantangan

Sejumlah kendala dan tantangan yang dapat kami identifikasi:

- Tingginya kompleksitas tugas dan dinamika lingkungan kerja KBRI Beijing, yang mencakup diplomasi politik, ekonomi, sosial budaya, perlindungan WNI, serta layanan protokoler dalam hubungan strategis Indonesia–Tiongkok. Kompleksitas ini menuntut alokasi waktu dan sumber daya yang besar, sehingga ruang untuk pendalaman analisis kinerja, khususnya pada aspek pengukuran outcome dan dampak jangka menengah, menjadi terbatas.
- Pola pengelolaan anggaran yang fluktuatif, di mana pada awal tahun anggaran kerap terjadi pengetatan atau pemotongan anggaran, yang kemudian diikuti oleh relaksasi pada paruh atau akhir tahun. Pola ini berpengaruh terhadap kepastian perencanaan dan konsistensi pelaksanaan program, serta menyulitkan optimalisasi penjadwalan kegiatan dan pengukuran kinerja secara berimbang sepanjang tahun anggaran. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja sebagaimana diharapkan dalam kerangka SAKIP.
- Dari sisi sumber daya, keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan AKIP juga menjadi tantangan, mengingat fungsi perencanaan dan pelaporan kinerja dijalankan secara bersamaan dengan beban kerja substantif yang tinggi. Hal ini membatasi ruang bagi pengembangan inovasi pengelolaan kinerja dan pendalaman metodologi evaluasi berbasis hasil.
- Di samping itu, kebutuhan akan integrasi data dan dokumentasi pendukung kinerja yang lebih sistematis masih menjadi pekerjaan rumah, mengingat capaian kinerja berasal dari berbagai fungsi dengan karakteristik program yang berbeda. Koordinasi lintas fungsi yang intensif diperlukan agar seluruh data kinerja dapat terdokumentasi secara lengkap, konsisten, dan siap dievaluasi sesuai standar AKIP.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan meliputi:

- KBRI Beijing akan semakin memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dengan menajamkan sasaran strategis dan indikator kinerja agar semakin mencerminkan outcome dan dampak, bukan semata output kegiatan.
- Dalam merespons pola pengetatan anggaran di awal tahun dan relaksasi di akhir tahun, KBRI Beijing akan menerapkan perencanaan yang lebih fleksibel dan berbasis prioritas, termasuk pengelompokan program inti (core programs) dan program pendukung. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan kinerja meskipun terjadi penyesuaian anggaran, serta meminimalkan risiko deviasi antara rencana dan realisasi.
- Penguatan kapasitas SDM pengelola AKIP akan menjadi fokus, baik melalui pembagian peran yang lebih jelas, penguatan kerja lintas fungsi, maupun peningkatan pemahaman



substantif mengenai SAKIP dan evaluasi kinerja berbasis hasil. Dengan demikian, proses pengelolaan AKIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga analitis dan strategis.

- KBRI Beijing akan mendorong pemanfaatan digitalisasi dan integrasi data kinerja secara lebih sistematis, termasuk pengelolaan evidence kinerja yang terdokumentasi dengan baik sejak awal pelaksanaan kegiatan. Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi, konsistensi, dan kesiapan data dalam proses evaluasi AKIP.
- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya akan terus dimonitor secara berkala.

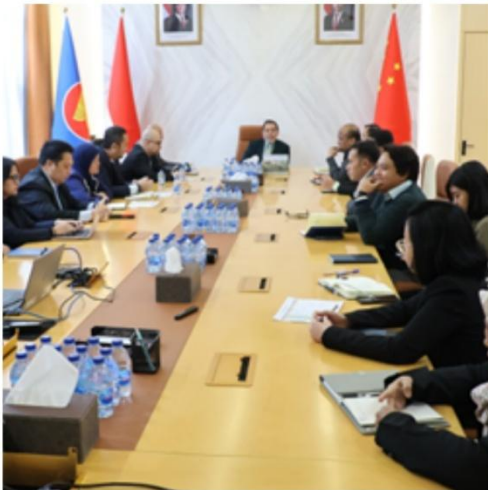
Proyeksi Kedepan

Ke depan, kinerja AKIP KBRI Beijing diproyeksikan akan semakin dipengaruhi oleh dinamika eksternal dan internal yang menuntut tata kelola kinerja yang lebih adaptif, presisi, dan berorientasi hasil nyata.

Dari sisi eksternal, intensitas hubungan Indonesia–Tiongkok yang terus meningkat, baik melalui kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan, people-to-people contact, maupun saling kunjung pejabat tinggi, akan berdampak langsung pada bertambahnya volume program, kompleksitas kegiatan, serta kebutuhan koordinasi lintas fungsi. Kondisi ini menuntut sistem AKIP yang mampu menangkap kinerja secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi kuantitas kegiatan, tetapi juga kualitas outcome dan dampaknya terhadap kepentingan nasional.

Selain itu, meningkatnya ekspektasi publik dan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan kualitas pelayanan diplomatik akan menjadikan AKIP bukan sekadar instrumen pelaporan, tetapi juga alat komunikasi kinerja institusi. Dengan demikian, kualitas narasi kinerja, analisis capaian, serta penjelasan atas deviasi target akan menjadi aspek yang semakin krusial.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK L.1.1



Beberapa Rapat staf dan Town Hall Meeting di KBRI Beijing Tahun 2025



L.2 Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal

Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal merupakan bagian penting dari upaya menjaga tata kelola organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Aset pada dasarnya adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Aset tersebut dapat diukur dalam satuan uang dan mencakup pula sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan publik, termasuk aset yang dipelihara karena nilai sejarah dan budaya.

Dalam konteks KBRI Beijing, aset yang dimaksud terutama adalah Barang Milik Negara (BMN), yaitu seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari perolehan lain yang sah. Fokus pengukuran pada sasaran strategis ini diarahkan pada aset lancar berupa BMN yang berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, pengelolaan aset dimaknai sebagai rangkaian proses yang mencakup perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian BMN, dengan tujuan memastikan aset dimanfaatkan secara paling baik dan memberikan nilai optimal bagi pelaksanaan tugas perwakilan.

Ruang lingkup pengelolaan aset tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang mengatur secara komprehensif seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, hingga penatausahaan serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dengan pengelolaan yang tertib, sistematis, dan optimal, aset KBRI Beijing diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi diplomasi, pelayanan publik, serta perlindungan WNI secara efektif dan berkelanjutan.

Sasaran L.2 Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal diukur melalui capaian IK L.2.1 Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing

Analisis IK L.2.1 Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing

Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal merupakan bagian integral dari upaya penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel, efisien, dan berkelanjutan. Aset dipahami sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Aset tersebut dapat diukur dalam satuan uang serta mencakup sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan layanan publik, termasuk aset yang dipelihara karena nilai sejarah dan budaya.

Dalam konteks KBRI Beijing, aset yang dikelola terutama adalah Barang Milik Negara (BMN), yaitu seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari perolehan lain yang sah. Cakupan aset yang diukur dalam indeks ini difokuskan pada aset lancar berupa BMN yang berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, pengelolaan aset dalam sasaran strategis ini dimaknai sebagai suatu proses menyeluruh yang mencakup perencanaan kebutuhan, penggunaan,



pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian BMN, dengan tujuan mencapai kondisi yang paling baik dan bernilai optimal.

Ruang lingkup pengelolaan aset tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang mengatur secara komprehensif seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, hingga penatausahaan serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kerangka regulatif ini menjadi landasan bagi KBRI Beijing dalam memastikan bahwa pengelolaan aset dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

Untuk mengukur kualitas pengelolaan BMN tersebut, digunakan Indeks Pengelolaan BMN, yaitu alat ukur yang menilai sejauh mana satuan kerja Perwakilan RI melaksanakan pengelolaan BMN secara efektif sebagai bagian dari pengelolaan aset Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan. Implementasi Indeks Pengelolaan BMN sekaligus menjadi instrumen penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian, mendorong Pengelola Barang dan Pengguna Barang untuk melakukan perbaikan tata kelola BMN secara berkelanjutan.

Indeks Pengelolaan BMN disusun berdasarkan rata-rata tertimbang dari sejumlah parameter pengelolaan BMN yang relevan dengan kondisi Perwakilan RI. Secara umum, indeks ini mencakup delapan parameter utama, yaitu: tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait BMN; realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset; ketepatan waktu dan kelengkapan laporan serta usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN); pengasuransian BMN; tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN; pengelolaan BMN rusak berat; ketersediaan dokumen kepemilikan BMN; serta kesesuaian penggunaan BMN dengan ketentuan yang berlaku.

Parameter-parameter tersebut merujuk pada komponen penilaian dalam Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Perwakilan RI. Dalam praktiknya, parameter yang tidak relevan atau tidak applicable dengan kondisi perwakilan dapat dikecualikan dari perhitungan. Sebagai contoh, apabila suatu perwakilan tidak memiliki aset tanah, maka parameter terkait dokumen kepemilikan tanah tidak diperhitungkan dalam indeks.

Setiap parameter memiliki mekanisme penilaian tersendiri yang menghasilkan indeks pada rentang tertentu, mulai dari indeks 1 hingga indeks 4, berdasarkan tingkat pemenuhan atau penyelesaian. Penilaian mencakup antara lain persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, capaian pemanfaatan BMN yang menghasilkan PNBP, ketepatan waktu pelaporan, status pengasuransian BMN, serta perkembangan penanganan BMN rusak berat. Indeks Pengelolaan BMN Perwakilan RI kemudian diperoleh dari hasil penjumlahan nilai seluruh parameter yang diperhitungkan, dibagi dengan jumlah parameter yang berlaku.

Nilai Indeks Pengelolaan BMN yang digunakan adalah nilai pada tahun berjalan, yakni periode Januari hingga Desember. Indeks ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola aset di KBRI Beijing sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tujuan utama pengukuran Indeks Pengelolaan BMN adalah mendukung terwujudnya pengelolaan aset yang optimal dan akuntabel, yakni pengelolaan aset yang



dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Dengan pengelolaan aset yang tertib dan optimal, KBRI Beijing diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas diplomasi, pelayanan publik, dan perlindungan WNI secara efektif dan berkelanjutan.

Informasi Kinerja

Capaian IKU L2.1 Indeks Pengelolaan Aset KBRI Beijing Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu	Nilai Pengelolaan Aset yang ditetapkan oleh Kemenkeu	3.7
Realisasi		3.77
Target		3.7
Capaian		101.89%

Tabel:

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) L2.1 menunjukkan bahwa pengelolaan aset KBRI Beijing pada tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, nilai Indeks Pengelolaan Aset KBRI Beijing ditetapkan sebesar 3,7. Dalam pelaksanaannya, KBRI Beijing berhasil mencapai realisasi indeks sebesar 3,77, lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 101,89 persen, yang mencerminkan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga menunjukkan peningkatan efektivitas dalam perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian aset.

Perbandingan Kinerja

Perbandingan Capaian IKU L2.1 Indeks Pengelolaan Aset KBRI Beijing tahun 2023-2025

	2023	2024	2025
Nilai Pengelolaan Aset yang ditetapkan oleh Kemenkeu	2.91	3.69	3.7
Realisasi	2.91	3.69	3.77
Target	2.90	3.2	3.7
Capaian	100.34%	115.31%	101.89%

Tabel:

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) L2.1 periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola Barang Milik Negara (BMN). Pada tahun 2023, KBRI Beijing mencatat realisasi indeks sebesar 2,91 dengan target 2,90, menghasilkan capaian sebesar 100,34 persen.



Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan baik dari sisi target maupun realisasi. Target indeks ditetapkan sebesar 3,2, sementara realisasi mencapai 3,69, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 115,31 persen.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2025. Target Indeks Pengelolaan Aset ditetapkan lebih tinggi, yaitu 3,7, dan KBRI Beijing berhasil merealisasikan nilai indeks sebesar 3,77. Dengan capaian sebesar 101,89 persen, kinerja pengelolaan aset tidak hanya memenuhi target yang semakin menantang, tetapi juga menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas tata kelola aset pada level tinggi.

Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IKU L2.1 didorong oleh penguatan tata kelola BMN yang semakin disiplin, terstruktur, dan berbasis kepatuhan regulasi. KBRI Beijing secara konsisten melakukan penatausahaan aset yang tertib, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik, termasuk dalam penyampaian laporan, usulan RKBMN, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Hal ini memastikan seluruh siklus pengelolaan aset berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Selain itu, peningkatan capaian juga ditopang oleh penguatan fungsi pengawasan internal dan koordinasi yang efektif dengan unit teknis di pusat, sehingga potensi permasalahan aset dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini.

Pemanfaatan aset yang lebih optimal, penanganan BMN rusak berat secara berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap ketentuan asuransi dan pemanfaatan aset turut berkontribusi terhadap tingginya nilai indeks. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan komitmen KBRI Beijing dalam menjadikan pengelolaan aset sebagai instrumen pendukung utama pelaksanaan diplomasi yang efisien dan berkelanjutan.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

KBRI Beijing menempatkan pengelolaan aset sebagai salah satu fondasi penting dalam memperkuat minimum essential diplomatic infrastructure, sehingga pencapaian IKU L2.1 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diplomasi. Upaya yang dilakukan diarahkan pada penguatan tata kelola BMN secara tertib, akuntabel, dan berorientasi pencegahan. Pertama, KBRI Beijing melakukan supervisi yang lebih sistematis atas penatausahaan aset sesuai ketentuan melalui penyusunan *timetable* penatausahaan BMN, guna memastikan ketepatan waktu pelaporan serta konsistensi pencatatan. Kedua, dilakukan pemantauan aktif terhadap siklus pengelolaan aset, termasuk pemeliharaan berkala, pengangsuransian BMN, serta langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi kerusakan atau penurunan fungsi aset. Ketiga, KBRI Beijing memperkuat koordinasi intensif dengan unit terkait di Pusat, khususnya dalam aspek penatausahaan dan tindak lanjut kebijakan BMN, sehingga pengelolaan aset dapat berjalan selaras dengan standar kementerian dan mendukung efektivitas operasional perwakilan secara berkelanjutan.



Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan utama dalam pengelolaan aset KBRI Beijing masih berkaitan dengan aspek administrasi dan kepatuhan teknis.

- Pertama, penertiban dokumen asuransi BMN belum sepenuhnya konsisten dengan kriteria self-assessment Indeks Pengelolaan Aset, terutama dalam kelengkapan dan pembaruan dokumen pendukung.
- Kedua, ketepatan waktu serta kelengkapan penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) masih menghadapi tantangan, khususnya pada periode dengan beban kerja tinggi.
- Ketiga, penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) belum selalu dilakukan tepat waktu, yang berpotensi memengaruhi akurasi penilaian dan kesinambungan pemantauan aset. Tantangan-tantangan ini menuntut penguatan koordinasi internal dan peningkatan disiplin administrasi agar kualitas pengelolaan aset dapat terus ditingkatkan.

Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan pengelolaan aset KBRI Beijing ke depan diarahkan pada penguatan tata kelola administratif dan peningkatan kepatuhan terhadap standar penilaian Indeks Pengelolaan Aset.

- Pertama, penertiban dokumentasi asuransi BMN akan dilakukan secara lebih sistematis, termasuk pembaruan polis, pengarsipan dokumen pendukung, serta penyelarasan dengan kriteria self-assessment yang ditetapkan, sehingga seluruh objek BMN terlindungi dan tercatat secara akurat.
- Kedua, KBRI Beijing akan meningkatkan disiplin dan perencanaan internal dalam penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) serta Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dengan memastikan seluruh dokumen kelengkapan disusun secara komprehensif dan disampaikan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Upaya ini akan didukung melalui pengaturan alur kerja yang lebih jelas, pembagian peran yang tegas, serta pemanfaatan sistem pengingat dan monitoring internal, sehingga kualitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas pengelolaan aset dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, pengelolaan aset KBRI Beijing diproyeksikan akan semakin menuntut tingkat ketertiban administratif dan akuntabilitas yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya aktivitas perwakilan, intensitas kunjungan pejabat, serta pemanfaatan aset untuk mendukung fungsi diplomasi, pelayanan publik, dan perlindungan WNI. Tren penguatan tata kelola dan digitalisasi pengelolaan BMN di tingkat nasional juga akan mendorong KBRI Beijing untuk terus menyesuaikan proses perencanaan, pelaporan, dan pengawasan aset agar selaras dengan standar terbaru.



L.3 Pengelolaan anggaran KBRI Beijing yang optimal dan akuntabel

Pengelolaan anggaran KBRI Beijing yang optimal dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat infrastruktur diplomasi Indonesia di Tiongkok. Pengelolaan anggaran tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi sebagai rangkaian siklus yang utuh, mulai dari penyusunan rencana kerja, penguangannya ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasi kegiatan, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, hingga penyusunan Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan anggaran yang optimal berarti bahwa sumber daya keuangan yang tersedia dimanfaatkan secara paling efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KBRI Beijing, dengan tingkat penyerapan anggaran yang maksimal dan selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menuntut agar seluruh proses pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ruang lingkup tersebut, pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja diplomasi, pelayanan publik, serta perlindungan WNI yang dilaksanakan oleh KBRI Beijing.

Pemenuhan sasaran strategis L.3 diperoleh dari capaian IK L.3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Beijing.

Analisis IK L.3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Beijing

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Penilaian ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan dapat diakses secara transparan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Anggaran Perbendaharaan Negara (OMSPAN). Melalui IKPA, Kementerian Keuangan menilai sejauh mana pelaksanaan anggaran dilakukan secara tertib, efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang berlaku.

Penilaian IKPA merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Kementerian/Lembaga. Dalam kerangka tersebut, IKPA digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari empat aspek utama, yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi. Seiring dengan reformulasi IKPA pada tahun 2022, penilaian difokuskan ke dalam tiga aspek besar, yakni kualitas perencanaan anggaran dengan bobot 20 persen, kualitas pelaksanaan anggaran dengan bobot 55 persen, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan bobot 25 persen.

Secara operasional, terdapat enam indikator penilaian IKPA yang dihitung pada satuan kerja Perwakilan RI, masing-masing dengan bobot tertentu, yaitu Revisi DIPA (10%), Deviasi



Halaman III DIPA (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/TUP (10%), Dispensasi Surat Perintah Membayar atau SPM (5%), serta Capaian Output (25%). Keenam indikator tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga capaian hasil kegiatan.

Nilai IKPA diperoleh langsung dari aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Pengukuran dilakukan secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Nilai IKPA triwulanan diambil setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah triwulan berakhir, atau menyesuaikan dengan waktu diterimanya hasil penilaian dari Kementerian Keuangan. Sementara itu, nilai IKPA tahunan diambil setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan IV, atau sesuai dengan jadwal penyampaian dari Kementerian Keuangan.

Melalui penerapan IKPA, KBRI Beijing memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam menjaga serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. IKPA tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan anggaran semakin selaras dengan perencanaan, mendukung pencapaian kinerja, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Perwakilan RI.

Informasi Kinerja

Capaian IKU L3.1 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KBRI Beijing Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Kinerja Anggaran KBRI Beijing	Nilai IKPA yang ditetapkan dalam dokumem PK KBRI Beijing	95.44
Realisasi		95.44
Target		95
Capaian		100.46%

Tabel:

Capaian IKU L3.1 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran KBRI Beijing telah dilaksanakan secara optimal dan akuntabel. Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Beijing tercatat sebesar 95,44, sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KBRI Beijing.

Target IKPA tahun 2025 ditetapkan sebesar 95, dengan mempertimbangkan standar kualitas pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta kapasitas dan karakteristik pelaksanaan anggaran di lingkungan Perwakilan RI. Realisasi IKPA yang mencapai 95,44 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya secara terukur.

Dengan capaian sebesar 100,46%, kinerja pelaksanaan anggaran KBRI Beijing mencerminkan konsistensi dalam perencanaan yang matang, ketertiban dalam pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.



Perbandingan Kinerja

Capaian IKU L3.1 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KBRI Beijing Tahun 2023-2025

	2023	2024	2025
Nilai IKPA yang ditetapkan dalam dokumen PK KBRI Beijing	91.65%	94.11%	95.44%
Realisasi	91.65%	94.11%	95.44%
Target	93%	93%	95%
Capaian	98.55%	100.09%	100.46%

Tabel:

Capaian IKU L3.1 Tahun 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam kualitas pengelolaan anggaran. Pada tahun 2023, Nilai IKPA KBRI Beijing tercatat sebesar 91,65%, dengan capaian 98,55% terhadap target yang ditetapkan sebesar 93%.

Pada tahun 2024, kinerja pelaksanaan anggaran mengalami peningkatan signifikan. Nilai IKPA meningkat menjadi 94,11%, melampaui target yang tetap ditetapkan sebesar 93%, dengan capaian sebesar 100,09%.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2025. Nilai IKPA kembali meningkat menjadi 95,44%, melampaui target yang dinaikkan menjadi 95%, dengan capaian sebesar 100,46%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran di lingkungan KBRI Beijing.

Analisis Keberhasilan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IKU L3.1 periode 2023–2025 tidak terlepas dari penguatan tata kelola anggaran yang semakin konsisten dan disiplin. Peningkatan nilai IKPA secara bertahap mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam menyelaraskan perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil pelaksanaan program, sehingga revisi DIPA dan deviasi perencanaan dapat diminimalisir.

Selain itu, penguatan pengendalian internal dan koordinasi lintas fungsi turut berperan penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Proses penyerapan anggaran, pengelolaan UP/TUP, serta kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan regulasi perbendaharaan diupayakan secara lebih tertib dan tepat waktu, sehingga meminimalkan kendala teknis dalam proses pembayaran dan pelaporan. Keberhasilan ini juga didukung oleh pemanfaatan sistem informasi keuangan secara optimal, khususnya melalui pemantauan rutin atas indikator IKPA di aplikasi OMSPAN.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Keberhasilan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran KBRI Beijing sepanjang tahun 2025 juga ditopang oleh serangkaian langkah internal yang terstruktur, mulai dari penguatan



koordinasi lintas fungsi, peningkatan pemahaman seluruh tim terhadap indikator kinerja anggaran, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Upaya-upaya berikut menjadi fondasi penting dalam menjaga efektivitas, akuntabilitas, serta konsistensi capaian kinerja anggaran satker

1. Pembahasan kinerja dan realisasi anggaran dilaksanakan secara rutin melalui forum koordinasi antara Tim Kekanseleraian, MKP, dan seluruh fungsi, guna memastikan rencana kegiatan selaras dengan kebutuhan anggaran serta mendukung pencapaian target kinerja satuan kerja.
2. Diseminasi informasi dan sosialisasi terkait IKPA kepada Tim Kekanseleraian telah dilakukan pada 22 Juli 2025 sebagai *push factor* untuk meningkatkan awareness mengenai pentingnya IKPA sebagai salah satu indikator utama kualitas pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja satker.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan pada 30 Desember 2025 dengan melibatkan home staff dan staf lokal, sebagai langkah konsolidasi akhir tahun untuk mempertahankan capaian IKPA serta mengidentifikasi ruang perbaikan guna peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun berikutnya.

Kendala dan Tantangan

Pelaksanaan IKU L3.1 tetap dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan, diantaranya:

- Dinamika kebijakan anggaran, khususnya pola pengetatan anggaran di awal tahun dan relaksasi pada periode akhir tahun, yang memengaruhi ketepatan perencanaan dan tempo pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menuntut penyesuaian berulang pada rencana kerja dan berpotensi meningkatkan kebutuhan revisi anggaran.
- Tingginya intensitas kegiatan diplomatik dan pelayanan publik, termasuk kunjungan pejabat tinggi, kegiatan promosi ekonomi, serta pelayanan konsuler dan perlindungan WNI, menuntut fleksibilitas anggaran yang tinggi. Keterbatasan ruang fiskal dan rigiditas sebagian pos anggaran dapat menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penyerapan anggaran dan pencapaian output secara optimal.
- Faktor teknis administratif juga menjadi tantangan tersendiri, antara lain kompleksitas pemenuhan indikator IKPA yang mensyaratkan ketepatan waktu, kepatuhan regulasi, dan kualitas dokumentasi yang tinggi. Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani fungsi perencanaan dan keuangan di tengah beban kerja lintas fungsi berpotensi memengaruhi konsistensi pemantauan dan tindak lanjut atas setiap indikator kinerja anggaran.

Upaya Perbaikan

Untuk merespons berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaan anggaran, KBRI Beijing secara berkelanjutan melakukan upaya:

- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Pada tahap perencanaan, dilakukan penajaman rencana kerja dan penganggaran dengan pendekatan berbasis prioritas dan risiko, sehingga alokasi anggaran lebih adaptif terhadap kemungkinan



pengetatan di awal tahun serta tetap menjaga kesiapan pelaksanaan ketika terjadi relaksasi anggaran di periode berikutnya.

- Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan capaian output. Pemantauan ini dilakukan secara lintas fungsi guna mengidentifikasi potensi deviasi sejak dini, meminimalkan kebutuhan revisi DIPA yang tidak diperlukan, serta menjaga kualitas indikator IKPA, khususnya pada aspek penyerapan anggaran, pengelolaan UP/TUP, dan capaian output.
- Meningkatkan disiplin dalam pemenuhan kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, termasuk ketepatan waktu penyampaian SPM dan laporan terkait. Penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan juga terus dilakukan melalui pembagian tugas yang lebih jelas, penguatan koordinasi internal, serta pemanfaatan sistem OMSPAN secara optimal sebagai alat bantu pemantauan kinerja anggaran secara real time.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, kinerja pengelolaan anggaran KBRI Beijing akan semakin dipengaruhi oleh dinamika eksternal, khususnya fluktuasi nilai tukar USD terhadap Rupiah, serta kompleksitas pelaksanaan tugas perwakilan yang terus meningkat seiring eratnya hubungan Indonesia–Tiongkok. Variabilitas kurs berpotensi memengaruhi daya beli anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, sehingga diperlukan antisipasi kebijakan di tingkat pusat agar perencanaan dan realisasi anggaran Perwakilan RI di luar negeri tetap selaras dan tidak menimbulkan deviasi yang signifikan.

Dalam konteks tersebut, ke depan diperlukan penguatan kebijakan fiskal dan penganggaran yang lebih adaptif, antara lain melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan skema mitigasi risiko nilai tukar. Penerapan mekanisme pengamanan kurs, seperti kebijakan hedging yang mengacu pada kurs pada saat perencanaan anggaran, dapat dipertimbangkan guna menjaga kepastian daya beli anggaran Perwakilan RI serta meminimalkan kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Selain itu, optimalisasi arus kas pelaksanaan anggaran juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas kinerja anggaran. Ke depan, Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat mengajukan dispensasi kepada Kementerian Keuangan terkait ketentuan pengajuan GUP Belanja Barang dan Modal Perwakilan RI yang saat ini dibatasi kurang dari 50% UP Perdana Belanja Barang. Penyesuaian kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi belanja, meningkatkan fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, serta menjaga kesinambungan pencapaian output dan indikator kinerja anggaran.

Secara keseluruhan, proyeksi ke depan menunjukkan perlunya sinergi kebijakan yang lebih erat antara Perwakilan RI dan instansi pusat, baik dari sisi pengelolaan risiko nilai tukar maupun fleksibilitas mekanisme penyaluran anggaran. Dengan dukungan kebijakan yang adaptif tersebut, KBRI Beijing diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran secara optimal dan akuntabel, sekaligus memastikan dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan diplomasi dan pelayanan publik di wilayah akreditasi.

DOKUMENTASI PENDUKUNG IK L.3.1



Evaluasi Kinerja Anggaran, Desember 2025



Monitoring Capaian Realisasi Anggaran, September 2025



III.2 Realisasi Anggaran

Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan 7 (tujuh) kali revisi pagu anggaran terkait penambahan kebutuhan operasional yang bersifat mengikat seperti belanja pegawai dan belanja barang operasional, relaksasi efisiensi anggaran belanja barang non operasional serta penambahan belanja modal (RM) sebagai salah satu aspek penguatan kualitas sarana internal KBRI Beijing, berupa kebutuhan prioritas TIK KBRI Beijing (penguatan jaringan dan software, pengamanan informasi dan perangkat TIK), pemenuhan fasilitas perkantoran yang lebih memadai serta kendaraan dinas Pimpinan KBRI Beijing. Disamping itu terdapat 8 (delapan) kali revisi pemutakhiran KPA yang dilakukan di tingkat internal KBRI Beijing dalam menunjang kebutuhan di lingkup KRO KBRI Beijing.

Berdasarkan DIPA KBRI Beijing tanggal 31 Desember 2025, total Pagu anggaran KBRI Beijing setelah proses penyesuaian/revisi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 101.792.594.000,- (Seratus satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Diantara nilai tersebut terdapat alokasi anggaran yang tidak dapat digunakan/blokir sebesar Rp691.659.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Sehingga alokasi Pagu anggaran bersih yang dapat digunakan KBRI Beijing sebesar Rp101,100,935,000,- (seratus satu milyar seratus juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pagu dan Realisasi Anggaran KBRI Beijing TA 2025 per Jenis Belanja

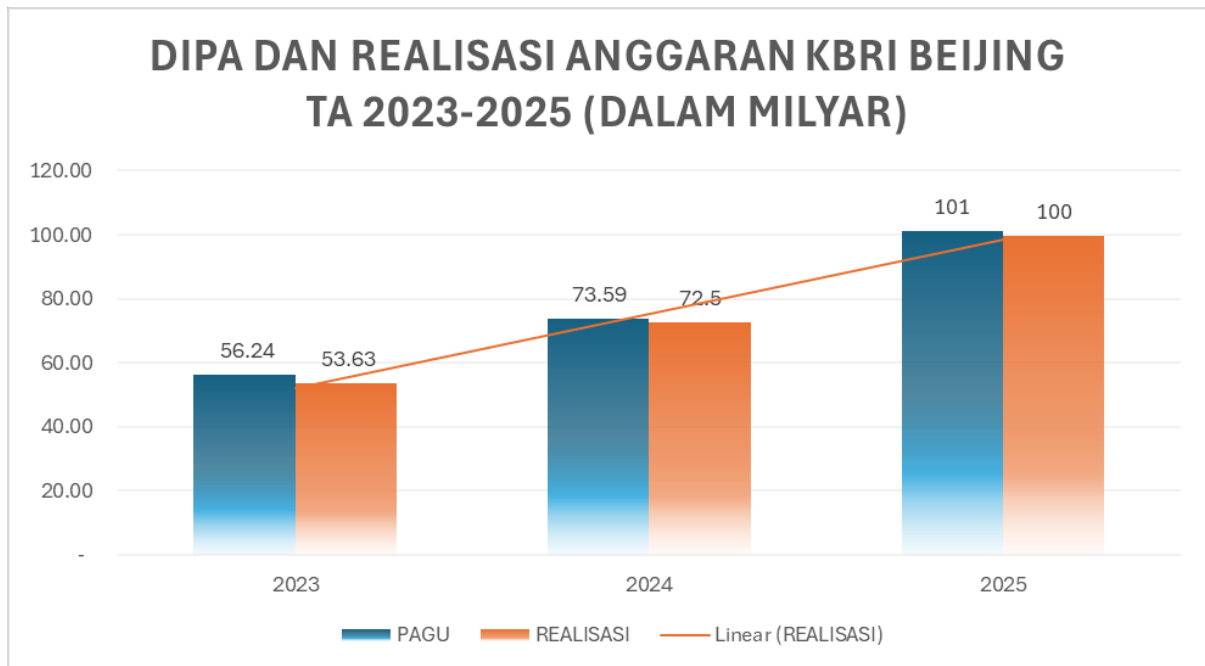
Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Sumber Pendanaan
Belanja Pegawai	58,156,686,000	58,135,237,674	99.96 %	RM
Belanja Barang	37,736,234,000	36,409,732,065	96.48 %	RM
Belanja Modal	2,313,015,000	2,291,217,610	99.06 %	RM
Belanja Modal	2,895,000,000	2,892,991,001	99.93 %	PNBP
Total	101,100,935,000	99,729,180,066	98.64 %	

KBRI Beijing telah mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 dengan realisasi mencapai 98.64% atau sebesar Rp. 99,729,180,066,- (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu enam puluh enam rupiah). Persentase realisasi tersebut meningkat sebesar 0.12 poin dan 3,28 poin jika secara berturut turut dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran pada tahun 2024, yaitu sebesar 98.52% dan tahun anggaran 2023 sebesar 95,36%.

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2023	56.243.140.000	53.636.346.820	95,37%



2024	73,591,362,000	72,502,706,358	98.52 %
2025	101,100,935,000	99,729,180,066	98.64 %



III.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

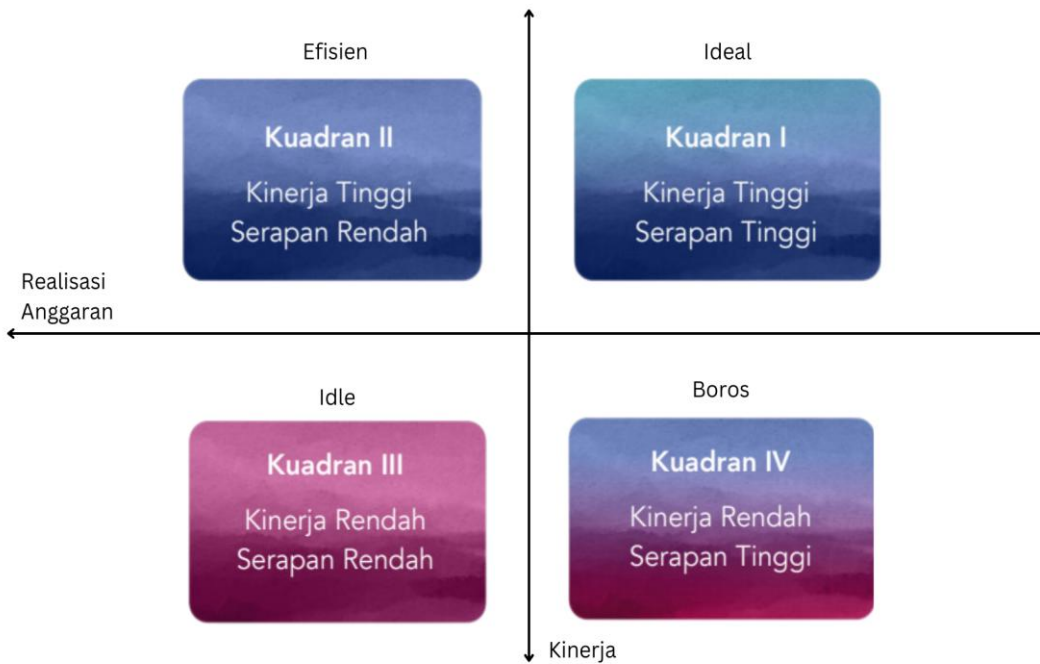
Dalam rangka menghadapi dinamika global dan tantangan baru yang semakin kompleks, KBRI Beijing berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Komitmen ini mencakup pengelolaan anggaran yang lebih baik, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang optimal. Melalui langkah-langkah ini, KBRI Beijing bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, setiap sumber daya yang dimiliki diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi anggaran merupakan salah satu indikator utama dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan optimal dengan sumber daya yang tersedia. Pendekatan yang digunakan oleh KBRI Beijing dalam penganggaran merupakan penganggaran berbasis kinerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian visi dan misi KBRI Beijing. Alokasi anggaran didasarkan untuk mendukung kegiatan yang memiliki dampak luas terhadap nilai tambah dan capaian organisasi serta manfaat bagi penguatan diplomasi Indonesia – RRT.

Untuk menilai efektivitas pemanfaatan anggaran, KBRI Beijing menerapkan model kuadran dengan melakukan perhitungan berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja yang terukur. Tingkat efisiensi digambarkan dalam kuadran yang mengelompokkan capaian kinerja dan serapan anggaran sebagai berikut:

Tabel Kuadran Efisiensi Kinerja dan Anggaran



Penilaian kriteria tinggi rendahnya capaian kinerja dan anggaran per triwulan didasarkan pada batasan angka/persentase sebagai berikut:

Tabel Kriteria Tinggi Rendahnya Capaian Kinerja dan Anggaran per Triwulan

	Rendah	Tinggi
TW I	Di bawah 25%	Di atas 25%
TW II	Di bawah 50%	Di atas 50%
TW III	Di bawah 75%	Di atas 75%
TW IV	Di bawah 90%	Di atas 90%



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

Berdasarkan Renja KBRI Beijing TA 2025 dan metode pengelolaan anggaran berbasis kinerja, KBRI Beijing menetapkan 3 Rincian Output untuk 10 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja.

Rincian anggaran per RO dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja (IK)	Capaian IK 2025	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Stakeholder Perspective						
Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Beijing yang Optimal	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	134.51	AEH.001.051. Promosi Dagang & 052. business Forum/ Business Matching	1,367,786,000	1,342,713,321	98.60
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi deNgaran negara akreditasi KBRI Beijing	100%	AEH.001.054. Promosi Investasi	686,299,000	670,125,838	97.64
	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Beijing	100%	AEH.001.053. Promosi Budaya dan Pariwisata	1,226,207,000	1,199,347,603	97.81
Citra positif Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing yang meningkat	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing	4,20 (skala 5)	BDD. Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	408,443,000	359,701,648	88.07
Customer Perspective						
Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Beijing yang prima	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Beijing	4 (Skala 4)	BAA. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	211,126,000	170,757,012	80.88
	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang diselesaikan	90%	QAA. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	493,306,000	373,232,161	75.66
	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Beijing	4 (Skala 4)				



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI Beijing	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Beijing *)Diadopsi jika terdapat tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing dengan penyesuaian target sesuai kondisi/karakteristik Perwakilan RI	95%	AEC. Kerja Sama Bilateral	3,407,071,000	3,371,650,876	98.96
Internal Business Process Perspective						
Diplomasi bilateral di negara akreditasi KBRI Beijing yang kuat	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	15	AEC. Kerja Sama Bilateral	3,407,071,000	3,371,650,876	98.96
	Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	5				
	Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi	12				
Basis data KBRI Beijing yang akurat	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100%	BAA. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	211,126,000	170,757,012	80.88
	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Beijing	98	AEH.060 Penyusunan Data Economic Inteligent	15,041,000	12,871,024	85.57
Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Beijing yang Kuat	Persentase Impresi <i>Engagement</i> Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing *)Terdapat perbedaan perlakuan meliputi jumlah komponen dan bobot komponen	70%	<i>BDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</i>	408,443,000	359,701,648	88.07



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

	untuk perwakilan PRPB dan non PRPB					
Learning and Growth Perspective						
Tata kelola organisasi KBRI Beijing yang baik	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing	80.65 (A)	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	85,999,053,000	84,993,980,563	98.83
Pengelolaan anggaran KBRI Beijing yang optimal dan akuntabel	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Beijing	95,44 skala 100				
Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal	Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing	3,7 (Skala 4)				
NCKO 2025		105,85%	TOTAL	101.100.935.000	99,729,180,066	98,64%

Capaian kinerja KBRI Beijing pada tahun 2025 telah didukung oleh serapan anggaran sebesar 98.64%. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025 KBRI Beijing berhasil mencapai Kuadran I (Ideal) dengan capaian kinerja sebesar 105,85% dan serapan anggaran 98,64%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program dijalankan secara strategis untuk memaksimalkan hasil dan dampak kebijakan yang diimplementasikan dan mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja.

Faktor-faktor utama yang mendukung tercapainya efisiensi penggunaan anggaran Kemenlu antara lain adalah:

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran untuk Berbagai Kegiatan

Optimalisasi penggunaan anggaran dilakukan oleh KBRI Beijing secara terkoordinasi dan antar fungsi. Hal ini meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dengan target meningkatkan capaian kinerja output masing-masing kegiatan. Dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antar fungsi, KBRI Beijing dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan meningkatkan capaian kinerja kegiatan dalam mendukung sasaran strategis. tanpa adanya pemborosan sumber daya.

2. Koordinasi dan Sinergi Antar Fungsi

Dinamika pelaksanaan tugas yang relatif tinggi selama tahun 2025 mengharuskan adanya efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan serta anggaran. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya koordinasi yang solid di antara



seluruh pegawai di KBRI Beijing. Komitmen tinggi untuk menjalankan tugas secara terintegrasi menciptakan sinergi yang optimal, mendukung pencapaian target kinerja dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi lintas fungsi serta dalam merencanakan program dapat menghasilkan inovasi dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, diantaranya melalui pelaksanaan kegiatan yang terpadu dan antar fungsi.

3. Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

Evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala melalui Wasdit anggaran yang dapat diakses oleh seluruh unsur di KBRI Beijing. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Efisiensi Anggaran dalam pencapaian Output

KBRI Beijing bukan merupakan Satuan Kerja memiliki SBKK/U dalam pelaksanaan kegiatannya.

Efisiensi Sumber Daya Manusia

Peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia (SDM) di KBRI Beijing menjadi isu strategis seiring dengan berkembangnya bobot misi Perwakilan serta meningkatnya intensitas dan kompleksitas hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dinamika kerja sama yang semakin luas, mencakup diplomasi politik, ekonomi, investasi, perlindungan WNI, hingga pengelolaan kunjungan tingkat tinggi, menuntut kapasitas organisasi yang semakin adaptif, responsif, dan profesional. Dalam konteks ini, optimalisasi SDM tidak hanya diukur dari jumlah personel, tetapi juga dari kesesuaian kompetensi, beban kerja, dan struktur organisasi dengan kebutuhan riil pelaksanaan tugas.

Pemenuhan Formasi Pegawai berdasarkan kebutuhan Organisasi

Perwakilan RI	Kebutuhan	Pemenuhan
Home Staff		
Diplomat	40 (termasuk Duta Besar, Wakil Duta Besar dan DCM)	13 (termasuk Duta Besar, Wakil Duta Besar dan DCM)
Penata Kanselerai	3	2
Pranata Informasi Diplomatik	3	2
Pegawai Setempat		
F. Politik	5	2
F. Ekonomi	5	2
F. PEKDP	5	2
F. Protkons	6	2
Kekanseleraian	8	7
Unit Komunikasi	3	1



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

Sekretaris Pimpinan	3	2
Staf Teknis	5	1

Per 21 Maret 2025, terdapat 22 (dua puluh dua) pemegang ID dan izin tinggal Diplomatik (termasuk Duta Besar RI), serta 34 (tiga puluh empat) pemegang ID dan izin tinggal Dinas di KBRI Beijing (tidak termasuk anggota keluarga yang juga memperoleh ID diplomatik/dinas yang melekat pada pejabat/staf KBRI Beijing), dengan rincian sebagai berikut:

→ *Home Staff* (HS): 28 orang

- 22 HS pemegang ID dan izin tinggal Diplomatik;
- 6 HS pemegang ID dan izin tinggal Dinas, terdiri atas:
 - 2 Penata Kanselera,;
 - 1 Direktur Promosi Investasi/BKPM
 - 1 PBU Athan,
 - 1 PBU Atase Imigrasi
 - 1 SK111

→ Pegawai Setempat (PS) WNI pemegang ID dan izin tinggal Dinas: 28 orang, dengan status Staf Administrasi dan Teknis (termasuk perangkat Duta Besar dan DCM).

Dalam praktik yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, penambahan posisi baru di KBRI Beijing (khususnya HS non-diplomatik dan Pegawai Setempat) tidak/belum dibatasi oleh Kemlu RRT, sesuai azas resiprositas.

- Prosedur pengajuan posisi baru dijalankan melalui pengiriman Nota Diplomatik Rekomendasi Visa oleh Direktorat Konsuler Kemlu RI kepada Kedubes RRT, dengan mencantumkan informasi tentang posisi/jabatan baru dan ruang lingkup tugas yang akan diemban oleh pejabat/staf baru.

Berdasarkan pengamatan KBRI Beijing, hampir seluruh negara menempatkan personel diplomatik dalam jumlah yang signifikan di Beijing untuk mengakomodasi luasnya spektrum isu tematik yang memerlukan keahlian khusus, serta mempertimbangkan karakter geografis Tiongkok sebagai negara dengan wilayah daratan sekitar 9,6 juta km², kompleksitas pemerintahan pusat dan daerah, serta dinamika kebijakan yang cepat dan berlapis.

Sebagai perbandingan, berikut disajikan data jumlah staf diplomatik, pemegang Paspor Diplomatik dan ID Diplomatik Kemlu RRT, di KBRI Beijing serta Kedutaan Besar negara-negara ASEAN di Beijing, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan negara-negara BRICS. Data ini disusun berdasarkan *Diplomatic List & Directory of International Organizations* yang diterbitkan oleh Kemlu RRT, dengan pembaruan per Januari 2025:

ASEAN

No.	Negara	Jumlah Staf Diplomatik
1.	Filipina	35
2.	Vietnam	34
3.	Singapura	28



Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

4.	Thailand	28
5.	Malaysia	23
6.	Indonesia	22
7.	Myanmar	19
8.	Laos	13
9.	Kamboja	11
10.	Brunei Darussalam	6

Tabel: Perbandingan Jumlah Staf Diplomatik dengan negara-negara ASEAN

BRICS

No.	Negara	Jumlah Staf Diplomatik
1.	Rusia	127
2.	Brazil	33
3.	India	30
4.	Iran	27
5.	Indonesia	22
6.	Ethiopia	21
7.	Mesir	20
8.	Afrika Selatan	17

Tabel: Perbandingan Jumlah Staf Diplomatik dengan negara-negara BRICS

AS, Jepang, Korsel, dan Australia

No.	Negara	Jumlah Staf Diplomatik
1.	Amerika Serikat	338
2.	Jepang	106
3.	Korea Selatan	80
4.	Australia	56

Tabel: Jumlah Staf Diplomatik AS, Jepang, Korsel, dan Australia

Adapun saat ini KBRI Beijing memiliki bobot indeks total sebesar 4,24, menempati peringkat kedua tertinggi di antara perwakilan RI di luar negeri. Indeks tersebut mencerminkan tingginya kepentingan nasional Indonesia di wilayah akreditasi, dengan rincian indeks kepentingan politik sebesar 4,07, kepentingan ekonomi sebesar 4,73, kepentingan sosial budaya sebesar 4,22, serta kepentingan protokol dan konsuler sebesar 3,79.

Dengan perkembangan bobot misi Perwakilan, intensitas dan derajat hubungan antara Indonesia dengan RRT, KBRI Beijing berpandangan perlu segera dilakukan evaluasi indeksasi kembali, guna penyesuaian komposisi dan formasi staf KBRI Beijing.

Untuk mendorong efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dalam pencapaian kinerja, KBRI Beijing telah menyempurnakan penjabaran kinerja yang menggambarkan kerangka logis pencapaian target hingga ke level individu. Penjabaran ini dituangkan dalam pembagian peran hasil bagi setiap pegawai, yang menjadi acuan dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam menghadapi ketimpangan antara keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia dan meningkatnya tuntutan beban kerja, KBRI Beijing tetap mencoba menempuh pendekatan optimalisasi internal yang menekankan efisiensi, ketepatan penugasan, serta penguatan



kapasitas individu dan organisasi. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa kinerja perwakilan tetap terjaga tanpa bergantung semata pada penambahan jumlah personel.

Langkah-langkah strategis telah diambil untuk mendukung tujuan organisasi diantaranya sebagai berikut:

1. KBRI Beijing mencoba menerapkan prinsip penempatan pegawai secara tepat (*right person in the right place*). Penugasan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi inti, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta kebutuhan riil fungsi. Pendekatan ini bertujuan memaksimalkan kontribusi setiap pegawai terhadap pencapaian sasaran strategis, sekaligus meminimalkan *learning curve* dalam pelaksanaan tugas. Dengan penempatan yang lebih presisi, beban kerja yang tinggi dapat dikelola secara lebih efektif meskipun dengan jumlah personel yang terbatas.
2. KBRI Beijing melakukan penyederhanaan alur kinerja dan penajaman pembagian peran. Struktur kerja dan alur proses ditinjau secara berkala untuk memastikan kejelasan tanggung jawab setiap jabatan serta menghindari tumpang tindih fungsi. Penyederhanaan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, memperpendek rantai koordinasi, dan meningkatkan kelincahan organisasi dalam merespons dinamika diplomasi yang sering kali bersifat mendesak dan tidak terencana.
3. Pengembangan kompetensi menjadi pilar utama dalam optimalisasi SDM. KBRI Beijing melakukan analisis kesenjangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi maupun dialog kinerja, guna mengidentifikasi kebutuhan pengembangan yang bersifat spesifik dan kontekstual. Berdasarkan analisis tersebut, berbagai bentuk pengembangan kompetensi diselenggarakan, antara lain melalui sharing session internal, pelatihan daring tematik, dan kegiatan penguatan soft skills seperti outbound atau diskusi terarah lintas fungsi. Kegiatan ini diikuti oleh sebagian besar pegawai sesuai relevansi tugasnya, dengan hasil berupa peningkatan pemahaman substantif, kemampuan koordinasi, serta kesiapan menghadapi kompleksitas tugas lintas sektor.
4. Pegawai KBRI Beijing juga diikutsertakan dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Partisipasi ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi teknis, manajerial, dan kebijakan sesuai kebutuhan fungsi masing-masing. Hasil pelatihan tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan menjadi bagian dari peningkatan kinerja individu.
5. KBRI Beijing berencana mendorong penyusunan dan implementasi Individual Development Plan (IDP) bagi pegawai. IDP digunakan sebagai instrumen perencanaan pengembangan yang terukur dan berkelanjutan, sekaligus menjadi acuan dalam evaluasi kemajuan kompetensi individu. Implementasi IDP ini dikaitkan secara langsung dengan cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) pengembangan kompetensi ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja.

Secara keseluruhan, strategi optimalisasi SDM yang ditempuh KBRI Beijing menunjukkan upaya sistematis untuk menjawab keterbatasan personel melalui peningkatan kualitas, ketepatan penugasan, dan efisiensi organisasi. Pendekatan ini sementara masih



memungkinkan KBRI Beijing bertahan untuk menjaga kinerja di tengah meningkatnya intensitas hubungan Indonesia–Tiongkok.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Kinerja Kemenlu

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KBRI Beijing secara konsisten memanfaatkan teknologi informasi sebagai *enabler* utama untuk meningkatkan kualitas layanan, efektivitas kerja, serta akuntabilitas organisasi. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memungkinkan proses diplomasi, pelayanan publik, dan tata kelola internal dijalankan secara lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan. Dalam konteks perwakilan di negara dengan kompleksitas lingkungan digital seperti Tiongkok, adopsi teknologi menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan kinerja dan kualitas layanan.

Implementasi SPBE di KBRI Beijing berkontribusi langsung pada peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan publik, khususnya melalui pemanfaatan berbagai aplikasi inti Kementerian Luar Negeri dan lintas kementerian.

- Portal Peduli WNI memperkuat pendataan, pelaporan, serta respons perlindungan WNI secara lebih cepat dan terstruktur.
- Aplikasi AKSI mendukung pengelolaan kinerja organisasi berbasis data yang akurat dan real-time,
- E-Kinerja BKN dan SIMSDM meningkatkan efektivitas manajemen SDM melalui perencanaan, evaluasi, dan pemantauan kinerja individu secara sistematis.
- Di sisi pengelolaan keuangan, penggunaan sistem SAKTI memastikan proses penganggaran dan pelaporan keuangan berjalan transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Selain mendukung efisiensi administratif, pemanfaatan teknologi informasi juga berfungsi sebagai, mekanisme pengendalian internal yang lebih kuat. Dengan demikian, teknologi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kualitas tata kelola KBRI Beijing.

Terobosan signifikan dalam pemanfaatan teknologi terjadi mulai akhir tahun 2025, ketika akses internet di lingkungan KBRI Beijing berhasil dioptimalkan melalui kerja sama teknis dengan KBRI Seoul. Melalui pengaturan akses tunneling dan server, KBRI Beijing kini dapat mengakses berbagai aplikasi dan sistem kerja tanpa harus bergantung pada VPN untuk meng-*bypass* *China's great digital firewall* yang selama ini menjadi kendala operasional. Terobosan ini secara nyata meningkatkan kelancaran komunikasi, kecepatan kerja, serta akses terhadap sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya terbatas.

Di samping itu, penguatan infrastruktur cloud internal KBRI yang lebih andal dan aman memungkinkan pola kerja kolaboratif (*coworking*) lintas fungsi dan lintas lokasi, sekaligus meningkatkan keamanan data. Integrasi dengan sistem Edispo yang kini dapat diakses melalui *gadget* pribadi masing-masing pegawai juga mendorong fleksibilitas kerja dan mendukung penerapan konsep *work from anywhere*, tanpa mengurangi aspek keamanan dan akuntabilitas. Hal ini menjadi solusi adaptif dalam menjawab tingginya beban kerja,

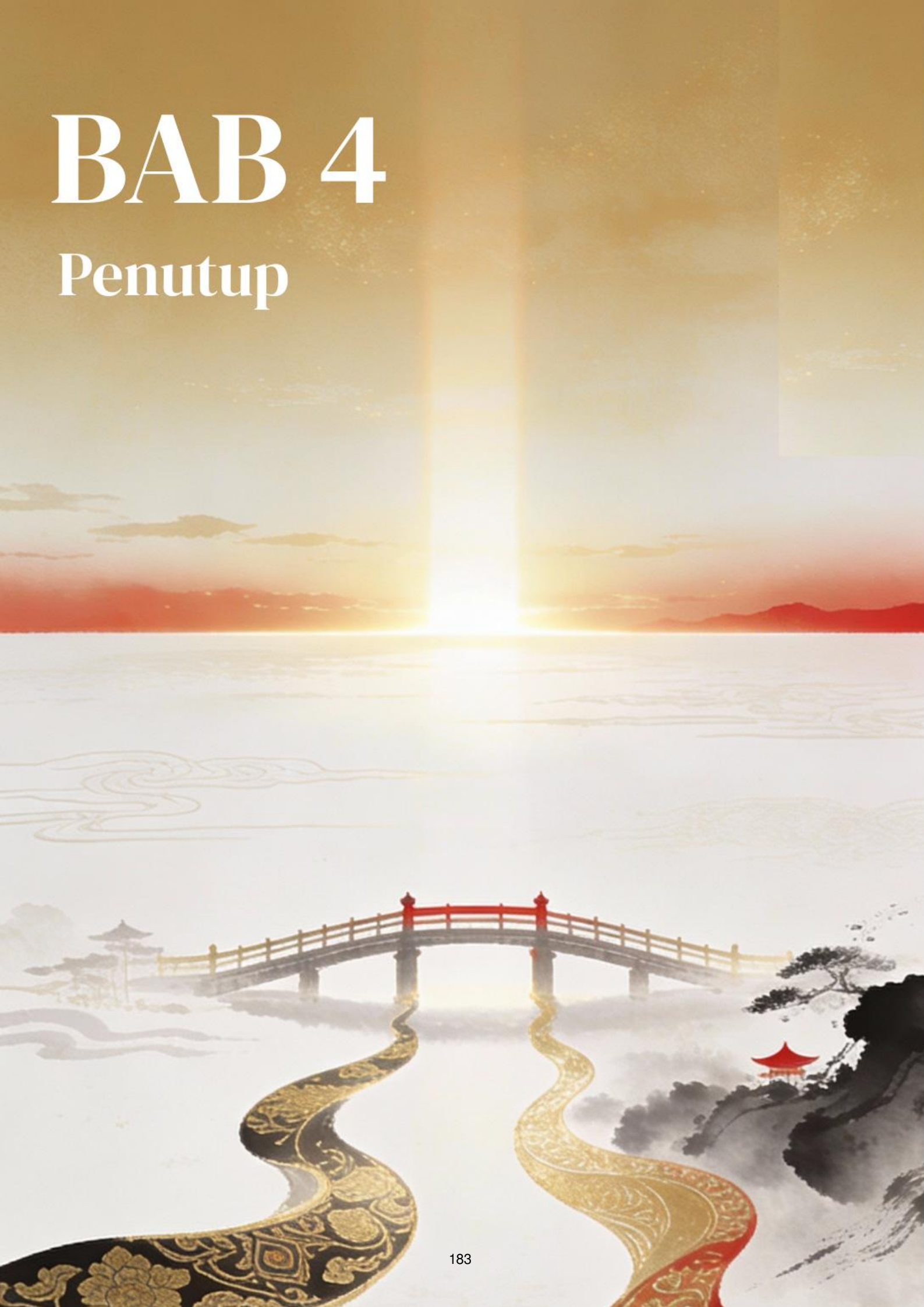


Laporan Kinerja (LKj) KBRI Beijing Tahun 2025

keterbatasan SDM, serta tuntutan respons cepat dalam dinamika hubungan Indonesia–Tiongkok.

BAB 4

Penutup





BAB 4 PENUTUP

4.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja

Secara umum, KBRI Beijing berhasil mencapai dan melampaui target kinerja organisasi pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan mandat diplomasi Indonesia di Tiongkok yang semakin terarah, adaptif terhadap dinamika strategis, serta berorientasi pada hasil nyata bagi kepentingan nasional dan masyarakat Indonesia.

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Beijing tahun 2025 tercatat sebesar 105,18, yang merupakan akumulasi dari capaian seluruh perspektif kinerja. Secara rinci, capaian tersebut terdiri atas Stakeholders Perspective sebesar 107,26%, Customer Perspective sebesar 111,75%, Internal Business Process Perspective sebesar 105,08%, serta Learning and Growth Perspective sebesar 100,25%. Komposisi capaian ini menunjukkan bahwa kinerja KBRI Beijing tidak hanya kuat pada aspek hasil dan pemangku kepentingan eksternal, tetapi juga ditopang oleh proses internal yang relatif efektif serta kapasitas SDM dan organisasi yang terjaga.

Tingginya capaian pada perspektif Stakeholders dan Customer mencerminkan meningkatnya kepercayaan, relevansi, dan manfaat nyata dari kehadiran KBRI Beijing bagi Pemerintah Indonesia, mitra strategis di Tiongkok, dunia usaha, diaspora, mahasiswa, serta WNI secara umum. Di sisi lain, capaian pada perspektif Internal Business Process dan Learning and Growth menunjukkan bahwa peningkatan output kinerja tetap diimbangi dengan penguatan tata kelola, koordinasi lintas fungsi, serta pembelajaran organisasi.

Dengan memperhatikan keseluruhan capaian tersebut dan mengacu pada ketentuan Kepmenlu No. 07/B/RO/I/2023/01 Tahun 2023, kinerja KBRI Beijing tahun 2025 memperoleh predikat Istimewa. Predikat ini merefleksikan konsistensi KBRI Beijing dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian target, kualitas pelaksanaan tugas, serta akuntabilitas kinerja sebagai satuan kerja pemerintah.

4.2 Kendala–Kendala Utama yang Dihadapi

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, selama tahun 2025 KBRI Beijing masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas, antara lain:

1. Kompleksitas lingkungan strategis Tiongkok, di mana pengambilan keputusan mitra tidak semata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga aspek politik, keamanan, dan kebijakan nasional, sehingga memerlukan pendekatan diplomasi yang lebih presisi dan berlapis.
2. Asimetri informasi dan peran perantara (broker/makelar) dalam beberapa inisiatif ekonomi dan investasi, yang menuntut KBRI Beijing untuk bekerja lebih intensif dalam mengidentifikasi mitra yang kredibel dan pengambil keputusan sesungguhnya (*true decision makers*).



3. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi SDM, anggaran, maupun infrastruktur pendukung, di tengah meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan serta beban kerja yang semakin kompleks dan multidimensi.
4. Dinamika geo-politik, regulasi dan kebijakan domestik Tiongkok dan Mongolia yang bergerak cepat dan sering bersifat eksperimental (*testing ground*), sehingga membutuhkan kemampuan adaptasi, pembaruan informasi, dan koordinasi lintas fungsi yang berkelanjutan.

4.3 Langkah di Masa Mendatang untuk Peningkatan Kinerja

Ke depan, KBRI Beijing akan memfokuskan upaya peningkatan kinerja pada penguatan kualitas, dampak, dan keberlanjutan diplomasi Indonesia di Tiongkok. Fokus tersebut diarahkan pada kerja sama politik, ekonomi, kebudayaan, pariwisata, pendidikan, protokol, kekonsuleran, serta kerja sama pemanfaatan *emerging technologies* yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Langkah strategis yang akan ditempuh antara lain:

- penyelenggaraan *business forum* yang lebih targeted dan tematik;
- penguatan promosi pariwisata dan industri kreatif;
- optimalisasi kanal diplomasi digital;
- peningkatan sosialisasi dan layanan kekonsuleran yang lebih responsive;
- mendorong high-level meetings;
- penguatan *people-to-people contacts*;
- penyelenggaraan forum terkait emerging technologies, penyusunan dan implementasi Plan of Action strategic partnership yang lebih terukur dan berorientasi hasil;
- berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya untuk menunjang kinerja KBRI Beijing.

Melalui langkah-langkah tersebut, KBRI Beijing diharapkan tidak hanya mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, tetapi juga meningkatkan kualitas kontribusi diplomasi Indonesia di Tiongkok dan Mongolia secara berkelanjutan, sejalan dengan Renstra Kementerian Luar Negeri RI tahun 2025-2029, kepentingan nasional, dan visi pembangunan jangka panjang Indonesia.



LAMPIRAN



**DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN RI DI BEIJING**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djauhari Oratmangun
Jabatan : Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia
untuk RRT dan Mongolia

selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : Sugiono
Jabatan : Menteri Luar Negeri RI

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beijing, Januari 2026

Pihak Kedua,

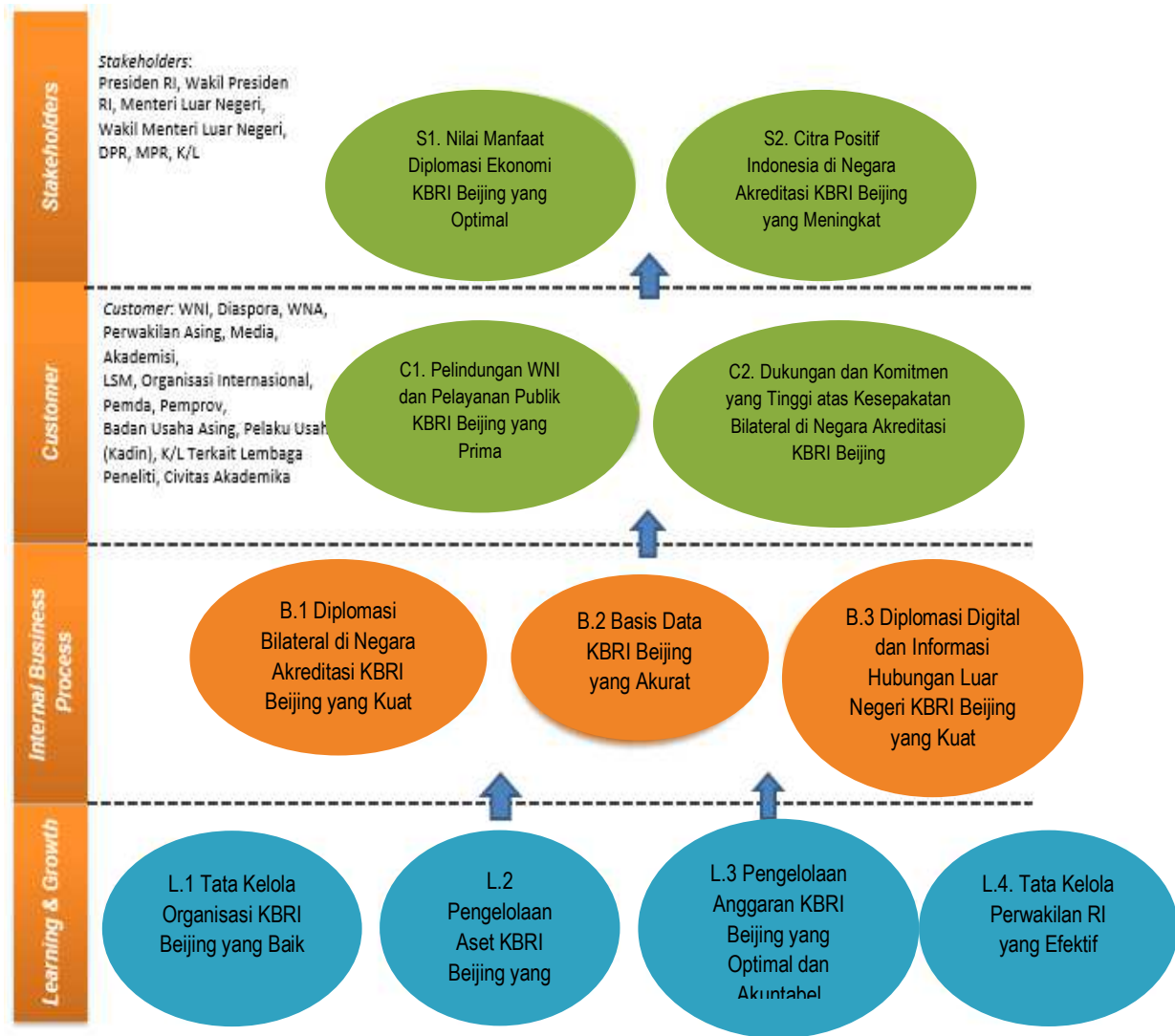
Pihak Pertama,

Sugiono

Djauhari Oratmangun

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA BEIJING**

PETA STRATEGI PERWAKILAN RI BEIJING TAHUN 2026



Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Beijing yang Optimal	IK S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	100% <i>(Cascading dari Pusat. Wajib Diadopsi Perwakilan RI dengan penyesuaian target)</i>
		IK S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Beijing <i>(Komitmen Inbound)</i>	100% <i>(Cascading dari Pusat. Wajib Diadopsi Perwakilan RI dengan penyesuaian target)</i>
		IK S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Beijing	100% <i>(Cascading dari Pusat. Wajib Diadopsi Perwakilan RI dengan penyesuaian target)</i>
S.2	Citra positif Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing yang meningkat	IK S.2.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing	4,20 (skala 5) <i>(Cascading dari Pusat. Wajib Diadopsi Perwakilan RI. Jika realisasi perwakilan pada tahun 2025 lebih tinggi dari 4,12, maka target 2026 disesuaikan dengan realisasi 2025)</i>
Customer Perspective				

Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C.1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Beijing yang prima	IK C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang diselesaikan	91% <i>(Cascading dari Pusat Wajib Diadopsi Perwakilan RI. Jika realisasi perwakilan pada tahun 2025 lebih tinggi daripada 87,5%, maka target 2026 disesuaikan dengan realisasi 2025.)</i>
		IK C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Beijing	4 (Skala 4) <i>(Cascading dari Pusat Wajib Diadopsi Perwakilan RI)</i>
		IK C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Beijing	4 (Skala 4) <i>(Cascading dari Pusat Wajib Diadopsi Perwakilan RI)</i>
C.2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI Beijing	IK C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi KBRI Beijing <i>*)Diadopsi jika terdapat tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing dengan penyesuaian target sesuai kondisi/karakteristik Perwakilan RI</i>	95,5%
Internal Business Process Perspective				
B.1	Diplomasi bilateral di negara akreditasi KBRI Beijing yang kuat	IK B.1.1	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	20
		IK B.1.2	Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	5
		IK B.1.5	Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi	14

Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B.2	Basis data KBRI Beijing yang akurat	IK B.2.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100% <i>(Wajib Diadopsi Perwakilan RI)</i>
		IK B.2.2	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Beijing	98.2 <i>(Cascading dari Pusat Wajib Diadopsi Perwakilan RI. Target menggunakan target peningkatan bertahap sesuai dengan nilai realisasi yang di dapatkan pada tahun 2024)</i>
B.3	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Beijing yang Kuat	IK B.3.1	Persentase Impresi <i>Engagement</i> Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing <i>*)Terdapat perbedaan perlakuan meliputi jumlah komponen dan bobot komponen untuk perwakilan PRPB dan non PRPB</i>	71% <i>(IK baru diadopsi pada tahun 2025. Target menyesuaikan dengan asesmen Perwakilan RI)</i>
Learning and Growth Perspective				
L.1	Tata kelola organisasi KBRI Beijing yang baik	IK L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing	81,6 <i>(Cascading dari Pusat wajib diadopsi Perwakilan RI. Rujukan penentuan baseline target mengacu pada Dokumen Konsep Lampiran IV SK Keppri Manual IK.)</i>
L.2	Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal	IK L.2.1	Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing	3,7 (Skala 4) <i>(Cascading dari Pusat wajib diadopsi Perwakilan RI. Rujukan penentuan baseline target mengacu pada Dokumen Konsep Lampiran IV SK Keppri Manual IK.)</i>

Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
L.3	Pengelolaan anggaran KBRI Beijing yang optimal dan akuntabel	IK L.3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Beijing	95,5 <i>(Cascading dari Pusat wajib diadopsi Perwakilan RI. Rujukan penentuan baseline target mengacu pada Dokumen Konsep Lampiran IV SK Keppri Manual IK.)</i>
L.4	Tata Kelola TIK Perwakilan RI yang Efektif	IK L.4.1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian	1 (skala 5) <i>(Cascading dari Pusat wajib diadopsi Perwakilan RI)</i>

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI	Rp9.786.725.000,-
2	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Perwakilan RI	Rp1.007.116.000,-
3	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp81.279.563.000,-
Pagu Anggaran KBRI ... 2026		Rp92.073.404.000,-

Beijing, Januari 2026

Menteri Luar Negeri RI,

Kepala Perwakilan RI,

Sugiono

Djauhari Oratmangun
Duta Besar LBBP



**DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA
BEIJING**

KEPUTUSAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:..... TAHUN 2026

TENTANG

PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA

PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BEIJING TAHUN 2026

DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tujuan dan Sasaran perlu diterjemahkan ke dalam peta strategi yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja (IK).
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut atas telah ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing Tahun 2026, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada Peta Strategi dan Indikator Kinerja Perwakilan RI di Beijing tahun 2025.
 - c. bahwa sebagai pedoman dan informasi menyeluruh terkait IK Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Duta Besar Republik Indonesia tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing tahun 2026 dengan penjelasan komprehensif yang tertuang dalam Manual IK Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026 - 2029;
 - 3. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

- Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Keputusan Menteri Luar Negeri No. 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
 7. Rencana Strategis 2025-2029 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BEIJING TAHUN 2026

KESATU: Memberlakukan Peta Strategi/Sasaran Strategis dan IK Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Strategi dan IK tersebut digunakan sebagai tolak ukur kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing dan acuan dalam dokumen perencanaan kinerja dan anggaran serta evaluasi kinerja dan anggaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing.

KETIGA : Memberlakukan Peta Strategi dan Indikator Kinerja (IK) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai dokumen acuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Fungsi di lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing untuk:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja di lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.

- b. Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data yang memiliki kontribusi atas IK Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing dan Kementerian Luar Negeri.

KELIMA : Manajer Kinerja Perwakilan bersama-sama dengan seluruh unsur Perwakilan RI memantau dan mengevaluasi realisasi serta capaian IK Perwakilan RI bersama Kepala Perwakilan Republik Indonesia sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Beijing,
pada tanggal Januari 2026

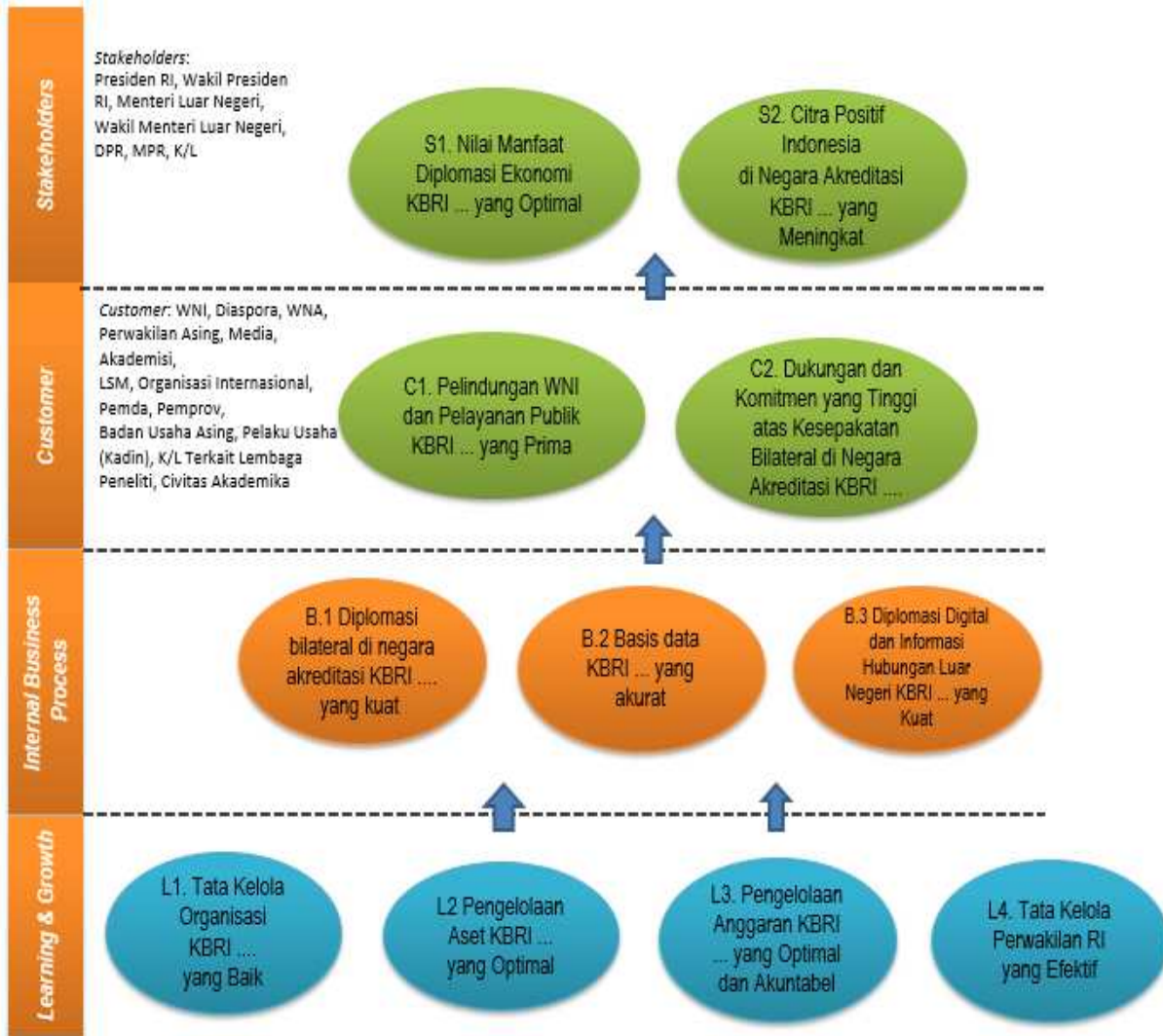
DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA,

DJAUHARI ORATMANGUN
DUTA BESAR LUAR BIASA BERKUASA
PENUH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DUTA BESAR RI
NOMOR: TAHUN 2026
TENTANG PETA STRATEGI DAN
INDIKATOR KINERJA PADA KEDUTAAN
BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BEIJING
TAHUN 2026

LAMPIRAN I:

**PETA STRATEGI
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BEIJING**



LAMPIRAN II:

**MATRIKS PROYEKSI TARGET INDIKATOR KINERJA KBRI BEIJING
TAHUN 2026-2030**

Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2026	Proyeksi Target			
					Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Stakeholder Perspective								
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Beijing yang Optimal	IK S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing	100%	100%	100%	100%	100%
		IK S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing	100%	100%	100%	100%	100%
		IK S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing	100%	100%	100%	100%	100%
S.2	Citra positif Indonesia di negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing yang meningkat	IK S.2.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing	4,2 (skala 5)	4,3 (skala 5)	4,3 (skala 5)	4,4 (skala 5)	4,4 (skala 5)
Customer Perspective								
C.1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Beijing yang prima	IK C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing yang diselesaikan	91%	91%	92%	92%	92.5%
		IK C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Beijing	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
		IK C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI/KJRI KBRI Beijing	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
C.2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi KBRI Beijing	IK C.2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing	95.5%	95.5%	96%	96%	96.5%
Internal Business Process Perspective								
B.1	Diplomasi bilateral di negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing yang kuat	IK B.1.1	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing	20	21	22	23	24
		IK B.1.2	Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	7	7	8	9	9
		IK B.1.5	Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah	12	14	14	15	16

Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2026	Proyeksi Target			
					Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Indonesia dengan negara akreditasi					
B.2	Basis data KBRI Beijing yang akurat	IK B.2.1	Persentase WNI di negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100%	100%	100%	100%	100%
		IK B.2.2	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Beijing	98.2	98.5	98.5	98.8	98.8
B.3	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Beijing yang Kuat	IK B.3.1	Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing	71%	73%	75%	78%	78%
Learning and Growth Perspective								
L.1	Tata kelola organisasi KBRI Beijing yang baik	IK L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing	80	81	81,5	82	82,5
L.2	Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal	IK L.2.1	Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing	3,7 (skala 4)	3,7 (skala 4)	3,8 (skala 4)	3,8 (skala 4)	3,8 (skala 4)
L.3	Pengelolaan anggaran KBRI Beijing yang optimal dan akuntabel	IK L.3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Anggaran KBRI Beijing	95	95.5	95.5	96	96
L.4	Tata Kelola TIK Perwakilan RI yang Efektif	IK L.4.1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian	1 (skala 5)	1.20 (skala 5)	1.40 (skala 5)	1.60 (skala 5)	1.80 (skala 5)

Format Lembar Penetapan Manual IK

**LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA (IK)**

Bersama ini ditetapkan manual IK Duta Besar RI Beijing untuk periode Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang meliputi:

- a. Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing
- b. Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing
- c. Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing
- d. Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing
- e. Persentase kasus WNI di negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing yang diselesaikan
- f. Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Beijing
- g. Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KBRI Beijing
- h. Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing
- i. Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Beijing
- j. Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan
- k. Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing
- l. Persentase WNI di negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing yang terverifikasi di Portal Peduli WNI
- m. Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Beijing
- n. Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing
- o. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing
- p. Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing
- q. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Anggaran KBRI Beijing
- r. Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian

Ditetapkan di Beijing, Januari 2026

Manajer Kinerja Perwakilan,

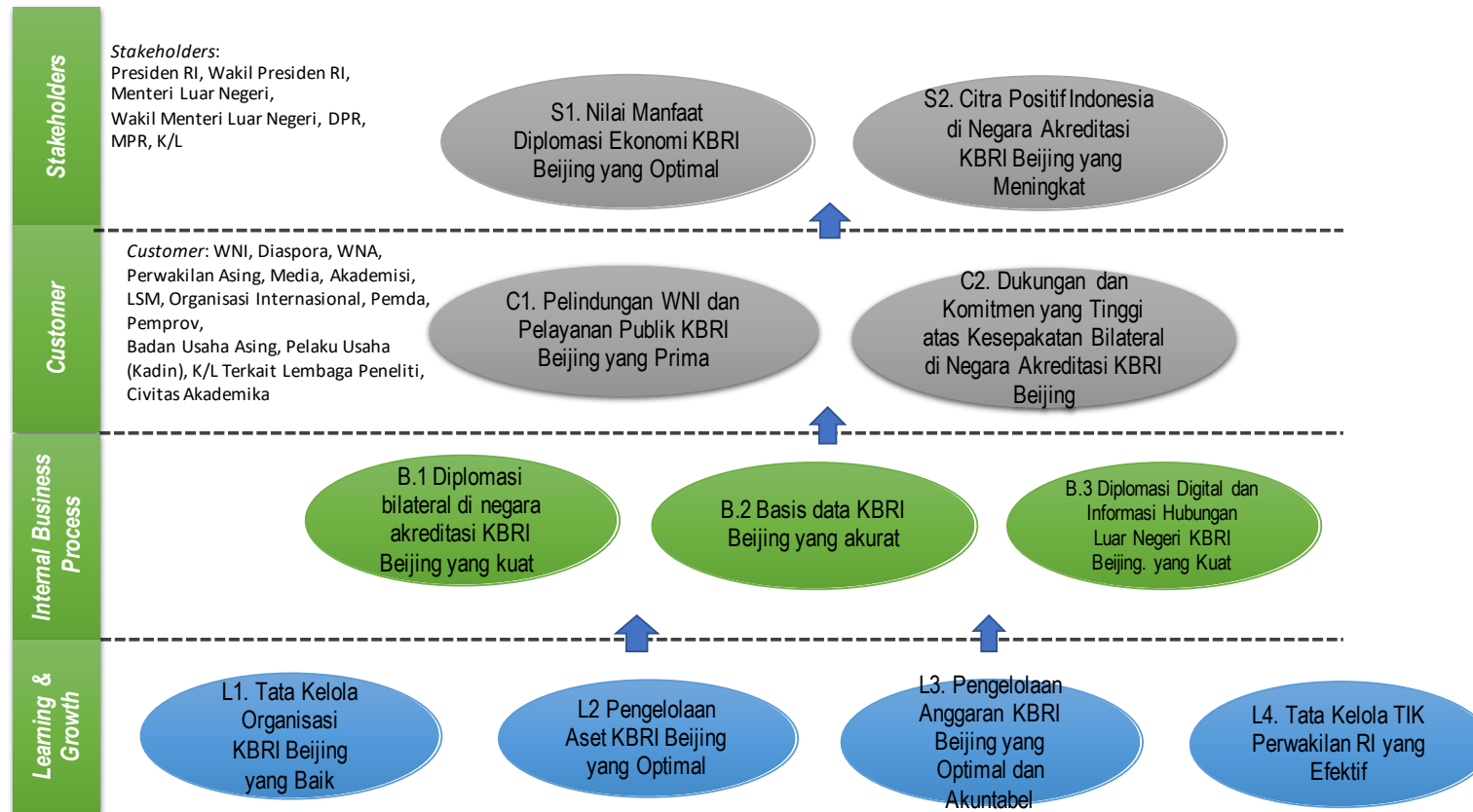
Duta Besar RI,

Delima Wahyu Maulidya

Djauhari Oratmangun



RANCANGAN PETA STRATEGI PERWAKILAN RI BEIJING TAHUN 2026



**MANUAL INDIKATOR KINERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

51

Perspektif:	Stakeholder
Sasaran :	Nilai manfaat diplomasi ekonomi KBRI Beijing yang optimal
Deskripsi Sasaran :	Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta amanat kinerja dari Presiden RI, Kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Hal ini dibuktikan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara. Diplomasi Ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral, regional dan multilateral untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam sektor perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, finansial, dan kerja sama pembangunan internasional. Optimal berarti paling baik dan tertinggi.
Indikator Kinerja:	IK 1 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing
Deskripsi Indikator Kinerja:	<p>Definisi: Efektivitas diplomasi ekonomi berarti IK ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2025 - 2029, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Indikator Kinerja ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan.</p> <p>Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.</p> <p>Ruang lingkup: IK1 memiliki 2 komponen, yakni:</p> <p>Komponen 1: Jumlah komitmen perdagangan, dengan bobot 60% Komponen ini mengukur jumlah komitmen perdagangan yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang dan forum kerja sama. Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis dan ditandatangani antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya dapat memuat nilai perdagangan yang disepakati. Jumlah komitmen perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi. Target jumlah komitmen perdagangan KBRI Beijing pada tahun 2026 adalah 18 komitmen.</p> <p>Komponen 2: Jumlah potensi komitmen perdagangan, dengan bobot 40% Komponen ini mengukur rangkaian upaya peninjauan yang mengarah pada terbentuknya suatu potensi komitmen perdagangan yang dibuktikan dengan dokumen laporan, brofaks, surat, ataupun dokumen lainnya. Sebagai contoh jika Perwakilan melakukan peninjauan sebanyak 3 kali guna mengupayakan adanya potensi satu komitmen perdagangan antara perusahaan A dengan perusahaan B, hal ini diklaim sebagai satu jumlah potensi komitmen perdagangan. Jika memungkinkan, rincian potensi komitmen perdagangan dapat menyebutkan monetary value (nilai transaksi bisnis dalam USD ataupun mata uang lainnya). Target jumlah potensi komitmen perdagangan KBRI Beijing pada tahun 2026 adalah 12 potensi komitmen perdagangan.</p> <p>Jika upaya peninjauan potensi komitmen perdagangan berhasil menjadi sebuah komitmen perdagangan pada tahun berjalan, maka Perwakilan harus menyesuaikan target jumlah komitmen perdagangan dan target jumlah potensi komitmen perdagangan.</p> <p>Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis.</p> <p>Jika di negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI hanya terdapat komponen 1, maka diterapkan normalisasi untuk menghitung capaian tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan batas toleransi sebesar 90%.</p> <p>Jika di negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI hanya terdapat komponen 2, maka diterapkan normalisasi untuk menghitung capaian tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan batas toleransi sebesar 80%.</p> <p>Batasan waktu: Tingkat efektivitas yang dihitung adalah tingkat efektivitas yang diperoleh dari penghitungan masing-masing komponen sesuai dengan periode masing-masing komponen pada tahun</p> <p>Formulas:</p> <p align="center">IK1 = (60% * Capaian Komponen 1) + (40% * Capaian Komponen 2)</p> <p align="center">Capaian Komponen 1 = (Jumlah komitmen perdagangan yang diperoleh / Jumlah target komitmen perdagangan) x 100% Capaian Komponen 2 = (Jumlah potensi komitmen perdagangan yang diperoleh / Jumlah potensi komitmen perdagangan yang direncanakan) x 100%</p> <p>Tujuan: Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi melalui berbagai macam kegiatan promosi dagang, dll.</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IK:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IK:	<input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK:	Fungsi Ekonomi, Abase Perdagangan
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi, Abase Perdagangan
Sumber Data :	Jumlah komitmen: LOI, MoU, kontrak, brofaks, laporan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya komitmen transaksi perdagangan dari kedua belah pihak Jumlah potensi komitmen perdagangan: laporan brofaks perwakilan terkait rangkaian upaya peninjauan yang dilakukan oleh Perwakilan yang mengarah pada terbentuknya suatu potensi komitmen perdagangan
Jenis Cascading IK:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan :	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN							
Semester I	N/A	N/A	50%	111,34%	100%	100%	100%
Semester II	N/A	N/A	100%	111,34%	80%	80%	80%

^{*) Catatan:}

1. Terdapat perubahan formula perhitungan IK pada tahun 2026

Indikator Kinerja:	IK 2 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Beijing
Deskripsi Indikator Kinerja:	<p>Definisi: Efektivitas diplomasi ekonomi berarti bahwa IK ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang investasi agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Sub IK ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk investasi.</p> <p>Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dari negara akreditasi untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>Ruang lingkup: IK2 memiliki 2 komponen, yakni:</p> <p>Komponen 1: Jumlah komitmen investasi inbound, dengan bobot 60% Komponen ini mengukur jumlah komitmen investasi inbound yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi dan forum kerja sama. Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis dan ditandatangani antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya dapat memuat nilai investasi yang disepakati. Jumlah komitmen investasi dihitung untuk suatu negara akreditasi. Target jumlah komitmen investasi KBRI Beijing pada tahun 2026 adalah 18 komitmen.</p> <p>Komponen 2: Jumlah potensi komitmen investasi, dengan bobot 40% Komponen ini mengukur rangkaian upaya peninjauan yang dilakukan oleh Perwakilan yang mengarah pada terbentuknya suatu potensi komitmen investasi yang dibuktikan dengan dokumen laporan, brofaks, surat, ataupun dokumen lainnya. Sebagai contoh jika Perwakilan melakukan peninjauan sebanyak 3 kali guna mengupayakan adanya potensi satu komitmen investasi antara entitas A dengan entitas B, hal ini diklaim sebagai satu jumlah potensi komitmen investasi. Jika memungkinkan, rincian potensi komitmen investasi dapat menyebutkan monetary value (nilai transaksi bisnis dalam USD ataupun mata uang lainnya). Target jumlah potensi komitmen investasi KBRI Beijing pada tahun 2026 adalah 10 potensi komitmen investasi.</p> <p>Jika upaya peninjauan potensi komitmen investasi berhasil menjadi sebuah komitmen investasi pada tahun berjalan, maka Perwakilan harus menyesuaikan target jumlah komitmen investasi dan target jumlah potensi komitmen investasi.</p> <p>Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis.</p> <p>Jika di negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI hanya terdapat komponen 1, maka diterapkan normalisasi untuk menghitung capaian tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan batas toleransi sebesar 90%.</p> <p>Jika di negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI hanya terdapat komponen 2, maka diterapkan normalisasi untuk menghitung capaian tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan batas toleransi sebesar 80%.</p> <p>Formulas:</p>

IK 2 = (60% * Capaian Komponen 1) + (40% * Capaian Komponen 2)	
Capaian Komponen 1 = (Komitmen investasi inbound yang diperoleh / Target komitmen investasi inbound) x 100%	
Capaian Komponen 2 = (Jumlah potensi komitmen investasi inbound yang diperoleh / Jumlah potensi komitmen investasi inbound yang direncanakan) x 100%	
Tujuan:	
Seesai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Perwakilan RI bertekad memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia (in-bound).	
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IK:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IK:	<input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK:	Fungsi Ekonomi, IIPC
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi, IIPC
Sumber Data :	Jumlah komitmen: LoI, MoU, kontrak, atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya komitmen transaksi investasi dari kedua belah pihak Jumlah potensi komitmen investasi: laporan brifade perwakilan terkait rangkaian upaya penajakan yang dilakukan oleh Perwakilan yang mengarah pada terbentuknya suatu potensi komitmen investasi
Jenis Cascading IK:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan :	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	10	12	100%	100%	100%
Semester I	N/A	N/A	4	5	40%	40%	40%
Semester II	N/A	N/A	6	7	60%	60%	60%

*) Catatan:

1. Terdapat perubahan formulasi perhitungan IK pada tahun 2026

Indikator Kinerja:	IK 3 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Beijing
Deskripsi Indikator Kinerja:	<p>Definis:</p> <p>Efektivitas diplomasi ekonomi berarti bahwa IK ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2025-2029, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang pariwisata agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.</p> <p>Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh unsur pemerintah maupun non-pemerintah.</p> <p>Ruang lingkup: IK ini mengukur wisatawan potensial dari negara akreditasi yang memiliki ekspektasi tinggi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia.</p> <p>Potensi kunjungan wisatawan mancanegara merupakan pengukuran seberapa minat wisatawan mancanegara potensial yang merupakan WNA yang memiliki ekspektasi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia setelah melihat/menghadiri/bertpartisipasi pada promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI atau event promosi yang diselenggarakan pihak lain di mana Perwakilan RI turut sebagai peserta event.</p> <p>Level ekspektasi diukur melalui survei citra Indonesia di dunia internasional (https://citraindonesia.kemlu.go.id/) khususnya pada dimensi TOURISM & SOCIO-CULTURE.</p> <p>Klaim variabel 1 adalah jumlah responden yang menjawab "Agree" ditambah "Strongly Agree" pada pertanyaan "I am more interested to visit Indonesia after attending tourism/cultural events or learning about Indonesia through promotion materials".</p> <p>Klaim variabel 2 adalah jumlah responden yang mengisil "Yes" pada pertanyaan "Have you ever attended tourism/cultural events or learnt about Indonesia through promotion materials", namun bukan jumlah seluruh responden survei citra.</p> <p>Target dan realisasi Perwakilan RI berkontribusi pada target dan realisasi Pusat.</p> <p>Bagi Perwakilan yang menaungi negara rangkapan, IK menggunakan data agregat dari negara utama dan negara rangkapan.</p> <p>Batasan waktu: Data diambillah berdasarkan penitbitunan pada 1 Januari-15 Desember</p> <p>Formula:</p> <p style="text-align: center;">IK 3 = Variabel 1 / Variabel 2 x 100%</p> <p>Variabel 1 = jumlah responden yang menjawab "Agree" ditambah "Strongly Agree" pada pertanyaan "I am more interested to visit Indonesia after attending tourism/cultural events or learning about Indonesia through promotion materials".</p> <p>Variabel 2 = jumlah responden yang mengisil "Yes" pada pertanyaan "Have you ever attended tourism/cultural events or learnt about Indonesia through promotion materials". Bukan seluruh responden survei citra.</p> <p>Tujuan:</p> <p>Seesai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Perwakilan RI bertekad memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai wisatawan asing ke Indonesia melalui berbagai macam kegiatan promosi budaya, pariwisata, kuliner, dll.</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IK:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IK:	<input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK:	Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud, Abase Pendidikan (<i>disesuaikan dengan kondisi Perwakilan</i>)
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud, Abase Pendidikan (<i>disesuaikan dengan kondisi Perwakilan</i>)
Sumber Data :	Data survei Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional
Jenis Cascading IK:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan :	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	100%	103.49%	100%	100%	100%
Semester I	N/A	N/A	50%	100%	50%	100%	40%
Semester II	N/A	N/A	100%	103.49%	50%	100%	60%

*) Catatan:

2. Terdapat perubahan formulasi perhitungan IK pada tahun 2025

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

Perspektif: Stakeholder

Sasaran : Citra positif Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing yang meningkat

Deskripsi Sasaran : Citra positif Indonesia adalah persepsi yang dipercayai/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional. Pola perilaku tersebut terbentuk berdasarkan power yang dimiliki, baik yang bersifat hard maupun soft. Citra dalam hal ini dapat bersifat positif maupun negatif. Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan.
Negara akreditasi/wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara/wilayah kerja rangkapan yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.
Latar belakang: Citra merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang positif dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap citra meliputi isu-isu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, isu-isu tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Indonesia. Pemberitaan positif dan negatif tentunya akan berpengaruh terhadap mindset publik terhadap Indonesia.

Indikator Kinerja: IK 1 Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Beijing

Deskripsi Indikator Kinerja:

Definisi:
Citra Indonesia yaitu persepsi yang dipercayai/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional. Pola perilaku tersebut terbentuk berdasarkan power yang dimiliki, baik yang bersifat hard maupun soft. Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan.
Ruang Lingkup:
Indeks Citra adalah Indeks yang mengukur kesan atau pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia. Indeks Citra Indonesia diperoleh berdasarkan survei yang mengukur 3 dimensi, yaitu TOURISM & SOCIO-CULTURE, ECONOMY, dan GOVERNANCE AND RULE OF LAW. Sumber data didapatkan berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah pada aplikasi pengelolaan data citra Indonesia di dunia internasional (https://citraindonesia.kemlu.go.id). Kuesioner disebarkan oleh seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri kecuali Peraturan Tetap Republik Indonesia (PTRI) dengan responden Warga Negara Asing di negara akreditasi/wilayah kerja. Negara Akreditasi/wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara akreditasi/wilayah kerja rangkapan yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.
Responden merupakan WNA di negara akreditasi/wilayah kerja yang mengetahui Indonesia. Adapun jumlah minimal responden pada setiap perwakilan ditentukan berdasarkan status perwakilan (minimal Triwulan I: 45 responden, Triwulan II: 45 responden, Triwulan III: 45 responden, Triwulan IV: 45 responden, dan Tahunan: 180 responden, untuk setiap perwakilan, kecuali untuk perwakilan kategori rawan dan berbahaya. Untuk Perwakilan Rawan dan Berbahaya, jumlah minimal responden adalah 10 responden per triwulan. Teknik pengambilan sampel sesuai metodologi survei yang digunakan. Adapun nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional per-Triwulan bersifat kumulatif sesuai dengan jumlah total responden dan jawaban survei dari awal penyelenggaraan survei pada tahun berjalan sampai dengan akhir tiap triwulan.
Adapun wilayah kerja yang menjadi objek perhitungan adalah _____ (*sebutkan nama-nama wilayah/negara bagian/provinsinya)
Indeks Citra Indonesia:

Interval	Kategori Indeks
4,21 - 5,00	Sangat Baik
3,41 - 4,20	Baik
2,61 - 3,40	Cukup
1,81 - 2,60	Kurang
1,00 - 1,80	Tidak Baik

Nilai Persepsi diperoleh dari jawaban responden terhadap 3 dimensi dan dinyatakan dalam skala likert (1-5) dimana 1 adalah strongly disagree dan 5 adalah strongly agree.

Batasan Waktu:
Indeks Citra dihitung berdasarkan hasil pengukuran selama satu tahun anggaran, yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Formula:

Indeks citra Indonesia di negara akreditasi/wilayah akreditasi =
(Total Nilai Persepsi Seluruh Responden di negara/wilayah akreditasi) / (Jumlah Total Responden di negara/wilayah akreditasi)

Tujuan:
Untuk mengukur citra positif Indonesia di dunia internasional

Satuan Pengukuran : -

Tingkat Kendali IK : () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IK : () Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IK : Fungsi Pensosbud

Unit/Pihak Penyedia Data : Semua Fungsi Perwakilan yang terkait

Sumber Data : Data survey citra Indonesia di Dunia Internasional yang dilakukan oleh Perwakilan RI, dengan menggunakan database website melalui tautan https://citraindonesia.kemlu.go.id

Jenis Cascading IK: (X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading

Metode Cascading : () Direct (X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : () Sum () Average (X) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan : () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	3,95	4,11	4,07	4,48	4,20	4,24	4,20
s.d TRIWULAN I
s.d TRIWULAN II
s.d TRIWULAN III
s.d TRIWULAN IV	3,95	4,11	...	4,48	...	4,24	...

Catatan:
Jika realisasi perwakilan pada tahun 2025 lebih tinggi daripada 4,12, maka target 2026 disesuaikan dengan realisasi 2025

Jenis Cascading IK:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan :	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	83%	...	85.00%	90.36%	90%	90.00%	91%
s.d TRIWULAN I	83%	...	25.00%	25.00%	25%	97.63%	25%
s.d TRIWULAN II	83%	...	50.00%	50.00%	50%	100.00%	50%
s.d TRIWULAN III	83%	...	75.00%	75.00%	75%	98.22%	75%
s.d TRIWULAN IV	83%	...	85.00%	90.36%	90%	99.46%	91%

Catatan:

Jika realisasi perwakilan pada tahun 2025 lebih tinggi daripada 87,5%, maka target 2026 disesuaikan dengan realisasi 2025

Indikator Kinerja:	IK 2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Beijing
--------------------	---

Deskripsi Indikator Kinerja: **Definisi:**

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Kekonsuleran adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh hukum nasional dengan memperhatikan hukum negara mitra serta kebiasaan dan hukum internasional yang mencakup, namun tidak terbatas pada layanan kependudukan, notariat, kehakiman, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Pelayanan publik dalam lingkup kekonsuleran mencakup layanan terkait pengurusan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali, perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi dan jasa konsuler warga negara asing.

Ruang lingkup:

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran diperoleh melalui survei (manual dan/atau elektronik) kepada responden yang sedang/tepat menerima pelayanan kekonsuleran. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran merujuk Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei dilakukan dengan responden sebagai berikut :

Orang/Perusahaan, Staf/Pejabat Kementerian/Lembaga, Organisasi Internasional, Pemda setempat dan Perwakilan Negara Asing.

Batasan waktu:

Nilai persepsi dihitung berdasarkan pengukuran selama satu tahun anggaran (1 Januari - 15 Desember), yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Tabel Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,80	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,81 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Jumlah responden survei merujuk pada Lampiran II Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan tabulasi pengambilan sampel Morgan dan Krejcie sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

Formula:

Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran dihitung sebagai berikut:

- Realisasi Triwulan I (Nilai Persepsi TW I) = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret.
- Realisasi Triwulan II (Nilai Persepsi TW II) = rata-rata kuesioner April Januari s.d. Juni.
- Realisasi Triwulan III (Nilai Persepsi TW III) = rata-rata kuesioner Juli Januari s.d. September.
- Realisasi Triwulan IV / Tahunan = rata-rata kuesioner Januari s.d. Desember.

Tujuan:

untuk mengetahui kualitas pelayanan kekonsuleran di Perwakilan KBRI

Satuan Pengukuran : -

Tingkat Kendali IK :	<input type="checkbox"/> High	<input checked="" type="checkbox"/> Moderate	<input type="checkbox"/> Low
----------------------	-------------------------------	--	------------------------------

Tingkat Validitas IK :	<input checked="" type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy	<input type="checkbox"/> Activity
------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------------

Unit/Pihak Penanggung Jawab IK : Fungsi Konsuler Perwakilan RI, Atase Imigrasi, Atase Ketenagakerjaan dan Atase Perhubungan (dapat disesuaikan dengan kondisi Perwakilan)

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Konsuler Perwakilan RI, Atase Imigrasi, Atase Ketenagakerjaan dan Atase Perhubungan (dapat disesuaikan dengan kondisi Perwakilan)

Sumber Data : Hasil survei atau kuesioner kepuasan pelayanan kekonsuleran Perwakilan RI

Jenis Cascading IK:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
---------------------	--	---	--

Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
--------------------	---------------------------------	--	--

Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
-----------------------------	------------------------------	----------------------------------	---

Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
s.d TRIWULAN I	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
s.d TRIWULAN II	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
s.d TRIWULAN III	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
s.d TRIWULAN IV	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)

Indikator Kinerja: **IK 3 Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI KBRI**

Deskripsi Indikator Kinerja: **Definisi:**

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Perlindungan WNI merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Pelayanan terkait perlindungan WNI di luar negeri mencakup pemberian layanan dalam penanganan kasus atau pemberian bantuan perlindungan lainnya, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD.

Ruang lingkup:

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI diperoleh melalui survei (manual dan/atau elektronik) kepada responden yang sedang/telah menerima pelayanan Perlindungan WNI. Pelayanan terkait perlindungan WNI di luar negeri mencakup pemberian layanan dalam penanganan kasus, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI merujuk Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei dilakukan dengan responden yaitu orang/penerima jasa pelayanan Perlindungan WNI.

Batasan waktu:

Nilai persepsi dihitung berdasarkan pengukuran selama satu tahun anggaran (1 Januari - 15 Desember), yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Tablel Nilai Persepsi Pelayanan Perlindungan WNI:

Nilai Persepsi (NIK)	Nilai Interval Indeks	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,59	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Jumlah responden survei merujuk pada Lampiran II Peraturan Menteri 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan tabel sebagai berikut:

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3200	344
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

Formula:

Nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI dihitung sebagai berikut:

- a. Realisasi Triwulan I (Nilai Persepsi TW I) = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret.
- b. Realisasi Triwulan II (Nilai Persepsi TW II) = rata-rata kuesioner April, Januari s.d. Juni.
- c. Realisasi Triwulan III (Nilai Persepsi TW III) = rata-rata kuesioner Juli, Januari s.d. September.
- d. Realisasi Triwulan IV / Tahunan = rata-rata kuesioner Januari s.d. Desember.

Tujuan:

untuk mengetahui kualitas pelayanan Perlindungan WNI di Perwakilan RI

Satuan Pengukuran : -

Tingkat Kendali IK : High Moderate Low

Tingkat Validitas IK : Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IK : Fungsi Konsuler Perwakilan RI, Atase Imigrasi, Atase Ketenagakerjaan, Atase Perhubungan dan Atase Teknis Terkait (dapat disesuaikan dengan kondisi Perwakilan)

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Konsuler Perwakilan RI (dapat disesuaikan dengan kondisi Perwakilan)

Sumber Data : Hasil survei atau kuesioner kepuasan pelayanan perlindungan WNI di Perwakilan RI di luar negeri.

Jenis Cascading IK: Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
s.d TRIWULAN I	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
s.d TRIWULAN II	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
s.d TRIWULAN III	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
s.d TRIWULAN IV	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	90%	100.00%	95%	160%	95%	110%	95.5%
s.d TRIWULAN 1	25%	12.50%	25%	...	95%	100%	20%
s.d TRIWULAN 2	50%	50.00%	50%	...	95%	125%	25%
s.d TRIWULAN 3	75%	87.50%	75%	...	92%	100%	25%
s.d TRIWULAN 4	90%	100.00%	95%	160%	100%	116.7%	26%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

Perspektif: Internal Business Process

Sasaran: Diplomasi bilateral di negara akreditasi KBRI Beijing yang kuat

Deskripsi Sasaran: Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi bilateral. Relasi bilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaminnya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hubungan bilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Dalam dinamika relasi antar negara, kepentingan Indonesia di bidang tersebut diperjuangkan melalui diplomasi bilateral. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diwujudkan, dan selanjutnya dibahas melalui proses negosiasi dan perundingan. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan *assurance* terhadap terjaminnya kepentingan Indonesia dalam hubungan antar negara. Sasaran strategis ini mencerminkan prioritas strategis yang mesti dicapai oleh Perwakilan RI dalam rangka relasi bilateral dengan negara akreditasi yang menjadi naungan Perwakilan.

Diplomasi Bilateral adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral.

Kuat adalah teguh, tidak mudah goyah dan mempunyai keunggulan.

Indikator Kinerja: IK 1 Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Beijing

Deskripsi Indikator Kinerja:

Definisi:
Kesepakatan adalah seluruh bentuk perjanjian tertulis antara Indonesia dengan negara lain (baik pemerintah, swasta, universitas, pelaku bisnis atau pihak lainnya) yang difasilitasi oleh Perwakilan RI.

Ruang lingkup:
Kesepakatan bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan sektor lainnya merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam negosiasi, perundingan, diskusi, pertemuan, dan komunikasi yang bersifat landasan/payung hukum dan tidak memiliki *monetary value*.

Batasan waktu:
Kesepakatan yang dapat diklaim sebagai realisasi adalah kesepakatan yang diperoleh/ditetapkan pada satu tahun anggaran (Januari-Desember).

Formula:
Jumlah kesepakatan yang dihasilkan

Tujuan:
Untuk mengetahui kapabilitas diplomasi serta hasil konkrit atau output dari negosiasi atau perundingan yang telah dilakukan oleh Perwakilan RI

Satuan Pengukuran: Kesepakatan

Tingkat Kendali IK: () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IK: () Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IK: Fungsi Politik, Fungsi Ekonomi, Fungsi Pensosbud, Atase Perdagangan, Atase Pendidikan, atase terkait lainnya (jika ada)

Unit/Pihak Penyedia Data: Fungsi Politik, Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud, ITPC, IIPC, Atase Perdagangan, Atase Pendidikan, atase terkait lainnya (jika ada)

Sumber Data: Records of Discussion (RoD), Naskah Kesepakatan, Diplomatic Notes, Joint Statement, Declaration, Joint Communiqué, Letter of Intent, Chairman's Note, Memorandum of Understanding, Exchange of Notes, Summary Record, Agreed Minutes, Treaty, Minutes of Meeting, Laporan Perwakilan RI.

Jenis Konsolidasi Periode: () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: (X) Sum () Average () Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja: (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan: () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	8	10	19	29	15	26	20
s.d. Triwulan I	2	1	2	...	2	0	2
s.d. Triwulan II	2	3	5	...	3	18	7
s.d. Triwulan III	2	3	7	...	5	3	8
s.d. Triwulan IV	2	3	5	29	5	5	3

Indikator Kinerja: IK 2 Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan

Deskripsi Indikator Kinerja:

Definisi:
Analisis potensi ekonomi tematik adalah informasi dan hasil analisis di bidang ekonomi yang bersifat tematik pada isu tertentu di sektor perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, atau jasa. Analisis tersebut disampaikan oleh Perwakilan RI sesuai kebutuhan, termasuk atas permintaan dari pemangku kepentingan.

Dimanfaatkan adalah analisis tersebut dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan bisnis.

Pemangku kepentingan adalah pihak yang berkepentingan di Indonesia diantaranya Pelaku Bisnis, Investor, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.

Ruang Lingkup:
Perwakilan RI menyampaikan analisis potensi ekonomi tematik kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan menindaklanjuti hasil analisis tersebut dengan melakukan peninjauan, melaksanakan kegiatan promosi, atau upaya perluasan akses pasar/investasi lainnya. Perwakilan RI melakukan pemantauan atas pemanfaatan analisis potensi ekonomi tematik tersebut guna mengetahui jumlah analisis yang dimanfaatkan.

Batas waktu:
Analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pada satu tahun anggaran (Januari-Desember).

Formula:
Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan

Tujuan:
Untuk mengetahui manfaat atas analisis potensi ekonomi tematik bagi pemangku kepentingan.

Satuan Pengukuran: Jumlah

Tingkat Kendali IK: () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IK: () Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IK: Fungsi Ekonomi

Unit/Pihak Penyedia Data: Fungsi Ekonomi

Sumber Data: Laporan Perwakilan RI, Surat/Pernyataan dari pemangku kepentingan

Jenis Konsolidasi Periode: () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja: (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	8	10	19	29	15	26	20
s.d. Triwulan I	2	1	2	...	2	0	2
s.d. Triwulan II	2	3	5	...	3	18	7
s.d. Triwulan III	2	3	7	...	5	3	8
s.d. Triwulan IV	2	3	5	29	5	5	3

TAHUNAN	N/A	N/A	5	5	5	5	5
---------	-----	-----	---	---	---	---	---

**) Catatan: IK bersifat opsional dan diadopsi pada tahun 2024*

Indikator Kinerja: IK 5 Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi

Deskripsi Indikator Kinerja:

Definisi:
Intensitas saling kunjung adalah tingkat kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, dan kunjungan kerja pejabat pemerintah Indonesia ke negara akreditasi atau sebaliknya.
Pejabat pemerintah Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Kepala Badan/Lembaga/Komisi Negara, Pimpinan Lembaga Legislatif Pusat dan Daerah (Tingkat I dan Tingkat II), Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua dan wakil ketua BPK, Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pejabat pemerintah di negara akreditasi adalah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Wakil Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Kepala Negara Bagian/Provinsi dan Menteri.

Ruang Lingkup:
Kegiatan saling kunjung diharapkan menjadi salah satu sarana dalam mengukuhkan hubungan baik dan kerja sama saling menghargai dan menguntungkan dengan negara mitra.
Kegiatan saling kunjung juga dapat merefleksikan tingkat layanan keprotokolalan yang diberikan oleh Perwakilan RI.
Jumlah kunjungan meliputi kunjungan pejabat pemerintah Indonesia ke negara akreditasi, dan kunjungan pejabat pemerintah negara akreditasi ke Indonesia.

Batasan Waktu:
Saling kunjung antar pejabat pemerintah yang dilakukan pada satu tahun anggaran (Januari-Desember).

Formula:
Jumlah kunjungan antar pejabat pemerintah Indonesia dengan pejabat pemerintah negara akreditasi

Tujuan:
Untuk mengetahui intensitas derajat hubungan Indonesia dengan negara akreditasi.

Satuan Pengukuran : Jumlah

Tingkat Kendali IK : () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IK : (X) Exact () Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IK : Fungsi Politik, Fungsi Protokol, Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud, Atase Pertahanan, Atase Teknis dan Pejabat Teknis lainnya (jika ada)

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Politik, Fungsi Protokol, Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud, Atase Pertahanan, Atase Teknis dan Pejabat Teknis lainnya (jika ada)

Sumber Data : Laporan Perwakilan RI

Jenis Cascading IK: () Cascading Peta () Cascading Non peta (X) Non-Cascading

Metode Cascading : () Direct () Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan : () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	19	29	12	50	14
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	4	...	1	5	2
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	8	...	4	16	4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	16	...	2	15	5
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	19	29	5	14	3

**) Catatan: IK bersifat opsional dan diadopsi pada tahun 2024*

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

82

Perspektif: Internal Business Process

Sasaran : Basis data KBRI Beijing yang akurat

Deskripsi Sasaran : Dalam rangka mendukung pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri melalui perumusan kebijakan yang berdasarkan data dan informasi yang akurat (evidence-based policy), Kementerian Luar Negeri RI mendorong pelaksanaan pendataan, pemantauan sistem informasi dan penyusunan keajilan analisis dibarengi bidang, Perwakilan RI sebagai ujung tombak diplomasi di luar negeri, memiliki peran penting dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pengolahan data dan informasi guna perumusan kebijakan politik luar negeri dimaksud. Penguatan basis data dan informasi di Perwakilan RI saat ini difokuskan namun tidak terbatas pada aspek Pelindungan WNI dan diplomasi ekonomi.

Basis data adalah suatu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer dan dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi secara sistematis menggunakan program komputer. Istilah "basis" mengacu pada tempat penyimpanan, sedangkan "data" merujuk pada fakta-fakta yang dikumpulkan.

Akurat adalah teliti; saksama; cermat; tepat benar.

Indikator Kinerja: IK 1 Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang terverifikasi di Portal Peduli WNI

Definisi:
Portal Peduli WNI adalah sistem informasi pelayanan dan perlindungan terpadu bagi WNI di luar negeri yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2018. Untuk mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", Portal Peduli WNI telah berintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan Komunitas (SIMKOM), Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri BP2MI (SISKOP2MI) serta sistem pendataan dan pelayanan nasional lainnya.

Selain mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", jumlah WNI yang terdaftar pada Portal Peduli WNI dapat mempermudah proses pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri secara lebih baik dan akurat.

Ruang Lingkup:
Data pembandingan/pembagi adalah data jumlah WNI yang telah lapor diri pada tahun berjalan.

Terverifikasi adalah WNI yang sudah terdaftar pada Portal Peduli WNI disertai dengan dokumen WNI yang diunggah oleh WNI sendiri dan/atau staf Perwakilan RI yang berwenang dan diverifikasi oleh Perwakilan RI pada tahun berjalan.

WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

Persentase jumlah WNI yang terdaftar di Portal Peduli WNI adalah persentase dari data WNI yang terverifikasi oleh Perwakilan RI di luar negeri pada Portal Peduli WNI dibanding jumlah WNI yang mengajukan lapor diri pada tahun berjalan.

Perwakilan RI secara berkala melakukan pemutakhiran dan back-up data WNI atau master data dan juga melakukan update portal peduli WNI.

Proses verifikasi data WNI pada Perwakilan RI yang berada dalam keadaan darurat diatur melalui ketentuan khusus oleh Direktorat Pelindungan WNI. Definisi keadaan darurat merujuk ketentuan yang tertuang pada Pemleu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Jika di negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI terdapat pengajuan lapor diri WNI yang belum terverifikasi di Portal Peduli WNI pada tahun berjalan, maka verifikasi dilakukan pada tahun berikutnya.

Batasan waktu:
Formula:
(Jumlah lapor diri WNI yang terverifikasi pada Portal Peduli WNI / Jumlah WNI yang lapor diri) x 100%

Tujuan:
Mengukur persentase jumlah WNI yang datanya terverifikasi di Portal Peduli WNI

Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Kendali IK : () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IK : (X) Exact () Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IK : Fungsi Konsuler Perwakilan RI, Atase Migrasi, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Atase Ketenagakerjaan dan Atase Perhubungan.

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Konsuler Perwakilan RI

Sumber Data : Database Portal Peduli WNI

Jenis Cascading IK : () Cascading Peta () Cascading Non peta (X) Non-Cascading

Jenis Konsolidasi Periode : () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Periode Pelaporan : () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	90%	...	100%	100%	100%	100%	100%
s.d TRIWULAN I	100%	100%	100%	100%	25%
s.d TRIWULAN II	100%	100%	100%	100%	25%
s.d TRIWULAN III	100%	100%	100%	100%	25%
s.d TRIWULAN IV	90%	...	100%	100%	100%	100%	25%

Indikator Kinerja: IK 2 Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI ...

Definisi:
Data economic intelligence (DEI) adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) termasuk informasi peluang produk spesifik yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara akreditasi/wilayah kerja. DEI disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun dari masing-masing negara akreditasi/wilayah kerja.

Ruang lingkup:
DEI antara lain mencakup Gambaran Umum Ekonomi Negara Akreditasi, Potensi Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Negara Akreditasi, dan Kiat Mengembangkan Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Negara Akreditasi, dan Kalender Kegiatan. Format DEI Perwakilan RI merujuk pada Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan DEI Kemenlu.

Nilai DEI adalah:
0-30 : Tidak sesuai
30,01-50 : Belum sesuai
50,01-70 : Cukup sesuai
70,01-90 : Sesuai
>90 : Sangat sesuai

Penilaian dilakukan oleh Ditjen Amerop untuk Perwakilan RI di kawasan Amerop dan Ditjen Aspasaf untuk Perwakilan RI di kawasan Aspasaf.

Batasan Waktu:
DEI periode observasi tahun sebelumnya disampaikan ke Pusat pada Triwulan I tahun berjalan.
Penilaian DEI diperoleh Perwakilan RI dari Pusat pada Triwulan III tahun berjalan.

Formula:
Hasil Penilaian Laporan Data Economic Intelligence

Tujuan:
Tersedianya DEI yang andal, akurat, dan berkualitas

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Kendali IK : (X) High () Moderate () Low

Tingkat Validitas IK : () Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IK : Fungsi Ekonomi

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Ekonomi

Sumber Data : Nilai DEI dari Ditjen Aspasaf/Ditjen Amerop

Jenis Konsolidasi Periode : () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan : () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	85	98	98	98	98,2

**) Catatan: IK diadopsi pada tahun 2024*

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

B3

Perspektif:	Internal Business Process
Sasaran :	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Beijing yang Kuat
Deskripsi Sasaran :	<p>Diplomasi Digital adalah diplomasi yang dilakukan dengan menggunakan internet untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Diplomasi digital menawarkan cara baru dalam berkomunikasi dalam mendukung aktivitas diplomasi, baik yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, negara lain, serta publik. Diplomasi digital ditujukan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi penting untuk mendukung kebijakan luar negeri; mengomunikasikan posisi kebijakan luar negeri; serta melindungi kepentingan negara dan warga negara.</p> <p>Informasi hubungan luar negeri adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang hal-hal yang menyangkut aspek regional dan internasional, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.</p> <p>Kuat berarti memiliki keunggulan, akurat, dan aktual.</p>
Indikator Kinerja:	IK 1 Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing
Deskripsi Indikator Kinerja:	<p>Definisi:</p> <p>Impresi adalah jumlah akun followers dan non-followers yang melihat suatu postingan di media digital.</p> <p>Engagement adalah jumlah respons, retweet, share, dan likes terhadap suatu postingan di media digital dan/atau akumulasi press briefing, wawancara, pelaksanaan media gathering, kunjungan jurnalistik, pembuatan film, Journalist Visit Program, pertemuan/kerja sama lainnya dengan media</p> <p>Media sosial adalah suatu media dalam jaringan (online) di mana penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu informasi. Media sosial yang diukur meliputi Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.</p> <p>Portal berita adalah publikasi berita yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), atau perwakilan diplomatik lainnya di situs web resmi Perwakilan. Publikasi ini disampaikan dalam bahasa setempat atau bahasa Inggris, bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait aktivitas, layanan, dan perkembangan yang relevan dengan Indonesia kepada masyarakat setempat maupun khalayak internasional.</p> <p>Media setempat adalah pemberitaan di negara akreditasi/wilayah kerja. Berita terkait Indonesia yang dipublikasikan di berbagai platform media di negara akreditasi, seperti media cetak, media online, televisi, dan radio. Pemberitaan ini meliputi isu-isu yang terkait dengan Indonesia dan dipromosikan atau didukung oleh Perwakilan RI.</p> <p>Engagement media setempat meliputi pertemuan berbagai media setempat dan perwakilan untuk menyampaikan informasi atau memberikan penjelasan mengenai suatu isu, kebijakan terkait pertemuan/kerja sama lainnya dengan media).</p> <p>Kunjungan Jurnalistik adalah kegiatan peliputan yang dilakukan oleh jurnalis media asing dari Perwakilan RI ke Indonesia.</p> <p>Pembuatan film adalah kegiatan pembuatan film oleh perusahaan asing di wilayah akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI yang mengambil lokasi di wilayah Indonesia.</p> <p>Journalist Visit Program adalah program yang diinisiasi oleh Perwakilan RI untuk mengundang jurnalis asing datang ke Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan potensi Indonesia, baik dari segi pariwisata, budaya, ekonomi, maupun hubungan diplomatik.</p> <p>Ruang Lingkup: IK ini diukur melalui penghitungan atas 4 (empat) komponen utama: 1. Impresi dan Engagement Media Sosial Perwakilan dengan bobot: 25% 2. Berita yang diunggah pada Portal Perwakilan dalam Bahasa setempat/Bahasa Inggris dengan bobot: 25% 3. Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat dengan bobot: 25% 4. Engagement Perwakilan dengan media setempat (akumulasi press briefing, wawancara, pelaksanaan media gathering, kunjungan jurnalistik, pembuatan film, Journalist Visit Program, pertemuan/kerja sama lainnya dengan media) dengan bobot: 25%</p> <p>Pada awal tahun saat penetapan target, perwakilan perlu menetapkan proyeksi realisasi dan target setiap komponen pada dokumen pemetaan.</p> <p>Batasan Waktu:</p> <p>Formula:</p> $(25\% \times \text{capaian komponen 1}) + (25\% \times \text{capaian komponen 2}) + (25\% \times \text{capaian komponen 3}) + (25\% \times \text{capaian komponen 4})$ <p>Capaian Komponen 1 = (Impresi dan Engagement Media Sosial Perwakilan yang terealisasi / Target Impresi dan Engagement Media Sosial Perwakilan) x 100% Capaian Komponen 2 = (Berita yang diunggah pada Portal Perwakilan dalam Bahasa setempat/Bahasa Inggris yang terealisasi / Target Berita yang diunggah pada Portal Perwakilan dalam Bahasa setempat/Bahasa Inggris) x 100% Capaian Komponen 3 = (Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat yang terealisasi / Target Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat) x 100% Capaian Komponen 4 = (Engagement Perwakilan dengan media setempat yang terealisasi / Target Engagement Perwakilan dengan media setempat) x 100%</p> <p>Tujuan: mengukur seberapa tingkat ketertarikan dan engagement publik terhadap isu-isu yang terkait kebijakan hublu RI di media sosial, mengetahui tingkat efektivitas penyampaian informasi diplomasi di media, dan mengukur jumlah kerja sama yang dilakukan oleh Perwakilan RI dengan media, baik nasional maupun asing sebagai sarana diseminasi informasi dalam rangka keterbukaan publik dan meningkatkan citra positif Indonesia di Perwakilan RI</p>
Satuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IK :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IK :	() Exact (X) Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK :	Fungsi Pensosbud
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Pensosbud
Sumber Data :	Laporan Impresi Engagement pada Media Sosial, Laporan berita yang diunggah pada portal Perwakilan RI dalam bahasa setempat / Bahasa Inggris, Laporan Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat (media massa, media online, tv, radio) dan Laporan Hasil Engagement Perwakilan dengan Media Setempat Perwakilan RI
Jenis Cascading IK:	() Cascading Peta () Cascading Non peta (X) Non-Cascading
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average (X) Take Last Known Value
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2025		2026
	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	70%	72%	75%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

L1

Perspektif:	Learning and Growth																																						
Sasaran :	Tata kelola organisasi KBRI Beijing yang baik																																						
Deskripsi Sasaran :	<p>Definisi: Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.</p> <p>Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.</p>																																						
Indikator Kinerja:	IK 1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing																																						
Deskripsi Indikator Kinerja:	<p>Definisi: Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.</p> <p>Ruang lingkup: Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen dan bobot sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Perwakilan RI bertujuan untuk: a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Perwakilan RI; b. menilai tingkat implementasi SAKIP di Lingkungan Perwakilan RI; c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Lingkungan Perwakilan RI; dan d. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Perwakilan RI periode sebelumnya.</p> <p>Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik (4) B (Skor > 60-70); Baik (5) CC (>50-60); Cukup (6) C (>30-50); Kurang (7) D (0-30); Sangat Kurang</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkategorian dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pedoman evaluasi AKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Evaluasi AKIP juga diatur oleh Kepmen No. 0065/ Tahun 2023 tentang <i>Book of</i> Evaluasi AKIP 1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah 2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; b) menilai tingkat implementasi SAKIP; c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan e) memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.</p> <p>Batasan waktu: Nilai evaluasi AKIP yang digunakan adalah Nilai Evaluasi AKIP tahun berjalan. Apabila belum diperoleh nilai pada tahun berjalan, digunakan penilaian tahun sebelumnya.</p> <p>Formula: Nilai AKIP yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemenlu</p> <p>Tujuan: untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Perwakilan RI.</p>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan	Perencanaan Kinerja	20%	30%	50%		Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	6	9	15	30	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15	Nilai Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100
Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																																			
	Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub-Komponen 2 Kualitas	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan																																				
Perencanaan Kinerja	20%	30%	50%																																				
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
Pelaporan Kinerja	6	9	15	30																																			
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15																																			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25																																			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																			
Satuan Pengukuran :	Nilai																																						
Tingkat Kendali IK :	() High (X) Moderate () Low																																						
Tingkat Validitas IK :	(X) Exact () Proxy () Activity																																						
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK :	Seluruh Fungsi																																						
Unit/Pihak Penyedia Data :	Inspektorat Jenderal																																						
Sumber Data :	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal																																						
Jenis Cascading IK:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading																																						
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect																																						
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average (X) Take Last Known Value																																						
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize																																						
Periode Pelaporan :	() Bulanan () Triwulanan (X) Tahunan																																						

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	79.06 (BB)	79.6 (BB)	80.6 (A)	79.65 (BB)	80.65 (A)	79.35	81.6

Nilai AKIP 2024/2025	Target 2026
Kategori BB	
>77,50	Target minimal
>75,00 - 77,50	Target minimal
>72,50 - 75,00	Target minimal
>70,00 - 72,50	Target minimal
Kategori B	min 70,50 (BB)

Perspektif:	<i>Learning and Growth</i>
Sasaran :	Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal
Deskripsi Sasaran :	<p>Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset berupa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berdasar dari perolehan lainnya yang sah.</p> <p>Cakupan aset yang diukur dalam indeks ini adalah aset lancar berupa barang milik negara (BMN). Sehingga Pengelolaan Aset dimaksud dalam sasaran strategis ini ialah proses perencanaan, penguasaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pengawasaan dan pengendalian BMN yang berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Optimal berarti paling baik dan tertinggi.</p> <p>Ruang lingkup Pengelolaan Aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasaan dan pengendalian.</p>
Indikator Kinerja:	IK 1 Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing
Deskripsi Indikator Kinerja:	<p>Definisi:</p> <p>BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p> <p>Indeks Pengelolaan BMN adalah alat ukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh satker perwakilan sebagai pendukung pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan. Implementasi Indeks Pengelolaan BMN merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasaan dan pengendalian pengelolaan BMN sebagai upaya Pengelola Barang bersama-sama Pengguna Barang untuk terus menerus melakukan perbaikan tata kelola BMN.</p> <p>Indeks Pengelolaan BMN mencakup rata-rata tertimbang (weighted average) parameter-parameter pengelolaan BMN yang terdapat pada Perwakilan RI.</p> <p>Ruang lingkup:</p> <p>Indeks Pengelolaan BMN mencakup penghitungan dari 8 (delapan) parameter pengelolaan BMN, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait BMN pada satuan kerja 2. Realisasi PNPB dari pengelolaan aset satuan kerja 3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN satuan kerja 4. Asuransi BMN satuan kerja 5. Tindak lanjut pemanfaatan/penggunaan yang menghasilkan PNPB, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN satuan kerja 6. Tindak lanjut BMN satuan kerja rusak berat 7. BMN satuan kerja memiliki dokumen kepemilikan 8. Penggunaan BMN satuan kerja yang sesuai ketentuan <p>Parameter tersebut merujuk komponen penilaian dalam Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang disesuaikan dengan implementasi pengelolaan BMN pada Perwakilan RI. Dalam penghitungan akhir, parameter yang tidak <i>applicable</i> dengan kondisi perwakilan RI dapat tidak diperhitungkan. Sebagai contoh, jika suatu perwakilan RI tidak mempunyai kepemilikan tanah, maka parameter nomor 7 yaitu Tingkat BMN (tanah) yang mempunyai dokumen kepemilikan, tidak diperhitungkan.</p> <p>Penghitungan Parameter poin 1 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelesaian tindak lanjut parameter 100% atau tidak terdapat temuan = indeks 4 - penyelesaian tindak lanjut parameter antara 70% s.d. kurang dari 100% = indeks 3 sampai <4 - penyelesaian tindak lanjut parameter antara 40% s.d. kurang dari 60% = indeks 2 sampai <3 - penyelesaian tindak lanjut parameter di bawah 40% = indeks 1 sampai <2 <p>Penghitungan Parameter poin 2; 5; 7; dan 8 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelesaian/pemenuhan parameter lebih dari 80% = indeks 4 - penyelesaian/pemenuhan parameter antara 60% s.d. kurang dari 80% = indeks 3 sampai <4 - penyelesaian/pemenuhan parameter antara 40% s.d. kurang dari 70% = indeks 2 sampai <3 - penyelesaian/pemenuhan parameter di bawah 40% = indeks 1 sampai <2 <p>Penghitungan Parameter poin 3 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyampaian laporan kurang atau sama dengan H-3 = indeks 4 - penyampaian laporan antara H-5 s.d. H-0 = indeks 3 - penyampaian laporan H+1 s.d. H+3 = indeks 2 - penyampaian laporan lebih dari H+3 atau tidak menyampaikan = indeks 1 <p>Penghitungan Parameter poin 4 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyerahan polis asuransi atau tidak terdapat obyek target asuransi BMN = indeks 4 - kontrak pengadaan asuransi oleh satuan kerja = indeks 3 - penandatanganan Surat Permintaan Asuransi oleh satuan kerja = indeks 2 - penyampaian usulan asuransi atau belum ada kegiatan pengasuransian = indeks 1 <p>Penghitungan Parameter poin 6 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 > Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0 = Indeks 1 - Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 = Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0 = Indeks 2 - Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 < Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0 = Indeks 3 <p>Indeks Pengelolaan BMN Perwakilan RI dihasilkan dari penjumlahan parameter-parameter pengelolaan BMN dibagi dengan jumlah parameter.</p> <p>Batasan waktu:</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan BMN yang digunakan adalah Nilai Indeks Pengelolaan BMN satker Perwakilan RI tahun berjalan (Januari s.d. Desember 2024).</p>
	Formula:
	Indeks Pengelolaan BMN Perwakilan RI
	Tujuan:
	Mendukung terwujudnya pengelolaan aset yang optimal dan akuntabel yaitu pengelolaan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.
Satuan Pengukuran :	Nilai
Tingkat Kendali IK :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IK :	(X) Exact () Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK :	Perwakilan RI
Unit/Pihak Penyedia Data :	Perwakilan RI
Sumber Data :	Berita penyampaian RKBMN; berita penyampaian LBKP; laporan tindak lanjut temuan BPK; dokumen kepemilikan (akta/sertifikat); polis asuransi; berita penyampaian wasdal; data pada aplikasi SAKTI dan Monsakti; dan berita penyampaian PSP dan aplikasi SIMAN.
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum () Average (X) Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	() Sum () Average (X) Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Tahunan	2,90 (dari skala 4)	2,91 (skala 4)	3,20 (dari skala 4)	3,69 (dari skala 4)	3,7 (dari skala 4)	3,77 (dari skala 4)	3,7 (dari skala 4)

*) Catatan: IK baru diadopsi pada tahun 2024
IK tahun 2023 menggunakan nilai IPA Kemenlu

Rujukan penentuan baseline target

Realisasi BMN 2025	Target 2026
≥ 3,20	Rentang target menggunakan baseline realisasi tahun sebelumnya
< 3,20	3,20

Perspektif:	Learning and Growth
Sasaran :	Pengelolaan Anggaran KBRI Beijing yang Optimal dan Akuntabel
Deskripsi Sasaran :	Keberadaan infrastruktur diplomasi yang kuat juga ditopang oleh Pengelolaan Anggaran yang optimal dan akuntabel. Dalam hal ini pengelolaan anggaran meliputi pengelolaan dimulai dari penyusunan rencana kerja, penguangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan. Optimal berarti paling baik dan tertinggi Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja:	IK 1 Nilai IKPA KBRI Beijing
Deskripsi Indikator Kinerja:	Definisi: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan dapat diakses melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN). Merujuk pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdapat 3 (tiga) aspek penilaian dalam IKPA yaitu (1) kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, (2) kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sesuai Reformulasi IKPA Tahun 2024 (PER-5/PB/2024), terdapat 8 (delapan) Indikator Penilaian IKPA dengan bobot persentasenya sebagai berikut: 1.Revisi DIPA (10%) 2.Deviasi Halaman III DIPA (15%) 3.Penyerapan Anggaran (20%) 4.Data Kontrak (10%) 5.Penyelesaian Tagihan (10%) 6.Pengelolaan UP/TUP (10%) 7. Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA) 8. Capaian Output (25%) Kategori nilai IKPA sesuai PER-5/PB/2024 adalah sbb: 1. Sangat Baik (nilai ≥ 95) 2. Baik (89 ≤ nilai < 95) 3. Cukup (70 ≤ nilai < 89) 4. Kurang (nilai < 70) Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu. Data yang digunakan adalah data pada akhir setiap triwulan. Namun, jika tidak memungkinkan, Perwakilan RI dapat menggunakan data terakhir yang tersedia pada Formula: Nilai IKPA KBRI..... Tujuan: untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggaran Perwakilan RI
Satuan Pengukuran :	Nilai
Tingkat Kendali IK :	() High (X) Moderate () Low
Tingkat Validitas IK :	(X) Exact () Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IK :	Seluruh Fungsi di Perwakilan RI
Unit/Pihak Penyedia Data :	Perwakilan RI
Sumber Data :	Aplikasi OMSPAN Kemenkeu
Jenis Cascading IK:	(X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading
Metode Cascading :	() Direct (X) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode	() Sum () Average (X) Take Last Known Value
Polarisasi Indikator Kinerja :	(X) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan (X) Triwulanan () Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2023		2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	94,2	94.11	95	95.9	95.5
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	30	...	70.23	100	...
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	60	...	94.47	92.72	...
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	75	...	94.47	95.35	...
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	94,2	94.11	95	95.44	...

Rujukan penentuan <i>baseline</i> target	
Realisasi IKPA 2024	Target 2026
≥ 90	Rentang Target menggunakan baseline realisasi tahun sebelumnya
< 90	90

MATRIKS RENCANA AKSI

Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IK/ Sub IK	Indikator Kinerja	Target IK				Kode	RO/Komponen>Nama Kegiatan	Target		Dukungan SDM (orang)	
				TW I	TW II	TW III	TW IV			Volume	Anggaran		
S1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Beijing yang Optimal	S1.1	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	40%	60%	051	Promosi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Promosi daeang Partisipasi pada pameran daeang di negara akreditasi	239.314.000	11 orang				
											052	Bussines forum/bisnis matching Pelaksanaan forum bisnis di beberapa kota di RRT dan Mongolia	530.788.000
											053	Promosi Budaya dan Pariwisata Pelaksanaan promosi budaya dan pariwisata di RRT	2.068.230.000
											054	Promosi Investasi	845.484.000
											055	Kegiatan Promosi Investasi di negara akreditasi Pelaksanaan Familiarization Trip ke Indonesia	118.024.000
		S1.2	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Beijing	40%	60%	056	Resepsi Diplomatik Program Resepsi Diplomatik RI di Beijing Program Resepsi Diplomatik RI di Mongolia	1.009.357.000					
						057	Representasi Program representasi	23.760.000					
						059	Siwa Coerasional Khusus Keala Perwakilan	297.000.000					
		S1.3	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Beijing	40%	60%	058	Facilitasi Delegasi RI Dukungan fasilitas kunjungan dari ke negara akreditasi dalam rangka diplomasi ekonomi, pariwisata, dan politik	485.990.000					
		B.1	Diplomasi bilateral di negara akreditasi KBRI Beijing yang kuat	IK B.1.1	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	2	7	8	3	10.311.000			
IK B.1.2	Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku			1	1	2	1						
IK B.1.5	Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi			2	4	5	3						
B2	Basis data KBRI Beijing yang akurat	B2.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Beijing yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	25%	25%	25%	25%	279.356.000 78.199.000	6 orang				
		B2.2	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI	98.2									
S2	Citra Postif Indonesia di Wilayah Akreditasi KBRI Beijing yang Meningkatkan	S2.1	Indeks Citra Indonesia di Wilayah Akreditasi KBRI Beijing	4,20	4,20	4,20	4,20	061 A	Pembinaan dan Penggalangan Masyarakat di Negara Akreditasi/Wilayah Akreditasi Pembinaan dan Penggalangan kelompok masyarakat Kelompok Friends of Indonesia Program pembinaan bagi kelompok Friends of Indonesia	355.413.000 279.356.000 78.199.000			
								B	Kelompok Diaspora Program pembinaan bagi kelompok diaspora	67.642.000			
								C	Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Program pembinaan bagi kelompok mahasiswa	66.733.000			
								D	Kelompok masyarakat lainnya Program pembinaan bagi kelompok mahasiswa	66.782.000			
								066	Upacara Keneseraan Pelaksanaan kegiatan Upacara 17 Agustus	76.057.000			
B3	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Beijing yang Kuat	B.3.1	Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Beijing				75%						
C1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Beijing yang prima	C1.1	Persentase kasus WNI di Wilayah Akreditasi KBRI Beijing yang diselesaikan	25%	25%	25%	25%	301.996.000	4 orang				
		C1.3	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Beijing	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)						
B3	Basis data KBRI Beijing yang akurat	B2.1	Persentase WNI di Wilayah Akreditasi KBRI Beijing yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100%	100%	100%	100%	005 A	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI) Dukungan dan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Bantuan pelindungan dan pemulanan WNI bermasalah Pendampingan untuk pemulanan WNI bermasalah	755.049.000 301.996.000			
								B	Bantuan/pendampingan hukum WNI bermasalah Kunjungan ke penjara dan pendampingan hukum WNI bermasalah	212.025.000			
								C	Bantuan logistik/penampungan bagi WNI bermasalah Pemberian bantuan penampungan dan kostik bagi WNI bermasalah	21.562.000			
								D	Sosialisasi/Diseminasi informasi ketentuan/aturan/kebijakan dalam Sosialisasi peraturan terkait pelindungan WNI di luar negeri	209.550.000			
								E	Pemutakhiran Data WNI di luar negeri Penginputan data WNI di luar negeri	6.616.000			
								F	Survey layanan kekonsuleran	3.300.000			
								005 A	Pelayanan dan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan dokumen kekonsuleran Pemberian layanan untuk dokumen kekonsuleran	2.445.000			
B	Warung konsuler di negara akreditasi/Wilayah Akreditasi Penyelenggaraan warung konsuler di kota-kota luar Beijing	187.770.000											
C	Survey layanan kekonsuleran Program survey layanan kekonsuleran	61.852.000											
C1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Beijing yang prima	C1.2	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Beijing	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	252.067.000	4 orang				
C2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di Wilayah Akreditasi KBRI Beijing	C2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Beijing	20%	25%	25%	25%	3.803.054.000	15 orang				
B1	Diplomasi bilateral di Wilayah Akreditasi KBRI Beijing yang kuat	B1.1	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	2	7	8	3	051	Siwa Operasional Khusus Keala Perwakilan	297.000.000			
								052	Representasi Program representasi	237.600.000			
								053 A	Partisipasi pada Pertemuan Bilateral Partisipasi KBRI Beijing pada pertemuan bilateral, regional, dan multilateral	2.264.028.000			
								054	Facilitasi Delegasi RI Pembinaan fasilitas delegasi RI di negara akreditasi KBRI	923.983.000			
								055	Pemusatan dokumen kesepakatan	80.443.000			
L1	Tata kelola organisasi KBRI Beijing yang baik	L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Beijing				81,6	78.679.363.000	8 orang				
L3	Pengelolaan anggaran KBRI Beijing yang optimal dan akuntabel	L.3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Beijing	92	92	92	95,5	001	Cali dan Tunjangan Pemberian oai dan tunjangan untuk seluruh staf KBRI	46.995.134.000			
								002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pelaksanaan pemeliharaan dan kebutuhan coerasional kantor	31.684.429.000			
L2	Pengelolaan aset KBRI Beijing yang optimal	L.2.1	Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing				3,7 (skala 4)	056	Layanan Sarana Internal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perwakilan Penadaan untuk hardware, PC, dan laptop Kantor	200.000.000 100.000.000			
								057	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan Penadaan untuk peralatan kantor dan mesin	100.000.000			
L4	Tata Kelola TIK Perwakilan RI yang Efektif	L.4.1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian				1 (skala 4)						

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI NOMOR TENTANG PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN RI BEIJING**

DOKUMEN *MAPPING* TINDAKLANJUT/IMPLEMENTASI KESEPAKATAN INTERNASIONAL

PERWAKILAN RI BEIJING TAHUN 2026

No	Dokumen Kesepakatan	Waktu Berlaku Kesepakatan	Rencana Ditindaklanjuti					Substansi Yang Ditindaklanjuti	Stakeholders Terkait	Target Hasil Tindaklanjuti	PIC
			2026	2027	2028	2029	2030				
1	Rencana Aksi Penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (2022-2026)	2022-2026	✓					Memperkuat kerja sama polhukam, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, maritim, serta isu kawasan dan multilateral	Kementerian Luar Negeri, Bakamla, dan pemangku kepentingan RI terkait lainnya, serta Kemlu RRT, CCG, dan pihak-pihak terkait lainnya	Terlaksananya Pertemuan 2+2 Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan RI dengan Menteri Luar Negeri RRT dan Menteri Pertahanan RRT	Fungsi Politik
							Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, dan pihak-pihak terkait lainnya		Partisipasi aktif Indonesia pada forum multilateral yang di <i>host</i> oleh RRT	Fungsi Politik, Fungsi Ekonomi	
							Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait lainnya		Partisipasi aktif Indonesia pada kegiatan ASEAN-China	Fungsi Politik	

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI NOMOR TENTANG PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN RI BEIJING**

DOKUMEN MAPPING TINDAKLANJUT/IMPLEMENTASI KESEPAKATAN INTERNASIONAL

PERWAKILAN RI BEIJING TAHUN 2026

									Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Indonesia, dan pihak-pihak terkait lainnya	Tercapainya kesepakatan protokol ekspor-impor produk perdagangan RI-RRT	Fungsi Ekonomi dan Atase Perdagangan
2	<i>Joint Statement Between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future</i>	2024-2026	✓					Memperkuat kerja sama politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya dan pariwisata, hingga kerja sama kemaritiman.	Kementerian Luar Negeri, Bakamla, dan pemangku kepentingan RI terkait lainnya, serta Kemlu RRT, CCG, dan pihak-pihak terkait lainnya	Ditandatanganinya MoU antara Bakamla RI dan China Coast Guard (sudah terlaksana di 2025)	Fungsi Politik
									Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak-pihak terkait lainnya	Meningkatnya jumlah kerja sama <i>sister city/province</i>	Fungsi PEKDP
3	<i>MoU on Cooperation in Economic</i>	2025-2028 (dapat diperpanjang)	✓	✓	✓			Kerja sama di sektor kebijakan	Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi,	Terlaksananya program diskusi, <i>knowledge dan</i>	Fungsi Politik, Fungsi Protokol dan Konsuler,

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI NOMOR TENTANG PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN RI BEIJING**

DOKUMEN *MAPPING* TINDAKLANJUT/IMPLEMENTASI KESEPAKATAN INTERNASIONAL

PERWAKILAN RI BEIJING TAHUN 2026

	<i>Development Policy</i>							perencanaan Pembangunan ekonomi dan sosial dan ekonomi-makro	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Dewan Ekonomi Nasional, dan pihak-pihak terkait lainnya	<i>experience sharing</i> , pelatihan, dan pembangunan SDM	Fungsi Ekonomi, dan Fungsi PEKDP
4	<i>MoU for the Establishment of a Framework for Cooperation to Promote Bilateral Transactions in Local Currencies</i>	2025 - 2030	✓	✓	✓	✓	✓	Kerja sama Teknik di bidang keuangan	Bank Indonesia	Meningkatnya nilai perdagangan dan kerja sama keuangan dua arah	Fungsi Ekonomi
5	<i>MOU Capacity Building and Exchanges Cooperation in Sustainable Development</i>	2023 – 2026 (dapat diperpanjang)	✓					Kerja sama peningkatan kapasitas dan kerja sama dalam pembangunan berkelanjutan di bidang antara lain agrikultur, bioteknologi, dan medis	Kemenkomarinvester RI dan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi RRT	Ter laksanakan <i>working group</i> pembahasan kerja sama pembangunan berkelanjutan di kedua negara pada bidang-bidang antara lain agrikultur, bioteknologi, dan medis	Fungsi PEKDP

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI NOMOR TENTANG PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN RI BEIJING**

DOKUMEN *MAPPING* TINDAKLANJUT/IMPLEMENTASI KESEPAKATAN INTERNASIONAL

PERWAKILAN RI BEIJING TAHUN 2026

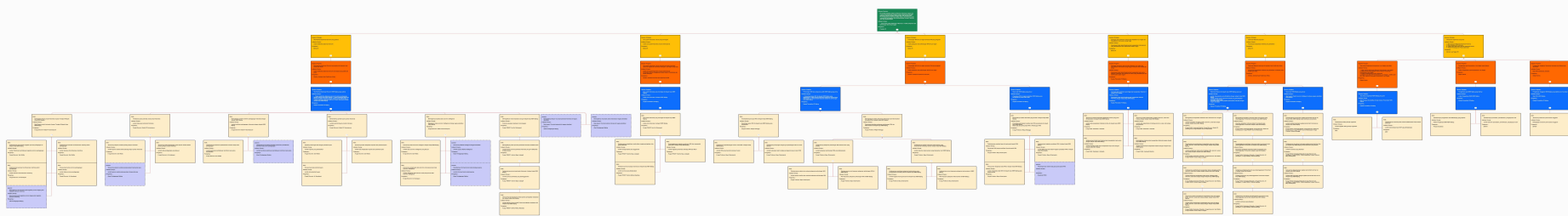
6	MoU on Establishing the Comprehensive Strategic Dialogue	2025-2030	✓	✓	✓	✓	✓	Kerja sama pengembangan pendidikan tinggi antara lain beasiswa, peningkatan teknologi pengajaran, dan pendirian pusat bahasa baik di RRT dan RI	Pemerintah RI dan Pemerintah RRT	Mengoordinasikan dan memajukan kerja sama saling menguntungkan dalam kerangka lima pilar yang meliputi aspek politik, ekonomi, pertukaran antar masyarakat maritim, dan keamanan, serta bidang lain yang disepakati bersama	Fungsi Ekonomi, PEKDP, Politik
7.	MoU Kerja Sama Pariwisata	2025-2030	✓	✓	✓	✓	✓	Kerja sama pengembangan pariwisata di kedua negara	Kementerian Budaya dan Pariwisata RRT, dan Kementerian Pariwisata RI	Terjalinnnya kerja sama untuk menarik wisatawan dari kedua negara, pembentukan kantor pariwisata nirlaba ,pertukaran info dan statistic pariwisata	Fungsi PEKDP
8.	MoU on Enhancement of Cooperation in the Field of Diplomacy and International	2023 – 2028 (dapat diperpanjang)	✓	✓	✓			Kerja sama pengembangan dan promosi di bidang diplomasi dan isu-isu	Kementerian Luar Negeri	Terlaksananya saling kunjung, mekanisme konsultasi bilateral, pertukaran	Fungsi Politik

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI NOMOR TENTANG PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN RI BEIJING**

DOKUMEN *MAPPING* TINDAKLANJUT/IMPLEMENTASI KESEPAKATAN INTERNASIONAL

PERWAKILAN RI BEIJING TAHUN 2026

	Relations Indonesia- Mongolia							hubungan internasional		informasi, peningkatan kapasitas, dan pertukaran personel	
9.	MoU on the Cooperation in the field of Traditional Medicine	2025 - 2030	✓	✓	✓	✓	✓	Kerja sama di bidang pengobatan tradisional	Kementerian Kesehatan, Badan Administrasi Nasional Pengobatan Tradisional China RRT (NMPA)	Terlaksananya pertukaran praktik terbaik, pengetahuan, teknologi, pakar, pengembangan kapasitas, dukungan teknis, dan kerja sama di bidang sumber daya tanaman obat dan pengobatan herbal/alami	Fungsi PEKDP/Ekonomi



MATRIKS INFORMASI KINERJA
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN RI TAHUN 2025

No. SS	Sasaran Strategis (SS)	No. IK	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Unor Pengampu	Formula	Sumber Data	Catatan Khusus
Stakeholders Perspective							
1	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal	1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	$IK1 = (50\% * \text{Capaian Komponen 1}) + (50\% * \text{Capaian Komponen 2})$ Capaian Komponen 1 = (Komitmen perdagangan yang diperoleh / Target komitmen perdagangan) x 100% Capaian Komponen 2 = (Potensi transaksi perdagangan yang terealisasi / Target potensi transaksi perdagangan) x 100%	> Jumlah komitmen: Loi, MoU, kontrak, atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya komitmen transaksi perdagangan dan potensi transaksi perdagangan dari kedua belah pihak > Jumlah potensi transaksi: laporan brafaks perwakilan untuk kegiatan yang menghasilkan potensi transaksi , dan mencantumkan nilai potensi transaksi tersebut.	Agar dapat menghitung masing-masing capaian, Perwakilan RI harus memiliki pemetaan target tahun 2025.
		2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	$IK2 = (50\% * \text{Capaian Komponen 1}) + (50\% * \text{Capaian Komponen 2})$ Capaian Komponen 1 = (Komitmen investasi yang diperoleh / Target komitmen investasi) x 100% Capaian Komponen 2 = (Potensi transaksi investasi inbound yang terealisasi / Target potensi transaksi investasi) x 100%	> Jumlah komitmen: Loi, MoU, kontrak, atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya komitmen transaksi investasi dan potensi transaksi investasi dari kedua belah pihak > Jumlah potensi transaksi: laporan brafaks perwakilan untuk kegiatan yang menghasilkan potensi transaksi , dan mencantumkan nilai potensi transaksi tersebut.	Agar dapat menghitung masing-masing capaian, Perwakilan RI harus memiliki pemetaan target tahun 2025.
		3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	$IK3 = (\text{Jumlah responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia}) / (\text{Jumlah responden yang mengisi survei}) \times 100\%$	Data survei Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	> Klaim Variabel 1 adalah jumlah responden yang menjawab "Agree" ditambah "Strongly Agree" pada pertanyaan "I am more interested to visit Indonesia after attending tourism/cultural events or learning about Indonesia through promotion materials". > Klaim variabel 2 adalah jumlah responden yang mengisi "Yes" pada pertanyaan "Have you ever attended tourism/cultural events or learnt about Indonesia through promotion materials"
2	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di organisasi internasional	1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	KBRI Multilateral/PTRI	$(\text{Jumlah pertemuan yang dipimpin/diselenggarakan oleh Indonesia} + \text{Jumlah pencalonan yang berhasil}) / (\text{Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin/diselenggarakan oleh Indonesia} + \text{Jumlah pencalonan yang diusulkan}) \times 100\%$	> Pertemuan yang dipimpin : Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, statement Delri. > Jumlah pencalonan yang diusulkan: database pencalonan.	Ruang lingkup Pertemuan yang dipimpin > Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group, antara lain dapat menjadi Presiden dan Ketua Organ Subsider selama menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. > Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair, dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. Pencalonan yang berhasil Keberhasilan pencalonan akan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan. Contoh: Pemilihan Anggota Dewan HAM PBB untuk periode tahun 2024-2025, diselenggarakan pada tahun 2023. Keberhasilan Indonesia terpilih sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dicatat sebagai capaian Kemenlu tahun 2023.
		2	Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri multilateral	KBRI Multilateral/PTRI	$(\text{Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima} / \text{Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan}) \times 100\%$	Laporan dan dokumen sidang: Leaders' Vision, chairman's statement, joint statement, joint communique, declaration, laporan Delri, agreements, MoU, summary record/ of discussion, plan of action, Treaty, Resolution, Charter, Terms of References, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper/note dan concept paper/note, framework of cooperation, Element of working document, work plan/program	Pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri adalah pertemuan yang diikuti oleh Presiden RI dan/atau pejabat setingkat Menteri.
3	Citra positif Indonesia di negara akreditasi ... yang meningkat	1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi ...	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	$\text{Indeks citra Indonesia di negara akreditasi} = (\text{Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden}) / (\text{Jumlah Total Responden})$	Data survey citra Indonesia di Dunia Internasional yang dilakukan oleh Perwakilan RI, dengan menggunakan database website melalui tautan https://citraindonesia.kemlu.go.id	
Customer Perspective							
1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik ... yang prima	1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi ... yang diselesaikan	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	Persentase Penyelesaian Kasus = $(55\% \times (\text{Kasus Khusus yang diselesaikan} / \text{Kasus Khusus yang ditangani}) \times 100\%) + (45\% \times (\text{Kasus Umum yang diselesaikan} / \text{Kasus Umum yang ditangani}) \times 100\%)$	Laporan penanganan kasus, database Portal Peduli WNI, dan Berita Acara Serah Terima Penanganan Kasus	Jika suatu Perwakilan hanya menangani salah satu jenis kasus (hanya kasus umum atau hanya kasus khusus), maka bobot 100% diberikan kepada jenis kasus yang tersedia, dan rumus disesuaikan dengan jenis kasus tersebut saja.
		2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran dihitung sebagai berikut: a. Realisasi Triwulan I (Nilai Persepsi TW I) = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret. b. Realisasi Triwulan II (Nilai Persepsi TW II) = rata-rata kuesioner April Januari s.d. Juni. c. Realisasi Triwulan III (Nilai Persepsi TW III) = rata-rata kuesioner Juli Januari s.d. September. d. Realisasi Triwulan IV / Tahunan = rata-rata kuesioner Januari s.d. Desember.	Hasil survei atau kuesioner kepuasan pelayanan pelindungan WNI di Perwakilan RI di luar negeri.	> Pastikan survei telah merujuk pedoman teknis dari PWN dan Kepmenlu SKM
		3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran dihitung sebagai berikut: a. Realisasi Triwulan I (Nilai Persepsi TW I) = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret. b. Realisasi Triwulan II (Nilai Persepsi TW II) = rata-rata kuesioner April Januari s.d. Juni. c. Realisasi Triwulan III (Nilai Persepsi TW III) = rata-rata kuesioner Juli Januari s.d. September. d. Realisasi Triwulan IV / Tahunan = rata-rata kuesioner Januari s.d. Desember.	Hasil survei atau kuesioner kepuasan pelayanan pelindungan WNI di Perwakilan RI di luar negeri.	> Pelayanan terkait pelindungan WNI di luar negeri mencakup pemberian layanan dalam penanganan kasus atau pemberian bantuan pelindungan lainnya, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD. > Pastikan survei telah merujuk pedoman teknis dari PWN dan
2	Dukungan dan komitmen yang tinggi atas kesepakatan bilateral di negara akreditasi ...	1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi ...	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	$(\text{Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti/dimplementasikan} / \text{Jumlah rencana kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi/wilayah kerja beserta negara rangkapan yang akan ditindaklanjuti sesuai dokumen pemetaan}) \times 100\%$	Dokumen laporan dari tindak lanjut kesepakatan berdasarkan pertemuan/kegiatan, brafaks perwakilan, surat dari/kepada K/L teknis, pernyataan pers, liputan media, pidato pejabat, website treaty room	

Internal Business Process Perspective							
1	Diplomasi bilateral di negara akreditasi ... yang kuat	1	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi ...	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan	Records of Discussion (ROD), Naskah Kesepakatan, Diplomatic Notes, Joint Statement, Declaration, Joint Communiqué, Letter of Intent, Chairman's Note, Memorandum of Understanding, Exchange of Notes, Summary Record, Agreed Minutes, Treaty, Minutes of Meeting, Laporan Perwakilan RI.	Pastikan bahwa kesepakatan yang diklaim pada indikator B1 tidak diklaim kembali sebagai komitmen pada IK TTI guna menghindari double claim .
		2	Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan	Laporan Perwakilan RI, Surat/Pernyataan dari pemangku kepentingan	analisis potensi ekonomi tematik kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan menindaklanjuti hasil analisis tersebut dengan melakukan penajakan, melaksanakan kegiatan promosi, atau upaya perluasan akses pasar/investasi lainnya. Perwakilan RI melakukan pemantauan atas pemanfaatan analisis potensi ekonomi tematik tersebut guna mengetahui jumlah analisis yang dimanfaatkan
		3	Persentase pengamanan akses pasar dan/atau sengketa bisnis dengan negara akreditasi ... yang diselesaikan	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	((Pengamanan akses pasar dan/atau sengketa bisnis yang diselesaikan)/(Pengamanan akses pasar dan/atau sengketa bisnis yang ditangani)) x 100%	Laporan Perwakilan RI	
		4	Tingkat respon positif pelaksanaan diplomasi sosial budaya	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	Hasil survey respon positif pelaksanaan diplomasi sosial budaya	Hasil survey respon positif	> Pastikan survei disusun merujuk template survei yang telah disusun BPO > Tingkat respon positif dihitung berdasarkan rata-rata hasil tanggapan/ Jawaban responden atas pertanyaan nomor 5 sampai dengan 9.
		5	Intensitas saling kunjung pejabat pemerintah Indonesia dengan negara akreditasi	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	Jumlah kunjungan antar pejabat pemerintah Indonesia dengan pejabat pemerintah negara akreditasi	Laporan Perwakilan RI	Pejabat pemerintah Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Kepala Badan/Lembaga/Komisariat Negara, Pimpinan Lembaga Legislatif Pusat dan Daerah (Tingkat I dan Tingkat II), Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua dan wakil ketua BPK, Gubernur dan Wakil Gubernur. Pejabat pemerintah di negara akreditasi adalah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Wakil Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Kepala Negara Bagian/Provinsi dan Menteri.
2	Diplomasi multilateral yang kuat	1	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral	KBRI Multilateral/PTRI	((Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima)/(Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia)) x 100%	Laporan Delegasi RI (Delri), Presidential/Chairman Statement, statement Delri, joint statement, report of the meeting, summary of discussion, summary record, joint communique, agreed minutes, declaration, agreements, Memorandum of Understanding (MoU), plan of action, work plan, treaty, charter, media release, joint press statement, Terms of References, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper/note and concept paper/note, framework, Element of working document, pledge, dan concord	> Diterima adalah dicatatnya prakarsa/rekomendasi di dalam dokumen sidang/pertemuan, yang mencerminkan penerimaan dari pihak lain atas prakarsa atau rekomendasi Indonesia yang dinilai bermanfaat dalam sidang/pertemuan forum multilateral. > Disampaikan adalah tersampainya posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum multilateral
		2	Persentase tindak lanjut yang dilakukan atas hasil kesepakatan di forum kerja sama multilateral	PTRI	(Jumlah tindak lanjut kesepakatan di forum kerja sama multilateral/Jumlah kesepakatan di forum kerja sama multilateral) x 100%	Laporan Delegasi RI (Delri), Presidential/Chairman Statement, Statement Delri, Dokumen Sidang Joint Statement, report of the meeting, summary of discussion, summary record, joint communique, agreed minutes, declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point of Intervention, agreements, Memorandum of Understanding plan of action, work plan, treaty, charter, media realese, joint press statement.	
3	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri ... yang Kuat	1	Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada	Seluruh Perwakilan RI	Perwakilan non PRPB (25% x capaian komponen 1) + (25% x capaian komponen 2) + (25% x capaian komponen 3) + (25% x capaian komponen 4) Capaian Komponen 1 = (Impresi dan Engagement Media Sosial Perwakilan yang terealisasi/ Target Impresi dan Engagement Media Sosial Perwakilan) x 100% Capaian Komponen 2 = (Berita yang diunggah pada Portal Perwakilan dalam Bahasa setempat/Bahasa Inggris yang terealisasi / Target Berita yang diunggah pada Portal Perwakilan dalam Bahasa setempat/Bahasa Inggris) x 100% Capaian Komponen 3 = (Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat yang terealisasi / Target Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat) x 100% Capaian Komponen 4 = (Engagement Perwakilan dengan media setempat yang terealisasi / Target Engagement Perwakilan dengan media setempat) x 100% Perwakilan PRBB (40% x capaian komponen 1) + (40% x capaian komponen 2) + (20% x capaian komponen 3) Capaian Komponen 1 = (Impresi dan Engagement Media Sosial Perwakilan yang terealisasi/ Target Impresi dan Engagement Media Sosial Perwakilan) x 100% Capaian Komponen 2 = (Berita yang diunggah pada Portal Perwakilan dalam Bahasa setempat/Bahasa Inggris yang terealisasi / Target Berita yang diunggah pada Portal Perwakilan dalam Bahasa setempat/Bahasa Inggris) x 100% Capaian Komponen 3 = (Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat yang terealisasi / Target Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat) x 100%	Laporan Impresi Engagement pada Media Sosial, Laporan berita yang diunggah pada portal Perwakilan RI dalam bahasa setempat / Bahasa Inggris, Laporan Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat (media massa, media online, tv, radio) dan Laporan Hasil Engagement Perwakilan dengan Media Setempat Perwakilan RI	> Agar memastikan telah menyusun dokumen pemetaan > memastikan sudah mendokumentasikan data impresi media sosial dan portal sepanjang tahun dari bulan Januari

4	Basis data yang akurat	1	Persentase WNI di negara akreditasi ... yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	(Jumlah WNI yang tercantum dan terverifikasi pada Portal Peduli WNI / Jumlah WNI yang lapor diri) x 100%	Database Portal Peduli WNI	> Data pembanding/pembagi adalah data Jumlah WNI yang telah lapor diri sepanjang periode tahun berjalan > Terverifikasi adalah WNI yang sudah terdaftar pada Portal Peduli WNI disertai dengan dokumen WNI yang diunggah oleh WNI sendiri dan/atau staf Perwakilan RI yang berwenang dan diverifikasi oleh Perwakilan RI sepanjang periode tahun berjalan
		2	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi ...	KBRI Bilateral/KBRI Multilateral/KJRI/KRI	Hasil Penilaian Laporan Data Economic Intelligence	Nilai DEI dari Ditjen Aspasaf/Ditjen Amerop	
Learning and Growth Perspective							
1	Tata kelola organisasi KBRI/PTRI/KJRI/KRI yang baik	1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI/PTRI/KJRI/KRI	Seluruh Perwakilan RI	Nilai AKIP yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemenlu	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal	
2	Pengelolaan aset KBRI/PTRI/KJRI/KRI... yang optimal	1	Indeks Pengelolaan BMN KBRI/PTRI/KJRI/KRI	Seluruh Perwakilan RI	Indeks Pengelolaan BMN Perwakilan RI	Berita penyampaian RKBMN; berita penyampaian LBKP; laporan tindak lanjut temuan BPK; dokumen kepemilikan (akta/sertifikat); polis asuransi; berita penyampaian wasda; data pada aplikasi SAKTI dan Monsakti; dan berita penyampaian PSP dan aplikasi SIMAN.	
3	Pengelolaan Anggaran KBRI/PTRI/KJRI/KRI..... yang Optimal dan Akuntabel	1	Nilai IKPA KBRI/PTRI/KJRI/KRI.....	Seluruh Perwakilan RI	Nilai IKPA KBRI/PTRI/KJRI/KRI.....	Aplikasi OMSPAN Kemenkeu	100% diambil dari Nilai IKPA

IK Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing

Formula $IK1 = (50\% * \text{Capaian Komponen 1}) + (50\% * \text{Capaian Komponen 2})$

Capaian Komponen 1 = $(\text{Komitmen perdagangan yang diperoleh} / \text{Target komitmen perdagangan}) \times 100\%$

Capaian Komponen 2 = $(\text{Potensi transaksi perdagangan yang terealisasi} / \text{Target potensi transaksi perdagangan}) \times 100\%$

Sumber Jumlah komitmen: Lol, MoU, kontrak, atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya komitmen transaksi perdagangan dan potensi transaksi perdagangan dari kedua belah pihak

Jumlah potensi transaksi: laporan brafaks perwakilan untuk kegiatan yang menghasilkan potensi transaksi, dan mencantumkan nilai potensi transaksi tersebut.

Periode Januari - Desember

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Realisasi	Target	Capaian Per Komponen	Bobot Capaian
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing	Komponen 1: Jumlah komitmen dan transaksi potensial perdagangan	16	15	106.67%	53.33%
	Komponen 2: Jumlah Komitmen dan transaksi potensial investasi	8	8	100.00%	50.00%
Realisasi					103.33%
Target					98.20%
Capaian					105.23%
Batas Toleransi Capaian					120.00%

Ket :
Jangan diedit, berisi formula

IK Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi ...

Komponen 1 - Jumlah komitmen perdagangan

Formula Jumlah komitmen perdagangan yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang dan forum kerja sama. Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis dan ditandatangani antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya dapat memuat nilai perdagangan yang disepakati.

Sumber Lol, MoU, kontrak, atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya komitmen transaksi perdagangan dan potensi transaksi perdagangan dari kedua belah pihak

Periode Januari - Desember

No	Judul Komitmen dan Transaksi Potensial Perdagangan yang Ditargetkan	Nilai Komitmen (dalam USD atau valuta asing lainnya)	Keterangan	Kodifikasi Data Dukung	Sektor
Semester I					
1	PT Etana dengan Grand Pharmaceuticals Wuhan dan Redstone Capital	USD 650,000,000	tanggal kesepakatan: 25 Mei 2025	Brafaks B-00159/BEIJING/250411	Kesehatan
2	MoU Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan RRT mengenai Penguatan Kerja Sama Ekonomi di Bidang Industri dan Rantai Pasok	USD 6,000,000,000	tanggal kesepakatan: 25 Mei 2025	Brafaks R-02848/KEMLU/250604	
3	MoU Trilateral antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan RRT, dan Pemerintah Provinsi Fujian Tiongkok mengenai proyek Two Countries Twin Parks	USD 30,000,000,000	tanggal kesepakatan: 25 Mei 2025	Brafaks R-02848/KEMLU/250604	
4	Bank Indonesia dan People's Bank of China menyepakati pembentukan Kerangka Kerja Sama Transaksi Bilateral dalam Mata Uang Lokal (local currency transaction framework)	USD 20,000,000,000	tanggal kesepakatan: 25 Mei 2025	Brafaks R-02848/KEMLU/250604	
5	Kerja Sama Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs RRT tentang inspeksi, karantina, dan persyaratan sanitasi untuk ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok	USD 10,000,000,000	tanggal kesepakatan: 25 Mei 2025	Brafaks R-02848/KEMLU/250604	
6	Kesepakatan Penguatan Hubungan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia	USD 20,000,000,000	tanggal kesepakatan: 25 Mei 2025	Brafaks R-02848/KEMLU/250604	
7	The 31st Lanzhou Investment and Trade Fair 2025	Nilai transaksi on the spot mencapai RMB 86.630 setara USD 12.363,73 dan potensi transaksi (business to business) mencapai USD 360,000	tanggal kesepakatan: 6 – 10 Juli 2025	Brafaks B-00302/Beijing/250717	
Semester II					
8	MOU CAMEX - GAPKI	potensi USD 5,000,000	tanggal kesepakatan 20 September 2025	008 - MoU GAPKI dan CAMEX China	
9	MOU kontrak Eksklusif KOMODO Maju Pangan - Shanghai HuangGuangE-Commerce Co.,Ltd	potensi USD 24,370		250920 MOU kontrak eksklusif komodo maju pangan	
10	Pameran the 28th annual China Fisheries & Seafood Expo '2025 di Qingdao, Provinsi Shandong	nilai transaksi on the spot sebesar USD 20.000.000 dan Potensi transaksi (Business to Business) mencapai USD 50.000.000	tanggal kesepakatan 29 - 31 Oktober 2025	SKL-25-0405 20251118 Laporan perjalanan dinas partisipasi pada Pameran the 28th annual China Fisheries & Seafood Expo '2025 tanggal 29 - 31 Oktober 2025 di Qingdao, Shandong, Tiongkok	
11	MOU PT Walet Teluk Naga dengan Fujian Trading Technology Group Co. Ltd	USD 1,000,000,000	tanggal kesepakatan 17 Oktober 2025	251017 Draft MoU WTN	
12	MOU Repeat Order TGP - Xiamen Maodi Jiuzhou International Trading Co.,Ltd	USD 21,000,000	tanggal kesepakatan 20 Oktober 2026	250920 PO Pineapple China	
13	Trade Expo Indonesia : MOU Repeat Order Shanghai Superfresh Trading Co.ltd dan Guangzhou Kunhai Supply Chain Co.Ltd bersama PT. Bintang Kiat kemuliaan	USD 25,000,000	tanggal kesepakatan 15 -19 Oktober 2025	Brafaks B-00506/Beijing/251107	
14	Trade Expo Indonesia : MOU Repeat Order PT Maritim Timur Jaya	USD 1,200,000,000	tanggal kesepakatan 15 -19 Oktober 2025	Brafaks B-00506/Beijing/251107	
15	Trade Expo Indonesia : MOU Repeat Order CV. Mandiri Kopi & China Light Merchandise IMP & EXP Corn	USD 10,000,000	tanggal kesepakatan 15 -19 Oktober 2025	Brafaks B-00506/Beijing/251107	
16	Trade Expo Indonesia : MOU Repeat Order PT. Natura Karunia Agung bersama Zhezhenbu(Guangdong)Healthy Technology Co.,Ltd dan Zhezhenbu(Guangdong)Healthy Technology Co.,Ltd	USD 25,000,000	tanggal kesepakatan 15 -19 Oktober 2025	Brafaks B-00506/Beijing/251107	
Jumlah komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing					16
Target komitmen perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Beijing					15
Capaian Komponen 1					106.67%

NOTE:

- 1 Jangan diedit, berisi formula
- 2 Jika akan menambahkan realisasi, bisa di klik kanan kemudian insert

IK Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi ...

Formula $IK\ 2 = (50\% * \text{Capaian Komponen 1}) + (50\% * \text{Capaian Komponen 2})$

Capaian Komponen 1 = $(\text{Komitmen investasi outbound yang diperoleh} / \text{Target komitmen investasi outbound}) \times 100\%$

Capaian Komponen 2 = $(\text{Potensi transaksi investasi outbound yang terealisasi} / \text{Target potensi transaksi investasi outbound}) \times 100\%$

Sumber Jumlah komitmen: Lol, MoU, kontrak, atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya komitmen transaksi investasi dan potensi transaksi investasi dari kedua belah pihak

Jumlah potensi transaksi: laporan brafaks perwakilan untuk kegiatan yang menghasilkan potensi transaksi, dan mencantumkan nilai potensi transaksi tersebut.

Periode Januari - Desember

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Realisasi	Target	Capaian Per Komponen	Bobot Capaian
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi ...	Komponen 1: Jumlah komitmen investasi	16	8	200.00%	100.00%
	Komponen 2: Jumlah potensi transaksi investasi	8	8	100.00%	50.00%
Realisasi					150.00%
Target					98.20%
Capaian					152.75%
Batas Toleransi Capaian					120.00%

Ket :

Jangan diedit, berisi formula

IK Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Beijing

Komponen 1 - Jumlah komitmen investasi

Formula jumlah komitmen investasi yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi dan forum kerja sama. Jumlah komitmen investasi dihitung untuk suatu negara akreditasi. Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis dan ditandatangani antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya dapat memuat nilai investasi yang disepakati.

Sumber Lol, MoU, kontrak, atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya komitmen transaksi investasi dan potensi transaksi investasi dari kedua belah pihak

Periode Januari - Desember

No	Judul Komitmen dan Transaksi Potensial Perdagangan yang Ditargetkan	Nilai Komitmen (dalam USD atau valuta asing lainnya)	Keterangan	Kodifikasi Data Dukung	Sektor	
Semester I						
1						
2						
Semester II						
1	JASON FURNITURE	15,250,000,000	One-on-One Meeting, 10 November 2025. akan bekerja sama dengan perusahaan Indonesia, PT Kaka Furniture Industry	NKU Tahun 2025	Furniture	
2	SINO TRUCK	10,010,000,000	Business Forum New Energy Chain, Jiading, 7-8 November 2025. akan bekerja sama dengan PT Sinotruk Indonesia Jaya	NKU Tahun 2025	Transportasi	
3	isoftstone	12,000,000,000	KBRI Beijing, 30 Desember 2025. akan bekerja sama dengan PT ISOFTSTONE Software Indonesia	NKU Tahun 2025	Digital / IT	
4	CECC Group	51,000,000,000	KBRI Beijing, 16 Desember 2025. Akan bekerja sama dengan PT CCECC Group Indonesia	NKU Tahun 2025	Infrastruktur	
5	CECC Group	26,159,712,106,206	KBRI Beijing, 16 Desember 2025. Akan bekerja sama dengan PT Shenhuo Guohua Pembangkit	NKU Tahun 2025		
6	CECC Group	7,700,000,000	KBRI Beijing, 16 Desember 2025. Akan bekerja sama dengan PT Penta Dharma Karsa	NKU Tahun 2025		
7	CECC Group	6,500,000,000	KBRI Beijing, 16 Desember 2025. Akan bekerja sama dengan PT Penta Dharma Karsa	NKU Tahun 2025		
8	CECC Group	11,250,000,000	KBRI Beijing, 16 Desember 2025. Akan bekerja sama dengan PT Qing Feng Ferrochrome	NKU Tahun 2025		
9	CECC Group	157,666,323,009	KBRI Beijing, 16 Desember 2025. Akan bekerja sama dengan PT Phoenix Resources International	NKU Tahun 2025		
10	CECC Group	23,189,856,723,791	KBRI Beijing, 16 Desember 2025. Akan bekerja sama dengan PT Phoenix Resources International	NKU Tahun 2025		
11	CECC Group	32,882,388,400	KBRI Beijing, 16 Desember 2025. Akan bekerja sama dengan PT ACE Medical Products Indonesia	NKU Tahun 2025		
12	Freenow	776,000,000,000	CIE, 4-6 November 2025. Akan bekerja sama dengan PT Freenow Food Indonesia	NB Tahun 2025		Makanan
13	Freenow	11,000,000,000	CIE, 4-6 November 2025. Akan bekerja sama dengan PT Freenow Food Indonesia	NB Tahun 2025		Makanan
14	Delong Steel	10,100,000,000	Kunjungan Kerja Menteri Investasi dan Hilirisasi, 28 Agustus 2025. Akan bekerja sama dengan PT Dexin Steel Indonesia	NKU Tahun 2025	Besi dan Baja	
15	GEM	10,000,000,100	Kunjungan Kerja Menteri Investasi dan Hilirisasi, 25 Agustus 2025. Akan bekerja sama dengan PT GEM Indonesia Scraped Vehicle	NB Tahun 2025	Green Economy	
16	Wechai Power	10,500,000,000	Business Forum New Energy Chain, Jiading, 7-8 November 2025. Akan bekerja sama dengan PT Wechai Indonesia Utama	NKU Tahun 2025	Energi	
Jumlah komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Beijing					16	
Target komitmen investasi dengan negara akreditasi KBRI Beijing					1	
Capaian Komponen 1					1600.00%	

NOTE:

- Jangan diedit, berisi formula
- Jika akan menambahkan realisasi, bisa di klik kanan kemudian insert

IK Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja KBRI Beijing

Formula : Indeks citra Indonesia di wilayah kerja = (Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden) / (Jumlah Total Responden)

Sumber : Data survey citra Indonesia di Dunia Internasional oleh Perwakilan RI, dengan menggunakan database website melalui tautan <https://citraindonesia.kemlu.go.id>

Periode	Dimensi			Total Rata-rata Persepsi per Responden	Total Responden	Indeks Citra	Kodifikasi Data Dukung
	Pariwisata dan Sosial Budaya	Ekonomi	Pemerintahan dan Penegakkan Hukum				
Triwulan I	4,10	4,02	3,84	67,78	17	3,99	Brafaks Nomor B-02095/KEMLU/250423
Triwulan II	4,62	4,27	4,21	737,56	169	4,36	Brafaks Nomor B-03656/KEMLU/25070
Triwulan III	4,62	4,27	4,21	1705,33	404	4,22	Brafaks Nomor B-05996/KEMLU/251011
Triwulan IV	4,44	4,20	4,11	2408,32	568	4,24	Brafaks Nomor B-00088/KEMLU/260108

Contoh:

* Mohon lampirkan beberapa sampel kuesioner yang telah diisi oleh responden

- Mohon lampirkan data dukung berupa brafaks dari Ditjen IDP mengenai hasil verifikasi indeks citra seluruh Perwakilan

Komponen 1 (Impresi dan engagement media sosial Perwakilan)				Penghitungan Output per Platform															
Tracking IKU Bulanan Medsos		Link Analytics Portal & Medsos		Capaian Triwulanan		No	Bulan	Twitter		Facebook		Instagram		Youtube	Caput Bulanan (Bukan untuk IK)	Hitungan Per Triwulan		Hitungan Kumulatif (Untuk IK/NCKO)	
								TW Engagement	TW Impressions	FB Engagement	FB Reach	IG Engagement	IG Reach	YT Views*					
Jan	228.732			628,901	1	Januari	0	0	48	1.734	15.372	223.852	3.146	15.420		Triwulan I			
Feb	235.335				2	Februari	0	0	38	1.686	15.274	230.584	3.065	15.312					
Mar	164.824				3	Maret	0	0	51	2.195	13.298	154.421	8.218	13.349		Medsos	628,901	628,901	
Apr	92.401			279,915	4	April	0	0	68	2.632	6.748	85.791	3.978	6.816		Triwulan II			
Mei	102.828				5	Mei	0	0	79	3.733	9.265	96.000	3.095	9.344					
Jun	84.686				6	Juni	0	0	43	2.274	7.308	79.587	2.825	7.351		Medsos	279,915	908,816	
Jul	223.445			761,149	7	Juli	0	0	67	3.422	25.179	215.404	4.619	25.246		Triwulan III			
Agst	298.210				8	Agustus	0	0	33	4.259	25.550	286.023	7.928	25.583					
Sep	239.494				9	September	0	0	65	3.459	44.247	165.289	70.746	44.312		Medsos	761,149	1,669,965	
Oktr	163.361			481,322	10	Oktober	0	0	92	4.351	2.938	155.000	4.010	3.030		Triwulan IV			
Nov	172.281				11	November	0	0	20	1.943	2.283	167.000	3.338	2.303					
Des	145.680				12	Desember	0	0	2	983	1.431	138.000	6.697	1.433		Medsos	315,035	1,985,000	
Target		2.151.287																	
Capaian		1.500.000																	
%		143,42%																	

Social Media Impression/Reach & Engagement

Legend: Twitter TW Engagement, Twitter TW Impressions, Facebook FB Engagement, Facebook FB Reach, Instagram IG Engagement, Instagram IG Reach, Youtube YT Views*

Masukan untuk Perwakilan:
 Hitung Engagement per bulan agar ter-tracking capaiannya dan dapat dilakukan selective claim jika terjadi lonjakan capaian sehingga tidak melampaui target tahunan yang ditetapkan (tidak anomali)

Komponen 2 (Berita yang diunggah)			
No.	Berita yang diunggah	Tanggal Posting	Link
1	Media Gathering Kabar Terkini dari Indonesia di Gelar di KBRI Beijing	28-Feb-25	https://mediaindonesia.com/internasional/747865/media-gathering-kabar-terkini-dari-indonesia-di-gelar-di-kbri-beijing
2	Tiongkok akan Tetap Menjadi Salah Satu dari Tiga Sumber Investasi Asing Teratas di Indonesia	27-Feb-25	https://www.kompasiana.com/tilianalle2123/67c03aded64351bfb627762/Tiongkok-akan-tetap-menjadi-salah-satu-dari-tiga-sumber-investasi-asing-teratas-di-indonesia
3	Indonesia Ingin Perluas Destinasi yang Tersedia untuk Wisatawan Asing	28-Feb-25	https://www.kompasiana.com/tilianalle2123/67c0347774d6f66ca7fa0e5a17a1e-perluas-destinasi-yang-tersedia-untuk-wisatawan-asing
4	75 Tahun Kemiraan RI-RRT: Momentum Perkuat Kerja sama Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Hijau	13-Jun-25	https://mediaindonesia.com/humaniora/782067/75-tahun-kemiraan-ri-rt-momentum-perkuat-kerja-sama-energi-baru-dan-terbarukan-serta-pembangunan-hijau
5	ANTARA	28 Februari 2025	https://m.antaranews.com/video/4679337/bercengkrama-bersama-jumalis-china-di-wisma-indonesia-beijing
6	ANTARA	27 Februari 2025	https://m.antaranews.com/berita/4678765/kbri-beijing-kemirakan-politik-kar-anggot-eta-orabow-ke-media-china?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=related_news
7	ANTARA	27 Februari 2025	https://m.antaranews.com/berita/4678713/kbri-beijing-ajak-media-china-promosikan-wisata-unggulan-indonesia?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=related_news
8	ANTARA	27 Februari 2025	https://m.antaranews.com/berita/4678917/media-china-jaga-tahu-seal-dianantara-kara-dubey-ri
9	ANTARA	28 Februari 2025	https://m.antaranews.com/berita/4679957/kbri-di-china-harapkan-mitra-di-china-manfaatkan-golden-visa-ri?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=related_news
10	KBRI Beijing gelar Sholat Idul Fitri untuk WNI	31 Maret 2025	https://amadhan.antaranews.com/foto/4747413/kbri-beijing-gelar-sholat-idul-fitri-untuk-wni
11	Kehangatan Idul Fitri di Awal Musim Semi di KBRI Beijing	31 Maret 2025	https://indonesia.cc.co/2025/03/31/ARTI1743402843145730
12	Menlu Sugiono: 75 Tahun Diplomatik RI-China Era Baru Kemiraan yang Lebih Luas	22 April 2025	https://kumparan.com/kumparanews/menlu-sugiono-75-tahun-diplomatik-ri-china-era-baru-kemiraan-yang-lebih-luas-72vnh8c79

IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Beijing

Formula : Untuk nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan wni dihitung sebagai berikut:

- a. Untuk realisasi Triwulan I (Nilai Persepsi TW I) = rata-rata kuesioner Januari s.d. Maret.
- b. Untuk realisasi Triwulan II (Nilai Persepsi TW II) = rata-rata kuesioner April s.d. Juni.
- c. Untuk realisasi Triwulan III (Nilai Persepsi TW III) = rata-rata kuesioner Juli s.d. September.
- d. Untuk realisasi Triwulan IV = [(rata-rata kuesioner Oktober s.d. Desember) + (Nilai Persepsi TW I + Nilai Persepsi TW II + Nilai Persepsi TW III)] / 4.

Sumber : Hasil survei atau kuesioner kepuasan pelayanan pelindungan WNI di Perwakilan RI

Catatan:

- Kolom hijau adalah kolom yang perlu diinput manual sesuai jumlah respon yang dihasilkan berdasarkan survei.
- Kolom kuning berisi rumus yang sudah diatur untuk membantu perhitungan nilai. Mohon untuk tidak menghapus.

TRIWULAN I													
No.	Pertanyaan	Sangat Puas	Bobot SP	Puas	Bobot P	Tidak Puas	Bobot TP	Sangat Tidak Puas	Bobot STP	Tidak Valid	Bobot TV	Responden	Total Bobot
		4		3		2		1		0			
1	KBRI telah menetapkan standar prosedur operasional (SOP) pelayanan yang dipasang di ruang pelayanan publik/website/media sosial, apakah Anda merasa puas dengan kejelasan syarat penerimaan pelayanan kekonsuleran/pelayanan pelindungan WNI?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
2	Apakah Anda puas dengan kesesuaian pelaksanaan prosedur pelayanan kekonsuleran/pelayanan pelindungan WNI dengan SOP tersebut?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
3	Dalam SOP tersebut, tercantum lama waktu tahap pelayanan kekonsuleran/pelayanan pelindungan WNI. Apakah Anda puas dengan kesesuaian waktu pelayanan kekonsuleran/pelindungan WNI dengan SOP tersebut?	87	348	1	3	2	4	0	0	0	0	90	355
4	Berdasarkan SOP tersebut dan peraturan pemerintah Indonesia yang telah dijelaskan oleh petugas atau yang Anda ketahui, apakah pelayanan kekonsuleran/pelindungan WNI yang diberikan telah tepat?	88	352	2	6	0	0	0	0	0	0	90	358
5	KBRI telah menetapkan biaya dan tarif pelayanan sesuai peraturan pemerintah Indonesia dan memasangkannya di ruang pelayanan publik/website, apakah biaya yang ditagihkan oleh KBRI kepada Anda telah sesuai?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
6	Pejabat/petugas telah memberikan penjelasan dan pelayanan kekonsuleran/pelindungan WNI yang Anda minta, apakah Anda puas dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
7	Apakah Anda puas dengan sikap pejabat/petugas dalam memberikan pelayanan kekonsuleran/pelayanan pelindungan WNI?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
8	Apakah Anda puas dengan penanganan pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan kekonsuleran/pelindungan WNI di KBRI?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
9	Apakah Anda puas dengan kelengkapan sarana dan prasarana tempat pelayanan kekonsuleran/pelayanan pelindungan WNI?	86	344	0	0	4	8	0	0	0	0	90	352
10	Apakah Anda puas dengan kenyamanan tempat pelayanan kekonsuleran/pelayanan pelindungan WNI?	86	344	0	0	4	8	0	0	0	0	90	352
												Total Responden	90
												Total Bobot	3222
												Total Pertanyaan	10
												Total Bobot / Total Responden	35.80
												Nilai Perhitungan Kuesioner TW I	3.58
												Nilai Persepsi TW I	4

TRIWULAN II

No.	Pertanyaan	Sangat Puas	Bobot SP	Puas	Bobot P	Tidak Puas	Bobot TP	Sangat Tidak Puas	Bobot STP	Tidak Valid	Bobot TV	Responden	Total Bobot
		4		3		2		1		0			
1	KBRI telah menetapkan standar prosedur operasional (SOP) pelayanan yang dipasang di ruang pelayanan publik/website/media sosial, apakah Anda merasa puas dengan kejelasan syarat penerimaan pelayanan konsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
2	Apakah Anda puas dengan kesesuaian pelaksanaan prosedur pelayanan konsuleran/pelayanan perlindungan WNI dengan SOP tersebut?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
3	Dalam SOP tersebut, tercantum lama waktu tahap pelayanan konsuleran/pelayanan perlindungan WNI. Apakah Anda puas dengan kesesuaian waktu pelayanan konsuleran/pelayanan WNI dengan SOP tersebut?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
4	Berdasarkan SOP tersebut dan peraturan pemerintah Indonesia yang telah dijelaskan oleh petugas atau yang Anda ketahui, apakah pelayanan konsuleran/pelayanan WNI yang diberikan telah tepat?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
5	KBRI telah menetapkan biaya dan tarif pelayanan sesuai peraturan pemerintah Indonesia dan memasangnya di ruang pelayanan publik/website, apakah biaya yang ditagihkan oleh KBRI kepada Anda telah sesuai?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
6	Pejabat/petugas telah memberikan penjelasan dan pelayanan konsuleran/pelayanan WNI yang Anda minta, apakah Anda puas dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
7	Apakah Anda puas dengan sikap pejabat/petugas dalam memberikan pelayanan konsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
8	Apakah Anda puas dengan penanganan pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan konsuleran/pelayanan WNI di KBRI?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
9	Apakah Anda puas dengan kelengkapan sarana dan prasarana tempat pelayanan konsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	88	352	0	0	2	4	0	0	0	0	90	356
10	Apakah Anda puas dengan kenyamanan tempat pelayanan konsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	88	352	0	0	2	4	0	0	0	0	90	356
Total Responden												90	
Total Bobot												3589	
Total Pertanyaan												10	
Total Bobot / Total Responden												39.88	
Nilai Perhitungan Kuesioner TW II												3.99	
Nilai Rata-Rata Kuesioner												3.78	
Nilai Persepsi TW II												4	

TRIWULAN III

No.	Pertanyaan	Sangat Puas	Bobot SP	Puas	Bobot P	Tidak Puas	Bobot TP	Sangat Tidak Puas	Bobot STP	Tidak Valid	Bobot TV	Responden	Total Bobot
		4		3		2		1		0			
1	KBRI telah menetapkan standar prosedur operasional (SOP) pelayanan yang dipasang di ruang pelayanan publik/website/media sosial, apakah Anda merasa puas dengan kejelasan syarat penerimaan pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
2	Apakah Anda puas dengan kesesuaian pelaksanaan prosedur pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI dengan SOP tersebut?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
3	Dalam SOP tersebut, tercantum lama waktu tahap pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI. Apakah Anda puas dengan kesesuaian waktu pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI dengan SOP tersebut?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
4	Berdasarkan SOP tersebut dan peraturan pemerintah Indonesia yang telah dijelaskan oleh petugas atau yang Anda ketahui, apakah pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI yang diberikan telah tepat?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
5	KBRI telah menetapkan biaya dan tarif pelayanan sesuai peraturan pemerintah Indonesia dan memasangkannya di ruang pelayanan publik/website, apakah biaya yang ditagihkan oleh KBRI kepada Anda telah sesuai?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
6	Pejabat/petugas telah memberikan penjelasan dan pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI yang Anda minta, apakah Anda puas dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
7	Apakah Anda puas dengan sikap pejabat/petugas dalam memberikan pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
8	Apakah Anda puas dengan penanganan pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI di KBRI?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
9	Apakah Anda puas dengan kelengkapan sarana dan prasarana tempat pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	88	352	0	0	2	4	0	0	0	0	90	356
10	Apakah Anda puas dengan kenyamanan tempat pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	88	352	0	0	2	4	0	0	0	0	90	356
												Total Responden	90
												Total Bobot	3589
												Total Pertanyaan	10
												Total Bobot / Total Responden	39.88
												Nilai Perhitungan Kuesioner TW II	3.99
												Nilai Rata-Rata Kuesioner	3.99
												Nilai Persepsi TW II	4

TRIWULAN IV

No.	Pertanyaan	Sangat Puas	Bobot SP	Puas	Bobot P	Tidak Puas	Bobot TP	Sangat Tidak Puas	Bobot STP	Tidak Valid	Bobot TV	Responden	Total Bobot
		4		3		2		1		0			
1	KBRI telah menetapkan standar prosedur operasional (SOP) pelayanan yang dipasang di ruang pelayanan publik/website/media sosial, apakah Anda merasa puas dengan kejelasan syarat penerimaan pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	85	340	5	15	0	0	0	0	0	0	90	355
2	Apakah Anda puas dengan kesesuaian pelaksanaan prosedur pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI dengan SOP tersebut?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
3	Dalam SOP tersebut, tercantum lama waktu tahap pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI. Apakah Anda puas dengan kesesuaian waktu pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI dengan SOP tersebut?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
4	Berdasarkan SOP tersebut dan peraturan pemerintah Indonesia yang telah dijelaskan oleh petugas atau yang Anda ketahui, apakah pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI yang diberikan telah tepat?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
5	KBRI telah menetapkan biaya dan tarif pelayanan sesuai peraturan pemerintah Indonesia dan memasangnya di ruang pelayanan publik/website, apakah biaya yang ditagihkan oleh KBRI kepada Anda telah sesuai?	85	340	5	15	0	0	0	0	0	0	90	355
6	Pejabat/petugas telah memberikan penjelasan dan pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI yang Anda minta, apakah Anda puas dengan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
7	Apakah Anda puas dengan sikap pejabat/petugas dalam memberikan pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	90	360	0	0	0	0	0	0	0	0	90	360
8	Apakah Anda puas dengan penanganan pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI di KBRI?	89	356	1	3	0	0	0	0	0	0	90	359
9	Apakah Anda puas dengan kelengkapan sarana dan prasarana tempat pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	88	352	0	0	2	4	0	0	0	0	90	356
10	Apakah Anda puas dengan kenyamanan tempat pelayanan kekonsuleran/pelayanan perlindungan WNI?	88	352	0	0	2	4	0	0	0	0	90	356
Total Responden												90	
Total Bobot												3579	
Total Pertanyaan												10	
Total Bobot / Total Responden												39.77	
Nilai Perhitungan Kuesioner TW II												3.98	
Nilai Rata-Rata Kuesioner												3.98	
Nilai Persepsi TW II												4	

IK 1 Persentase kasus WNI di negara akreditasi/wilayah kerja KBRI/KJRI/KRI ... yang diselesaikan

Formulasi ((55% Jumlah Kasus Khusus WNI yang Diselesaikan/Total kasus khusus WNI yang ditangani) + ((45% Jumlah Kasus Umum WNI yang Diselesaikan/Total kasus umum WNI yang ditangani))

Sumber Laporan penanganan kasus, database Portal Peduli WNI, dan Berita Acara Serah Terima Penanganan Kasus

Bobot Kasus Khusus 55% dan Kasus Umum 45%

Catatan : WNI dapat mengalami beberapa kasus

- Kasus Khusus adalah kasus WNI di luar negeri yang berdasarkan asesmen Perwakilan dan/atau Pusat dikategorikan sebagai high profile case

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus yang diselesaikan				Jumlah Kasus yang ditangani				Kodifikasi Data Dukung
		s.d. TW I	s.d. TW II	s.d. TW III	s.d. TW IV	s.d. TW I	s.d. TW II	s.d. TW III	s.d. TW IV	
	TOTAL KASUS UMUM	0	0	0	169	0	0	0	155	
1	Pidana				4				3	Portal Peduli WNI
2	Imigrasi				129				118	
3	Ketenagakerjaan				26				24	
4	Meninggal Dunia				8				8	
5	Terancam Hukuman Mati				0				0	
6	Kedaruratan				0				0	
7	Tindak Pidana Perdagangan Orang				0				0	
8	Lainnya				2				2	
	TOTAL KASUS KHUSUS	0	0	0	12	0	0	0	12	
1	Pidana									Portal Peduli WNI
2	Imigrasi				12				12	
3	Meninggal Dunia									
4	Terancam Hukuman Mati									
5	Ketenagakerjaan									
6	Kedaruratan									
7	Tindak Pidana Perdagangan Orang									
8	Lainnya									
	TOTAL KASUS	0	0	0	181	0	0	0	167	

*Merujuk Laporan Perwakilan atau Portal Peduli WNI

** Data yang diinput bersifat akumulatif sbb:

TW I = TW I

TW II = TW I + TW II

TW III = TW I + TW II + TW III

TW IV = TW I + TW II + TW III + TW IV

DATA KASUS PER JENIS KASUS 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020 PER PROVINSI REPUBLIK INDONESIA																																					
Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Kategori Kasus	Jenis Kasus																Jenis Kasus																
					Pada	Ingat	Kelelahan	Meninggal Dunia	Terpapar Substansi Merak	Indikasi	Tidak Pernah Pergerakan Orang	Lainnya	Jumlah	Pada	Ingat	Kelelahan	Meninggal Dunia	Terpapar Substansi Merak	Indikasi	Tidak Pernah Pergerakan Orang	Lainnya	Jumlah															
					Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah	Salah

IK 1 Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing

Formula : (Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti/diimplementasikan / Jumlah rencana kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi/wilayah kerja beserta negara rangkapan yang akan ditindaklanjuti sesuai dokumen pemetaan) * 100%

Sumber : Dokumen laporan dari tindak lanjut kesepakatan berdasarkan pertemuan/kegiatan, brafaks perwakilan, surat dari/kepada K/L teknis, pernyataan pers, liputan media, pidato pejabat, website treaty room

Catatan : Merujuk Manual IKU, dokumen pemetaan adalah rekapitulasi rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dan disusun di awal tahun

No	Nama Kesepakatan Kerjasama	Direncanakan untuk ditindaklanjuti	Telah/Belum Ditindaklanjuti	Kegiatan TL dilakukan pada				Kodifikasi Data Dukung
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future (November 2024)	✓	✓	The First China Coast Guard and Bakamla RI High Level Meeting in Beijing, 11 Januari 2025 Kunjungan dan Pertemuan Menteri Pertahanan RI dengan Menteri Pertahanan RRT, 22 Januari 2025	Pertemuan 2+2 Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI-RRT, 21 April 2025 Kunjungan Kerja Delegasi Dewan Ekonomi Nasional ke Beijing, 21 - 22 Mei 2025 Intergovernmental Joint Steering Committee RI-RRT, 25 Juni 2025		Joint Working Group RI-RRT, 22 Oktober 2025 Pertemuan Menteri Perhubungan dengan Minister of Transport, Li Xiaopeng di Beijing, November 2025, 11-13 November 2025	R-0073/Beijing/250424, R-00215/Beijing/251027 R-00095/Beijing/250521, B-00526/Beijing/251125 R-00121/Beijing/250701
2	MoU Kerja Sama Penyiaran antara TVRI dan CMG	✓	✓				Kunjungan Direktur Utama TVRI sebagai panelis pada the1st Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) AI Forum dan Pertemuan dengan China Media Group, 22-25 Juli 2025	B-00327/Beijing/250731
3	Tindak Lanjut Hasil Indonesia-Africa Forum ke-2, 2 September 2024	✓	✓				Kunjungan dan Pertemuan Tim Direktorat Afrika dengan Kedutaan Besar Non-Residen Negara Afrika di Beijing, 3-9 Agustus 2025	B-00357/Beijing/250815
4	Agreement on Further Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation (16 November 2022)	✓	✓				Pertemuan Wamenperind dan Xin Guobin, Vice Minister of Industry and Information Technology di Xiamen, 15 September 2025 Pertemuan Menteri Investasi dan Vice Chairman NDRC, 28 Agustus 2025	B-00425/Beijing/250929 R-00181/Beijing/250911
5	MOU on Cooperation in Rural Development and Poverty Alleviation (17 Oktober 2023)	✓	✓				Kunjungan Wamen Desa PDT bersama 22 kepala desa, 30 Oktober 2025 - 5 November 2025	B-00512/Beijing/251112
6	MoU on Regulatory Cooperation of Pharmaceutical Products and Cosmetics (2021)	✓	✓				Pertemuan Kepala BPOM dan Commissioner Li Li, National Medical Product Administration ke Beijing, 11 November 2025	B-00525/Beijing/251125
7	MoU Kemendikbudristek dan Kementerian Pendidikan RRT tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan Bahasa Mandarin	✓	✓				Pertemuan antara Gubernur NTT dan CLEC untuk membahas tindak lanjut, 14 November 2025	https://www.suarantt.id/ntt-jajaki-kerja-sama-pengembangan-pembelajaran-bahasa-mandarin-dengan-pemerintah-tiongkok/
8	Kerja Sama Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs RRT tentang inspeksi, karantina, dan persyaratan sanitasi untuk ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok, 25 Mei 2025	✓	✓				Kunjungan Kepala Badan Karantina ke RRT dan Pertemuan dengan GACC, 22 November 2025	B-00522/Beijing/251122
9	Kerja Sama Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs RRT tentang inspeksi, karantina, dan persyaratan sanitasi untuk ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok	✓	✓				Ekspor Perdana Durian Beku ke RRT, 15 Desember 2025	https://www.tempo.co/ekonomi/indonesia-eksport-durian-beku-perdana-ke-cina-seberat-48-ton-2099167
Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti/diimplementasikan								9
Jumlah rencana kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi/wilayah kerja beserta negara rangkapan yang akan ditindaklanjuti sesuai dokumen pemetaan rencana kesepakatan								9
Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara akreditasi/wilayah kerja KBRI Beijing								100.00%

NOTE

Yang dihitung sebagai realisasi adalah jumlah kesepakatan bukan kegiatan tindak lanjutnya. Dimana jika 1 kesepakatan ditindaklanjuti melalui beberapa kegiatan, tetap dihitung 1/1=100%

IK Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Beijing

Formulasi : Jumlah kesepakatan yang dihasilkan
 Sumber : Records of Discussion (RoD), Naskah Kesepakatan, Diplomatic Notes, Joint Statement, Declaration, Joint Communiqué, Letter of Intent, Chairman's Note, Memorandum of Understanding, Exchange of Notes, Summary Record, Agreed Minutes, Treaty, Minutes of Meeting, Laporan Perwakilan RI.

Periode : Jumlah kesepakatan yang disepakati selama satu periode anggaran

No	Nama Kesepakatan	Bidang	Keterangan	Kodifikasi Data Dukung
1	MoU on Establishing Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) RI – RRT	Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	21 April 2025	Brafaks Laporan Kunker Menlu ke Beijing 2+2, Nomor R-00073/Beijing/250424
2	Pembentukan Consultation on Disarmament, Non-Proliferation, and Arms Control Kemlu RI – Kemlu RRT	Pertahanan	21 April 2025	Brafaks Laporan Kunker Menlu ke Beijing 2+2, Nomor R-00073/Beijing/250424
3	MoU Kerja Sama Keamanan Maritim antara Bakamla dan China Coast Guard (CCG)	Maritim	21 April 2025	Brafaks Laporan Kunker Menlu ke Beijing 2+2, Nomor R-00073/Beijing/250424
4	Peresmian Pembukaan KJRI Chengdu	Politik	21 April 2025	Brafaks Laporan Kunker Menlu ke Beijing 2+2, Nomor R-00073/Beijing/250424
5	MoU on Political Consultation RI-Mongolia	Politik	21 Mei 2025	Press Release Kementerian Luar Negeri bulan Mei 2025
6	MoU mengenai Penguatan Kerja Sama Ekonomi di Bidang Industri dan Rantai Pasok antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan RRT	Ekonomi	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
7	MoU trilateral antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan RRT, dan Pemerintah Provinsi Fujian Tiongkok mengenai proyek Two Countries Twin Parks	Sosial Budaya	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
8	Bank Indonesia dan People's Bank of China menyetujui pembentukan Kerangka Kerja Sama Transaksi Bilateral dalam Mata Uang Lokal (local currency transaction framework)	Keuangan	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
9	MoU Dewan Ekonomi Nasional RI dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi	Ekonomi	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
10	MoU antara Kementerian Pariwisata RI dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RRT mengenai Kolaborasi di Sektor Pariwisata dan Mempromosikan Arus Pariwisata Kedua Negara	Sosial Budaya	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
11	Kerja Sama Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs RRT tentang inspeksi, karantina, dan persyaratan sanitasi untuk ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok	Ekonomi	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
12	Kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dan National Administration of Traditional Chinese Medicine RRT mengenai pengobatan tradisional Tiongkok	Kesehatan	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
13	Kerja sama antara Kementerian Kesehatan RI dan National Administration of Disease Control and Prevention RRT terkait kerja sama pencegahan dan pengendalian TBC	Kesehatan	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
14	Kerja sama investasi antara Danantara dan China Investment Corporation	Ekonomi	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
15	Kesepakatan Penguatan Hubungan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia	Ekonomi	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
16	Kerja Sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan Xinhua News Agency dalam bidang Pemberitaan dan Pertukaran Informasi	Sosial Budaya	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
17	Kerja Sama Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan China Media Group mengenai Kolaborasi dan Kerja Sama di bidang Media	Sosial Budaya	25 Mei 2025	Press Release Sekretariat Kabinet RI pada 25 Mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dan-premier-li-qiang-saksikan-penandatanganan-12-nota-kesepahaman-strategis-ri-tiongkok/
18	Minutes of Meeting Intergovernmental Joint Steering Committee RI-RRT di Xiamen	Politik, Ekonomi, Sosi	25 Juni 2025	Brafaks Nomor R-00121-Beijing/250701
19	Memorandum of Understanding Between the Ministry of Communications and Digital Affairs of The Republic of Indonesia and the State Post Bureau of The People's Republic of China on Strengthening Cooperation in The Field of Postal Services	Sosial Budaya	30 Juli 2025	Brafaks Nomor B-00327/Beijing/250731
20	Arrangement Between the Directorate General of Digital Ecosystems of The Ministry of Communications and Digital Affairs of The Republic of Indonesia and China National Philatelic Co., Ltd. Of The People's Republic of China Concerning Joint Issue of Stamps	Sosial Budaya	31 Juli 2025	Brafaks nomor B-00339/Beijing/250808
21	Nanning Initiative for the China-ASEAN Industry Ministerial Roundtable Meeting	Ekonomi	17 September 2025	Brafaks nomor B-00425/Beijing/250929
22	Quarantine Protocol for Fish Meal, Fish Oil, and Other Aquatic Animal Protein	Ekonomi	12 November 2025	Brafaks Nomor B-00522/Beijing/251122
23	MoU antara Kementerian Kesehatan RI dan Beijing Chaoyang Hospital untuk Coronary Intervention Physician Training Program	Kesehatan	13 November 2025	Nota Dinas KBRI Beijing No. 1304.3/ND/XII/2025/POL
24	Record of Discussion untuk membuka Pusat Pelatihan Bahasa Mandarin di NTT	Sosial Budaya	14 November 2025	Berita NTT: https://www.suaranti.id/ntf-jajaki-kerja-sama-pengembangan-pembelajaran-bahasa-mandarin-dengan-pemerintah-tiongkok/
25	Report The 50th Meeting of The Asean-China Joint Working Group on The Implementation of The Declaration on The Conduct of Parties in the South China Sea (JWG-DOC)	Politik	26 November 2025	Brafaks Nomor R-00239/Beijing/251128
26	MoU antara Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia tentang Peningkatan Kerja Sama Kecerdasan Artifisial	Sosial Budaya	29 Desember 2025	Brafaks Nomor B-00005/Beijing/260108
TOTAL KESEPAKATAN TAHUN 2025		26		

IK Jumlah Analisis Potensi Ekonomi Tematik yang Dimanfaatkan Pemangku Kepentingan

Formulasi : Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan
 Sumber : Laporan Perwakilan RI, Surat/Pernyataan dari pemangku kepentingan
 Periode : Satu tahun anggaran (Januari - Desember)

No	Analisis Potensi Ekonomi Tematik Tahun 2025			Kodifikasi Data Dukung
	Uraian Analisis	Pemangku Kepentingan yang terkait	Pemantauan Tindakan/Hasil Analisis	
1	Analisa Singkat Kunjungan Mengan RRT ke Vietnam, Desember 2024	Kementerian Luar Negeri - ASEAN, Multilateral, HPI, Kepala Perwakilan yang menangani G20		B-00003/Beijing/250103
2	Analisa Perkembangan Deep Seek sebagai model AI asal RRT	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, BRIN, dan BSSN		B-00040/Beijing/250129
3	Informasi dan Analisa terkait Benchmark Fraud Investigator Kementerian Kesehatan RI	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan		B-00105/Beijing/250319
4	Analisa Perkembangan Perang Tarif antara RRT dan AS serta dampak terhadap Indonesia	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM		B-00169/Beijing/250416
5	Laporan Analisis Dampak Kesepakatan AS dan RRT terkait Penghentian Sementara Tarif Tambahan	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM		B-00211/Beijing/250519
6	Laporan Analisa Perkembangan AI Tiongkok dan Potensi Pemanfaatan Kolaborasi di Bidang Media, Kesehatan, dan Pendidikan	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi		B-00264/Beijing/250625
7	Analisa dan Lessons Learned terkait pemberlakuan regulasi kualifikasi influencer di Tiongkok	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia		B-00480/Beijing/251031
8	Penyampaian dan Analisa Informasi Sistem Kurikulum dan Penyelenggaraan Diklat Diplomasi Kemlu RRT	Kementerian Luar Negeri - Wamenlu, Sekretaris Jenderal, Dirjen Aspasaf		B-00527/Beijing/251125
9	Laporan Analisis Ekspor Durian Beku Indonesia ke RRT	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia		B-00561/Beijing/251219

IK Intensitas Saling Kunjung Pejabat Pemerintah Indonesia dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja

Formulasi Jumlah kunjungan antar pejabat pemerintah Indonesia dengan pejabat pemerintah negara akreditasi/wilayah kerja

Sumber Laporan Perwakilan RI

Periode Saling kunjung antar pejabat pemerintah yang dilakukan dalam satu tahun anggaran (Januari - Desember)

Catatan 1. Pejabat pemerintah Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Kepala Badan/Lembaga/Komisi Negara, Pimpinan Lembaga Legislatif Pusat dan Daerah (Tingkat I dan Tingkat II), Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua dan wakil ketua BPK, Gubernur dan Wakil Gubernur. Pejabat pemerintah di negara akreditasi adalah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Wakil Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Kepala Negara Bagian/Provinsi dan Menteri.

2. Target dan Realisasi Triwulan bersifat akumulatif dari TW I sampai dengan TW IV.

No	Triwulan	Target Kunjungan	Realisasi Kunjungan	Capaian (%)	Keterangan	Kodifikasi Data Dukung
1	Triwulan I	3	5	166.67%	<p>Januari</p> <p>1. Kunjungan Menteri Pertahanan</p> <p>2. Kunjungan Kepala Badan Kemananan Laut</p> <p>3. Kunjungan Panglima TNI</p> <p>Februari</p> <p>4. Ketua Komisi I DPR RI, dalam rangka rapat dengar pendapat di Shanghai</p> <p>Maret</p> <p>5. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan</p>	Nota Dinas KBRI Beijing Nomor: 1310/ND/XII/2025/PTK
2	Triwulan II	6	11	183.33%	<p>April</p> <p>1. Pada tanggal 15 April 2025 KBRI Beijing telah menerima kunjungan kerja Wakil Ketua MPR dalam rangka Pertemuan dan Dialog dengan Masyarakat serta Mahasiswa Indonesia yang berada di Tiongkok.</p> <p>2. KBRI Beijing telah menerima kunjungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk kunjungan pada BOAO Forum</p> <p>3. KBRI Beijing telah menerima kunjungan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dalam rangka Pertemuan 2+2 Resepsi Diplomatik Hubungan Bilateral RI-RRRT</p> <p>4. KBRI Beijing telah menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri</p> <p>Mei</p> <p>5. KBRI Beijing telah menerima kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Keuangan</p> <p>6. pada bulan Mei 2025, PM Li Qiang mengunjungi Indonesia Juni</p> <p>7. Pada tanggal 30 Juni 2025 KBRI Beijing telah menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)</p> <p>8. Tujuan kunjungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah</p>	Nota Dinas KBRI Beijing Nomor: 1310/ND/XII/2025/PTK
3	Triwulan III	9	16	177.78%	<p>Juli</p> <p>1. kunjungan Menteri Keuangan RI bulan Juli 2025 pada Pertemuan Tahunan Board of Governor of the AIB</p> <p>2. kunjungan Mantan Presiden Indonesia didampingi Menteri Kebudayaan untuk menghadiri forum Global Civilization Dialogue</p> <p>3. kunjungan Menteri Pekerjaan Umum</p> <p>4. kunjungan DPD RI, Wakil Ketua DPD RI</p> <p>5. kunjungan Kepala BNPB</p> <p>6. kunjungan Kepala BAIS</p> <p>Agustus</p> <p>7. kunjungan Menteri Investasi pada bulan Agustus 2025</p> <p>8. kunjungan Menteri Luar Negeri untuk SCO Summit dan Pendampingan kunker Presiden RI</p> <p>9. Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk SCO Summit dan Pendampingan kunker Presiden RI</p> <p>10. Kunjungan Wamendikti untuk SCO Summit dan Pendampingan kunker Presiden RI</p> <p>11. Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri pada FEALAC di Ulanbataar. 12. Kunjungan Gubernur Lemhanas</p> <p>September</p> <p>13. Kehadiran Presiden RI, Menteri Luar Negeri RI pada perayaan 80th Anniversary of the Victory of the Chinese People's War Against Japanese Aggression and the World Anti-Facist War</p> <p>14. Kehadiran Gubernur BI</p> <p>15. Kunjungan Sekretaris Kabinet dalam rangka pendampingan Kunjungan Kerja Presiden RI</p>	Nota Dinas KBRI Beijing Nomor: 1310/ND/XII/2025/PTK

4	Triwulan IV	12	15	125.00%	<p>Oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBRI Beijing menerima kunjungan Menteri Pertahanan - kunjungan Menteri Hukum - kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi - kunjungan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - kunjungan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan <p>November</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBRI Beijing telah menerima kunjungan Gubernur NTT pada bulan November 2025, untuk menghadiri pertemuan tahunan di Beijing dan tindak lanjut MoU Pendidikan bahasa China di NTT - kunjungan delegasi Lemhanas pada bulan November 2025 - kunjungan Menteri Pekerjaan Umum - kunjungan Menteri Perhubungan - kunjungan Wakil Menteri Perindustrian - KBRI Beijing menerima kunjungan Ka BPOM pada bulan November 2025 untuk melakukan sejumlah agenda, dimana tujuan utama adalah benchmarking jamu dengan TCM - kunjungan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika <p>Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> - kunjungan Wakil Ketua MPR RI - kunjungan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan - kunjungan Ketua Komite Nasional CPPCC mengunjungi DPR RI pada bulan Desember 2025 	Nota Dinas KBRI Beijing Nomor: 1310/ND/XII/2025/PTK
---	-------------	----	----	---------	---	---

IK Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada

Formulasi (25% x capaian komponen 1) + (25% x capaian komponen 2) + (25% x capaian komponen 3) + (25% x capaian komponen 4)

Capaian Komponen 1 = (Impresi dan Engagement Media Sosial Perwakilan yang terealisasi/ Target Impresi dan Engagement Media Sosial Perwakilan) x 100%

Capaian Komponen 2 = (Berita yang diunggah pada Portal Perwakilan dalam Bahasa setempat/Bahasa Inggris yang terealisasi / Target Berita yang diunggah pada Portal Perwakilan dalam Bahasa setempat/Bahasa Inggris) x 100%

Capaian Komponen 3 = (Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat yang terealisasi / Target Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat) x 100%

Capaian Komponen 4 = (Engagement Perwakilan dengan media setempat yang terealisasi / Target Engagement Perwakilan dengan media setempat) x 100%

Sumber Laporan Impresi Engagement pada Media Sosial, Laporan berita yang diunggah pada portal Perwakilan RI dalam bahasa setempat / Bahasa Inggris, Laporan Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat (media massa, media online, tv, radio) dan Laporan Hasil Engagement Perwakilan dengan Media Setempat Perwakilan RI

Periode Januari s.d Desember Tahun Berjalan

Komponen	Komponen 1 (Impresi dan engagement media sosial Perwakilan)	Komponen 2 (Berita yang diunggah)	Komponen 3 (Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat)	Komponen 4 (Engagement Perwakilan dengan media setempat)	
Target	100,000	24	24	20	
Realisasi 2025	112,290	24	24	20	
Capaian Komponen	112.29%	100.00%	100.00%	100.00%	
Bobot Komponen	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
Realisasi IK	28.07%	25.00%	25.00%	25.00%	103%
Target IK					70%
Capaian IK					147%

(baseline target bisa merujuk implementasi tahun sebelumnya)
(diinput)

IK Persentase WNI di negara/wilayah akreditasi KBRI Beijing yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI

Formula : (Jumlah WNI yang tercantum dan terverifikasi di Portal Peduli WNI / Total jumlah WNI yang lapor diri) * 100%
 Sumber : Database Portal Peduli WNI

No	Triwulan	Jumlah WNI yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	Jumlah WNI yang lapor diri	Capaian (%)	Kodifikasi Data Dukung
1	s.d Triwulan I	31	31	100%	Portal Peduli WNI
2	s.d Triwulan II	76	76	100%	Portal Peduli WNI
3	s.d Triwulan III	197	197	100%	Portal Peduli WNI
4	s.d Triwulan IV	330	330	100%	Portal Peduli WNI

(Mohon lampirkan screenshot Portal Peduli WNI yang menampilkan gambaran data jumlah WNI)
 Angka berwarna biru hanya sebagai contoh.

NOTE

Triwulan I = Data WNI Lapor diri dan terverifikasi Januari s.d Maret 2025
 Triwulan II = Data WNI Lapor diri dan terverifikasi Januari s.d Juni 2025
 Triwulan III = Data WNI Lapor diri dan terverifikasi Januari s.d September 2025
 Triwulan IV = Data WNI Lapor diri dan terverifikasi Januari s.d Desember 2025

Contoh

TW I

DATA LAPOR DIRI DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA						
Tanggal 2025-01-01 s/d 2025-03-31						
No	Kawasan	Negara	Nama Perwakilan	Total	Progress Verifikasi	
					Verified	Unverified
Total				31	31	0
Persentase (%)				100	100	0
1	ASIA PASIFIK DAN AFRIKA - ASIA TIMUR	TIONGGOK, REPUBLIK RAKYAT	KBRI Beijing	31	31	0

TW II

DATA LAPOR DIRI DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA						
Tanggal 2025-01-01 s/d 2025-06-30						
No	Kawasan	Negara	Nama Perwakilan	Total	Progress Verifikasi	
					Verified	Unverified
Total				76	76	0
Persentase (%)				100	100	0
1	ASIA PASIFIK DAN AFRIKA - ASIA TIMUR	TIONGGOK, REPUBLIK RAKYAT	KBRI Beijing	76	76	0

TW III

DATA LAPOR DIRI DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA						
Tanggal 2025-01-01 s/d 2025-09-30						
No	Kawasan	Negara	Nama Perwakilan	Total	Progress Verifikasi	
					Verified	Unverified
Total				197	197	0
Persentase (%)				100	100	0
1	ASIA PASIFIK DAN AFRIKA - ASIA TIMUR	TIONGGOK, REPUBLIK RAKYAT	KBRI Beijing	197	197	0

TW IV

DATA LAPOR DIRI DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA						
Tanggal 2025-01-01 s/d 2025-12-31						
No	Kawasan	Negara	Nama Perwakilan	Total	Progress Verifikasi	
					Verified	Unverified
Total				330	330	0
Persentase (%)				100	100	0
1	ASIA PASIFIK DAN AFRIKA - ASIA TIMUR	TIONGGOK, REPUBLIK RAKYAT	KBRI Beijing	330	330	0

IK Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi/wilayah kerja KBRI/KJRI/KRI...

Formulasi : Hasil Penilaian Pelaporan Data Economic Intelligence

Sumber : Brafaks dari Kemenlu Pusat terkait hasil penilaian

Periode : Data economic intelligence periode observasi tahun sebelumnya disampaikan ke Pusat pada Triwulan I tahun berjalan. Respon data economic intelligence diperoleh Perwakilan RI dari Pusat pada Triwulan III tahun berjalan.

Catatan : Penilaian dilakukan oleh Ditjen Amerop untuk Perwakilan RI di kawasan Amerop dan Ditjen Aspasaf untuk Perwakilan RI di kawasan Aspasaf.

1	Nama Perwakilan	: KBRI Beijing
2	Wilayah Akreditasi/Wilayah Kerja	: Beijing dan Mongolia
3	Kodifikasi Data Dukung	: Brafaks No. R-05970/KEMLU/251107
4	Nilai dan Predikat	: 98 - Sangat Sesuai
5	Keterangan	: Terima kasih atas penyusunan laporan DEI dengan baik. Berikut catatan penilaian untuk penyempurnaan DEI di masa mendatang: Terdapat sedikit perbedaan antara DEI KBRI Beijing dengan Perwakilan lain di kawasan Asia Timur, khususnya di RRT, menimbang adanya negara rangkapan, yaitu Mongolia. Namun, secara umum, DEI KBRI Beijing telah memuat aspek sesuai panduan dalam penyusunan DEI.

(Mohon lampirkan hasil kajian/data economic/market intelligence yang telah disampaikan ke Pusat dan Berita dari Direktorat Regional perihal nilai DEI)

Angka berwarna biru hanya sebagai contoh.

Hasil Nilai Laporan Data Economic Intelligence/Market Intelligence tentang Negara Akreditasi oleh Perwakilan RI

Periode	: Laporan Data Economic Intelligence (DEI) Perwakilan yang berisi observasi tahun sebelumnya disampaikan ke Pusat pada Triwulan I tahun 2025 untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh Pusat.
Catatan	: Penilaian Laporan DEI Perwakilan dilakukan oleh Direktorat Regional masing-masing kawasan.

Hasil Penilaian:

1	Nama Perwakilan	: KBRI Beijing
2	Negara/Wilayah Akreditasi	: RRT dan Mongolia
3	Nomor Brafaks	: R-00078/BEIJING/250430
4	Nilai	: 98
5	Predikat	: Sangat Sesuai
6	Keterangan	: Terima kasih atas penyusunan laporan DEI dengan baik. Berikut catatan penilaian untuk penyempurnaan DEI di masa mendatang: Terdapat sedikit perbedaan antara DEI KBRI Beijing dengan Perwakilan lain di kawasan Asia Timur, khususnya di RRT, menimbang adanya negara rangkapan, yaitu Mongolia. Namun, secara umum, DEI KBRI Beijing telah memuat aspek sesuai panduan dalam penyusunan DEI.

IK Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PTRI/KBRI/KJRI/KRI ...

Formulasi : Nilai Evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal

No	Komponen	Bobot	Nilai AKIP TA 2023	Kodifikasi Data Dukung
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,50	Brafaks Itjen No. B-03304/KEMLU/250624
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,00	
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,10	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75	
TOTAL		100%	79,35	

(Mohon lampirkan Screenshot Nilai berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023/2024 dari Inspektorat Jenderal)

kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KBRI Beijing memperoleh nilai **79,35** atau dengan kategori penilaian **BB** (Sangat Baik). Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023/2024	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25,20	25,50
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,60	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,10	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75	18,75
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		100%	79,65	79,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

IK Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing

Formula : Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing

Sumber : Kepmenlu No. 21/B/PL/08/2024/01 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Tahunan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Periode : 1 Tahun Anggaran

No	Parameter	Nilai	Kodifikasi Data Dukung
1	Parameter 1 Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) terkait BMN pada satuan kerja	4,00	Brafaks Biasa No. B-00108/KEMLU/260109 dan aplikasi dashboard IPA Kemlu
2	Parameter 2 Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset satuan kerja	4,00	
3	Parameter 3 Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN satuan kerja	3,00	
4	Parameter 4 Asuransi BMN satuan kerja	4,00	
5	Parameter 5 Tindak lanjut pemanfaatan/penggunaan yang menghasilkan PNBPN, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN satuan kerja	4,00	
6	Parameter 6 Tindak lanjut BMN satuan kerja rusak berat	2,00	
7	Parameter 7 BMN satuan kerja memiliki dokumen kepemilikan	4,00	
8	Parameter 8 Penggunaan BMN satuan kerja yang sesuai ketentuan	4,00	
Indeks Pengelolaan BMN KBRI Beijing		3,77	

IK Nilai IKPA KBRI Beijing

Formulasi : 100% Nilai IKPA
 Sumber : Aplikasi Money Kemenkeu/OMSPAN Kemenkeu

Periode	Indikator IKPA (bobot)	Nilai Perolehan	Nilai Terbobot	Nilai Akhir	Dispensasi SPM	Nilai IKPA	Target IKPA	Capaian	Kodifikasi Data Dukung
s.d. Triwulan IV	Revisi DIPA (10%)	100	10.00	95.44	1.00	94.44	93.13	101.41%	contoh: No. Laporan / No. Surat Kemenkeu.....dst.
	Deviasi Halaman III DIPA (15%)	84.85	12.73						
	Penyerapan Anggaran (20%)	93.58	18.72						
	Belanja Kontraktual								
	Penyelesaian Tagihan								
	Pengelolaan UP/TUP (10%)	99.12	9.91						
	Capaian Output (25%)	100	25.00						

Catatan:

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **KODE SATKER | 403624** **SAMPAI DENGAN | DESEMBER** CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENURUNAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	01B	011	403624	KEDUTAAN BESAR RI DI MOSKOW	Nilai	50.00	93.63	94.81	0.00	0.00	96.24	98.40	72.23	80%	1.00	89.29	
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25					
					Nilai Akhir	5.00	14.04	18.96	0.00	0.00	9.62	24.60					
					Nilai Aspek	71.82		95.53				98.40					

IK Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Beijing

Formulasi (Jumlah responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia) / (Jumlah responden yang mengisi survei) x 100%

Sumber Data survei Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional

Periode Data diperoleh berdasarkan penghitungan pada satu tahun anggaran (Januari-Desember)

No	Jumlah responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia*	Jumlah responden yang mengisi survei**	Tingkat Potensi	Kodifikasi Data Dukung
s.d Semester I				
1	76	78	97.44%	Hasil Rekapitulasi/Konsolidasi Survei Citra Indonesia untuk KBRI Beijing.
s.d Semester II				
2	280	290	96.55%	Hasil Rekapitulasi/Konsolidasi Survei Citra Indonesia untuk KBRI Beijing
Tahunan	280	290	96.55%	

NOTE

*) Jumlah responden yang dimasukkan adalah hanya responden yang menjawab 'ya' untuk pertanyaan:

Have you ever attended tourism/cultural events or learnt about Indonesia through promotion materials (printed/online/digital content/multimedia)?

**) Row total dapat digunakan sesuai kebutuhan saja.

Data pada s.d Semester II adalah Jumlah Responden dari Januari s.d Desember bukan Juli s.d Desember

Contoh Sumber Data

Pertanyaan	Option	Jumlah	Pengisian Survei
Have you ever attended tourism/cultural events or learnt about Indonesia through promotion materials (printed/online/digital content/multimedia)?	1. Yes 2. No	Option Yes A. Daring [35] B. Luring [0] Option No A. Daring [92] B. Luring [0]	Jumlah responden yang mengisi survei**
I am more interested to visit Indonesia after attending tourism/cultural events or learning about Indonesia through promotion materials.	1. STRONGLY AGREE 2. AGREE 3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE 4. DISAGREE 5. STRONGLY DISAGREE	Option STRONGLY AGREE A. Daring [19] B. Luring [0] Option AGREE A. Daring [15] B. Luring [0] Option NEITHER AGREE NOR DISAGREE A. Daring [1] B. Luring [0] Option DISAGREE A. Daring [0] B. Luring [0] Option STRONGLY DISAGREE A. Daring [0] B. Luring [0]	Jumlah responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia*